

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kabupaten Natuna mengawali penerapan pelaksanaan basis akrual pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan kebijakan akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2023.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 295);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 (tujuh) bab yaitu:

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- 7.2 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**
 - 7.2.1 Ekonomi Makro
 - 7.2.2 Kebijakan Keuangan
 - 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 7.4 Kebijakan Akuntansi**
 - 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

 - 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.3 Transfer
 - 7.5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 7.5.1.5 Pembiayaan
 - 7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - 7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.4 Aset lainnya
 - 7.5.3.5 Kewajiban
 - 7.5.3.6 Ekuitas
 - 7.5.4 Laporan Operasional

- 7.5.4.1 Pendapatan-LO
- 7.5.4.2 Beban-LO
- 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
- 7.5.5 Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 7.5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
 - 7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Ekuitas awal
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 7.5.6.4 Ekuitas Akhir
- 7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.
- 7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**
 - 7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas
 - 7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02
- 7.7 Penutup**

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tenteram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya atau kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2023 mencapai 23,52 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,74 triliun rupiah atau sekitar 3%-nya dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 24,26 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 14,66 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Natuna didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Sedangkan menurut pengeluaran, distribusi paling besar terdapat pada jenis pengeluaran Ekspor Neto barang dan jasa. Pengeluaran terbesar kedua adalah pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2023, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 7.2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Natuna (persen), 2017–2023
(dalam persentase)



Sumber: BPS Kab. Natuna

Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2019–2023

(dalam miliar rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.512,63	2.455,46	2.571,67	2.789,30	3.013,40
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	15.500,97	12.287,84	14.613,86	17.578,94	16.352,30
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	161,71	166,70	171,80	178,45	184,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	17,11	17,27	17,37	18,02	19,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,12	1,17	1,28	1,34	1,40
F	Konstruksi/Construction	1.749,05	1.664,05	1.624,56	1.685,34	1.824,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	746,27	716,83	747,51	813,64	890,22
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	163,10	126,28	128,16	155,40	171,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	106,43	101,04	105,92	111,92	117,97
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	137,67	147,41	157,75	165,13	168,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	30,11	30,75	30,20	31,92	33,16
L	Real Estat/ Real Estate Activities	137,44	139,15	147,07	155,65	166,99
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	409,84	428,20	421,26	441,37	432,02
P	Jasa Pendidikan/ Education	41,62	43,12	45,65	47,79	49,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	66,33	66,25	71,38	75,40	77,93
R,S,T, U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	14,04	14,35	14,68	15,76	16,91
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		21.795,50	18.405,91	20.870,16	24.265,43	23.519,88
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		6.322,11	6.145,66	6.285,25	6.716,39	7.199,72

Sumber: BPS Kab. Natuna

Tabel 7.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2019-2023

(dalam miliar rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.725,28	1.684,27	1.711,79	1.768,01	1.838,44
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	11.019,31	10.488,44	10.486,60	10.385,84	10.362,92
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	112,78	114,67	115,98	117,37	117,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	11,33	11,50	11,55	11,91	12,65
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,94	0,98	1,06	1,10	1,13
F	Konstruksi/Construction	1.174,68	1.115,27	1.064,91	1.070,33	1.128,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	470,85	448,48	456,69	478,21	496,47
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	100,73	78,48	79,36	88,67	93,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ ccommodation and Food Service Activities	72,80	69,12	72,09	74,80	77,55
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	120,62	130,68	140,38	146,32	146,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	20,31	20,98	21,08	21,43	22,04
L	Real Estat/Real Estate Activities	102,19	105,77	110,52	114,41	118,10
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence;	286,48	293,62	289,00	296,07	298,23

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Compulsory Social Security</i>					
P	Jasa Pendidikan/Education	24,91	24,82	25,92	26,73	26,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	46,30	45,86	48,62	50,37	50,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	9,83	9,79	9,82	10,17	10,67
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	15.299,36	14.642,75	14.645,40	14.661,78	14.801,85

Sumber: BPS Kab. Natuna

Tabel 7.2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2019-2023

(dalam persen)

	Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	11,53	13,34	12,32	11,49	12,81
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	71,12	66,76	70,02	72,44	69,53
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	0,74	0,91	0,82	0,74	0,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/Construction	8,02	9,04	7,78	6,95	7,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,42	3,89	3,58	3,35	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,75	0,69	0,61	0,64	0,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,49	0,55	0,51	0,46	0,50
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,63	0,80	0,76	0,68	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,14	0,17	0,14	0,13	0,14
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,63	0,76	0,70	0,64	0,71
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,88	2,33	2,02	1,82	1,84
P	Jasa Pendidikan/Education	0,19	0,23	0,22	0,20	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,30	0,36	0,34	0,31	0,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,06	0,08	0,07	0,06	0,07
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Natuna

Tabel 7.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2019-2023

(dalam persen)

	Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	5,24	(2,38)	1,63	3,28	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,20	(4,82)	(0,02)	(0,96)	(0,22)
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	1,05	1,68	1,14	1,20	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	(0,16)	1,49	0,39	3,17	6,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	(3,57)	3,75	8,43	3,32	3,43
F	Konstruksi/Construction	7,87	(5,06)	(4,52)	0,51	5,46
G	Perdagangan Besar	4,61	(4,75)	1,83	4,71	3,82
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	6,48	(22,09)	1,12	11,74	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	4,99	(5,05)	4,31	3,75	3,67
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	6,51	8,34	7,42	4,23	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,31	3,31	0,48	1,67	2,82
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,32	3,50	4,50	3,52	3,22
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3,33	(8,13)	1,19	8,23	1,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	8,27	2,49	(1,58)	2,45	0,73

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P	Jasa Pendidikan/Education	4,52	(0,36)	4,46	3,11	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,97	(0,95)	6,01	3,61	1,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,84	(0,40)	0,31	3,60	4,91
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1,75	(4,29)	0,02	0,11	0,96

Sumber: BPS Kab. Natuna

Tabel 7.2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna 2019-2023

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	3.939,88	3.976,34	4.071,54	4.383,17	4.860,62
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption <i>Expenditure</i>	12,78	12,88	12,82	13,11	14,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	2.234,69	1.998,92	1.949,05	1.990,57	2.088,56
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital <i>Formation</i>	3.571,63	3.524,37	3.421,21	3.722,58	4.036,86
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	25,73	8,53	36,58	210,66	32,24
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net Exports of Goods and <i>Services</i>	12.010,79	8.884,87	11.378,96	13.945,34	12.486,78
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	21.795,50	18.405,91	20.870,16	24.265,43	23.519,88

Sumber: BPS Kab. Natuna

Tabel 7.2.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna 2019-2023

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household <i>Consumption Expenditure</i>	2.629,36	2.636,34	2.671,24	2.790,76	2.897,64
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption <i>Expenditure</i>	7,87	7,83	7,76	7,86	8,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption <i>Expenditure</i>	1.375,71	1.205,95	1.152,53	1.174,47	1.180,35
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formator <i>Formation</i>	2.242,92	2.210,33	2.103,87	2.145,61	2.241,65
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	14,15	4,70	17,86	99,15	14,41
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net Exports of Goods and <i>Services</i>	9.029,34	8.577,61	8.692,15	8.443,93	8.459,24
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	15.299,36	14.642,75	14.645,40	14.661,78	14.801,85

Sumber: BPS Kab. Natuna

Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam %. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum tingkat pengangguran dipengaruhi oleh:

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 34,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/ km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/km².

Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Tabel 7.2.7 Distribusi Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Midai	1.762	1.730	3.492
2	Bunguran Barat	4.071	3.866	7.937
3	Serasan	2.662	2.574	5.236
4	Bunguran Timur	14.328	13.958	28.286
5	Bunguran Utara	2.101	1.960	4.061
6	Subi	1.145	1.198	2.343
7	Pulau Laut	1.235	1.135	2.370
8	Pulau Tiga	2.036	1.848	3.884
9	Bunguran Timur Laut	2.943	2.736	5.679
10	Bunguran Tengah	1.970	1.827	3.797
11	Bunguran Selatan	1.825	1.682	3.507
12	Serasan Timur	1.711	1.609	3.320
13	Bunguran Batubi	2.017	1.917	3.934
14	Pulau Tiga Barat	1.186	1.140	2.326
15	Suak Midai	907	890	1.797
16	Pulau Panjang	443	411	854
17	Pulau Seluan	426	419	845
Jumlah		42.768	40.900	83.668

Sumber: Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Natuna

Berdasarkan data statistik dari BPS Kab. Natuna Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/ km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/km².

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Natuna didominasi kelompok umur muda yaitu umur 0-4 tahun sebanyak 7,66 ribu jiwa, umur 5-9 tahun sebanyak 7,75 ribu jiwa, 10-14

sebanyak 7,59 ribu jiwa, umur 15-19 sebanyak 7,68 ribu jiwa, dan umur 20-24 tahun sebanyak 7,50 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah berada dalam kelompok umur 75 tahun ke atas hanya sebesar 1,27 ribu jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Natuna lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu sebesar 43,48 ribu jiwa (51,42 persen).

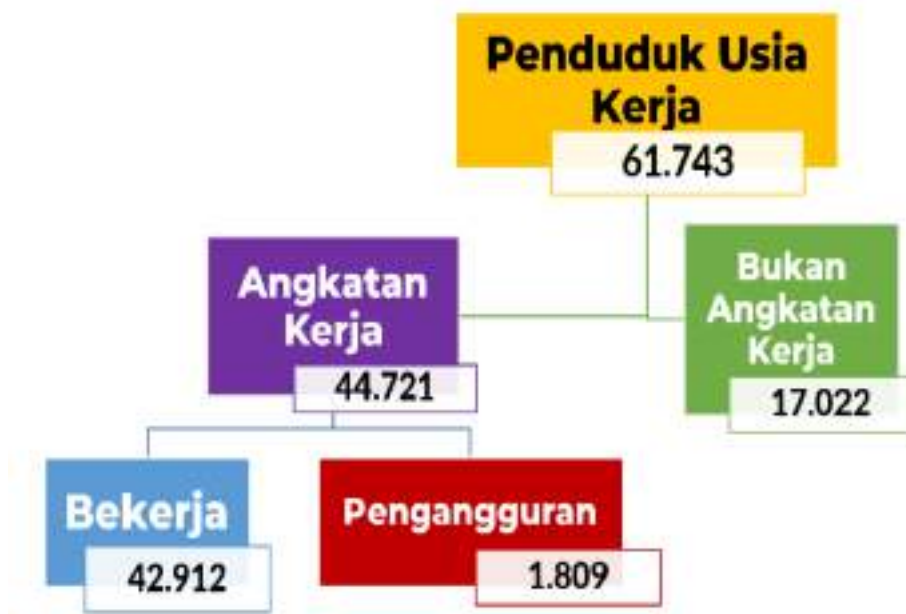
Rasio Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah 48,52. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 sampai 49 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Usia non produktif terdiri atas usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia yang dianggap tidak produktif lagi (65+ tahun).

b. Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang tersedia. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja.

Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna sebesar 44,72 ribu orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17,02 ribu orang. Angkatan kerja terdiri atas bekerja sebanyak 42,91 ribu orang dan pengangguran terbuka sebanyak 1,8 ribu orang.

Gambar 7.2.2 Bagan Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Agustus 2023 (orang)



Sumber : BPS Kab. Natuna

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 72,43 persen, mengalami peningkatan 4,54 persen poin dibandingkan tahun 2022. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan yaitu sebesar 82,69 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 61,42 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 9,54 persen poin.

Tabel 7.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Agustus 2019-Agustus 2023

(dalam persen)

Karakteristik Angkatan Kerja	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,59	69,39	72,31	67,89	72,43	4,84	4,54
TPAK menurut Jenis Kelamin							
Laki-laki	84,22	85,49	86,13	82,81	82,69	-1,53	-0,12
Perempuan	49,81	52,05	57,45	51,88	61,42	11,61	9,54

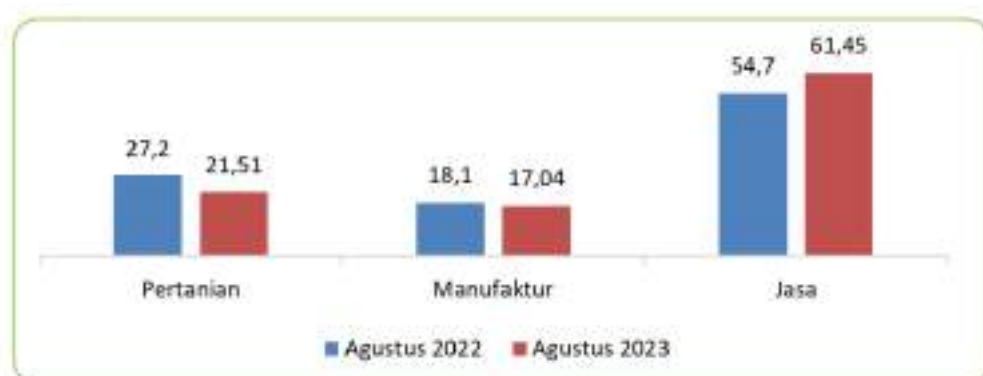
Sumber : BPS Kab. Natuna

Karakteristik Penduduk yang Bekerja Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu. Penjelasan sebagai berikut:

1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 61,45 persen, kemudian diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 21,51 persen, dan paling sedikit pada Sektor Manufaktur sebesar 17,04 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022, dimana Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak, diikuti Sektor Pertanian dan Sektor Manufaktur. Dibandingkan Agustus 2022, hanya Sektor Jasa yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,75 persen poin. Sementara itu, Sektor Pertanian dan Sektor Manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,69 persen poin dan 1,06 persen poin.

Gambar 7.2.3 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022 dan 2023 (persen)

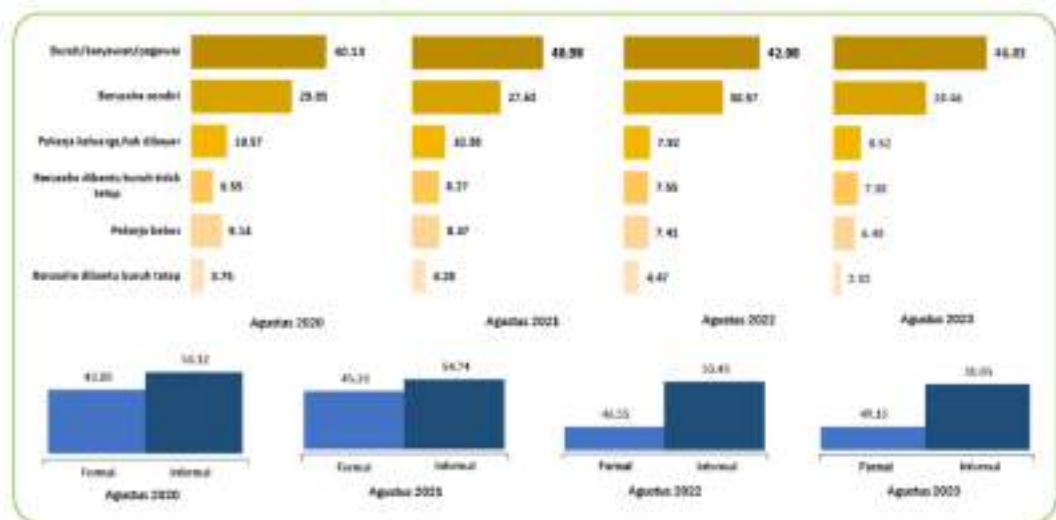


Sumber : BPS Kab. Natuna

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 46,83 persen, sementara paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebesar 2,32 persen. Dibandingkan Agustus 2022, terjadi kenaikan persentase penduduk bekerja pada dua status pekerjaan, yaitu buruh/karyawan/ pegawai sebesar 4,75 persen poin dan pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 0,6 persen poin (Lampiran 1). Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 21 093 orang (49,15 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 21 819 orang (50,85 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan, yaitu sebesar 2,6 persen.

Gambar 7.2.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2023



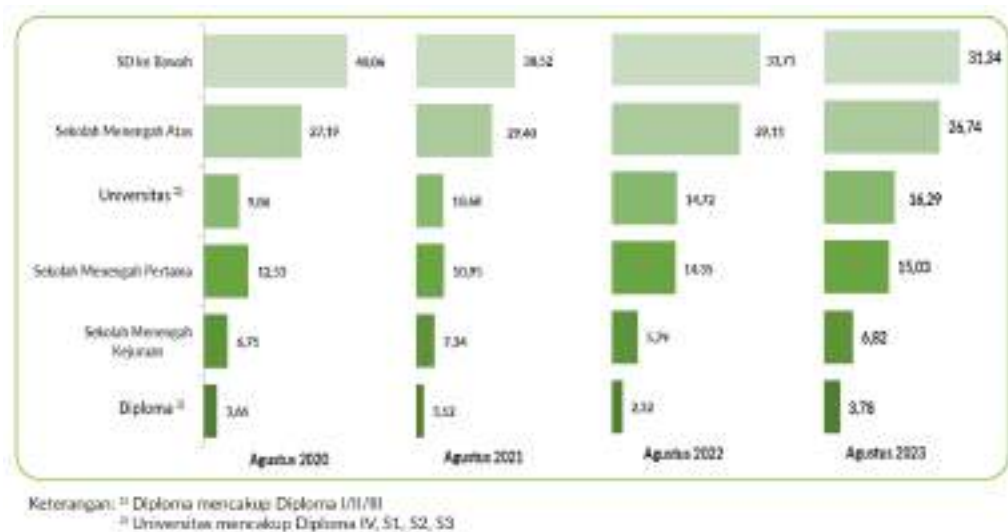
Sumber : BPS Kab. Natuna

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 31,34 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma I/II/III masing-masing hanya sebesar 6,82 persen dan 3,78 persen. Distribusi ini memiliki pola yang sama

dengan Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, terjadi peningkatan persentase penduduk bekerja pada empat jenjang pendidikan. Jika diurutkan dari yang terbesar peningkatannya, posisi pertama adalah penduduk bekerja tamatan Universitas/ perguruan tinggi (Diploma IV, S1, S2, S3) sebesar 1,57 persen poin, kemudian penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III sebesar 1,46 persen poin, diikuti oleh penduduk bekerja tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 1,03 persen poin, dan penduduk bekerja tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) sebesar 0,68 persen poin. Sedangkan pada dua jenjang pendidikan lainnya terjadi penurunan persentase penduduk bekerja dengan penurunan yang sama besar yaitu 2,37 persen poin terjadi pada penduduk bekerja tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) dan SD ke bawah (tidak/ belum pernah sekolah/ belum tamat SD/ tamat SD).

Gambar 7.2.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-Agustus 2023



Sumber : BPS Kab. Natuna

c. Karakteristik Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,05 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat hingga lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,1 persen poin

Tabel 7.2.9 Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019-Agustus 2023

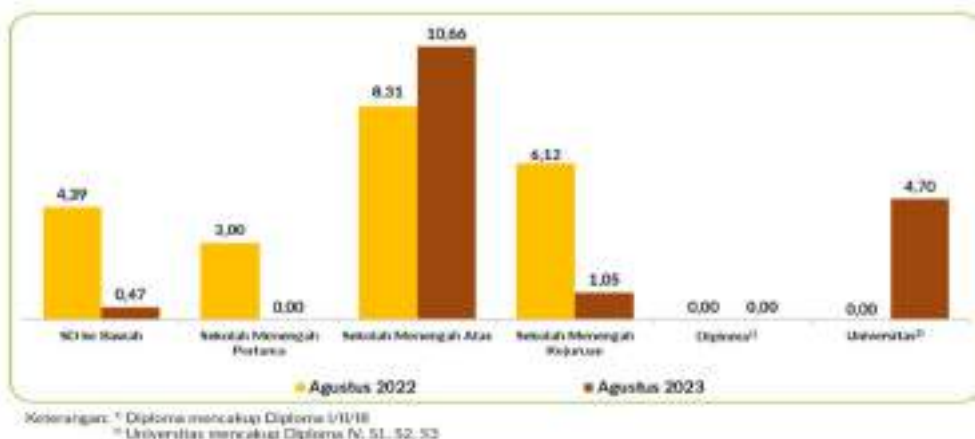
Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,33	4,10	5,15	4,15	4,05	0,72	-0,1
TPT menurut Jenis Kelamin							
Laki-laki	3,36	4,27	6,31	4,98	2,67	-0,96	-2,31
Perempuan	2,79	3,79	3,28	2,72	5,43	3,25	3,32

Sumber: BPS Kab. Natuna

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,67 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. TPT laki-laki lebih rendah dibanding TPT perempuan yang

sebesar 6,04 persen. TPT lakilaki mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu sebesar 2,31 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,32 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT laki-laki menurun sebesar 0,96 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 3,25 persen poin.

Gambar 7.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber: BPS Kab. Natuna

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) adalah yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 10,66 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada jenjang pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat). Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat) yaitu sebesar 5,07 persen poin. Sementara itu, peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) yaitu sebesar 2,35 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 4,7 persen poin. Untuk kategori tamatan Diploma (Diploma I/II/III) tidak terdapat perubahan angka TPT.

Tabel 7.2.10 Karakteristik Penduduk Bekerja di Kabupaten Natuna, Agustus 2023

Karakteristik Penduduk Bekerja	Orang	Persen (%)
Status Pekerjaan Utama		
Berusaha sendiri	12.214	28,46
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.167	7,38
Berusaha dibantu buruh tetap	998	2,32
Buruh/karyawan/pegawai	20.095	46,83
Pekerja bebas	2.784	6,49
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.654	8,52
Jumlah	42.912	100,00
Status Pekerjaan Formal/Informal		
Formal	21.093	49,15
Informal	21.819	50,85
Jumlah	42.912	100,00
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
SD ke Bawah	13.448	31,34

Karakteristik Penduduk Bekerja	Orang	Persen (%)
Sekolah Menengah Pertama	6.449	15,03
Sekolah Menengah Atas	11.473	26,74
Sekolah Menengah Kejuruan	2.927	6,82
Diploma I/II/III	1.623	3,78
Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	6.992	16,92
Jumlah	42.912	100,00

Sumber: BPS Kab. Natuna

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

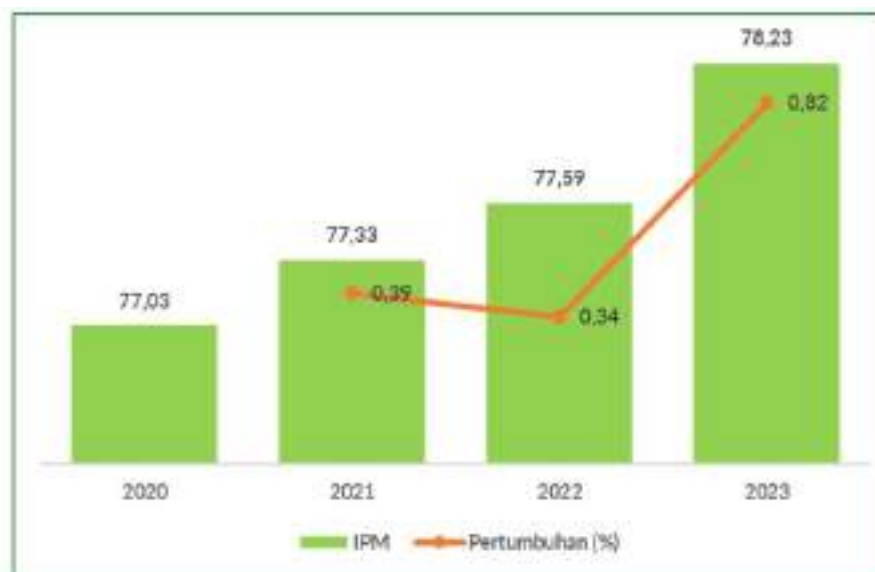
Pada tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau mencapai 2.152,63 juta jiwa. Kota Batam menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 58,38 persen dari total penduduk. Di sisi lain, Kabupaten Natuna merupakan kabupaten dengan penduduk terendah kedua setelah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk sebanyak 84,56 ribu jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 4,30 ribu jiwa atau setara dengan 5,25 persen dari jumlah penduduk. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Natuna mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,02 ribu orang. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 142,50 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin juga turut terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 2020-2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi kepulauan Riau. Pada tahun 2023, Kota Batam merupakan kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 82,64, sedangkan Kabupaten Lingga memiliki IPM terendah yaitu sebesar 72,23.

Kabupaten Natuna berada di peringkat ketiga dari tujuh kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan IPM sebesar 78,23 atau berstatus “tinggi”. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,64 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Natuna senantiasa menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan bahkan menempati peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 7.2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Natuna

Meningkatnya pertumbuhan IPM didukung oleh meningkatnya indikator pendukungnya. HLS dan UHH yang mengalami pertumbuhan yang sama dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 0,07 persen dan 0,34 persen. Sementara indikator lainnya seperti RLS mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi sebesar 1,34 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,45 persen. Sedangkan Pengeluaran Riil per Kapita juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya 0,84 persen. Perkembangan IPM Kabupaten Natuna dan indikator penyusunnya selama 2020-2023.

Tabel 7.2.11 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna, 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) (tahun)	73,57	73,65	73,90	74,15
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,90	13,91	13,92	13,93
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,73	8,92	8,96	9,08
Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	14,705	14.711	14.834	15.409
IPM	77,03	77,33	77,59	78,23

Sumber: BPS Kab. Natuna

2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan updating sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir.

UHH Kabupaten Natuna saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kabupaten Natuna yang sebesar 74,25 pada tahun 2020, naik secara berturut-turut hingga mencapai 74,15 pada tahun 2023 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,15 tahun. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), UHH Kabupaten Natuna telah meningkat sebesar 0,25 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26 persen per tahun

Gambar 7.2.8 Umur Harapan Hidup Lahir (UHH) Kabupaten Natuna 2020-2023



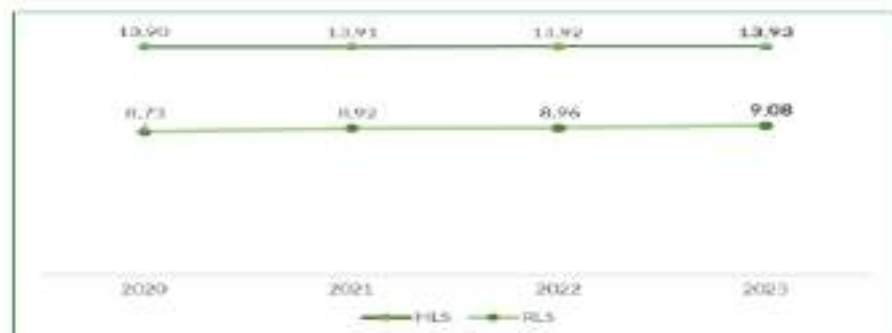
Catatan atas

Sumber: BPS Kab. Natuna

2.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), HLS Kabupaten Natuna rata-rata meningkat 0,07 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,32 persen per tahun. Jika dibandingkan tahun 2022, HLS Kabupaten Natuna meningkat sebesar 0,01 tahun (0,07 persen) dan RLS meningkat sebesar 0,12 tahun (1,34 persen)

Gambar 7.2.9 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Sekolah (RLS) Kabupaten Natuna 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Natuna

2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) penduduk Kabupaten Natuna mencapai Rp15.409.000 per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2023 mulai meningkat kembali, seiring dengan pemulihan ekonomi Kabupaten Natuna yang terus berlanjut. Selama empat tahun terakhir (2020-2023), pengeluaran riil per kapita Kabupaten Natuna telah meningkat sebesar Rp575.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,58 persen per tahun.

Gambar 7.2.10 Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kepulauan Riau (ribu rupiah) 2020-2023



Catatan atas Lapo

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Penerimaan Daerah dalam struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1) dana perimbangan;
 - 2) dana otonomi khusus;
 - 3) dana keistimewaan; dan
 - 4) dana Desa.
 - b. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1) pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan serangkaian langkah, strategi, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola serta meningkatkan sumber pendapatan yang tersedia bagi daerah tersebut. Kebijakan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kebijakan ini haruslah didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik daerah, serta harus diimplementasikan secara transparan dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah menjadi sumber

keuangan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam peningkatan pendapatan daerah dari beberapa sumber bukan hanya dari Pendapatan Daerah (PAD) tetapi ditambah dari dana transfer pemerintah pusat seperti Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID) dan Hibah. Sedangkan dana transfer pemerintah provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Tanah serta Pajak Rokok. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pendapatan yang realistis berdasarkan estimasi pendapatan dari berbagai sumber. Perencanaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi potensi pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan pemerintah daerah yang baik. Dengan melakukan pengelolaan pendapatan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

1) **Analisis Potensi Pendapatan:**

Pemerintah daerah telah melakukan analisis terhadap potensi pendapatan pajak dan retribusi. Ini meliputi identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi untuk dikenakan pajak atau retribusi, serta penilaian terhadap tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

2) **Revisi Peraturan Perpajakan dan Retribusi.**

Pemerintah daerah telah merevisi peraturan perpajakan dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan tarif retribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak dengan inflasi atau perkembangan ekonomi, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan.

3) **Penyuluhan dan Sosialisasi**

Telah melakukan kampanye penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi secara tepat waktu serta konsekuensinya bagi pembangunan daerah. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang manfaat yang mereka dapatkan dari pembayaran pajak dan retribusi dalam penyediaan layanan publik melalui.

4) **Peningkatan Administrasi Pajak dan Retribusi.**

Dalam usaha peningkatan efisiensi dalam administrasi pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Ini meliputi penerapan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pajak dan retribusi serta pembayaran pajak dengan mekanisme memperbanyak *channel* pembayaran secara non tunai.

5) **Penegakan Hukum.**

Akan dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi secara tegas dapat menjadi deteren bagi pelaku yang ingin menghindari kewajiban perpajakan bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang efektif dalam mendeteksi, menindak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi.

6) **Kemitraan dengan Pihak Swasta.**

Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Pemerintah daerah akan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan atau perusahaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pembayaran pajak dan retribusi.

b. Kebijakan Eksternal

1) **Perubahan Kebijakan Pusat.**

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan dalam bentuk perubahan kebijakan perpajakan yang menguntungkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam peningkatan alokasi bagi hasil pajak, pemberian insentif fiskal, atau penyesuaian regulasi perpajakan yang mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.

2) **Pengembangan Kerjasama Antar Daerah.**

Pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi. Kerjasama antar daerah meliputi koordinasi dengan dilakukan pertukaran informasi.

3) **Kemitraan dengan Sektor Swasta.**

Pemerintah daerah telah melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi. Seperti bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih efisien dan mudah diakses oleh Masyarakat berbasis elektronik.

4) **Pendidikan dan Sosialisasi.**

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi telah dilakukan melalui program pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan media massa. Di samping itu juga dilakukan dengan Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang juga memberikan dukungan dalam bentuk kampanye nasional yang meningkatkan kesadaran pajak serta pertukaran data.

5) **Peningkatan Literasi Keuangan.**

Peningkatan literasi keuangan di masyarakat juga turut membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah daerah telah menyelenggarakan program-program literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan melalui sosialisasi kepada ASN maupun masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah.
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak.

- c. Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat.
- d. Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- e. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi.
- f. Percepatan penyerapan anggaran khusus kegiatan *earmarked* seperti DAK Fisik dan Non Fisik, DID dan DAU yang sudah ditentukan peruntukannya.
- g. Penandaan belanja daerah untuk kemiskinan *ekstrem* dan *stunting* dalam upaya untuk mendapatkan Dana Insentif Tahun Berjalan.
- h. Koordinasi penyaluran Kurang Bayar DBH dari secara TDF atau Non Tunai untuk disalurkan ke daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

4. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD tentang Kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2023 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2023.

1. Pendapatan

Target kinerja pendapatan pada tahun 2023 tergolong cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.275.091.033.815,11 dan terealisasi sebesar Rp1.333.507.226.175,09 atau 104,58% dibandingkan pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.082.256.199.243,26 dan terealisasi sebesar Rp989.275.275.868,02 atau 91,41%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan Pendapatan sebesar Rp344.231.950.307,07 atau sebesar 34,80% berbanding tahun sebelumnya.

2. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp1.280.058.659.612,00 terealisasi sebesar Rp1.174.496.509.506,59 atau sebesar 91,75% dibandingkan dengan belanja pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.114.635.528.300,00 terealisasi sebesar Rp1.016.634.841.803,28 atau sebesar 91,21%. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan Belanja sebesar Rp157.861.667.703,31 atau sebesar 15,53% berbanding tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata 156,09% dari target, indikator yang menjadi tolok ukur adalah kenaikan jumlah kunjungan wisatawan;
2. Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah sebesar 111,03% dari target awal dan 74,02% dari target RPJMD;
3. Meningkatnya indeks pembangunan manusia sebesar 100,18% atau 72,83 dari target yaitu 72,50. Indeks pembangunan manusia setiap tahun mengalami peningkatan dana secara keseluruhan realisasi sebesar 99,22% dari target RPJMD;
4. Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, nyaman, indah, dan aman, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks status air yaitu sebesar 128,62% dari target yang telah direncanakan;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan pendapatan per kapita realisasi sebesar 115,37%;
6. Meningkatnya konektivitas kecamatan dan desa, hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Indikator keberhasilan ditunjukkan dengan konektivitas dari pelabuhan,

- akses angkutan darat, akses jalan dan akses transportasi laut dalam menunjang aktivitas ekonomi;
7. Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Supremasi Hukum sehingga memberikan kepastian kenyamanan dalam investasi maupun dalam aktivitas ekonomi;
 8. Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga miskin ditunjukkan dengan tingkat pengangguran turun, memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah berhasil menekan angka pengangguran;
 9. Terwujudnya efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dengan penyusunan dokumen perencanaan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 10. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, antara lain meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pemantauan arus kas, manajemen investasi, pengelolaan hutang, pengelolaan risiko, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga melibatkan pengambilan keputusan terkait alokasi dana antara berbagai kebutuhan dan peluang, serta evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan kesehatan keuangan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Kemudian dilakukan pertanggungjawaban dengan memperhatikan aspek-aspek yaitu pemerintah daerah memastikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan transparan demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2020. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah. Sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Jaminan Kapitasi Nasional (JKN) pada FKTP dan Dak Non Fisik BOP Puskesmas yang langsung dikelola oleh Puskesmas serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing Sekolah Negeri di Kabupaten Natuna tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Pendapatan sebesar Rp1.275.091.033.815,11 dengan realisasi sebesar Rp1.333.507.226.175,09 atau 104,58%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp989.275.275.868,02, artinya realisasi Pendapatan tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp344.231.950.307,07 atau sebesar 34,80% dari realisasi Pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan sebesar Rp1.280.058.659.612,00 dengan realisasi sebesar Rp1.174.496.509.506,59 atau sebesar 91,75% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp1.016.634.841.803,28 terjadi peningkatan sebesar Rp157.861.667.703,31 atau sebesar 15,53% dari realisasi belanja tahun sebelumnya.

Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan	1.275.091.033.815,11	1.333.507.226.175,09	104,58	989.275.275.868,02
2	Belanja Daerah	1.280.058.659.612,00	1.174.496.509.506,59	91,75	1.016.634.841.803,28
	a. Belanja Operasi	874.817.161.367,64	788.943.176.676,47	90,18	728.446.072.391,69
	b. Belanja Modal	283.117.329.844,36	264.281.035.089,12	93,35	180.851.143.808,59
	c. Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.648.129.341,00	65,93	1.331.862.663,00
	d. Belanja Transfer	119.624.168.400,00	119.624.168.400,00	100,00	106.005.762.940,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel 7.3.2 di bawah ini:

Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.02.01	Dinas Kesehatan	34.337.706.646,00	39.103.598.930,00	113,88	43.006.462.847,14
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.417.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	192.582.500,00	115,80	104.794.500,00
2.15.01	Dinas Perhubungan	65.333.000,00	36.000.000,00	55,10	49.800.000,00
2.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	120.223.710,00	120,22	45.590.940,00
3.31.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	22.349.000,00	12.390.000,00	55,44	29.578.000,00
5.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.240.430.228.169,11	1.294.042.431.035,09	104,32	946.039.049.580,88
Jumlah		1.275.091.033.815,11	1.333.507.226.175,09	104,58	989.275.275.868,02

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel 7.3.3 di bawah ini:

Tabel 7.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	242.875.922.267,64	205.256.187.798,00	84,51	186.817.477.342,77
1.02.01.	Dinas Kesehatan	227.059.282.666,00	212.344.634.152,05	93,52	210.704.794.858,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	153.742.483.311,00	135.984.379.148,46	88,45	105.086.374.851,53
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51.579.052.659,00	50.451.200.446,00	97,81	41.696.626.295,00

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	17.549.910.744,00	17.183.836.711,00	97,91	15.764.328.617,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.143.879.295,00	6.694.839.474,00	93,71	8.015.689.684,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.135.006.017,00	6.930.688.224,00	97,14	4.889.695.116,00
1.06.01.	Dinas Sosial	5.439.953.125,00	5.044.823.568,00	92,74	6.519.786.528,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.175.584.769,00	6.182.134.536,00	86,16	5.378.964.909,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.847.603.091,00	10.012.641.593,00	92,30	7.421.595.545,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.474.285.061,36	12.077.045.502,00	89,63	14.049.895.381,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	10.655.538.456,00	10.175.750.272,00	95,50	8.401.890.018,60
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.529.359.794,00	4.520.574.181,00	81,76	4.586.575.174,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.013.473.320,00	8.782.525.285,00	97,44	7.008.356.634,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	25.173.045.510,00	23.577.412.852,00	93,66	9.777.829.400,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.891.967.313,00	12.506.686.498,00	97,01	13.157.406.120,98
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.948.200.643,00	7.315.687.621,00	92,04	6.040.641.685,34
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.306.833.743,00	13.491.248.920,84	94,30	12.245.194.793,60
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.928.915.213,00	5.649.014.649,00	95,28	4.254.410.037,74
3.25.01.	Dinas Perikanan	10.582.614.584,00	9.514.675.856,00	89,91	10.010.593.871,34
3.26.01.	Dinas Pariwisata	11.693.168.481,00	10.064.405.077,39	86,07	6.664.633.089,96
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	31.582.582.292,00	30.285.603.838,61	95,89	12.490.748.905,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	64.553.487.032,00	58.852.786.214,00	91,17	49.626.266.606,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	43.813.198.560,00	39.447.475.265,18	90,04	40.219.893.098,15
5.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.770.470.469,00	10.245.280.127,00	87,04	8.826.863.259,77
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	145.433.396.317,00	142.873.711.007,00	98,24	128.985.276.654,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.397.166.608,00	9.066.825.767,00	87,20	7.640.704.589,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.865.581.000,00	5.487.335.128,00	93,55	5.089.300.227,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	13.222.172.271,00	12.416.170.156,00	93,90	9.581.287.652,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	10.038.738.548,00	9.616.562.348,00	95,79	9.570.259.200,50
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	6.161.289.876,00	6.029.944.903,00	97,87	5.501.906.622,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	5.419.676.140,00	5.319.676.241,00	98,15	4.277.400.426,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	4.628.593.631,00	4.521.519.435,00	97,69	3.395.333.141,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	6.221.062.000,00	6.158.164.718,31	98,99	4.914.888.294,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	5.754.368.382,00	5.604.611.746,00	97,40	5.177.836.677,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	5.540.224.911,00	5.447.788.797,90	98,33	4.391.232.866,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3.500.100.280,00	3.269.488.048,00	93,41	2.501.642.793,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.883.117.005,00	2.492.004.583,00	86,43	2.161.641.237,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.699.160.331,00	4.547.947.429,00	96,78	3.593.633.794,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	3.172.424.390,00	2.813.880.251,00	88,70	2.522.035.769,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	5.269.319.085,00	5.084.054.362,33	96,48	3.712.718.541,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	3.620.106.890,00	3.575.486.755,00	98,77	2.596.735.313,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	3.835.291.350,00	3.705.785.892,52	96,62	2.674.474.429,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	4.079.184.469,00	3.684.636.484,00	90,33	2.693.127.861,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	2.102.346.075,00	1.840.667.350,00	87,55	0,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	2.043.781.350,00	2.011.327.792,00	98,41	0,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.705.740.287,00	16.337.382.503,00	97,80	5.996.873.896,00
Jumlah		1.280.058.659.612,00	1.174.496.509.506,59	91,75	1.016.634.841.803,28

Terhadap besaran anggaran dan realisasi Belanja per SKPD sesuai tabel 7.3.4 tersebut, rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.962.524.336,64	175.519.315.472,00	82,81	164.029.586.098,80
1.02.01.	Dinas Kesehatan	182.427.230.770,00	168.613.089.219,05	92,43	164.887.496.025,80
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.396.322.652,00	17.915.166.895,00	83,73	26.342.959.810,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.897.034.944,00	26.848.210.457,00	96,24	23.074.433.894,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	17.293.778.536,00	16.931.056.711,00	97,90	15.764.328.617,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.042.179.295,00	6.593.744.474,00	93,63	8.015.68.684,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.532.006.017,00	6.334.127.928,00	96,97	4.717.117.116,00
1.06.01.	Dinas Sosial	5.178.952.590,00	4.811.020.568,00	92,90	5.923.998.697,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.997.084.769,00	6.011.834.126,00	85,92	5.378.964.909,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.655.603.091,00	9.836.081.593,00	92,31	7.387.632.245,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.217.430.142,00	11.825.225.582,00	89,47	12.663.376.442,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	10.332.138.456,00	9.853.452.842,00	95,37	8.384.410.018,60
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.481.359.794,00	4.472.574.181,00	81,60	4.576.125.174,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.987.473.320,00	8.756.725.285,00	97,43	6.984.106.634,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	10.955.185.941,00	10.202.550.098,00	93,13	9.041.658.748,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.274.186.313,00	11.893.096.498,00	96,90	12.444.421.620,98
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.287.700.643,00	6.681.689.801,00	91,68	5.996.928.171,34
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.241.809.243,00	11.889.727.058,93	97,12	11.161.860.336,60
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.436.052.213,00	5.158.721.969,00	94,90	4.179.839.426,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	10.087.014.584,00	9.048.942.356,00	89,71	9.825.007.232,34
3.26.01.	Dinas Pariwisata	9.683.377.269,00	8.333.869.528,00	86,06	6.615.293.689,96
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	12.542.684.522,00	11.286.569.650,43	89,99	7.295.393.752,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	62.403.677.882,00	56.828.303.714,00	91,07	48.692.813.933,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	42.150.941.360,00	37.814.515.087,00	89,71	38.581.820.923,00
5.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.324.670.469,00	9.909.782.127,00	87,51	8.826.863.259,77
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	22.266.077.917,00	20.611.727.266,00	92,57	20.733.574.051,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.199.631.458,00	8.870.605.767,00	86,97	7.480.397.039,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.629.497.670,00	5.260.805.128,00	93,45	5.089.300.227,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	12.918.472.271,00	12.119.040.156,00	93,81	9.476.100.152,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	9.821.738.548,00	9.404.627.348,00	95,75	9.439.729.200,50
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	5.898.789.876,00	5.773.114.903,00	97,87	5.410.006.622,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	5.234.976.140,00	5.146.616.241,00	98,31	4.217.109.826,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	4.445.993.631,00	4.354.281.435,00	97,94	3.395.333.141,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	6.093.062.000,00	6.033.744.718,31	99,03	4.910.392.658,00

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
7.01.12.	Kecamatan Serasan	5.726.068.382,00	5.576.311.746,00	97,38	5.157.236.677,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	5.315.224.911,00	5.223.651.297,90	98,28	4.252.351.707,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3.460.100.280,00	3.229.688.048,00	93,34	2.501.642.793,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.809.385.005,00	2.487.044.583,00	88,53	2.161.641.237,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.411.960.331,00	4.261.030.429,00	96,58	3.557.368.794,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.968.524.390,00	2.707.382.251,00	91,20	2.522.035.769,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	4.985.519.085,00	4.841.752.362,33	97,12	3.637.029.541,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	3.515.606.890,00	3.472.136.755,00	98,76	2.547.975.313,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	3.722.891.350,00	3.605.705.892,52	96,85	2.657.074.429,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.404.754.369,00	3.040.347.484,00	89,30	2.588.787.861,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	1.743.446.075,00	1.497.359.350,00	85,89	0,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	1.864.281.350,00	1.831.962.792,00	98,27	0,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.592.740.287,00	16.224.847.503,00	97,78	5.918.858.896,00
Jumlah		874.817.161.367,64	788.943.176.676,47	90,18	728.446.072.391,69

Tabel 7.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.913.397.931,00	29.736.872.326,00	96,19	22.787.891.243,97
1.02.01.	Dinas Kesehatan	44.632.051.896,00	43.731.544.933,00	97,98	45.817.298.832,20
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.346.160.659,00	118.069.212.253,46	89,21	78.743.415.041,53
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.682.017.715,00	23.602.989.989,00	99,67	18.622.192.401,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	256.132.208,00	252.780.000,00	98,69	0,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	101.700.000,00	101.095.000,00	99,41	0,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	603.000.000,00	596.560.296,00	98,93	172.578.000,00
1.06.01.	Dinas Sosial	261.000.535,00	233.803.000,00	89,58	595.787.831,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	178.500.000,00	170.300.410,00	95,41	0,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	192.000.000,00	176.560.000,00	91,96	33.963.300,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	256.854.919,36	251.819.920,00	98,04	1.386.518.939,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	323.400.000,00	322.297.430,00	99,66	17.480.000,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	10.450.000,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.000.000,00	25.800.000,00	99,23	24.250.000,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	14.217.859.569,00	13.374.862.754,00	94,07	736.170.652,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	617.781.000,00	613.590.000,00	99,32	712.984.500,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	660.500.000,00	633.997.820,00	95,99	43.713.514,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.065.024.500,00	1.601.521.861,91	77,55	1.083.334.457,00
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492.863.000,00	490.292.680,00	99,48	74.570.611,74
3.25.01.	Dinas Perikanan	495.600.000,00	465.733.500,00	93,97	185.586.639,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	2.009.791.212,00	1.730.535.549,39	86,11	49.339.400,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	19.039.897.770,00	18.999.034.188,18	99,79	5.195.355.153,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	2.149.809.150,00	2.024.482.500,00	94,17	933.452.673,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	1.662.257.200,00	1.632.960.178,18	98,24	1.638.072.175,15
5.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	445.800.000,00	335.498.000,00	75,26	0,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.043.150.000,00	989.686.000,00	94,87	914.077.000,00

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	197.535.150,00	196.220.000,00	99,33	160.307.550,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	236.083.330,00	226.530.000,00	95,95	0,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	303.700.000,00	297.130.000,00	97,84	105.187.500,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	217.000.000,00	211.935.000,00	97,67	130.530.000,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	262.500.000,00	256.830.000,00	97,84	91.900.000,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	184.700.000,00	173.060.000,00	93,70	60.290.600,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	182.600.000,00	167.238.000,00	91,59	0,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	128.000.000,00	124.420.000,00	97,20	4.495.636,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	28.300.000,00	28.300.000,00	100,00	20.600.000,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	225.000.000,00	224.137.500,00	99,62	138.881.159,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	40.000.000,00	39.800.000,00	99,50	0,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	73.732.000,00	4.960.000,00	6,73	0,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	287.200.000,00	286.917.000,00	99,90	36.265.000,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	203.900.000,00	106.498.000,00	52,23	0,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	283.800.000,00	242.302.000,00	85,38	75.689.000,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	104.500.000,00	103.350.000,00	98,90	48.760.000,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	112.400.000,00	100.080.000,00	89,04	17.400.000,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	674.430.100,00	644.289.000,00	95,53	104.340.000,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	358.900.000,00	343.308.000,00	95,66	0,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	179.500.000,00	179.365.000,00	99,92	0,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	113.000.000,00	112.535.000,00	99,59	78.015.000,00
Jumlah		283.117.329.844,36	264.281.035.089,12	93,35	180.851.143.808,59

**Tabel 7.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.500.000.000,00	1.648.129.341,00	65,93	1.331.862.663,00
Jumlah		2.500.000.000,00	1.648.129.341,00	65,93	1.331.862.663,00

**Tabel 7.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	119.624.168.400,00	119.624.168.400,00	100,00	106.005.762.940,00
Jumlah		119.624.168.400,00	119.624.168.400,00	100,00	106.005.762.940,00

Dalam rangka pengelolaan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan pemenuhan Belanja wajib (*mandatory spending*) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan belanja *mandatory spending* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana pada sejumlah program atau kegiatan tertentu yang diatur oleh undang-undang atau kebijakan yang mengikat. Pemenuhan Belanja wajib diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah diwajibkan untuk menganggarkan belanja bidang pendidikan minimal 20% dari total APBD. Pada Tahun

2023 Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengalokasikan Belanja bidang pendidikan sebesar Rp247.728.756.562,00 atau sebesar 20,08% dari total APBD. Belanja bidang pendidikan dianggarkan pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan beberapa SKPD lainnya di Pemerintah Kabupaten Natuna terkait belanja yang mendukung fungsi pendidikan.

2. Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Kesehatan
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran bidang kesehatan sebagai *mandatory spending* belanja kesehatan minimal 10% dari APBD. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengalokasikan Belanja urusan Kesehatan sebesar Rp218.472.202.316,23, atau sebesar 17,71% dari total APBD.
3. Pemenuhan Belanja Wajib Transfer ke Desa
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran bagi hasil pendapatan ke desa minimal 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta 10% dari pendapatan Dana Transfer dan Dana Perimbangan di luar DAK. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengalokasikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp4.265.558.000,00 atau sebesar 10% dari anggaran pajak dan retribusi daerah dan telah direalisasikan 100%. Sedangkan untuk bagi hasil data transfer dana perimbangan di luar DAK telah dianggarkan Rp61.508.176.400,00 atau sebesar 10% dari alokasi pendapatan transfer di luar Dana DAK yang ditetapkan dalam rincian Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
4. Pemenuhan Belanja Wajib Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp326.286.010.944,36 atau sebesar 26,44% dari total APBD.

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Walaupun terdapat pelampauan atas realisasi Pendapatan Daerah, masih terdapat potensi atas beberapa objek pajak pendapatan yang dapat ditingkatkan. Kondisi di lapangan banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dengan ketentuan pajak daerah, seperti tidak menyetorkan pajak yang dipungut seperti pajak restoran dan pajak hiburan, serta kurangnya pemahaman wajib pajak bahwa pajak restoran, hiburan dan hotel ditanggung oleh pembeli.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 92,56% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp187.337.422.400,00 dengan realisasi sebesar Rp173.393.064.754,00. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan DAK Fisik adalah adanya selisih antara pagu dengan data kontrak yang

disampaikan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 21 Juli 2023. Sedangkan untuk DAK Non Fisik penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu dari pagu yang ditetapkan dikurangi dengan SiLPA DAK Non Fisik di RKUD.

3. Sedangkan untuk pendapatan hibah hanya terealisasi sebesar Rp1.254.000.000,00 atau 50,61% dari yang telah dianggarkan yaitu Rp2.478.000.000,00. Ini disebabkan kurangnya koordinasi SKPD pelaksana dengan penyedia dalam memenuhi kelengkapan persyaratan penyaluran atas Belanja hibah tersebut.

Realisasi Belanja hanya terserap 91,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.280.058.659.612,00 terserap sebesar Rp1.174.496.509.506,59. Belanja yang tidak terserap disebabkan oleh sisa anggaran dari sisi kontrak, kegiatan yang tidak dilaksanakan karena sampai triwulan III belum ada kejelasan untuk penyaluran kurang bayar sesuai PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Kegiatan DAK Non Fisik yang belum maksimal, di samping itu terdapat sisa anggaran dari hasil efisiensi setiap program dan kegiatan.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan pemantauan atas transaksi wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dengan menempatkan beberapa orang petugas, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.
2. Melakukan peningkatan terhadap SDM dibidang pendapatan khususnya pemeriksa atas pajak daerah.
3. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
4. Menetapkan prioritas yang jelas dalam alokasi anggaran dengan titik fokus pada program-program atau kegiatan yang dianggap paling penting dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi, dan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi perubahan atau masalah yang memerlukan tindakan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala dan terstruktur terhadap pencapaian target dan kinerja anggaran.
6. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
7. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan memfasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

7.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah dilakukan perubahan terakhir yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggungjawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah Kabupaten Natuna yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan.

Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban dan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah dan Beban diakui pada saat Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pemerintah daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah, serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

7.4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan - LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

7.4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode Pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

7.4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

7.4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara kas dapat diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu:

- 1) Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah (Kasda)

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari Saldo Kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke

RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21, PPN dan Pajak lainnya, uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di Neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan. Pencatatan pendapatan-LRA telah dapat dilakukan disaat uang telah berada di tangan Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan bagian dari BUD dalam entitas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2) Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

b. Kas Dana BOS

Kas Dana Bos mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, kas dana bergulir.

7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

- 1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi
Piutang Pajak/Piutang Retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau Retribusi Daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.
- 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada Pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada Tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan Neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan Neraca dihitung berapa Bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain Aset yang berupa Aset Lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.
- 4) Piutang Lainnya
Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- 5) Piutang Tak Tertagih
Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak

tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya presentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun Pajak yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dapat dipilah dalam beberapa kualifikasi terdiri dari:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

- c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Piutang Retribusi

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

c) Piutang Lainnya

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Lainnya.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet
Apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambilan Keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan Hapus Tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan dapat menjadi harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna ketika pelaksanaannya dapat menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya, wajib pajak dan retribusi yang telah bangkrut, meninggal sedangkan ahli waris tidak mampu membayar hutangnya dan sebagainya.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang yang telah dihapus bukukan
Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

7.4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Natuna menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja. Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus

menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan metode *first in first out (FIFO)*.

Dengan menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal di unit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Selisih persediaan terjadi apabila timbul selisih antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang dan/atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, using, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan Transaksi wajar.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam laporan keuangan SKPD dinilai dengan metode *first in first out (FIFO)*. Metode tersebut dipilih mengingat banyaknya macam dan jenis persediaan yang harus dicatat.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

7.4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

- a) Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ditambah penambahan dan pengurangan nilai akibat keuntungan dan kerugian perusahaan tahun berjalan yang dibebankan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut

disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan apabila:

- 1) kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- 2) kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

7.4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (material) dan perlengkapan (suplesi).

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian dan pengukuran aset tetap adalah:

- 1) Biaya Perolehan/Nilai Wajar Pada Saat Perolehan
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai beban dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi berlaku untuk pengadaan baru maupun biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Nilai satuan minimum untuk peralatan dan mesin

adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk bangunan gedung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk jenis aset tetap yang lain nilai minimumnya Rp1,00 (satu rupiah) artinya berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai aset tetap.

3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produksi.
2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

4) Biaya Perolehan Aset Tetap Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

5) Biaya Perolehan Aset Tetap Swakelola

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi antara lain:

- a) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut

7.4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Langkah dan prosedur penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan dalam daftar rincian barang;
- 2) mengelompokkan aset tetap dalam artian aset individual atau berkelompok;
- 3) menetapkan nilai wajar aset tetap, dalam hal ini dapat digunakan harga perolehan;
- 4) menetapkan nilai yang dapat disusutkan;
- 5) menghitung penyusutan, secara umum menggunakan metode garis lurus karena unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan ingin dilakukan semudah mungkin sehingga penyusutan lebih logis dan proporsional;
- 6) mencatat penyusutan ke dalam jurnal;

- 7) menyajikan penyusutan pada akun akumulasi penyusutan (neraca) dan beban penyusutan-LO;
- 8) mengungkapkan penyusutan dalam CaLK.

Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap adalah untuk:

- 1) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- 2) mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) peralatan dan mesin;
- 2) gedung dan bangunan;
- 3) jalan, irigasi, dan jaringan;
- 4) aset tetap renovasi; dan
- 5) aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) aset tetap berupa tanah, baik yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;
- 2) aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk dioperasikan dan direklasifikasi ke jenis aset tetap yang bersangkutan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan;
- 4) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya;
- 5) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, dan
- 6) aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya direklasifikasi ke aset lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka aset tetap tersebut dapat dihapusbukkan. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan untuk dihapuskan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasi kembali ke aset tetap, dan disusutkan sesuai sisa umur manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang

disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan, dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu, yaitu nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:

- 1) daya pakai; dan
- 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekarang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.

Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:

- 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; dan atau
- 2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan atau
- 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap tercantum dalam tabel berikut:

Tabel.....Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02			Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01		Alat Besar	
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat Bantu	7
1	3	02	02		Alat Angkutan	
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	02	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	10
1	3	02	13	02	Produksi	10
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	02	15	03	Alat sar	2
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	03	03		Bangunan Menara	
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02		Bangunan Air	
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03		Instalasi	
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas meliputi:

- 1) renovasi,
- 2) restorasi atau overhaul.

Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi tabel masa manfaat. Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap. Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap. Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Bupati Natuna atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati Natuna.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang disahkan oleh Pengguna Barang, dan selanjutnya menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh PPK SKPD. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan pengurang pos aset tetap di Neraca. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nilai penyusutan;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai dasar penyusunan Neraca Restatement Pemerintah Kabupaten Natuna per 1 Januari 2015. Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan aset tetap dan pengurang nilai ekuitas pada neraca, serta diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan. Dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada periode sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.

Perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dinilai ulang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat adalah selisih antara masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat untuk Aset Tetap yang bersangkutan dikurangi dengan masa manfaat yang telah terpakai sampai dengan tahun 31 Desember 2006.
- 2) Nilai penyusutan dihitung dengan masa manfaat sejak tahun 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dibagi dengan sisa masa manfaat dikalikan dengan nilai aset.

7.4.3.11 Pengukuran Konstruksi/Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;

- (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
 - (d) biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7.4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam:

- 1) Tagihan Jangka Panjang.
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan Aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud (ATB)
 - a. Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

(a) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

(c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

(d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam aspek pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud maka kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Sementara, pengeluaran atau biaya yang telah dibebankan sebagai beban operasional tidak dapat diakui kembali sebagai aset.

4) Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5) Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat.

Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a) Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada

komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

b) Amortisasi untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut, dan
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

c) Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

- 6) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai buku.

7.4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.
 - b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:
 1. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 2. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 4. Pengukuran Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan Diterima di Muka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
 5. Pengukuran Utang Belanja
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 6. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- 4) Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam

kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

7.4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

7.4.4.1 Koreksi Kesalahan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni:

- i. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan;
- ii. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak

yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan:

- Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, dan pengembalian secara kas dilakukan pada periode sebelumnya, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- Apabila pengembalian kas terjadi pada tahun penyusunan Laporan Keuangan, maka koreksi tidak dilakukan pada akun periode sebelumnya melainkan dilakukan pada akun pendapatan tahun berjalan.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan tambahan pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

7.4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan Nilai Buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.

- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan baru dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.
- 3) Bagan Akun Standar yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penyajian Laporan Keuangan menggunakan konsep pemetaan/*Mapping* dari akun basis kas ke akun basis akrual. *Mapping* akun yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana tabel berikut ini:

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1	2.1.01.01.01.001.	Utang Taspen	2.1.01.01.01.001.	Utang Taspen		
2	2.1.01.02.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.1.01.02.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
3	2.1.01.03.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.1.01.03.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		
4	2.1.01.04.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.1.01.04.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kematian		
5	2.1.01.05.01.001.	Utang PPh 21	2.1.01.05.01.001.	Utang PPh 21		
6	2.1.01.05.02.001.	Utang PPh 22	2.1.01.05.02.001.	Utang PPh 22		
7	2.1.01.05.03.001.	Utang PPh 23	2.1.01.05.03.001.	Utang PPh 23		
8	2.1.01.05.04.001.	Utang PPh 25	2.1.01.05.04.001.	Utang PPh 25		
9	2.1.01.06.01.001.	Utang PPN Pusat	2.1.01.06.01.001.	Utang PPN Pusat		
10	2.1.01.07.01.001.	Utang Taperum	2.1.01.07.01.001.	Utang Taperum		
11	2.1.01.08.01.001.	Utang Iuran Wajib Pegawai	2.1.01.08.01.001.	Utang Iuran Wajib Pegawai		
12	2.1.03.01.01.0001.	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	2.1.03.01.01.0001.	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek		
13	4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.1.03.06.01.0001.	Piutang Pajak Hotel	7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO
14	4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.1.03.07.01.0001.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
15	4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.1.03.08.05.0001.	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	7.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
16	4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.1.03.08.07.0001.	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	7.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
17	4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.1.03.08.09.0001.	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
18	4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.1.03.09.01.0001.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
19	4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	1.1.03.09.02.0001.	Piutang Pajak Reklame Kain	7.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain-LO
20	4.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.1.03.09.03.0001.	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
21	4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	1.1.03.09.05.0001.	Piutang Pajak Reklame Berjalan	7.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan-LO
22	4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.1.03.10.01.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
23	4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.1.03.10.02.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
24	4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	1.1.03.11.01.0001.	Piutang Pajak Parkir	7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO
25	4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.1.03.12.01.0001.	Piutang Pajak Air Tanah	7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
26	4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung	1.1.03.14.05.0001.	Piutang Pajak Batu Apung	7.1.01.14.05.0001	Pajak Batu Apung-LO
27	4.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit	1.1.03.14.12.0001.	Piutang Pajak Granit/Andesit	7.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit-LO
28	4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	1.1.03.14.23.0001.	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	7.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
29	4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa	1.1.03.14.24.0001.	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	7.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa-LO
30	4.1.01.14.28.0001.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	1.1.03.14.28.0001.	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)	7.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
31	4.1.01.14.29.0001.	Pajak Tanah Diatome	1.1.03.14.29.0001.	Piutang Pajak Tanah Diatome	7.1.01.14.29.0001	Pajak Tanah Diatome-LO
32	4.1.01.14.30.0001.	Pajak Tanah Liat	1.1.03.14.30.0001.	Piutang Pajak Tanah Liat	7.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat-LO
33	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.1.03.14.37.0001.	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
34	4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	1.1.03.15.01.0001.	Piutang PBBP2	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO
35	4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.1.03.16.01.0001.	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
36	4.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.1.03.16.02.0001.	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
37	4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.1.04.01.01.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
38	4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.1.04.01.02.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
39	4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.1.04.01.09.0001.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	7.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
40	4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1.1.04.01.11.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	7.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
41	4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1.1.04.02.10.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	7.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
42	4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.1.04.03.01.0001.	Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
43	4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.1.05.01.01.0001.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
44	4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.1.05.02.01.0001.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
45	4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.1.06.01.02.0002.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	7.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
46	4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	1.1.06.03.01.0001.	Piutang Hasil Sewa BMD	7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO
47	4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.1.06.05.01.0001.	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
48	4.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.1.06.05.02.0001.	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
49	4.1.04.05.04.0001.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.1.06.05.04.0001.	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	7.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
50	4.1.04.05.05.0001.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada	1.1.06.05.05.0001.	Piutang Jasa Giro	7.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		FKTP		Dana Kapitasi pada FKTP	.	Kapitasi pada FKTP-LO
51	4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.1.06.06.01.0001.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
52	4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.1.06.07.01.0001.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
53	4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.1.06.08.01.0001.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	7.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
54	4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.1.06.08.02.0001.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
55	4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.1.06.11.01.0001.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
56	4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.1.06.12.06.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	7.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
57	4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.1.06.12.07.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
58	4.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.1.06.12.08.0005.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
59	4.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.1.06.12.08.0009.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)	7.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
60	4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.1.06.12.09.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
61	4.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.1.06.12.11.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	7.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
62	4.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.1.06.12.12.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	7.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
63	4.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.1.06.12.14.0037.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
64	4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	1.1.06.12.15.0001.	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	7.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2-LO
65	4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.1.06.12.16.0001.	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	7.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO
66	4.1.04.12.16.0002.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.1.06.12.16.0002.	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	7.1.04.12.16.0002.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
67	4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.1.06.15.03.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
68	4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.1.06.15.04.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	7.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
69	4.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	1.1.06.15.04.0002.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	7.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO
70	4.1.04.15.04.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.1.06.15.04.0004.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.1.04.15.04.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO
71	4.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.1.06.15.04.0005.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-LO
72	4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	1.1.06.16.01.0001.	Piutang Pendapatan BLUD	7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO
73	4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.1.06.18.01.0001.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
74	4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.1.06.19.01.0001.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
75	4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.1.07.01.01.0001.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO
76	4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	1.1.07.01.01.0002.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO
77	4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.1.07.01.01.0003.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
78	4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.1.07.01.01.0004.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO
79	4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.1.07.01.01.0005.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
80	4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.1.07.01.01.0006.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
81	4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.1.07.01.01.0008.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
82	4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.1.07.01.01.0009.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
83	4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.1.07.01.01.0010.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
84	4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.1.07.01.01.0013.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO
85	4.2.01.01.02.0001.	DAU	1.1.07.01.02.0001.	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU	7.2.01.01.02.0001	DAU-LO
86	4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.1.07.01.03.0002.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
87	4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.1.07.01.03.0003.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
88	4.2.01.01.03.0006.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.1.07.01.03.0006.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	7.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
89	4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.1.07.01.03.0011.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	7.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
90	4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.1.07.01.03.0013.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
91	4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.07.01.03.0014.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
92	4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.1.07.01.03.0015.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO
93	4.2.01.01.03.0018.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.1.07.01.03.0018.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	7.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
94	4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	1.1.07.01.03.0024.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	7.2.01.01.03.0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO
95	4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.1.07.01.03.0025.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	7.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO
96	4.2.01.01.03.0027.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.1.07.01.03.0027.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
97	4.2.01.01.03.0030.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.1.07.01.03.0030.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	7.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
98	4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.1.07.01.03.0031.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
99	4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.1.07.01.03.0032.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.2.01.01.03.0032 .	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO
100	4.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.1.07.01.03.0033.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	7.2.01.01.03.0033 .	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
101	4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1.1.07.01.03.0034.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.2.01.01.03.0034 .	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
102	4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1.1.07.01.03.0035.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.2.01.01.03.0035 .	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
103	4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.1.07.01.03.0037.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.2.01.01.03.0037 .	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
104	4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.1.07.01.03.0039.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	7.2.01.01.03.0039 .	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
105	4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.1.07.01.03.0040.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.2.01.01.03.0040 .	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
106	4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.1.07.01.03.0042.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.2.01.01.03.0042 .	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
107	4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.1.07.01.03.0043.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.2.01.01.03.0043 .	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
108	4.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	1.1.07.01.03.0047.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.2.01.01.03.0047 .	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO
109	4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler			7.2.01.01.04.0001 .	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
110	4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja			7.2.01.01.04.0003 .	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
111	4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.1.07.01.04.0004.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD	7.2.01.01.04.0004 .	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
112	4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.1.07.01.04.0005.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.2.01.01.04.0005 .	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
113	4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.1.07.01.04.0006.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD	7.2.01.01.04.0006 .	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
114	4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.1.07.01.04.0007.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD	7.2.01.01.04.0007 .	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
115	4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.1.07.01.04.0008.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7.2.01.01.04.0008 .	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
116	4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.1.07.01.04.0011.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK	7.2.01.01.04.0011 .	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
117	4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1.1.07.01.04.0012.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		
118	4.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.1.07.01.04.0013.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.2.01.01.04.0013 .	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
119	4.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.1.07.01.04.0014.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan	7.2.01.01.04.0014 .	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
				Persalinan		
120	4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.1.07.01.04.0015.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
121	4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.1.07.01.04.0016.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM	7.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
122	4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1.07.01.04.0017.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
123	4.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.1.07.01.04.0018.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	7.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan-LO
124	4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.1.07.01.04.0019.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	7.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
125	4.2.01.02.01.0001.	DID	1.1.07.02.01.0001.	Piutang DID	7.2.01.02.01.0001.	DID-LO
126	4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	1.1.07.05.01.0001.	Piutang Dana Desa	7.2.01.05.01.0001.	Dana Desa-LO
127	4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0001.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
128	4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0002.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
129	4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0003.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
130	4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.1.08.01.01.0004.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
131	4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.1.08.01.01.0005.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
132	4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.1.08.02.02.0001.	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
133	4.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah			7.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
134	4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis			7.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
135	4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS			7.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
136	4.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	1.1.06.15.34.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
137	5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS			8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS
138	5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK			8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK
139	5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS
140	5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
141	5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			8.1.01.01.03.0001 .	Beban Tunjangan Jabatan PNS
142	5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			8.1.01.01.04.0001 .	Beban Tunjangan Fungsional PNS
143	5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			8.1.01.01.04.0002 .	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
144	5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			8.1.01.01.05.0001 .	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
145	5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			8.1.01.01.05.0002 .	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
146	5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS			8.1.01.01.06.0001 .	Beban Tunjangan Beras PNS
147	5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK			8.1.01.01.06.0002 .	Beban Tunjangan Beras PPPK
148	5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			8.1.01.01.07.0001 .	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
149	5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS			8.1.01.01.08.0001 .	Beban Pembulatan Gaji PNS
150	5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			8.1.01.01.08.0002 .	Beban Pembulatan Gaji PPPK
151	5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			8.1.01.01.09.0001 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
152	5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			8.1.01.01.09.0002 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
153	5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			8.1.01.01.10.0001 .	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
154	5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			8.1.01.01.10.0002 .	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
155	5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			8.1.01.01.11.0001 .	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
156	5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			8.1.01.01.11.0002 .	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
157	5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			8.1.01.02.01.0001 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
158	5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			8.1.01.02.01.0002 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
159	5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS			8.1.01.02.02.0001 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
160	5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK			8.1.01.02.02.0002 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
161	5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.1.01.02.03.0001 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
162	5.1.01.02.03.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK			8.1.01.02.03.0002 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
163	5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			8.1.01.02.04.0001 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
164	5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			8.1.01.02.05.0001 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
165	5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK			8.1.01.02.05.0002 .	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
166	5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan			8.1.01.03.02.0001 .	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
167	5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD			8.1.01.03.03.0001 .	Beban TPG PNSD
168	5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD			8.1.01.03.04.0001 .	Beban TKG PNSD
169	5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD			8.1.01.03.05.0001 .	Beban Tamsil Guru PNSD
170	5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			8.1.01.03.06.0001 .	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
171	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8.1.01.03.07.0001 .	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
172	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			8.1.01.03.07.0002 .	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
173	5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			8.1.01.03.07.0003 .	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
174	5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.03.08.0001 .	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
175	5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.03.08.0002 .	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
176	5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD			8.1.01.04.01.0001 .	Beban Uang Representasi DPRD
177	5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD			8.1.01.04.02.0001 .	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
178	5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD			8.1.01.04.03.0001 .	Beban Tunjangan Beras DPRD
179	5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD			8.1.01.04.04.0001 .	Beban Uang Paket DPRD
180	5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD			8.1.01.04.05.0001 .	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
181	5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD			8.1.01.04.06.0001 .	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
182	5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD			8.1.01.04.07.0001 .	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
183	5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.08.0001 .	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
184	5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD			8.1.01.04.09.0001 .	Beban Tunjangan Reses DPRD
185	5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.10.0001 .	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
186	5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD			8.1.01.04.12.0001 .	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
187	5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD			8.1.01.04.12.0002 .	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
188	5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD			8.1.01.04.12.0003 .	Beban Jaminan Kematian DPRD
189	5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD			8.1.01.04.12.0004 .	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
190	5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD			8.1.01.04.13.0001 .	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
191	5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD			8.1.01.04.14.0001 .	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
192	5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH			8.1.01.05.01.0001 .	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
193	5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH			8.1.01.05.02.0001 .	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
194	5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH			8.1.01.05.03.0001 .	Beban Tunjangan Jabatan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						KDH/WKDH
195	5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH			8.1.01.05.04.0001.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
196	5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH			8.1.01.05.05.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
197	5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH			8.1.01.05.06.0001.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
198	5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH			8.1.01.05.07.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
199	5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH			8.1.01.05.08.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
200	5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH			8.1.01.05.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
201	5.1.01.05.10.0006.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel			8.1.01.05.10.0006.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
202	5.1.01.05.10.0007.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran			8.1.01.05.10.0007.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
203	5.1.01.05.10.0008.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan			8.1.01.05.10.0008.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
204	5.1.01.05.10.0009.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame			8.1.01.05.10.0009.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
205	5.1.01.05.10.0010.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan			8.1.01.05.10.0010.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
206	5.1.01.05.10.0011.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir			8.1.01.05.10.0011.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
207	5.1.01.05.10.0012.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah			8.1.01.05.10.0012.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
208	5.1.01.05.10.0014.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			8.1.01.05.10.0014.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
209	5.1.01.05.10.0015.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			8.1.01.05.10.0015.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
210	5.1.01.05.10.0016.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			8.1.01.05.10.0016.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
211	5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD			8.1.01.06.01.0001.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
212	5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH			8.1.01.06.02.0001.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
213	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS			8.1.01.88.88.8888.	Beban Pegawai BOS
214	5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD			8.1.01.99.99.9999.	Beban Pegawai BLUD
215	5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			8.1.02.01.01.0001.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
216	5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia			8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia
217	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
218	5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku			8.1.02.01.01.0005 .	Beban Bahan-Bahan Baku
219	5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			8.1.02.01.01.0008 .	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
220	5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			8.1.02.01.01.0010 .	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
221	5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			8.1.02.01.01.0012 .	Beban Bahan-Bahan Lainnya
222	5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			8.1.02.01.01.0013 .	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
223	5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian			8.1.02.01.01.0019 .	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
224	5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			8.1.02.01.01.0023 .	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
225	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			8.1.02.01.01.0024 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
226	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.1.02.01.01.0025 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
227	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			8.1.02.01.01.0026 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
228	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			8.1.02.01.01.0027 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
229	5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			8.1.02.01.01.0028 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
230	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			8.1.02.01.01.0029 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
231	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			8.1.02.01.01.0031 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
232	5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			8.1.02.01.01.0032 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
233	5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga			8.1.02.01.01.0034 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
234	5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			8.1.02.01.01.0035 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
235	5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			8.1.02.01.01.0036 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
236	5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat			8.1.02.01.01.0037 .	Beban Obat-Obatan-Obat
237	5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			8.1.02.01.01.0038 .	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
238	5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			8.1.02.01.01.0039 .	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
239	5.1.02.01.01.0040.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			8.1.02.01.01.0040 .	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
240	5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura			8.1.02.01.01.0043 .	Beban Natura dan Pakan-Natura
241	5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya			8.1.02.01.01.0045 .	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
242	5.1.02.01.01.0049.	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya			8.1.02.01.01.0049 .	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
243	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.1.02.01.01.0052 .	Beban Makanan dan Minuman Rapat
244	5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			8.1.02.01.01.0053 .	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
245	5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			8.1.02.01.01.0056 .	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
246	5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial			8.1.02.01.01.0057 .	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
247	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			8.1.02.01.01.0058 .	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
248	5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			8.1.02.01.01.0061 .	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
249	5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			8.1.02.01.01.0062 .	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
250	5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			8.1.02.01.01.0063 .	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
251	5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			8.1.02.01.01.0064 .	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
252	5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			8.1.02.01.01.0065 .	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
253	5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)			8.1.02.01.01.0066 .	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
254	5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan			8.1.02.01.01.0067 .	Beban Pakaian Penyelamatan
255	5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga			8.1.02.01.01.0068 .	Beban Pakaian Siaga
256	5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja			8.1.02.01.01.0070 .	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
257	5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah			8.1.02.01.01.0074 .	Beban Pakaian Adat Daerah
258	5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional			8.1.02.01.01.0075 .	Beban Pakaian Batik Tradisional
259	5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga			8.1.02.01.01.0076 .	Beban Pakaian Olahraga
260	5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka			8.1.02.01.01.0077 .	Beban Pakaian Paskibraka
261	5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan			8.1.02.01.02.0003 .	Beban Komponen-Komponen Peralatan
262	5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.02.02.01.0001 .	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
263	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.1.02.02.01.0003 .	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
264	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			8.1.02.02.01.0004 .	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
265	5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			8.1.02.02.01.0005 .	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Saksi Ahli, dan Beracara
266	5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
267	5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan			8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan
268	5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
269	5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian			8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian
270	5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
271	5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
272	5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
273	5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
274	5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
275	5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
276	5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
277	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi
278	5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
279	5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
280	5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli			8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli
281	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
282	5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan
283	5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir
284	5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak			8.1.02.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
285	5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
286	5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
287	5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
288	5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
289	5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
290	5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan			8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
291	5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
292	5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			8.1.02.02.01.0047 .	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
293	5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			8.1.02.02.01.0048 .	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
294	5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			8.1.02.02.01.0049 .	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
295	5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi			8.1.02.02.01.0050 .	Beban Jasa Kalibrasi
296	5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			8.1.02.02.01.0051 .	Beban Jasa Pengolahan Sampah
297	5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			8.1.02.02.01.0052 .	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
298	5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah			8.1.02.02.01.0053 .	Beban Jasa Pengukuran Tanah
299	5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan			8.1.02.02.01.0055 .	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
300	5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal			8.1.02.02.01.0057 .	Beban Jasa Operator Kapal
301	5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon			8.1.02.02.01.0059 .	Beban Tagihan Telepon
302	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air			8.1.02.02.01.0060 .	Beban Tagihan Air
303	5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik			8.1.02.02.01.0061 .	Beban Tagihan Listrik
304	5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			8.1.02.02.01.0062 .	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
305	5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			8.1.02.02.01.0063 .	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
306	5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman			8.1.02.02.01.0064 .	Beban Paket/Pengiriman
307	5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan			8.1.02.02.01.0066 .	Beban Registrasi/Keanggotaan
308	5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.1.02.02.01.0067 .	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
309	5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up			8.1.02.02.01.0073 .	Beban Medical Check Up
310	5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3			8.1.02.02.02.0003 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3
311	5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0005 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
312	5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0006 .	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
313	5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0007 .	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
314	5.1.02.02.04.0003.	Belanja Sewa Excavator			8.1.02.02.04.0003 .	Beban Sewa Excavator
315	5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya			8.1.02.02.04.0034 .	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
316	5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0036 .	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
317	5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.02.04.0037 .	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
318	5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.02.04.0038 .	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
319	5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0043 .	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
320	5.1.02.02.04.0045.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0045 .	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
321	5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.02.04.0049 .	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
322	5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0052 .	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
323	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			8.1.02.02.04.0115 .	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
324	5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			8.1.02.02.04.0117 .	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
325	5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel			8.1.02.02.04.0118 .	Beban Sewa Mebel
326	5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.02.04.0123 .	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
327	5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			8.1.02.02.04.0132 .	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
328	5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya			8.1.02.02.04.0137 .	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
329	5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus			8.1.02.02.04.0145 .	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus
330	5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum			8.1.02.02.04.0355 .	Beban Sewa Peralatan Umum
331	5.1.02.02.04.0406.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya			8.1.02.02.04.0406 .	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
332	5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.02.04.0411 .	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya
333	5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric			8.1.02.02.04.0416 .	Beban Sewa Elektronik/Electric
334	5.1.02.02.04.0444.	Belanja Sewa Suara			8.1.02.02.04.0444 .	Beban Sewa Suara
335	5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.02.05.0001 .	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
336	5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang			8.1.02.02.05.0002 .	Beban Sewa Bangunan Gudang
337	5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.02.05.0009 .	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
338	5.1.02.02.05.0014.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool			8.1.02.02.05.0014 .	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
339	5.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.02.05.0030 .	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
340	5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I			8.1.02.02.05.0038 .	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
341	5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama			8.1.02.02.05.0042 .	Beban Sewa Asrama
342	5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel			8.1.02.02.05.0043 .	Beban Sewa Hotel
343	5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun			8.1.02.02.05.0049 .	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
344	5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.02.05.0050 .	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
345	5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya			8.1.02.02.06.0131 .	Beban Sewa Jaringan Telepon

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Lainnya
346	5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik			8.1.02.02.07.0028	Beban Sewa Alat Musik
347	5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian			8.1.02.02.07.0030	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
348	5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			8.1.02.02.09.0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
349	5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
350	5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior			8.1.02.02.09.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
351	5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
352	5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
353	5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air			8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
354	5.1.02.02.08.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi			8.1.02.02.09.0011	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
355	5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya			8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
356	5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape			8.1.02.02.09.0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
357	5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
358	5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
359	5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan			8.1.02.02.09.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
360	5.1.02.02.08.0033.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan			8.1.02.02.09.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
361	5.1.02.02.08.0037.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya			8.1.02.02.09.0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
362	5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan			8.1.02.02.10.0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
363	5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika			8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
364	5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei			8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
365	5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
366	5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
367	5.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata			8.1.02.02.10.0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
368	5.1.02.02.09.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata			8.1.02.02.10.0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata
369	5.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			8.1.02.02.12.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
370	5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
371	5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
372	5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi			8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi
373	5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis			8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis
374	5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan			8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan
375	5.1.02.03.01.0001.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			8.1.02.03.01.0001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
376	5.1.02.03.01.0005.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga			8.1.02.03.01.0005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
377	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Bermotor Perorangan
378	5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
379	5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
380	5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
381	5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.03.02.0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
382	5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
383	5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus			8.1.02.03.02.0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
384	5.1.02.03.02.0062.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis			8.1.02.03.02.0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
385	5.1.02.03.02.0086.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi			8.1.02.03.02.0086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
386	5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			8.1.02.03.02.0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
387	5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik			8.1.02.03.02.0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
388	5.1.02.03.02.0114.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah			8.1.02.03.02.0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
389	5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)			8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
390	5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			8.1.02.03.02.0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Kantor
391	5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
392	5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel			8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
393	5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
394	5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
395	5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
396	5.1.02.03.02.0126.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat			8.1.02.03.02.0126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
397	5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio			8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
398	5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film			8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
399	5.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			8.1.02.03.02.0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
400	5.1.02.03.02.0218.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic			8.1.02.03.02.0218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
401	5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya			8.1.02.03.02.0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
402	5.1.02.03.02.0293.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain			8.1.02.03.02.0293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
403	5.1.02.03.02.0335.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja			8.1.02.03.02.0335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Alat Kesehatan Kerja
404	5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
405	5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer			8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer
406	5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya			8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya
407	5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer			8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer
408	5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan			8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan
409	5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya
410	5.1.02.03.02.0446.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman			8.1.02.03.02.0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman
411	5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			8.1.02.03.02.0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
412	5.1.02.03.02.0502.	Belanja Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut			8.1.02.03.02.0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
413	5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
414	5.1.02.03.03.0002.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang			8.1.02.03.03.0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang
415	5.1.02.03.03.0003.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar			8.1.02.03.03.0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
416	5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi			8.1.02.03.03.0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi
417	5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan			8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
418	5.1.02.03.03.0007.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium			8.1.02.03.03.0007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Obser

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						vatorium
419	5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah			8.1.02.03.03.0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
420	5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.03.03.0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
421	5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
422	5.1.02.03.03.0011.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga			8.1.02.03.03.0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
423	5.1.02.03.03.0018.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			8.1.02.03.03.0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
424	5.1.02.03.03.0020.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat			8.1.02.03.03.0020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
425	5.1.02.03.03.0021.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan			8.1.02.03.03.0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
426	5.1.02.03.03.0026.	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			8.1.02.03.03.0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
427	5.1.02.03.03.0030.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.03.03.0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
428	5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			8.1.02.03.03.0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
429	5.1.02.03.03.0042.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama			8.1.02.03.03.0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
430	5.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
431	5.1.02.03.03.0054.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu			8.1.02.03.03.0054	Beban Pemeliharaan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya				Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti -Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
432	5.1.02.03.03.0055.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai			8.1.02.03.03.0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
433	5.1.02.03.03.0057.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi			8.1.02.03.03.0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
434	5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
435	5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya			8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
436	5.1.02.03.04.0015.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa			8.1.02.03.04.0015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
437	5.1.02.03.04.0031.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
438	5.1.02.03.04.0035.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut			8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
439	5.1.02.03.04.0048.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			8.1.02.03.04.0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
440	5.1.02.03.04.0103.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
441	5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya			8.1.02.03.04.0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
442	5.1.02.03.04.0125.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi			8.1.02.03.04.0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
443	5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
444	5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum			8.1.02.03.05.0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Tercetak-Buku Umum
445	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa
446	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
447	5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			8.1.02.04.01.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
448	5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri			8.1.02.04.02.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
449	5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
450	5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa			8.1.02.05.01.0003.	Beban Beasiswa
451	5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)			8.1.02.05.01.0005.	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
452	5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
453	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			8.1.02.05.02.0002.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
454	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS			8.1.02.88.88.8888.	Beban Barang dan Jasa BOS
455	5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD			8.1.02.99.99.9999.	Beban Barang dan Jasa BLUD
456	5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
457	5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
458	5.1.05.01.03.0001.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.03.0001.	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
459	5.1.05.04.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD			8.1.05.04.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada BUMD
460	5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
461	5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
462	5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
463	5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Surat Keterangan Terdaftar
464	5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
465	5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
466	5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
467	5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
468	5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
469	5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
470	5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
471	5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			8.1.06.03.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
472	5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			8.1.06.03.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
473	5.2.01.01.01.0002.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.3.01.01.01.0002.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
474	5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.3.01.01.01.0004.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		
475	5.2.01.01.01.0005.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.3.01.01.01.0005.	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga		
476	5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.3.01.01.01.0007.	Tanah Persil Lainnya		
477	5.2.01.01.03.0007.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.3.01.01.03.0007.	Tanah untuk Jalan		
478	5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	1.3.01.01.03.0008.	Tanah untuk Bangunan Air		
479	5.2.01.01.03.0012.	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.3.01.01.03.0012.	Tanah untuk Makam		
480	5.2.01.01.03.0019.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.3.01.01.03.0019.	Lapangan Lainnya		
481	5.2.02.01.02.0006.	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	1.3.02.01.02.0006.	Alat Besar Apung Lainnya		
482	5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	1.3.02.01.03.0005.	Pompa		
483	5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.3.02.01.03.0016.	Alat Bantu Lainnya		
484	5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.02.02.01.0001.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
485	5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang		
486	5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.01.0003.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
487	5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
488	5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.3.02.02.01.0005.	Kendaraan Bermotor Beroda		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
				Tiga		
489	5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.02.02.01.0006.	Kendaraan Bermotor Khusus		
490	5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.3.02.02.01.0009.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		
491	5.2.02.02.02.0001.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.02.0001.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		
492	5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.3.02.02.03.0002.	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		
493	5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	1.3.02.03.01.0006.	Perkakas Bengkel Kayu		
494	5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.3.02.03.01.0010.	Alat Bengkel Bermesin Lainnya		
495	5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.3.02.03.02.0005.	Perkakas Standard (Standard Tools)		
496	5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.3.02.03.02.0007.	Perkakas Bengkel Kerja		
497	5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.3.02.03.02.0013.	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		
498	5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.3.02.03.03.0001.	Alat Ukur Universal		
499	5.2.02.03.03.0008.	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1.3.02.03.03.0008.	Alat Ukur/Pembanding		
500	5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.3.02.03.03.0010.	Alat Timbangan/Biara		
501	5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.3.02.03.03.0021.	Alat Ukur Lainnya		
502	5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.3.02.04.01.0001.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
503	5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.3.02.04.01.0002.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak		
504	5.2.02.04.01.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.3.02.08.01.0041.	Alat Laboratorium Pertanian		
505	5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.3.02.04.01.0010.	Alat Pengolahan Lainnya		
506	5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.3.02.05.01.0002.	Mesin Hitung/Mesin Jumlah		
507	5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		
508	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya		
509	5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	1.3.02.05.02.0001.	Mebel		
510	5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.3.02.05.02.0002.	Alat Pengukur Waktu		
511	5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	1.3.02.05.02.0003.	Alat Pembersih		
512	5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin		
513	5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.3.02.05.02.0005.	Alat Dapur		
514	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
515	5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.3.02.05.02.0007.	Alat Pemadam Kebakaran		
516	5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat		
517	5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0002.	Meja Rapat Pejabat		
518	5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat		
519	5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0004.	Kursi Rapat Pejabat		
520	5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	1.3.02.05.03.0006.	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
521	5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Arsip Pejabat		
522	5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio		
523	5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film		
524	5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.3.02.06.01.0003.	Peralatan Studio Gambar		
525	5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.3.02.06.01.0004.	Peralatan Cetak		
526	5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.3.02.06.01.0006.	Alat Studio Lainnya		
527	5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone		
528	5.2.02.06.02.0003.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.3.02.06.02.0003.	Alat Komunikasi Radio HF/FM		
529	5.2.02.06.02.0010.	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	1.3.02.06.02.0010.	Alat Komunikasi Satelit		
530	5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1.3.02.06.02.0011.	Alat Komunikasi Lainnya		
531	5.2.02.06.03.0024.	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF	1.3.02.06.03.0024.	Peralatan Antena Penerima VHF		
532	5.2.02.06.03.0047.	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga		
533	5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum		
534	5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.3.02.07.01.0002.	Alat Kedokteran Gigi		
535	5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.3.02.07.01.0005.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
536	5.2.02.07.01.0011.	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.3.02.07.01.0011.	Alat Kedokteran Poliklinik		
537	5.2.02.07.01.0017.	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.3.02.07.01.0017.	Alat Kedokteran Transfusi Darah		
538	5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.3.02.07.01.0021.	Alat Kedokteran Gawat Darurat		
539	5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.3.02.07.01.0024.	Alat Kedokteran ICU		
540	5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.3.02.07.01.0029.	Alat Kedokteran Lainnya		
541	5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.3.02.07.02.0005.	Alat Kesehatan Umum Lainnya		
542	5.2.02.08.01.0002.	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.3.02.08.01.0002.	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan		
543	5.2.02.08.01.0007.	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.3.02.08.01.0007.	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia		
544	5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.3.02.08.01.0011.	Alat Laboratorium Umum		
545	5.2.02.08.01.0017.	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	1.3.02.08.01.0017.	Alat Laboratorium Film		
546	5.2.02.08.01.0019.	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	1.3.02.08.01.0019.	Alat Laboratorium Farmasi		
547	5.2.02.08.01.0020.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	1.3.02.08.01.0020.	Alat Laboratorium Fisika		
548	5.2.02.08.01.0033.	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	1.3.02.08.01.0033.	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
549	5.2.02.08.01.0034.	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	1.3.02.08.01.0034.	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
550	5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.3.02.08.01.0056.	Alat Laboratorium Lain		
551	5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.3.02.08.01.0064.	Unit Alat Laboratorium Lainnya		
552	5.2.02.08.02.0003.	Belanja Modal General Laboratory Tool	1.3.02.08.02.0003.	General Laboratory Tool		
553	5.2.02.08.02.0005.	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	1.3.02.08.02.0005.	Laboratory Safety Equipment		
554	5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.3.02.08.03.0002.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika		
555	5.2.02.08.03.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.3.02.08.03.0003.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar		
556	5.2.02.08.03.0004.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.3.02.08.03.0004.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		
557	5.2.02.08.03.0006.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	1.3.02.08.03.0006.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas		
558	5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.3.02.08.03.0009.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan		
559	5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.3.02.08.03.0010.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian		
560	5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.3.02.08.03.0015.	Alat Peraga PAUD/TK		
561	5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.3.02.08.03.0016.	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya		
562	5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	1.3.02.08.08.0006.	Peralatan Umum		
563	5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.3.02.08.09.0005.	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu		
564	5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.3.02.10.01.0001.	Komputer Jaringan		
565	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer		
566	5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.3.02.10.01.0003.	Komputer Unit Lainnya		
567	5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.3.02.10.02.0001.	Peralatan Mainframe		
568	5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.3.02.10.02.0002.	Peralatan Mini Computer		
569	5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer		
570	5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan		
571	5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.3.02.10.02.0005.	Peralatan Komputer Lainnya		
572	5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.3.02.11.02.0002.	Elektronik/Electric		
573	5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	1.3.02.15.02.0001.	Baju Pengaman		
574	5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
575	5.2.02.18.03.0001.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.3.02.18.03.0001.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut		
576	5.2.02.18.03.0002.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	1.3.02.18.03.0002.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya		
577	5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.3.02.19.01.0002.	Peralatan Permainan		
578	5.2.02.19.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Senam	1.3.02.19.01.0003.	Peralatan Senam		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
579	5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.3.02.19.01.0006.	Peralatan Olahraga Lainnya		
580	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.3.02.08.03.0001.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia		
581	5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum		
582	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor		
583	5.2.03.01.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.3.03.01.01.0004.	Bangunan Gedung Instalasi		
584	5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.3.03.01.01.0005.	Bangunan Gedung Laboratorium		
585	5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.3.03.01.01.0006.	Bangunan Kesehatan		
586	5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.3.03.01.01.0008.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
587	5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.3.03.01.01.0009.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
588	5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.3.03.01.01.0010.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
589	5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.3.03.01.01.0011.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga		
590	5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.3.03.01.01.0016.	Bangunan Gedung Perpustakaan		
591	5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.3.03.01.01.0018.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara		
592	5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0030.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
593	5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.3.03.01.01.0032.	Bangunan Fasilitas Umum		
594	5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	1.3.03.01.01.0036.	Taman		
595	5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0037.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
596	5.2.03.01.02.0002.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002.	Rumah Negara Golongan II		
597	5.2.03.01.02.0003.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003.	Rumah Negara Golongan III		
598	5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.3.03.01.02.0013.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		
599	5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.3.03.04.01.0004.	Pagar		
600	5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.3.03.04.01.0005.	Tugu/Tanda Batas Lainnya		
601	5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.	Jalan Kabupaten		
602	5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.3.04.01.01.0010.	Jalan Lainnya		
603	5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.3.04.01.02.0013.	Jembatan Lainnya		
604	5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.3.04.02.01.0004.	Bangunan Pembuang Irigasi		
605	5.2.04.02.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.3.04.02.01.0005.	Bangunan Pengaman Irigasi		
606	5.2.04.02.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.3.04.02.01.0006.	Bangunan Pelengkap Irigasi		
607	5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.3.04.02.01.0008.	Bangunan Air Irigasi Lainnya		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
608	5.2.04.02.02.0004.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.3.04.02.02.0004.	Saluran Pembuang Pasang Surut		
609	5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.3.04.02.04.0001.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
610	5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.3.04.02.04.0005.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai		
611	5.2.04.02.04.0007.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.3.04.02.04.0007.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		
612	5.2.04.02.05.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	1.3.04.02.05.0004.	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
613	5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.02.06.0006.	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
614	5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.3.04.02.07.0003.	Bangunan Pembuang Air Kotor		
615	5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	1.3.04.02.07.0004.	Bangunan Pengaman Air Kotor		
616	5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.03.01.0005.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
617	5.2.04.03.03.0002.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.3.04.03.03.0002.	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
618	5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.3.04.03.03.0003.	Bangunan Penampung Sampah		
619	5.2.04.03.03.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.3.04.03.03.0004.	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya		
620	5.2.04.03.04.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	1.3.04.03.04.0004.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya		
621	5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.3.04.03.05.0012.	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya		
622	5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	1.3.04.03.09.0004.	Instalasi Pengaman Lainnya		
623	5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.3.04.04.01.0005.	Jaringan Air Minum Lainnya		
624	5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya		
625	5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.3.05.01.01.0001.	Buku Umum		
626	5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	1.3.05.01.01.0003.	Buku Agama		
627	5.2.05.01.01.0004.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.3.05.01.01.0004.	Buku Ilmu Sosial		
628	5.2.05.01.01.0005.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa		
629	5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.3.05.01.01.0006.	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		
630	5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
631	5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		
632	5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.3.05.01.01.0009.	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		
633	5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.3.05.01.01.0012.	Bahan Perpustakaan		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
				Tercetak Lainnya		
634	5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	1.3.05.01.02.0001.	Audio Visual		
635	5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.3.05.02.01.0001.	Alat Musik		
636	5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.3.05.02.01.0003.	Alat Peraga Kesenian		
637	5.2.05.04.01.0001.	Belanja Modal Ikan Budidaya	1.3.05.04.01.0001.	Ikan Budidaya		
638	5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.5.03.01.01.0005.	Software		
639	5.2.05.08.01.0006.	Belanja Modal Kajian	1.5.03.01.01.0006.	Kajian		
640	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa		
641	5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga			8.4.01.01.01.0001 .	Beban Tidak Terduga
642	5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa			8.2.01.01.03.0001 .	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
643	5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			8.2.01.02.01.0001 .	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
644	5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.01.0001 .	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
645	5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.02.0001 .	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
646	6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD			3.1.02.04.01.0001 .	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada satu tahun anggaran yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.333.507.226.175,09	989.275.275.868,02

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023. Anggaran pendapatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.275.091.033.815,11 dengan realisasi sebesar Rp1.333.507.226.175,09 atau sebesar 104,58% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp344.231.950.307,07 atau sebesar 34,80%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	86.318.125.706,11	97.981.165.498,09	113,51	66.678.873.457,02	31.302.292.041,07	46,94
2	Pendapatan Transfer	1.186.251.908.109,00	1.234.205.370.323,00	104,04	922.596.402.411,00	311.608.967.912,00	33,78
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.521.000.000,00	1.320.690.354,00	52,39	0,00	1.320.690.354,00	100,00
Jumlah		1.275.091.033.815,11	1.333.507.226.175,09	104,58	989.275.275.868,02	344.231.950.307,07	34,80

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp97.981.165.498,09. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp31.302.292.041,07 atau 46,94%. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah	35.404.230.000,00	54.850.557.254,00	154,93	12.561.988.365,52	42.288.568.888,48	336,64
2	Retribusi Daerah	725.135.000,00	1.049.361.910,00	144,71	963.777.940,00	85.583.970,00	8,88
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.927.016.847,00	6.927.016.847,00	100,00	7.043.060.400,00	(116.043.553,00)	(1,65)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Lain-lain PAD yang Sah	43.261.743.859,11	35.154.229.487,09	81,26	46.110.046.751,50	(10.955.817.264,41)	(23,76)
Jumlah		86.318.125.706,11	97.981.165.498,09	113,51	66.678.873.457,02	31.302.292.041,07	46,94

7.5.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar Rp54.850.557.254,00 atau sebesar 154,93% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022, realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp42.288.568.888,48 atau sebesar 336,64%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	450.000.000,00	722.504.512,00	160,56	174.549.315,00	547.955.197,00	313,93
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.766.215.705,00	138,31	2.240.043.747,00	526.171.958,00	23,49
3	Pajak Hiburan	19.226.000,00	17.566.200,00	91,37	8.943.600,00	8.622.600,00	96,41
4	Pajak Reklame	103.000.000,00	143.346.250,00	139,17	110.915.800,00	32.430.450,00	29,24
5	Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000,00	6.308.949.822,00	126,18	7.607.124.621,00	(1.298.174.799,00)	(17,07)
6	Pajak Parkir	6.568.000,00	2.550.000,00	38,82	5.251.500,00	(2.701.500,00)	(51,44)
7	Pajak Air Tanah	2.363.000,00	3.000.000,00	126,96	3.800.000,00	(800.000,00)	(21,05)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.472.583.000,00	39.128.097.806,00	174,11	279.702.646,00	38.848.395.160,00	13.889,18
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.367.930.000,00	1.374.432.700,00	100,48	1.383.397.684,00	(8.964.984,00)	(0,65)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.982.560.000,00	4.383.894.259,00	110,08	748.259.452,52	3.635.634.806,48	485,88
Jumlah		35.404.230.000,00	54.850.557.254,00	154,93	12.561.988.365,52	42.288.568.888,48	336,64

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Anggaran pendapatan pajak hotel pada tahun 2023 adalah sebesar Rp450.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp722.504.512,00 atau sebesar 160,56% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak hotel mengalami kenaikan sebesar Rp547.955.197,00 dibandingkan tahun 2022 atau sebesar 313,93%. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak hotel yaitu meningkatnya hunian hotel karena pengaruh jumlah kunjungan wisata dan adanya ekstensifikasi melalui sosialisasi sehingga wajib pajak aktif melakukan penyetoran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Anggaran pendapatan pajak restoran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.766.215.705,00 atau sebesar 138,31% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp526.171.958,00

dibandingkan tahun 2022 atau sebesar 23,49%. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak restoran karena kesadaran wajib pajak aktif melakukan penyetoran pajak sesuai dengan kewajiban pajak dan banyaknya penyelenggaraan kegiatan.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Anggaran pendapatan pajak hiburan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp19.226.000,00, dengan realisasi sebesar Rp17.566.200,00 atau sebesar 91,37% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp8.622.600,00 dibandingkan tahun 2022 atau sebesar 96,41%.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Anggaran pendapatan pajak reklame pada tahun 2023 adalah sebesar Rp103.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp143.346.250,00 atau sebesar 139,17% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak reklame dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.430.450,00 atau sebesar 29,24%. Faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak reklame dikarenakan semakin sadarnya pengusaha untuk mempromosikan atau mengenalkan barang dan jasa pada masyarakat umum melalui media reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Anggaran pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp6.308.949.822,00 atau sebesar 126,18% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi pajak penerangan jalan dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(1.298.174.799,00) atau sebesar (17,07)%.

f) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Anggaran pendapatan pajak parkir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp6.568.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.550.000,00 atau sebesar 38,82% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak parkir mengalami penurunan sebesar Rp(2.701.500,00) dibandingkan tahun 2022 atau sebesar (51,44)%. Salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan pajak parkir dikarenakan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Natuna belum optimal.

g) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Anggaran pendapatan pajak air tanah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.363.000,00, dengan realisasi adalah sebesar Rp3.000.000,00 atau sebesar 126,96% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak air tanah mengalami penurunan sebesar Rp(800.000,00) dibandingkan tahun 2022 atau sebesar (21,05)%. Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya target pendapatan pajak air tanah dikarenakan adanya peningkatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Anggaran pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp22.472.583.000,00, dengan realisasi sebesar

Rp39.128.097.806,00 atau sebesar 174,11% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.848.395.160,00 atau sebesar 13.889,18%. Faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu karena telah dilaksanakan kegiatan eksplorasi tambang pasir kuarsa.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.367.930.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.374.432.700,00 atau sebesar 100,48% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan sebesar Rp(8.964.984,00) dibandingkan tahun 2022 atau sebesar (0,65)%.

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Anggaran Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.982.560.000,00, dengan realisasi sebesar Rp4.383.894.259,00 atau sebesar 110,08% dari anggaran yang ditetapkan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.635.634.806,48 atau sebesar 485,88%.

Pendapatan pajak di Pemerintah Kabupaten Natuna dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Berdasarkan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan.

Sedangkan pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assessment* yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Secara umum meningkatnya Pajak Daerah dikarenakan adanya Ekstensifikasi dan Intensifikasi melalui optimalisasi peningkatan potensi sumber penerimaan daerah dan sosialisasi serta pengawasan dan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang sudah ada.

7.5.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.049.361.910,00 atau sebesar 144,71% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan pendapatan retribusi tahun 2022, pendapatan Retribusi 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.583.970,00 atau sebesar 8,88%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	402.036.000,00	667.300.700,00	165,98	718.864.500,00	(51.563.800,00)	(7,17)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.000.000,00	192.582.500,00	160,49	104.794.500,00	87.788.000,00	83,77
3	Retribusi Penyediaan	15.417.000,00	17.600.000,00	114,16	15.150.000,00	2.450.000,00	16,17

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	dan/atau Penyedotan Kakus						
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.349.000,00	12.390.000,00	55,44	29.578.000,00	(17.188.000,00)	(58,11)
5	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	3.265.000,00	100,00	0,00	3.265.000,00	100,00
6	Retribusi Penyeberangan di Air	65.333.000,00	36.000.000,00	55,10	49.800.000,00	(13.800.000,00)	(27,71)
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	120.223.710,00	120,22	45.590.940,00	74.632.770,00	163,70
Jumlah		725.135.000,00	1.049.361.910,00	144,71	963.777.940,00	85.583.970,00	8,88

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp402.036.000,00, dengan realisasi sebesar Rp667.300.700,00 atau sebesar 165,98% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami penurunan sebesar Rp(51.563.800,00) dibandingkan tahun 2022 atau sebesar (7,17)%. Retribusi pelayanan kesehatan didapatkan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan dicatat pada Dinas Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan meningkatnya objek retribusi berupapelayanan kesehatan di setiap Puskesmas yang dikenakan biaya/tarif, dikelompokkan kedalam pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran Pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp120.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp192.582.500,00 atau sebesar 160,49% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp87.788.000,00, dibandingkan tahun 2022 atau sebesar 83,77%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu faktor pencapaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan bertambahnya armada angkut, kualitas pelayanan serta tarif retribusi yang tidak terlalu tinggi menyebabkan kemampuan membayar masyarakat menjadi meningkat dari tahun sebelumnya.

c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Anggaran Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2023 adalah sebesar Rp15.417.000,00. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp17.600.000,00 atau sebesar 114,16% dari anggaran. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.450.000,00 atau sebesar 16,17%. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus secara teknis dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp22.349.000,00, dengan realisasi sebesar Rp12.390.000,00 atau sebesar 55,44% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(17.188.000,00) atau sebesar (58,11)%. Pendapatan pelayanan tera/tera ulang ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada tahun 2023 tidak mencapai target disebabkan karena pelaksanaan tera dan tera ulang tidak dapat dilaksanakan setiap tahun untuk objek yang telah dibubuhkan atau yang telah dilaksanakan tera ulangnya pada tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

e) Retribusi Tempat Pelelangan

Anggaran Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.265.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.265.000,00 atau sebesar 100,00%. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

f) Retribusi Penyeberangan Air

Anggaran Pendapatan Retribusi Penyeberangan Air pada tahun 2023 adalah sebesar Rp65.333.000,00. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp36.000.000,00 atau sebesar 55,10% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Penyeberangan Air dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(13.800.000,00) atau sebesar (27,71)%. Pendapatan Retribusi Penyeberangan Air dikelola oleh Dinas Perhubungan. Tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi Penyeberangan Air dari target yang ditetapkan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana di lapangan yang kurang memadai dan tidak merata disetiap jalur penyeberangan air.

g) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Anggaran Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp100.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp120.223.710,00 atau sebesar 120,22% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp74.632.770,00 atau sebesar 163,70 %. Retribusi izin mendirikan bangunan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar Rp6.927.016.847,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan deviden bagian Pemerintah Kabupaten Natuna atas penyertaan modal ke Bank Riau Kepri Syariah.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	6.927.016.847,00	6.927.016.847,00	100,00	7.043.060.400,00	(116.043.553,00)	(1,65)
Jumlah		6.927.016.847,00	6.927.016.847,00	100,00	7.043.060.400,00	(116.043.553,00)	(1,65)

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 adalah sebesar

Rp35.154.229.487,09 atau sebesar 81,26% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibanding Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(11.015.910.236,41) atau sebesar (23,89)%. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	517.743.762,00	(517.743.762,00)	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	44.950.000,00	44.950.000,00	100	0,00	44.950.000,00	100,00
3	Jasa Giro	2.323.470.178,11	877.434.099,73	37,76	563.696.705,63	313.737.394,10	55,66
4	Pendapatan Bunga	3.173.570.703,00	60.092.972,00	1,89	0,00	60.092.972,00	100,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.549.476.332,00	2.153.836.455,59	60,68	2.161.140.529,64	(7.304.074,05)	(0,34)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	68.899.701,31	1377,99	219.504.780,91	(150.605.079,60)	(68,61)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.106.000,00	74.142.763,00	134,55	62.597.813,25	11.544.949,75	18,44
8	Pendapatan dari Pengembalian	54.500.000,00	70.061.217,46	128,55	266.255.541,93	(196.194.324,47)	(73,69)
9	Pendapatan BLUD	27.000.000.000,00	25.007.928.655,00	92,62	36.344.883.376,14	(11.336.954.721,14)	(31,19)
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.935.670.646,00	6.671.064.675,00	96,18	5.941.494.107,00	729.570.568,00	12,28
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	125.818.948,00	104,85	32.730.135,00	93.088.813,00	284,41
Jumlah		43.261.743.859,11	35.154.229.487,09	81,26	46.110.046.751,50	(10.955.817.264,41)	(23,76)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2023 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(517.743.762,00) atau sebesar (100,00)%. Penurunan Pendapatan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan disebabkan karena tidak terjadi penjualan BMD yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp44.950.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp44.950.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp44.950.000,00 atau sebesar 100,00%.

c) Penerimaan Jasa Giro

Anggaran Penerimaan Jasa Giro pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.323.470.178,11 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp877.434.099,73 atau sebesar 37,76% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, Realisasi Penerimaan Jasa Giro mengalami kenaikan sebesar Rp313.737.394,10 atau sebesar 55,66% Adapun rincian penerimaan jasa giro sebagai berikut:

Tabel 7.5.7 Penerimaan Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.293.470.178,11	443.499.768,73	19,34	534.542.488,00	(91.042.719,27)	(17,03)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	30.000.000,00	58.378.313,00	194,59	27.755.995,00	30.622.318,00	110,33
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	177.358,63	(177.358,63)	(100,00)
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	1.220.864,00	(1.220.864,00)	(100,00)
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	375.556.018,00	0,00	0,00	375.556.018,00	100,00
Jumlah		2.323.470.178,11	877.434.099,73	37,76	563.696.705,63	313.737.394,10	55,66

d) Pendapatan Bunga

Anggaran Pendapatan Bunga pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.173.570.703,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp60.092.972,00 atau sebesar 1,89% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Bunga dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp60.092.972,00 atau sebesar 100,00%.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.549.476.332,00. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.153.836.455,59 atau sebesar 60,68% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(7.304.074,05) atau sebesar (0,34)%. Adapun rincian penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	3.287.000,00	0,00	147.691.250,00	(144.404.250,00)	(97,77)
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.549.476.332,00	2.150.549.455,59	60,59	2.013.449.279,64	137.100.175,95	6,81
Jumlah		3.549.476.332,00	2.153.836.455,59	60,68	2.161.140.529,64	(7.304.074,05)	(0,34)

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp68.899.701,31 atau sebesar 1.377,99% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2022 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan sebesar Rp(150.605.079,60) atau sebesar (68,61)%.

g) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp55.106.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp74.142.763,00 atau sebesar 134,55% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar

Rp11.544.949,75 atau sebesar 18,44%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Pendapatan Denda Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.200.000,00	1.107.863,00	92,32	184.587,00	923.276,00	500,18
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.100.000,00	5.312.385,00	252,97	4.062.132,00	1.250.253,00	30,78
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	200.000,00	229.540,00	114,77	44.896,00	184.644,00	411,27
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	500.000,00	562.960,00	112,59	689.420,00	(126.460,00)	(18,34)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	80.000,00	81.000,00	101,25	69.000,00	12.000,00	17,39
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	26.000,00	110.000,00	423,08	52.000,00	58.000,00	111,54
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	103.786,00	0,00	18.686,00	85.100,00	455,42
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000,00	65.494.641,00	130,99	56.805.744,00	8.688.897,00	15,30
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00	1.140.588,00	114,06	671.348,25	469.239,75	69,90
Jumlah		55.106.000,00	74.142.763,00	134,55	62.597.813,25	11.544.949,75	18,44

1) Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hotel pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.200.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.107.863,00 atau sebesar 92,32% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp923.276,00 atau sebesar 500,18%.

2) Pendapatan Denda Pajak Restoran

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Restoran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.100.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.312.385,00 atau sebesar 252,97% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp1.250.253,00 atau sebesar 30,78%.

3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hiburan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp200.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp229.540,00 atau sebesar 114,77%. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi pendapatan denda pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp184.644,00 atau sebesar 411,27%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	228.040,00	0,00	41.596,00	186.444,00	100,00
3	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	1.500,00	0,00	3.300,00	(1.800,00)	(54,55)
Jumlah		200.000,00	229.540,00	114,77	44.896,00	184.644,00	411,27

- 4) **Pendapatan Denda Pajak Reklame**
 Anggaran Pendapatan Denda Pajak Reklame pada tahun 2023 adalah sebesar Rp500.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp562.960,00 atau sebesar 112,59% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp(126.460,00) atau sebesar (18,34)%.
- 5) **Pendapatan Denda Pajak Parkir**
 Anggaran Pendapatan Denda Pajak Parkir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp80.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp81.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp12.000,00 atau sebesar 17,39%.
- 6) **Pendapatan Denda Pajak Air Tanah**
 Anggaran Pendapatan Denda Pajak Air Tanah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp26.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp110.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp58.000,00 atau sebesar 111,54%.
- 7) **Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**
 Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2023 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp103.786,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan sebesar Rp85.100,00 atau sebesar 455,42%.
- 8) **Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**
 Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp50.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp65.494.641,00 atau sebesar 130,99 % dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami kenaikan sebesar Rp8.688.897,00 atau sebesar 15,30%.
- 9) **Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
 Anggaran Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.140.588,00 atau sebesar 114,06% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp469.239,75 atau sebesar 69,90%. Rincian Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000,00	43.523,00	4,35	262.500,00	(218.977,00)	(83,42)
2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	1.097.065,00	0,00	408.848,25	688.216,75	100,00
Jumlah		1.000.000,00	1.140.588,00	114,06	671.348,25	469.239,75	69,90

h) Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp54.500.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp70.061.217,46 atau sebesar 128,55% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2022. Pendapatan dari Pengembalian mengalami penurunan sebesar Rp(196.194.324,47) atau sebesar (73,69)%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 7.5.12 Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.000.000,00	53.497.162,00	106,99	211.673.430,93	(158.176.268,93)	(74,73)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.500.000,00	6.839.200,00	151,98	54.582.111,00	(47.742.911,00)	(87,47)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	7.990.000,00	0,00	0,00	7.990.000,00	100,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.484.345,00	0,00	0,00	1.484.345,00	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	250.510,46	0,00	0,00	250.510,46	100,00
Jumlah		54.500.000,00	70.061.217,46	128,55	266.255.541,93	(196.194.324,47)	(73,69)

i) Pendapatan BLUD

Anggaran Pendapatan BLUD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp27.000.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp25.007.928.655,00 atau sebesar 92,62% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding tahun 2022 Pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp(11.336.954.721,14) atau sebesar (31,19)%. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD.

j) Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN tahun 2023 adalah sebesar Rp6.935.670.646,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp6.671.064.675,00 atau 96,18% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Dana Kapitasi JKN mengalami kenaikan sebesar Rp729.570.568,00 atau 12,28%. Pendapatan Dana Kapitasi JKN merupakan pendapatan dana kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

k) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2023 sebesar Rp120.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp125.818.948,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir mengalami kenaikan sebesar Rp93.088.813,00 atau 284,41%.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp1.234.205.370.323,00 atau sebesar 104,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.186.251.908.109,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp311.613.257.912,00 atau sebesar 33,78%. Kenaikan Pendapatan transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2022 yang direalisasikan penyalurannya di tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	1.001.210.892.996,00	1.045.714.855.167,00	104,45	813.001.270.286,00	232.713.584.881,00	28,62
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	84.525.422.800,00	84.524.748.000,00	100,00	54.851.547.000,00	29.673.201.000,00	54,10
3	Transfer Pemerintah Provinsi	100.515.592.313,00	103.965.767.156,00	103,43	54.743.585.125,00	49.222.182.031,00	89,91
Jumlah		1.186.251.908.109,00	1.234.205.370.323,00	104,04	922.596.402.411,00	311.608.967.912,00	33,78

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.045.714.855.167,00 atau sebesar 104,45% dari yang dianggarkan Rp1.001.210.892.996,00. Dibandingkan tahun 2022, Dana Perimbangan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp232.713.584.881,00 atau sebesar 28,62%. Kenaikan pendapatan transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2022 yang direalisasikan penyalurannya di tahun 2023. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	88.441.022.988,00	132.068.098.913,00	149,33	74.298.556.387,00	57.769.542.526,00	77,75
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	317.928.596.608,00	332.799.575.408,00	104,68	240.346.392.264,00	92.453.183.144,00	38,47
3	Dana Alokasi Umum	407.503.851.000,00	407.458.406.092,00	99,99	390.559.258.000,00	16.899.148.092,00	4,33
4	Dana Alokasi Khusus	187.337.422.400,00	173.388.774.754,00	92,55	107.797.063.635,00	65.591.711.119,00	60,85
Jumlah		1.001.210.892.996,00	1.045.714.855.167,00	104,45	813.001.270.286,00	232.713.584.881,00	28,62

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp88.441.022.988,00 dengan realisasi sebesar Rp132.068.098.913,00 atau sebesar 149,33% dari anggaran. Adanya kenaikan realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan adanya realisasi kurang bayar yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.15 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi	75.730.265.192,00	117.679.129.192,00	155,39	62.946.704.957,00	54.732.424.235,00	86,95

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan	%
2	dan Bangunan DBH PPh Pasal 21	11.990.205.745,00	13.264.040.745,00	110,62	0,00	13.264.040.745,00	100,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	699.497.510,00	1.116.358.510,00	159,59	11.342.265.000,00	(10.225.906.490,00)	(90,16)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.054.541,00	8.570.466,00	40,71	9.586.430,00	(1.015.964,00)	(10,60)
Jumlah		88.441.022.988,00	132.068.098.913,00	149,33	74.298.556.387,00	57.769.542.526,00	77,75

7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tahun 2023 adalah sebesar Rp317.928.596.608,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp332.799.575.408,00 atau sebesar 104,68% dari anggaran. Adanya kenaikan realisasi dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) disebabkan adanya realisasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	133.503.728.440,00	167.763.830.370,00	125,66	64.903.826.392,00	102.860.003.978,00	158,48
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	174.813.086.440,00	155.393.281.310,00	88,89	169.949.951.587,00	(14.556.670.277,00)	(8,57)
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.154.347.832,00	1.185.029.832,00	102,66	3.479.622.285,00	(2.294.592.453,00)	(65,94)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	25.686.685,00	25.686.685,00	100,00	54.681.000,00	(28.994.315,00)	(53,02)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.431.747.211,00	8.431.747.211,00	100,00	1.958.311.000,00	6.473.436.211,00	330,56
Jumlah		317.928.596.608,00	332.799.575.408,00	104,68	240.346.392.264,00	92.453.183.144,00	38,47

7.5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum tahun 2023 sebesar Rp407.503.851.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp407.458.406.092,00 atau sebesar 99,99%. Dibandingkan dengan tahun 2022, Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar Rp16.899.148.092,00 atau sebesar 4,33%, dimana penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2022 adalah sebesar Rp390.559.258.000,00.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun 2023 sebesar Rp187.337.422.400,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp173.388.774.754,00 atau sebesar 92,55%. Dibandingkan dengan tahun 2022, Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp65.591.711.119,00 atau sebesar 60,85%, dimana penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2022 adalah sebesar Rp107.797.063.635,00. Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.17 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Alokasi Khusus – Fisik	119.489.057.000,00	115.479.222.997,00	96,64	57.090.150.721,00	58.389.072.276,00	102,28
2	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	67.848.365.400,00	57.909.551.757,00	85,35	50.706.912.914,00	7.202.638.843,00	14,20
Jumlah		187.337.422.400,00	173.388.774.754,00	92,55	107.797.063.635,00	65.591.711.119,00	60,85

1. Dana Alokasi Khusus - Fisik

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2023 adalah sebesar Rp119.489.057.000,00, sedangkan realisasinya adalah Rp115.479.222.997,00 atau sebesar 96,64% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kenaikan Rp58.389.072.276,00 atau sebesar 102,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	666.252.000,00	658.914.850,00	98,90	0,00	658.914.850,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.919.089.000,00	3.911.575.277,00	99,81	3.160.024.074,00	751.551.203,00	23,78
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.031.903.000,00	8.926.183.112,00	98,83	3.854.777.484,00	5.071.405.628,00	131,56
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	763.625.702,00	(763.625.702,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	34.883.493.000,00	33.477.108.239,00	95,97	8.846.552.972,00	24.630.555.267,00	278,42
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.564.988.978,00	(3.564.988.978,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	583.802.556,00	(583.802.556,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	0,00	0,00	14.685.729.157,00	(14.685.729.157,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	94.072.500,00	(94.072.500,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	19.148.122.000,00	18.058.916.261,00	94,31	0,00	18.058.916.261,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.170.791.504,00	(1.170.791.504,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.163.832.346,00	(2.163.832.346,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.000.001.000,00	849.786.122,00	84,98	0,00	849.786.122,00	100,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-	42.079.437.000,00	41.259.806.211,00	98,05	8.430.609.354,00	32.829.196.857,00	389,40

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Jalan						
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.245.200.000,00	(4.245.200.000,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.083.429.000,00	(5.083.429.000,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	442.715.094,00	(442.715.094,00)	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.783.268.000,00	7.540.430.050,00	96,88	0,00	7.540.430.050,00	100,00
19	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	977.492.000,00	796.502.875,00	81,48	0,00	796.502.875,00	100,00
Jumlah		119.489.057.000,00	115.479.222.997,00	96,64	57.090.150.721,00	58.389.072.276,00	102,28

2. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2023 adalah sebesar Rp67.848.365.400,00 dengan realisasi sebesar Rp57.909.551.757,00 atau sebesar 85,35% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2022, Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp7.202.638.843,00 atau sebesar 14,20%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	15.601.860.000,00	15.390.204.810,00	98,64	14.156.066.940,00	1.234.137.870,00	8,72
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	955.000.000,00	955.000.000,00	100,00	560.000.000,00	395.000.000,00	70,54
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.790.771.000,00	20.579.997.200,00	98,99	18.708.385.360,00	1.871.611.840,00	10,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.234.000.000,00	1.171.750.000,00	94,96	1.016.000.000,00	155.750.000,00	15,33
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.446.224.400,00	1.387.495.000,00	95,94	1.282.824.400,00	104.670.600,00	8,16
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.350.440.000,00	2.276.470.400,00	96,85	2.300.299.000,00	(23.828.600,00)	(1,04)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Keseluruhan	344.590.000,00	344.590.000,00	100,00	163.500.000,00	181.090.000,00	110,76
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.695.127.000,00	6.757.304.900,00	45,98	10.140.727.429,00	(3.383.422.529,00)	(33,36)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.327.040.000,00	2.489.993.800,00	74,84	1.180.876.075,00	1.309.117.725,00	110,86
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	4.369.370.000,00	4.270.152.492,00	97,73	317.418.680,00	3.952.733.812,00	1.245,27
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.083.368.000,00	997.034.200,00	92,03	467.528.580,00	529.505.620,00	113,26
12	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.650.575.000,00	1.289.558.955,00	78,13	413.286.450,00	876.272.505,00	212,03
Jumlah		67.848.365.400,00	57.909.551.757,00	85,35	50.706.912.914,00	7.202.638.843,00	14,20

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp84.525.422.800,00 dengan realisasi sebesar Rp84.524.748.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2022, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp29.673.201.000,00 atau sebesar 54,10%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Penyesuaian	30.674.988.800,00	30.674.314.000,00	100,00	3.893.265.000,00	26.781.049.000,00	687,88
2	Dana Desa	53.850.434.000,00	53.850.434.000,00	100,00	50.958.282.000,00	2.892.152.000,00	5,68
Jumlah		84.525.422.800,00	84.524.748.000,00	100,00	54.851.547.000,00	29.673.201.000,00	54,10

7.5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Yang dimaksud sebagai Dana Penyesuaian adalah Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023 adalah sebesar Rp30.674.988.800,00 dengan realisasi sebesar Rp30.674.314.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2022 Dana Insentif Daerah (DID) mengalami kenaikan sebesar Rp26.781.049.000,00 atau sebesar 687,88%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Dana Insentif Kinerja yang pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, yang besarnya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

7.5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Anggaran Dana Desa tahun 2023 adalah sebesar Rp53.850.434.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.850.434.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2022 Dana Desa mengalami kenaikan sebesar Rp2.892.152.000,00 atau sebesar 5,68%.

7.5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 adalah sebesar Rp100.515.592.313,00 dengan realisasi sebesar Rp103.965.767.156,00 atau sebesar 103,43% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2022 Transfer Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp49.222.182.031,00 atau sebesar 89,91%.

Tabel 7.5.21 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.515.592.313,00	102.965.767.156,00	103,47	53.455.085.125,00	49.510.682.031,00	92,62
2	Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.288.500.000,00	(288.500.000,00)	(22,39)
Jumlah		100.515.592.313,00	103.965.767.156,00	103,43	54.743.585.125,00	49.222.182.031,00	89,91

7.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp99.515.592.313,00 dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp102.965.767.156,00 atau sebesar 103,47% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp49.510.682.031,00 atau sebesar 92,62%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.22 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.353.620.428,00	11.552.852.149,00	101,75	10.967.683.161,00	585.168.988,00	100,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.961.488.000,00	9.695.196.256,00	121,78	6.852.824.208,00	2.842.372.048,00	41,48
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.057.895.343,00	71.516.596.241,00	103,56	25.259.290.881,00	46.257.305.360,00	183,13
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	41.462.524,00	36.803.568,00	88,76	33.380.992,00	3.422.576,00	10,25
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.101.126.018,00	10.164.318.942,00	91,56	10.341.905.883,00	(177.586.941,00)	(1,72)
Jumlah		99.515.592.313,00	102.965.767.156,00	103,47	53.455.085.125,00	49.510.682.031,00	92,62

7.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp(288.500.000,00) atau sebesar (22,39)%. Bantuan Keuangan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 adalah sebesar Rp1.320.690.354,00 atau sebesar 52,39% dari yang dianggarkan Rp2.521.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp1.320.690.354,00 atau sebesar 100,00%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	2.478.000.000,00	1.254.000.000,00	50,61	0,00	1.254.000.000,00	100,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	43.000.000,00	66.690.354,00	155,09	0,00	66.690.354,00	100,00
	Jumlah	2.521.000.000,00	1.320.690.354,00	52,39	0,00	1.320.690.354,00	100,00

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2023 adalah sebesar Rp1.254.000.000,00 atau sebesar 50,61% dari yang dianggarkan Rp2.478.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Hibah mengalami kenaikan 100,00%. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk bidang sanitasi.

7.5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 adalah sebesar Rp66.690.354,00 atau sebesar 155,09% dari yang dianggarkan Rp43.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami kenaikan 100,00%. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagian besar berisikan pengembalian atas dana BOP PAUD yang diterima oleh sekolah swasta.

7.5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.054.872.341.106,59	910.629.078.863,28

Realisasi Belanja tahun 2023 sebesar Rp1.054.872.341.106,59 atau 90,90% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.160.434.491.212,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi Belanja mengalami kenaikan sebesar Rp144.243.262.243,31 atau sebesar 15,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Operasi	874.817.161.367,64	788.943.176.676,47	90,18	728.446.072.391,69	60.497.104.284,78	8,30
2.	Belanja Modal	283.117.329.844,36	264.281.035.089,12	93,35	180.851.143.808,59	83.429.891.280,53	46,13
3.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.648.129.341,00	65,93	1.331.862.663,00	316.266.678,00	23,75
	Jumlah	1.160.434.491.212,00	1.054.872.341.106,59	90,90	910.629.078.863,28	144.243.262.243,31	15,84

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp788.943.176.676,47 atau sebesar 90,18% dari anggaran yang sudah ditetapkan Rp874.817.161.367,64. Dibandingkan

dengan tahun 2022, realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp60.497.104.284,78 atau sebesar 8,30%. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Pegawai	455.925.566.225,64	418.913.978.804,00	91,88	380.605.113.177,00	38.308.865.627,00	10,07
2.	Belanja Barang dan Jasa	378.182.119.398,00	330.784.746.050,54	87,47	314.912.697.738,35	15.872.048.312,19	5,04
3.	Belanja Hibah	38.233.275.744,00	37.301.653.821,93	97,56	27.753.967.108,00	9.547.686.713,93	34,40
4.	Belanja Bantuan Sosial	2.476.200.000,00	1.942.798.000,00	78,46	5.174.294.368,34	(3.231.496.368,34)	(62,45)
Jumlah		874.817.161.367,64	788.943.176.676,47	90,18	728.446.072.391,69	60.497.104.284,78	8,30

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp418.913.978.804,00 atau sebesar 91,88% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp38.308.865.627,00, atau sebesar 10,07%. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 7.5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	162.365.875.773,64	133.143.065.380,00	82,00	132.072.544.886,00	1.070.520.494,00	0,81
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	15.594.583.162,00	15.486.825.100,00	99,31	4.991.709.600,00	10.495.115.500,00	210,25
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.830.347.188,00	12.654.306.809,00	98,63	12.523.554.257,00	130.752.552,00	1,04
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.377.358.037,00	1.083.190.736,00	78,64	358.387.646,00	724.803.090,00	202,24
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.314.027.400,00	5.219.371.000,00	98,22	4.995.246.000,00	224.125.000,00	4,49
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.314.389.600,00	8.190.491.000,00	98,51	7.062.181.000,00	1.128.310.000,00	15,98
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	658.438.000,00	634.700.000,00	96,39	293.040.000,00	341.660.000,00	116,59
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.113.916.400,00	3.045.312.000,00	97,80	3.336.644.000,00	(291.332.000,00)	(8,73)
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	353.522.000,00	346.240.000,00	97,94	19.530.000,00	326.710.000,00	1.672,86
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.620.747.500,00	8.498.977.818,00	98,59	8.507.032.560,00	(8.054.742,00)	(0,09)
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.075.721.380,00	927.627.780,00	86,23	302.860.440,00	624.767.340,00	206,29
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.913.690,00	48.143.343,00	59,50	201.184.669,00	(153.041.326,00)	(76,07)
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.347.251,00	1.994.033,00	5,49	1.992.173,00	1.860,00	0,09
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.780.584,00	279.529,00	3,59	80.185,00	199.344,00	248,61
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.087.264.315,00	10.882.407.733,00	98,15	10.725.796.318,00	156.611.415,00	1,46
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	929.184.715,00	875.704.341,00	94,24	252.694.967,00	623.009.374,00	246,55
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	313.383.327,00	272.955.144,00	87,10	271.820.125,00	1.135.019,00	0,42

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	42.046.694,00	34.240.466,00	81,43	10.592.568,00	23.647.898,00	223,25
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	868.049.881,00	819.436.154,00	94,40	814.900.617,00	4.535.537,00	0,56
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	111.043.878,00	102.614.690,00	92,41	31.776.368,00	70.838.322,00	222,93
22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	34.394.000,00	1.394.316,00	4,05	0,00	1.394.316,00	100,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.090.416.373,00	51.559.074.089,00	98,98	46.474.555.219,00	5.084.518.870,00	10,94
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.103.759.691,00	1.027.696.039,00	93,11	56.128.682,00	971.567.357,00	1.730,96
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	4.150.615.622,00	4.097.637.755,00	98,72	3.992.036.461,00	105.601.294,00	2,65
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	483.254.810,00	476.461.410,00	98,59	161.311.373,00	315.150.037,00	195,37
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.929.231.901,00	4.882.099.223,00	99,04	4.202.550.954,00	679.548.269,00	16,17
28	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	316.046.185,00	308.925.509,00	97,75	14.075.147,00	294.850.362,00	2.094,83
29	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.723.530.133,00	2.663.820.372,00	97,81	2.458.625.386,00	205.194.986,00	8,35
30	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	10.000.000,00	7.350.203,00	73,50	0,00	7.350.203,00	100,00
31	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	100.561.061.041,00	99.345.658.955,00	98,79	91.382.796.464,00	7.962.862.491,00	8,71
32	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.276.201.945,00	4.024.229.693,00	94,11	1.068.899.505,00	2.955.330.188,00	276,48
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	14.999.999,00	(14.999.999,00)	(100,00)
34	Belanja TPG PNSD	20.790.771.000,00	19.740.229.600,00	94,95	19.394.722.000,00	345.507.600,00	1,78
35	Belanja TKG PNSD	1.446.224.400,00	1.417.151.000,00	97,99	1.227.234.600,00	189.916.400,00	15,48
36	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.234.000.000,00	1.199.500.000,00	97,20	1.016.000.000,00	183.500.000,00	18,06
37	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.361.187.765,00	2.293.148.238,00	97,12	1.779.183.275,00	513.964.963,00	28,89
38	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	15.637.947.371,00	14.295.691.185,00	91,42	11.795.972.014,00	2.499.719.171,00	21,19
39	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	234.550.000,00	187.896.643,00	80,11	123.700.000,00	64.196.643,00	51,90
40	Belanja Honorarium	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	88.600.000,00	16.400.000,00	18,51

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)						
41	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	24.925.000,00	24.500.000,00	98,29	9.625.000,00	14.875.000,00	154,55
42	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.018.630.000,00	990.705.000,00	97,26	868.191.250,00	122.513.750,00	14,11
43	Belanja Uang Representasi DPRD	454.369.000,00	451.290.000,00	99,32	451.290.000,00	0,00	0,00
44	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.882.000,00	60.039.700,00	98,62	60.197.200,00	(157.500,00)	(0,26)
45	Belanja Tunjangan Beras DPRD	65.150.000,00	64.221.840,00	98,58	65.090.880,00	(869.040,00)	(1,34)
46	Belanja Uang Paket DPRD	39.000.000,00	38.682.000,00	99,18	38.682.000,00	0,00	0,00
47	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	659.110.000,00	654.370.500,00	99,28	654.370.500,00	0,00	0,00
48	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.437.000,00	62.026.650,00	97,78	63.396.900,00	(1.370.250,00)	(2,16)
49	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00	5.481.000,00	36,54	16.914.975,00	(11.433.975,00)	(67,60)
50	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.587.088.000,00	1.524.600.000,00	96,06	1.512.000.000,00	12.600.000,00	0,83
51	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	378.000.000,00	100,00	378.000.000,00	0,00	0,00
52	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	67.988.000,00	66.599.596,00	97,96	66.599.596,00	0,00	0,00
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	41.232.000,00	39.965.964,00	96,93	39.972.264,00	(6.300,00)	(0,02)
54	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.935.000,00	928.368,00	47,98	928.368,00	0,00	0,00
55	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.804.000,00	2.785.104,00	73,22	2.785.104,00	0,00	0,00
56	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	101.868.000,00	100.200.000,00	98,36	100.200.000,00	0,00	0,00
57	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.910.520.000,00	2.781.000.000,00	95,55	2.754.000.000,00	27.000.000,00	0,98
58	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.845.000,00	18.725.000,00	24,37	0,00	18.725.000,00	100,00
59	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.024.000,00	54.600.000,00	83,97	54.600.000,00	0,00	0,00
60	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.824.000,00	7.644.000,00	70,62	7.644.000,00	0,00	0,00
61	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	115.444.000,00	98.280.000,00	85,13	98.280.000,00	0,00	0,00
62	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.203.000,00	7.531.680,00	73,82	7.531.680,00	0,00	0,00
63	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.233.600,00	213.034,00	9,54	920.400,00	(707.366,00)	(76,85)
64	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.001.000,00	1.000,00	0,05	1.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
65	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.540.000,00	5.503.680,00	72,99	32.446.322,00	(26.942.642,00)	(83,04)
66	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.113.000,00	112.320,00	10,09	112.320,00	0,00	0,00
67	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.339.000,00	336.960,00	25,17	336.960,00	0,00	0,00
68	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.647.576.000,00	716.016.122,00	43,46	546.060.000,00	169.956.122,00	31,12
69	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.619.000,00	110.880.000,00	98,46	110.880.000,00	0,00	0,00
70	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	445.733.613,00	399.600.000,00	89,65	400.000.000,00	(400.000,00)	(0,10)
71	Belanja Pegawai BLUD	350.000.000,00	348.292.000,00	99,51	239.097.000,00	109.195.000,00	45,67
Jumlah		455.925.566.225,64	418.913.978.804,00	91,88	380.605.113.177,00	38.308.865.627,00	10,07

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp330.784.746.050,54 atau 87,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp378.182.119.398,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp15.872.048.312,19 atau sebesar 5,04%. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

<i>(dalam rupiah)</i>							
No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	196.500.000,00	192.502.000,00	97,97	159.599.360,00	32.902.640,00	20,62
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	45.362.000,00	43.150.000,00	95,12	316.278.500,00	(273.128.500,00)	(86,36)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.767.958.322,00	6.319.129.151,00	93,37	5.140.988.151,50	1.178.140.999,50	22,92
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.000.000,00	6.975.075,00	99,64	9.679.000,00	(2.703.925,00)	(27,94)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	170.000.000,00	169.427.900,00	99,66	294.177.000,00	(124.749.100,00)	(42,41)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.370.000,00	37.110.000,00	94,26	10.428.000,00	26.682.000,00	255,87
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.531.406.397,00	5.837.841.156,10	89,38	3.354.382.860,00	2.483.458.296,10	74,04
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.341.593.566,00	1.898.324.756,00	81,07	1.876.744.811,00	21.579.945,00	1,15
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	68.000.000,00	62.800.000,00	92,35	45.715.000,00	17.085.000,00	37,37
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	273.076.250,00	253.763.253,00	92,93	170.533.400,00	83.229.853,00	48,81
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.413.140.239,00	4.916.877.752,00	90,83	4.748.111.512,00	168.766.240,00	3,55
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	617.611.079,00	572.795.200,00	92,74	2.500.000,00	570.295.200,00	22.811,81
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.625.953.355,00	6.480.631.890,00	84,98	9.542.696.547,93	(3.062.064.657,93)	(32,09)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	953.033.107,00	891.969.100,00	93,59	673.439.200,00	218.529.900,00	32,45
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	18.500.000,00	13.990.045,00	75,62	11.697.600,00	2.292.445,00	19,60
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	11.000.000,00	100,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	0,00	11.900.000,00	100,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	813.340.840,00	751.038.644,00	92,34	619.984.014,00	131.054.630,00	21,14

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Alat Listrik						
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	825.260.038,00	734.462.850,00	89,00	413.479.900,00	320.982.950,00	77,63
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	169.155.000,00	168.400.000,00	99,55	245.167.844,00	(76.767.844,00)	(31,31)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	96.700.000,00	75.075.000,00	77,64	109.030.000,00	(33.955.000,00)	(31,14)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.364.184.460,00	1.198.672.570,00	87,87	980.027.100,00	218.645.470,00	22,31
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.507.307.600,00	3.230.228.800,43	92,10	3.214.620.298,88	15.608.501,55	0,49
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	3.544.506.900,00	2.978.119.327,00	84,02	2.735.556.479,70	242.562.847,30	8,87
25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	182.556.000,00	158.528.400,00	86,84	250.220.280,00	(91.691.880,00)	(36,64)
26	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	71.422.000,00	44.301.000,00	62,03	41.849.324,00	2.451.676,00	5,86
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.486.215.000,00	5.414.612.708,00	83,48	4.334.982.300,00	1.079.630.408,00	24,91
28	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.513.236.600,00	12.378.929.110,00	91,61	9.186.228.670,00	3.192.700.440,00	34,76
29	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	48.050.000,00	43.469.000,00	90,47	0,00	43.469.000,00	100,00
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.326.885.400,00	1.240.047.409,00	93,46	943.031.125,00	297.016.284,00	31,50
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	23.125.000,00	4.100.000,00	17,73	0,00	4.100.000,00	100,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.678.765.948,00	4.657.266.300,00	82,01	4.512.820.670,00	144.445.630,00	3,20
33	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.000.000,00	65.850.000,00	98,28	126.510.000,00	(60.660.000,00)	(47,95)
34	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.400.000,00	14.250.000,00	98,96	14.250.000,00	0,00	0,00
35	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	207.720.000,00	205.150.000,00	98,76	211.998.000,00	(6.848.000,00)	(3,23)
36	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	843.000.000,00	819.458.500,00	97,21	151.513.000,00	667.945.500,00	440,85
37	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00	49.400.000,00	98,80	97.565.000,00	(48.165.000,00)	(49,37)
38	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	16.950.000,00	(7.350.000,00)	(43,36)
39	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	69.774.600,00	(69.774.600,00)	(100,00)
40	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	225.650.000,00	208.815.740,00	92,54	149.925.000,00	58.890.740,00	39,28
41	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	33.600.000,00	32.890.000,00	97,89	0,00	32.890.000,00	100,00
42	Belanja Pakaian Adat Daerah	392.035.261,00	368.704.800,00	94,05	527.786.010,00	(159.081.210,00)	(30,14)
43	Belanja Pakaian Batik Tradisional	206.475.000,00	191.788.000,00	92,89	10.000.000,00	181.788.000,00	1.817,88
44	Belanja Pakaian Olahraga	354.098.608,00	348.420.000,00	98,40	654.018.004,00	(305.598.004,00)	(46,73)
45	Belanja Pakaian Paskibraka	444.925.000,00	421.352.000,00	94,70	419.202.825,00	2.149.175,00	0,51
46	Belanja Pakaian Jas/Safari	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	9.000.000,00	100,00
47	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	32.789.409,00	(17.789.409,00)	(54,25)
48	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.883.790,00	1.880.000,00	99,80	0,00	1.880.000,00	100,00
49	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	8.400.000,00	63,64	9.800.000,00	(1.400.000,00)	(14,29)
51	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.713.420.000,00	4.550.690.000,00	79,64	4.150.384.880,00	400.305.120,00	9,65
52	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.093.800.000,00	3.421.451.000,00	83,58	3.990.956.000,00	(569.505.000,00)	(14,27)
53	Honorarium Pemberi	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara						
54	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.024.440.000,00	1.787.900.000,00	88,32	1.846.960.000,00	(59.060.000,00)	(3,20)
55	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	4.000.000,00	55,56	7.200.000,00	(3.200.000,00)	(44,44)
56	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.720.000,00	7.800.000,00	61,32	4.200.000,00	3.600.000,00	85,71
57	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.100.000,00	6.100.000,00	100	0,00	6.100.000,00	100,00
58	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	175.400.000,00	157.400.000,00	89,74	22.750.000,00	134.650.000,00	591,87
59	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	899.200.000,00	816.000.000,00	90,75	0,00	816.000.000,00	100,00
60	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.537.950.000,00	7.279.150.000,00	96,57	10.433.350.000,00	(3.154.200.000,00)	(30,23)
61	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.024.260.447,00	19.354.817.427,00	92,06	25.589.042.425,00	(6.234.224.998,00)	(24,36)
62	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	70.785.000,00	43.945.000,00	62,08	31.465.000,00	12.480.000,00	39,66
63	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	100,00	1.291.400.000,00	(169.400.000,00)	(13,12)
64	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	433.200.000,00	424.800.000,00	98,06	0,00	424.800.000,00	100,00
65	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.800.000,00	1.795.000,00	99,72	0,00	1.795.000,00	100,00
66	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	(108.000.000,00)	(100,00)
67	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	303.400.000,00	182.450.000,00	60,14	46.150.000,00	136.300.000,00	295,34
68	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.441.252.895,00	36.683.072.328,00	97,98	33.170.243.602,00	3.512.828.726,00	10,59
69	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	20.000.000,00	0,00	0,00
70	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.785.808.137,00	13.560.700.000,00	98,37	16.986.565.000,00	(3.425.865.000,00)	(20,17)
71	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.441.962.202,00	1.406.512.600,00	97,54	1.290.119.600,00	116.393.000,00	9,02
72	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.669.435.910,00	2.599.573.960,00	97,38	2.731.321.896,00	(131.747.936,00)	(4,82)
73	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	536.650.000,00	497.700.000,00	92,74	353.450.000,00	144.250.000,00	40,81
74	Belanja Jasa Tenaga Supir	871.200.000,00	865.300.000,00	99,32	827.500.000,00	37.800.000,00	4,57
75	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	269.311.500,00	184.853.100,00	68,64	63.750.000,00	121.103.100,00	189,97
76	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00	159.000.000,00	(61.500.000,00)	(38,68)
77	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	15.700.000,00	13.300.000,00	84,71	0,00	13.300.000,00	100,00
78	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.386.450.000,00	1.357.950.000,00	97,94	1.521.455.000,00	(163.505.000,00)	(10,75)
79	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	195.299.500,00	139.990.880,00	71,68	28.236.500,00	111.754.380,00	395,78
80	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.838.429.880,00	837.464.000,00	45,55	82.729.048,00	754.734.952,00	912,30
81	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	16.500.000,00	16.000.000,00	96,97	0,00	16.000.000,00	100,00
82	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	310.499.560,00	304.918.945,00	98,20	4.866.651,34	300.052.293,66	6.165,48
83	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.545.525.976,00	1.430.825.000,00	92,58	51.909.000,00	1.378.916.000,00	2.656,41
84	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	15.300.000,00	2.300.000,00	15,03
85	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	44.632.000,00	44.626.000,00	99,99	26.456.000,00	18.170.000,00	68,68
86	Belanja Jasa Kalibrasi	188.500.000,00	172.683.000,00	91,61	0,00	172.683.000,00	100,00
87	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.089.900.000,00	1.089.900.000,00	100,00	1.301.800.000,00	(211.900.000,00)	(16,28)
88	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	23.500.000,00	22.000.000,00	93,62	7.384.676,00	14.615.324,00	197,91
89	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.961.283.320,00	9.917.492.000,00	99,56	4.883.920.000,00	5.033.572.000,00	103,06
90	Belanja Jasa Operator Kapal	901.650.000,00	899.600.000,00	99,77	862.500.000,00	37.100.000,00	4,30

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
91	Belanja Tagihan Telepon	193.150.000,00	129.237.645,00	66,91	113.825.949,00	15.411.696,00	13,54
92	Belanja Tagihan Air	967.919.132,00	696.292.996,00	71,94	798.461.707,00	(102.168.711,00)	(12,80)
93	Belanja Tagihan Listrik	6.904.683.659,00	5.763.181.694,00	83,47	5.348.769.588,00	414.412.106,00	7,75
94	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	377.200.000,00	301.665.000,00	79,97	480.029.000,00	(178.364.000,00)	(37,16)
95	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	3.407.936.880,00	3.278.950.079,00	96,22	3.563.574.745,00	(284.624.666,00)	(7,99)
96	Belanja Paket/Pengiriman	1.079.867.824,00	439.282.800,00	40,68	186.822.264,00	252.460.536,00	135,13
97	Belanja Penambahan Daya	7.000.000,00	6.455.400,00	92,22	0,00	6.455.400,00	100,00
98	Belanja Registrasi/Keanggotaan	90.000.000,00	60.000.000,00	66,67	108.000.000,00	(48.000.000,00)	(44,44)
99	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	811.611.240,00	434.738.991,00	53,56	356.257.253,00	78.481.738,00	22,03
100	Belanja Medical Check Up	0,00	0,00	0,00	101.416.000,00	(101.416.000,00)	(100,00)
101	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.168.450.000,00	11.754.966.000,00	96,6	26.565.911.900,00	(14.810.945.900,00)	(55,75)
102	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.007.748.000,00	967.050.000,00	95,96	0,00	967.050.000,00	100,00
103	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.849.898.872,00	3.490.604.304,00	90,67	4.092.148.815,00	(601.544.511,00)	(14,70)
104	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	531.016.096,00	207.822.092,00	39,14	114.476.314,60	93.345.777,40	81,54
105	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	449.567.717,00	217.944.513,00	48,48	129.260.758,00	88.683.755,00	68,61
106	Belanja Sewa Mesin Proses	1.250.000,00	1.000.000,00	80	0,00	1.000.000,00	100,00
107	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	48.220.000,00	48.220.000,00	100	0,00	48.220.000,00	100,00
108	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	14.000.000,00	4.500.000,00	32,14	4.500.000,00	0,00	0,00
109	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	274.806.000,00	219.706.000,00	79,95	388.657.000,00	(168.951.000,00)	(43,47)
110	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.050.000,00	4.550.000,00	90,10	5.700.000,00	(1.150.000,00)	(20,18)
111	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.615.000,00	11.320.000,00	89,73	15.220.000,00	(3.900.000,00)	(25,62)
112	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	180.305.000,00	140.440.000,00	77,89	180.389.000,00	(39.949.000,00)	(22,15)
113	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100,00
114	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
115	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	76.500.000,00	76.500.000,00	100	0,00	76.500.000,00	100,00
116	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.613.346.000,00	1.352.390.264,00	83,83	1.189.611.400,00	162.778.864,00	13,68
117	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	17.400.000,00	16.400.000,00	94,25	0,00	16.400.000,00	100,00
118	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	26.400.000,00	18.150.000,00	68,75	0,00	18.150.000,00	100,00
119	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.116.915.349,00	950.623.070,00	85,11	795.000,00	949.828.070,00	119.475,23
120	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	250.900.000,00	214.280.000,00	85,4	208.250.000,00	6.030.000,00	2,90
121	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
122	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	178.804.900,00	72.100.000,00	40,32	2.000.000,00	70.100.000,00	3.505,00
123	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	124.700.000,00	(109.200.000,00)	(87,57)
124	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	24.100.000,00	9.207.075,00	38,20	0,00	9.207.075,00	100,00
125	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	246.550.000,00	173.050.000,00	70,19	15.250.000,00	157.800.000,00	1.034,75
126	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	28.878.000,00	9.293.771,00	32,18	11.196.407,00	(1.902.636,00)	(16,99)
127	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.000.000,00	1.975.000,00	98,75	0,00	1.975.000,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
128	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	19.350.000,00	16.879.000,00	87,23	0,00	16.879.000,00	100,00
129	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
130	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	43.286.000,00	41.870.500,00	96,73	37.972.622,00	3.897.878,00	10,26
131	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	4.100.000,00	1.292.376,00	31,52	1.970.955,00	(678.579,00)	(34,43)
132	Belanja Sewa Elektronik/Electric	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
133	Belanja Sewa Suara	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
134	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	482.150.000,00	455.520.000,00	94,48	551.342.000,00	(95.822.000,00)	(17,38)
135	Belanja Sewa Bangunan Gudang	310.000.000,00	273.500.000,00	88,23	210.500.000,00	63.000.000,00	29,93
136	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	380.907.000,00	247.035.500,00	64,85	128.380.000,00	118.655.500,00	92,43
137	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00	100,00
138	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.200.000,00	300.000,00	4,17
139	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00	100,00
140	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.400.000,00	93.300.000,00	99,89	108.000.000,00	(14.700.000,00)	(13,61)
141	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.168.000,00	3.168.000,00	100,00	0,00	3.168.000,00	100,00
142	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	210.000.000,00	203.300.000,00	96,81	178.434.000,00	24.866.000,00	13,94
143	Belanja Sewa Asrama	524.704.000,00	516.950.000,00	98,52	516.950.000,00	0,00	0,00
144	Belanja Sewa Hotel	533.436.438,00	402.832.409,00	75,52	608.376.410,00	(205.544.001,00)	(33,79)
145	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	25.000.000,00	13.000.000,00	52	11.000.000,00	2.000.000,00	18,18
146	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	420.800.000,00	270.800.000,00	64,35	104.500.000,00	166.300.000,00	159,14
147	Belanja Sewa Alat Musik	26.000.000,00	25.000.000,00	96,15	0,00	25.000.000,00	100,00
148	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	39.800.000,00	25.200.000,00	63,32
149	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	70.000.000,00	69.907.800,00	99,87	0,00	69.907.800,00	100,00
150	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	295.000.000,00	294.853.296,00	99,95	79.180.740,00	215.672.556,00	272,38
151	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)	(100,00)
152	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	70.000.000,00	0,00	0,00	2.985.900,00	(2.985.900,00)	(100,00)
153	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.070.940.578,00	(1.070.940.578,00)	(100,00)
154	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00	99.900.000,00	100,00
155	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	1.252.069.660,00	(1.232.069.660,00)	(98,40)
156	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	346.000.000,00	345.987.000,00	100,00	0,00	345.987.000,00	100,00
157	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan	99.935.200,00	99.935.200,00	100,00	0,00	99.935.200,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	dan Landscape						
158	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.835.000.000,00	1.828.256.487,00	99,63	0,00	1.828.256.487,00	100,00
159	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	355.000.000,00	352.561.530,00	99,31	89.707.940,00	262.853.590,00	293,01
160	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	2.156.629.000,00	1.226.499.650,00	56,87	1.499.416.960,00	(272.917.310,00)	(18,20)
161	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	280.000.000,00	228.081.000,00	81,46	301.376.100,00	(73.295.100,00)	(24,32)
162	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	335.904.000,00	335.302.650,00	99,82	194.472.000,00	140.830.650,00	72,42
163	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	282.294.000,00	(282.294.000,00)	(100,00)
164	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	305.051.329,98	(305.051.329,98)	(100,00)
165	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	99.470.932,00	(99.470.932,00)	(100,00)
166	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	0,00	0,00	179.820.000,00	(179.820.000,00)	(100,00)
167	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	170.000.000,00	169.957.650,00	99,98	100.000.000,00	69.957.650,00	69,96
168	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	292.500.000,00	288.000.000,00	98,46	198.830.232,96	89.169.767,04	44,85
169	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00)
170	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	90.000.000,00	89.665.800,00	99,63	0,00	89.665.800,00	100,00
171	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00	0,00	0,00
172	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	908.232.730,00	728.507.820,00	80,21	379.782.000,00	348.725.820,00	91,82
173	Belanja Sosialisasi	198.730.000,00	140.245.000,00	70,57	88.136.500,00	52.108.500,00	59,12
174	Belanja Bimbingan Teknis	241.750.000,00	149.450.000,00	61,82	83.350.000,00	66.100.000,00	79,30
175	Belanja Diklat Kepemimpinan	357.820.000,00	357.747.500,00	99,98	2.650.000,00	355.097.500,00	13.399,91
176	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	39.000.000,00	38.300.000,00	98,21	0,00	38.300.000,00	100,00
177	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
178	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	74.400.000,00	57.048.185,00	76,68	0,00	57.048.185,00	100,00
179	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.436.669.567,00	1.214.151.862,00	84,51	992.415.023,00	221.736.839,00	22,34
180	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	462.300.000,00	316.494.000,00	68,46	142.068.000,00	174.426.000,00	122,78
181	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	26.500.000,00	11.075.000,00	41,79	24.889.200,00	(13.814.200,00)	(55,50)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang						
182	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	5.885.000,00	(5.885.000,00)	(100,00)
183	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.314.000,00	24.900.000,00	66,73	0,00	24.900.000,00	100,00
184	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17.500.000,00	12.545.000,00	71,69	0,00	12.545.000,00	100,00
185	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	638.665.890,00	636.485.300,00	99,66	180.885.000,00	455.600.300,00	251,87
186	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	7.000.000,00	2.130.000,00	30,43	0,00	2.130.000,00	100,00
187	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0,00	0,00	0,00	18.725.000,00	(18.725.000,00)	(100,00)
188	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00	(3.670.000,00)	(100,00)
189	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	12.000.000,00	10.090.000,00	84,08	3.800.000,00	6.290.000,00	165,53
190	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	24.000.000,00	23.965.000,00	99,85	39.975.000,00	(16.010.000,00)	(40,05)
191	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	411.675.000,00	353.062.000,00	85,76	598.393.421,77	(245.331.421,77)	(41,00)
192	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.430.807.000,00	1.231.876.406,00	86,10	702.199.001,00	529.677.405,00	75,43
193	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	500.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	(13.050.000,00)	(100,00)
194	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	30.344.000,00	29.774.050,00	98,12	12.527.500,00	17.246.550,00	137,67
195	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	362.509.620,00	356.784.500,00	98,42	281.934.600,00	74.849.900,00	26,55
196	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	11.649.378,00	11.648.000,00	99,99	0,00	11.648.000,00	100,00
197	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.121.346,00	47.186.100,00	67,29	36.755.000,00	10.431.100,00	28,38
198	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	53.500.000,00	35.800.614,00	66,92	0,00	35.800.614,00	100,00
199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)	(100,00)
200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Studio-Peralatan Studio Video dan Film						
201	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.081.000.000,00	1.952.310.510,00	93,82	0,00	1.952.310.510,00	100,00
202	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	78.498.300,00	(78.498.300,00)	(100,00)
203	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	50.610.000,00	23.945.000,00	47,31	82.605.000,00	(58.660.000,00)	(71,01)
204	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.780.000,00	(8.780.000,00)	(100,00)
205	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	142.567.670,00	94.603.000,00	66,36	26.840.000,00	67.763.000,00	252,47
206	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	38.832.638,00	32.705.124,00	84,22	216.213.000,00	(183.507.876,00)	(84,87)
207	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	82.900.000,00	62.110.000,00	74,92	20.990.000,00	41.120.000,00	195,90
208	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	50.010.000,00	46.000.000,00	91,98	0,00	46.000.000,00	100,00
209	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	700.000.000,00	656.662.843,00	93,81	136.028.085,00	520.634.758,00	382,74
210	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	113.000.000,00	111.866.355,00	99,00	98.207.000,00	13.659.355,00	13,91
211	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.725.000,00	6.725.000,00	100,00	0,00	6.725.000,00	100,00
212	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.517.926.657,00	3.376.781.161,06	95,99	1.616.474.049,00	1.760.307.112,06	108,90
213	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.551.386.570,00	2.541.021.570,00	99,59	605.128.734,00	1.935.892.836,00	319,91
214	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/ Observatorium	0,00	0,00	0,00	22.493.000,00	(22.493.000,00)	(100,00)
215	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.209.000.000,00	2.205.646.593,00	99,85	1.582.512.391,00	623.134.202,00	39,38
216	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	788.878.068,00	785.240.791,00	99,54	456.703.942,00	328.536.849,00	71,94
217	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	363.630.700,00	361.173.283,00	99,32	1.046.601.082,00	(685.427.799,00)	(65,49)
218	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.000.000,00	49.906.647,00	99,81	99.260.907,60	(49.354.260,60)	(49,72)
219	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	250.000.000,00	248.455.600,43	99,38	0,00	248.455.600,43	100,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar						
220	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
222	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	17.000.000,00	15.850.000,00	93,24	0,00	15.850.000,00	100,00
223	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	48.683.000,00	48.020.000,00	98,64	0,00	48.020.000,00	100,00
224	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	7.100.000,00	7.100.000,00	100	0,00	7.100.000,00	100,00
225	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	865.745.940,00	855.668.032,00	98,84	115.114.000,00	740.554.032,00	643,32
226	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	965.000.000,00	962.745.000,00	99,77	0,00	962.745.000,00	100,00
227	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	305.000.000,00	239.367.726,00	78,48	64.335.860,00	175.031.866,00	272,06
228	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti- Tugu	10.000.000,00	9.918.520,00	99,19	0,00	9.918.520,00	100,00
229	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40.000.000,00	39.840.000,00	99,60	19.950.000,00	19.890.000,00	99,70
230	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	186.903.659,00	(186.903.659,00)	(100,00)
231	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pagar	16.060.000,00	16.050.000,00	99,94	0,00	16.050.000,00	100,00
232	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	2.271.411.340,00	(2.271.411.340,00)	(100,00)
233	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	550.289.661,00	550.289.661,00	100	386.064.542,00	164.225.119,00	42,54
234	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	289.145.800,00	287.107.105,00	99,29	0,00	287.107.105,00	100,00
235	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.641.125,00	(10.641.125,00)	(100,00)
236	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	177.153.557,00	(177.153.557,00)	(100,00)
237	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	200.000.000,00	197.932.400,00	98,97	10.930.150,00	187.002.250,00	1.710,88

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bencana Alam						
238	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.000.000,00	2.625.000,00	87,5	2.700.000,00	(75.000,00)	(2,78)
239	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	7.284.100,00	(7.284.100,00)	(100,00)
240	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	208.503.216,00	178.240.550,00	85,49	81.286.600,00	96.953.950,00	119,27
241	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	21.500.000,00	7.367.000,00	34,27	0,00	7.367.000,00	100,00
242	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	5.930.000,00	5.920.000,00	99,83	0,00	5.920.000,00	100,00
243	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.557.584.156,00	43.019.639.039,00	74,74	44.243.286.700,00	(1.223.647.661,00)	(2,77)
244	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.611.543.451,00	12.776.097.417,00	65,15	1.830.735.116,00	10.945.362.301,00	597,87
245	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	946.613.176,00	706.560.000,00	74,64	222.606.500,00	483.953.500,00	217,40
246	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	58.620.000,00	58.620.000,00	100	0,00	58.620.000,00	100,00
247	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	83.442.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
248	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	749.977.810,00	711.486.187,00	94,87	592.025.225,00	119.460.962,00	20,18
249	Belanja Beasiswa	665.000.000,00	440.400.000,00	66,23	387.700.000,00	52.700.000,00	13,59
250	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	300.000.000,00	100	75.000.000,00	225.000.000,00	300,00
251	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.410.200.000,00	1.396.367.620,00	99,02	262.450.000,00	1.133.917.620,00	432,05
252	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	161.000.000,00	56.000.000,00	34,78	0,00	56.000.000,00	100,00
253	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.626.896.650,00	11.690.436.790,00	100,55	11.751.546.711,80	(61.109.921,80)	(0,52)
254	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.850.000.000,00	23.633.167.970,52	91,42	21.513.065.281,29	2.120.102.689,23	9,85
	Jumlah	378.182.119.398,00	330.784.746.050,54	87,47	314.912.697.738,35	15.872.048.312,19	5,04

Terdapat beberapa realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp949.828.070,00 atau 119.475,23% dibanding tahun 2022. Kenaikan tersebut terjadi karena pada tahun 2022 belanja fotocopy dianggarkan sebagian pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, dan di tahun 2023 dianggarkan ke belanja sewa alat reproduksi (Penggandaan).
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp570.295.200,00 atau 22.811,81% dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover tahun 2022 dianggarkan juga pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, sehingga pada tahun 2023 telah dianggarkan sesuai dengan rekening belanja semestinya.
3. Belanja Pakaian Batik Tradisional meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp181.788.000,00 atau 1.817,88% dibanding tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena Pemerintah melaksanakan beberapa agenda yang membutuhkan pakaian batik tradisional.
4. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp300.052.293,66 atau sebesar 6.165,48% dibanding tahun 2022, ini disebabkan meningkatnya kebutuhan Pemerintah Daerah akan teknologi

informasi komunikasi dan informasi seperti aplikasi *zoom meeting* dan aplikasi lainnya.

5. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.378.916.000,00 atau sebesar 2.656,41% dibanding tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2023 Pemerintah Daerah melaksanakan beberapa even/agenda yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan atau dilaksanakan secara swakelola.
6. Belanja Diklat Kepemimpinan pada tahun 2023 mengalami kenaikan Rp355.097.500,00 atau sebesar 13.399,91% dibanding tahun 2022. Ini disebabkan karena pada tahun 2023 Pemerintah Daerah banyak mengirim peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat II di Pusat Pendidikan dan Kepelatihan Kementerian Dalam Negeri.
7. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp187.002.250,00 atau sebesar 1.710,88%. Kenaikan ini disebabkan karena kebutuhan Pemerintah akan kebutuhan pemeliharaan jaringan air dan pengaman pantai dan sungai untuk menjaga agar kondisi aset yang telah ada tetap terjaga dengan baik dan tetap berfungsi.
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp483.953.500,00 atau sebesar 597,87% dibanding tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan karena perubahan kebijakan yang mengatur tapal batas kota perjalanan dinas. Pada Tahun 2022 khusus untuk Kecamatan di Luar Pulau Bunguran besar masuk ke Perjalanan Dinas Luar Kota, kemudian di pertengahan tahun 2023 untuk semua tujuan Perjalanan dinas dalam wilayah administrasi Kabupaten Natuna dirubah menjadi dalam kota untuk melaksanakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Audit LKPD Tahun 2022 setelah diberkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
9. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp483.953.500,00 atau sebesar 217,40%. Ini disebabkan pada tahun 2023 Pemerintah Daerah melaksanakan beberapa agenda acara seperti sosialisasi dan acara sejenis lainnya di beberapa Hotel dan resort yang ada di Kabupaten Natuna. Pada Tahun 2022 acara seperti itu dilaksanakan dikedung Pemerintah.
10. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp225.000.000,00 atau sebesar 300%. Ini disebabkan meningkatnya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh kelompok di desa.
11. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain mengalami kenaikan sebesar Rp1.133.917.620,00 atau mengalami kenaikan sebesar 432,05% dibanding tahun 2022. Ini disebabkan karena sebagian besar penganggaran jasa yang diperuntukan selain Pemerintah daerah/kepentingan umum dianggarkan pada rekening Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain. Pada tahun 2022 untuk pengggarannya dianggarkan di jasa administrasi kantor.

Pada Tahun 2023 terdapat pelampauan dari realisasi belanja barang dan jasa BOS yang disebabkan terjadi perubahan/pergeseran RKAS yang dilakukan oleh sekolah setelah perubahan APBD Tahun 2023 yang tidak diberitahukan/disampaikan ke PPKD selaku BUD. Sehingga atas perubahan RKAS tersebut tidak ditampung di Peraturan Bupati Natuna tentang perubahan penjabaran perubahan APBD Tahun anggaran 2023 yang menyebabkan kelebihan realisasi belanja barang dan jasa BOS tahun 2023 saat dilakukan pengesahan atas belanja tersebut.

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp37.301.653.821,93 atau sebesar 97,56%. Dibandingkan dengan tahun 2022 Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp9.547.686.713,93 atau sebesar 34,40%. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	100,00	463.140.000,00	8.936.860.000,00	1.929,62
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.471.395.000,00	2.137.497.129,00	86,49	4.666.818.301,00	(2.529.321.172,00)	(54,20)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.654.985.000,00	5.109.948.010,00	90,36	1.114.072.500,00	3.995.875.510,00	358,67
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.194.798.971,00	15.164.685.484,00	99,80	11.082.930.035,00	4.081.755.449,00	36,83
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.069.613.930,00	4.057.514.371,93	99,7	9.903.573.429,00	(5.846.059.057,07)	(59,03)
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	412.360.000,00	412.360.000,00	100,00	0,00	412.360.000,00	100,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	506.690.000,00	496.215.984,00	97,93	0,00	496.215.984,00	100,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00	523.432.843,00	100,00	523.432.843,00	0,00	0,00
Jumlah		38.233.275.744,00	37.301.653.821,93	97,56	27.753.967.108,00	9.547.686.713,93	34,40

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2022. Kenaikan ini terjadi karena pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Dana pelaksanaan Pilkada harus dibayarkan sebesar 40% kepada KPUD Kabupaten Natuna dan BAWASLU pada tahun 2023. Total Hibah Pelaksanaan Pilkada serentak yang dibayarkan pada tahun 2023 ke KPUD Kabupaten Natuna sebesar Rp6.400.000.000,00 dan ke BAWASLU sebesar Rp3.000.000.000,00

7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp1.942.798.000,00 atau sebesar 78,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.476.200.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp(3.231.496.368,34) atau (62,45)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00	634.488.000,00	63,45	522.000.000,00	112.488.000,00	21,55
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	91.200.000,00	80.388.000,00	88,14	119.255.200,00	(38.867.200,00)	(32,59)
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	2.074.800.000,00	(2.034.800.000,00)	(98,07)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Keluarga						
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.265.000.000,00	1.187.922.000,00	93,91	2.458.239.168,34	(1.270.317.168,34)	(51,68)
Jumlah		2.476.200.000,00	1.942.798.000,00	78,46	5.174.294.368,34	(3.231.496.368,34)	(62,45)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp634.488.000,00 merupakan dari Pemberian Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp80.388.000,00 terdiri dari pemberian Belanja Bantuan Sosial Alat Bantu Jalan Walker sebesar Rp38.430.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Pembelian Kursi Roda sebesar Rp41.958.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp40.000.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp1.265.000.000,00 terdiri dari pemberian belanja bantuan sosial untuk Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan pada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Subi sebesar Rp198.025.000,00, kemudian untuk Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan pada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Bunguran Barat sebesar Rp99.050.000,00, untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat pada Pekerjaan RTLH Program TMMD sebesar Rp99.996.000,00, untuk Pengadaan Bibit Ikan Kerapu pada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Bunguran Barat sebesar Rp195.951.000,00 dan untuk pengadaan bibit ikan kerapu pada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Subi sebesar Rp594.900.000,00.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp264.281.035.089,12 atau sebesar 93,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp283.117.329.844,36. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp83.429.891.280,53 atau sebesar 46,13% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Tanah	4.898.571.157,00	3.027.754.385,00	61,81	14.947.363.488,00	(11.919.609.103,00)	(79,74)
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.776.300.207,00	63.225.717.778,00	96,12	36.673.771.470,56	26.551.946.307,44	72,40
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.503.615.426,00	49.095.024.269,66	99,17	35.255.591.251,14	13.839.433.018,52	39,25
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.206.397.454,36	147.255.543.406,46	91,35	93.570.889.388,89	53.684.654.017,57	57,37
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.732.445.600,00	1.676.995.250,00	96,80	403.528.210,00	1.273.467.040,00	315,58
JUMLAH		283.117.329.844,36	264.281.035.089,12	93,35	180.851.143.808,59	83.429.891.280,53	46,13

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp3.027.754.385,00 atau sebesar 61,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.898.571.157,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 Belanja Modal Tanah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp(11.919.609.103,00) atau sebesar (79,74)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	4.702.848.600,00	(4.702.848.600,00)	(100,00)
2.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.871.271.157,00	1.653.000.000,00	57,57	836.404.088,00	816.595.912,00	97,63
3.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	640.000.000,00	446.000.000,00	69,69	3.733.000.000,00	(3.287.000.000,00)	(88,05)
4.	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	530.000.000,00	99.944.400,00	18,86	0,00	99.944.400,00	100,00
5.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	138.000.000,00	116.137.200,00	84,16	5.321.407.086,00	(5.205.269.886,00)	(97,82)
6.	Belanja Modal Tanah untuk Makam	360.000.000,00	354.831.200,00	98,56	0,00	354.831.200,00	100,00
7.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	359.300.000,00	357.841.585,00	99,59	353.703.714,00	4.137.871,00	1,17
TOTAL		4.898.571.157,00	3.027.754.385,00	61,81	14.947.363.488,00	(11.919.609.103,00)	(79,74)

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp63.225.717.778,00 atau sebesar 96,12% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp26.551.946.307,44 atau sebesar 72,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Mesin Proses	696.700.000,00	696.700.000,00	100,00	0,00	696.700.000,00	100,00
2	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	15.000.000,00	(9.500.000,00)	(63,33)
3	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	31.500.000,00	31.325.000,00	99,44	0,00	31.325.000,00	100,00
4	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	6.500.000,00	6.290.000,00	96,77	100.290.000,00	(94.000.000,00)	(93,73)
5	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	34.680.000,00	99,09	64.015.000,00	(29.335.000,00)	(45,83)
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	276.000.000,00	275.800.000,00	99,93	263.950.500,00	11.849.500,00	4,49
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	652.690.000,00	624.492.350,00	95,68	256.273.600,00	368.218.750,00	143,68
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	44.800.000,00	39.850.000,00	88,95	0,00	39.850.000,00	100,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	549.427.800,00	(549.427.800,00)	(100,00)
11	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	405.800.000,00	(405.800.000,00)	(100,00)
12	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	19.990.000,00	99,95	0,00	19.990.000,00	100,00
13	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.685.996.945,00	8.683.118.079,00	99,97	0,00	8.683.118.079,00	100,00
14	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
15	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	101.750.884,00	47.489.884,00	46,67	0,00	47.489.884,00	100,00
16	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1.000.000,00	550.000,00	55,00	0,00	550.000,00	100,00
17	Belanja Modal Alat Ukur Universal	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	0,00	29.700.000,00	100,00
18	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	8.000.000,00	7.490.000,00	93,63	0,00	7.490.000,00	100,00
19	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	146.575.000,00	146.075.000,00	99,66	22.420.000,00	123.655.000,00	551,54
20	Belanja Modal Alat	830.000.000,00	812.600.000,00	97,90	473.000.000,00	339.600.000,00	71,80

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pengolahan Lainnya						
21	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.500.000,00	1.900.000,00	76,00	0,00	1.900.000,00	100,00
22	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	146.120.000,00	123.835.000,00	84,75	0,00	123.835.000,00	100,00
23	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.447.369.589,00	1.318.775.918,00	91,12	602.563.846,74	716.212.071,26	118,86
24	Belanja Modal Mebel	3.584.990.000,00	3.526.261.344,00	98,36	797.477.592,00	2.728.783.752,00	342,18
25	Belanja Modal Alat Pembersih	30.000.000,00	29.540.000,00	98,47	6.026.035,00	23.513.965,00	390,21
26	Belanja Modal Alat Pendingin	1.033.350.100,00	994.569.634,00	96,25	441.212.331,00	553.357.303,00	125,42
27	Belanja Modal Alat Dapur	1.500.000,00	1.498.000,00	99,87	11.738.250,00	(10.240.250,00)	(87,24)
28	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.147.539.015,00	1.095.129.980,00	95,43	975.034.572,00	120.095.408,00	12,32
29	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	48.300.000,00	47.370.000,00	98,07	3.600.000,00	43.770.000,00	1.215,83
30	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	584.500.000,00	496.305.000,00	84,91	455.241.000,00	41.064.000,00	9,02
31	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	70.893.500,00	70.893.500,00	100	10.000.000,00	60.893.500,00	608,94
32	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	514.417.715,00	469.759.000,00	91,32	564.349.278,00	(94.590.278,00)	(16,76)
33	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	153.529.190,00	150.737.500,00	98,18	101.787.000,00	48.950.500,00	48,09
34	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.500.000,00	7.500.000,00	88,24	0,00	7.500.000,00	100,00
35	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	235.100.000,00	233.482.000,00	99,31	20.995.000,00	212.487.000,00	1.012,08
36	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	163.820.000,00	128.603.874,00	78,50	132.283.785,00	(3.679.911,00)	(2,78)
37	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	298.000.000,00	295.810.000,00	99,27	0,00	295.810.000,00	100,00
38	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	745.094.500,00	716.863.000,00	96,21	91.520.000,00	625.343.000,00	683,29
39	Belanja Modal Peralatan Cetak	12.731.900,00	12.470.000,00	97,94	41.850.000,00	(29.380.000,00)	(70,20)
40	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	136.900.000,00	135.797.000,00	99,19	0,00	135.797.000,00	100,00
41	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	216.000.000,00	215.750.000,00	99,88	109.296.659,00	106.453.341,00	97,40
42	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	90.500.000,00	88.435.000,00	97,72	0,00	88.435.000,00	100,00
43	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33	0,00	14.750.000,00	100,00
44	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	81.690.000,00	79.400.000,00	97,2	0,00	79.400.000,00	100,00
45	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	12.582.208,00	10.660.000,00	84,72	337.572.900,00	(326.912.900,00)	(96,84)
46	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	98.450.000,00	(98.450.000,00)	(100,00)
47	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.646.025.240,00	6.267.126.672,00	94,3	1.905.801.107,82	4.361.325.564,18	228,84
48	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	492.918.110,00	476.872.000,00	96,74	2.000.000,00	474.872.000,00	23.743,60
49	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	1.871.914.554,00	(1.871.914.554,00)	(100,00)
50	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	254.719.737,00	(254.719.737,00)	(100,00)
51	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	1.400.091.484,00	(1.400.091.484,00)	(100,00)
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.054.491.671,00	2.054.491.671,00	100	316.170.000,00	1.738.321.671,00	549,81
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	16.738.714.440,00	16.736.737.776,00	99,99	0,00	16.736.737.776,00	100,00
54	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	50.623.000,00	(50.623.000,00)	(100,00)
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00	100,00
56	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100.689.798,00	(93.689.798,00)	(93,05)
57	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	184.481.987,00	(184.481.987,00)	(100,00)
58	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	10.770.000,00	10.770.000,00	100,00	199.958.730,00	(189.188.730,00)	(94,61)
59	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	0,00	0,00	564.990.000,00	(564.990.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
60	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100,00
61	Meteorological Equipment	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00	100,00
62	Belanja Modal Peralatan Umum	150.000.000,00	149.743.440,00	99,83	53.586.136,00	96.157.304,00	179,44
63	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	322.287.969,00	(322.287.969,00)	(100,00)
64	Belanja Modal Personal Computer	7.735.283.300,00	7.398.468.900,00	95,65	736.231.767,00	6.662.237.133,00	904,91
65	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	988.300.000,00	934.632.007,00	94,57	3.074.218.734,00	(2.139.586.727,00)	(69,60)
66	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	100,00
67	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.805.279.000,00	1.691.300.772,00	93,69	150.695.236,00	1.540.605.536,00	1.022,33
68	Belanja Modal Peralatan Jaringan	43.740.000,00	43.361.000,00	99,13	221.503.100,00	(178.142.100,00)	(80,42)
69	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	995.757.000,00	990.617.000,00	99,48	350.433.401,00	640.183.599,00	182,68
70	Belanja Modal Elektronik/Electric	119.500.000,00	111.646.000,00	93,43	0,00	111.646.000,00	100,00
71	Belanja Modal Sumur Pemboran	12.163.000,00	12.035.000,00	98,95	0,00	12.035.000,00	100,00
72	Belanja Modal Baju Pengaman	44.539.150,00	23.900.000,00	53,66	0,00	23.900.000,00	100,00
73	Belanja Modal Sepatu Lapangan	6.000.000,00	5.980.000,00	99,67	0,00	5.980.000,00	100,00
74	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	157.500.000,00	150.534.750,00	95,58	29.975.000,00	120.559.750,00	402,20
76	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	812.980.000,00	411.469.164,00	50,61	23.952.000,00	387.517.164,00	1.617,89
77	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	100.000.000,00	95.783.144,00	95,78	0,00	95.783.144,00	100,00
78	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.000.000,00	14.996.100,00	99,97	0,00	14.996.100,00	100,00
79	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	88.731.500,00	(88.731.500,00)	(100,00)
80	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.360.098.750,00	3.167.544.299,00	94,27	3.199.900.401,00	(32.356.102,00)	(1,01)
81	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	800.000.000,00	723.162.020,00	90,4	14.604.640.680,00	(13.881.478.660,00)	(95,05)
Jumlah		65.776.300.207,00	63.225.717.778,00	96,12	36.673.771.470,56	26.551.946.307,44	72,40

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp49.095.024.269,66 atau 99,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.503.615.426,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp13.839.433.018,52 atau sebesar 39,25%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.595.058.280,00	21.570.473.244,18	99,89	935.532.522,94	20.634.940.721,24	2.205,69
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	11.934.350,00	11.934.350,00	100,00	125.819.296,00	(113.884.946,00)	(90,51)
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	295.191.152,26	(295.191.152,26)	(100,00)
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	17.360.031.907,38	(17.360.031.907,38)	(100,00)
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	215.000.000,00	214.505.820,00	99,77	208.327.599,16	6.178.220,84	2,97
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	59.815.680,00	59.815.680,00	100,00	0,00	59.815.680,00	100,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.769.670.884,00	13.608.303.466,00	98,83	6.886.872.913,03	6.721.430.552,97	97,60
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	315.000.000,00	314.266.696,91	99,77	803.002.957,00	(488.736.260,09)	(60,86)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	294.200.000,00	294.174.912,00	99,99	0,00	294.174.912,00	100,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.412.561.169,00	6.243.624.922,00	97,37	69.719.100,00	6.173.905.822,00	8.855,40
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.652.490.550,00	2.648.992.782,00	99,87	429.625.680,00	2.219.367.102,00	516,58
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.309.555.584,00	1.308.739.921,39	99,94	1.911.326.621,00	(602.586.699,61)	(31,53)
13	Belanja Modal Bangunan Parkir	416.000.000,00	408.786.283,00	98,27	0,00	408.786.283,00	100,00
14	Belanja Modal Taman	233.697.200,00	198.596.807,18	84,98	219.692.844,00	(21.096.036,82)	(9,60)
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	299.077.490,00	298.731.390,00	99,88	0,00	298.731.390,00	100,00
16	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	211.032.682,00	(211.032.682,00)	(100,00)
17	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	2.356.149.298,00	(2.356.149.298,00)	(100,00)
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00	199.684.400,00	99,84	1.543.518.911,20	(1.343.834.511,20)	(87,06)
19	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00	28.000.000,00	100,00
20	Belanja Modal Pagar	1.681.554.239,00	1.676.403.595,00	99,69	1.889.757.767,17	(213.354.172,17)	(11,29)
21	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	99,9	9.990.000,00	0,00	0,00
Jumlah		49.503.615.426,00	49.095.024.269,66	99,17	35.255.591.251,14	13.839.433.018,52	39,25

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp161.206.397.454,36 dengan realisasi sebesar Rp147.255.543.406,46 atau sebesar 91,35% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp53.684.654.017,57 atau sebesar 57,37%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Jalan	108.967.425.262,36	96.166.306.050,96	88,25	59.962.762.084,53	36.203.543.966,43	60,38
2.	Belanja Modal Jembatan	5.099.521.749,00	4.681.102.749,50	91,79	6.112.678.887,00	(1.431.576.137,50)	(23,42)
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.468.298.990,00	1.446.554.305,00	98,52	1.087.192.833,24	359.361.471,76	33,05
4.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	12.469.600.000,00	12.273.348.244,00	98,43	11.309.858.076,00	963.490.168,00	8,52
5.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	550.164.746,00	550.164.746,00	100,00	0,00	550.164.746,00	100,00
6.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.236.802.290,00	4.236.802.290,00	100,00	1.631.954.288,00	2.604.848.002,00	159,62
7.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	890.000.000,00	(840.060.000,00)	(94,39)
8.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	961.000.000,00	960.178.521,00	99,91	1.720.157.151,21	(759.978.630,21)	(44,18)
9.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	822.650.000,00	817.450.000,00	99,37	1.099.241.170,00	(281.791.170,00)	(25,64)
10.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.920.000.000,00	1.912.859.324,00	99,63	0,00	1.912.859.324,00	100,00
11.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	760.000.000,00	759.337.430,00	99,91	0,00	759.337.430,00	100,00
12.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	591.840.068,00	589.767.158,00	99,65	2.060.317.016,91	(1.470.549.858,91)	(71,37)
13.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	100,00	20.000.000,00	3.880.000.000,00	19.400,00
14.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	9.951.275.949,00	9.902.528.904,00	99,51	4.937.393.095,00	4.965.135.809,00	100,56
15.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	19.877.839,00	(19.877.839,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
16.	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.237.818.400,00	6.951.963.583,00	96,05	2.719.456.948,00	4.232.506.635,00	155,64
17.	Belanja Modal Jaringan Gas	2.220.000.000,00	2.057.240.101,00	92,67	0,00	2.057.240.101,00	100,00
Jumlah		161.206.397.454,36	147.255.543.406,46	91,35	93.570.889.388,89	53.684.654.017,57	57,37

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp1.732.445.600,00 dengan realisasi sebesar Rp1.676.995.250,00 atau sebesar 96,80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.273.467.040,00 atau sebesar 315,58%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.500.000,00	9.500.000,00	100	0,00	9.500.000,00	100,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	32.300.000,00	32.200.000,00	99,69	0,00	32.200.000,00	100,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	949.831.000,00	947.316.000,00	99,74	0,00	947.316.000,00	100,00
4	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	40.466.651,00	49.533.349,00	122,41
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	650.814.600,00	597.979.250,00	91,88	358.111.559,00	239.867.691,00	66,98
Jumlah		1.732.445.600,00	1.676.995.250,00	96,80	403.528.210,00	1.273.467.040,00	315,58

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2023 realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.648.129.341,00 atau sebesar 65,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp316.266.678,00 atau sebesar 23,75% dari tahun 2022 sebesar Rp1.331.862.663,00. Kenaikan ini terjadi disebabkan adanya musibah banjir dan tanah longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Adapun rincian penggunaan belanja Tidak Terduga diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak terduga

(dalam rupiah)

No	Dinas Pelaksana BTT	Nomor RKB	Peruntukan/ Tujuan Penggunaan BTT	Realisasi	Kategori BTT
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0002/1.05.04/III/2023	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Serasan dan Seerasan Timur	512.387.000,00	Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam
2	Dinas Kesehatan	0001/1.02.01.01/I/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	3.702.476,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
3	Dinas Kesehatan	0002/1.02.01.01/I/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	20.262.513,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0003/1.05.04/III/2023	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di	682.847.127,00	Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam

No	Dinas Pelaksana BTT	Nomor RKB	Peruntukan/ Tujuan Penggunaan BTT	Realisasi	Kategori BTT
			Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur Tahap II		
5	Dinas Sosial	0002/1.06.01/III/2023	Bantuan Perbaikan Rumah dan Atap Rumah Korban Bencana Banjir dan Angin Kencang	9.000.000,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0001/1.05.04/I/2023	Penangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	31.704.500,00	Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam
7	Dinas Kesehatan	0003/1.02.01.01/V/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	94.696.305,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
8	Dinas Kesehatan	0004/1.02.01.01/VI/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	29.801.271,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
9	Dinas Kesehatan	0005/1.02.01.01/VII/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	12.776.839,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0002/1.02.01.01/VI/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana Kepada Pelaku UMKM yang terdampak bencana longsor tahun 2023	111.000.000,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
11	Dinas Kesehatan	0006/1.02.01.01/X/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	12.214.470,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
12	Dinas Sosial	0003/1.06.01/XII/2023	Bansos Tidak terencana Terdampak Cuaca Ekstrem	76.735.000,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
13	Dinas Kesehatan	0008/1.02.01.01/XII/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	16.374.531,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
14	Dinas Kesehatan	0007/1.02.01.01/VII/2023	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	34.627.309,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
Jumlah				1.648.129.341,00	

Dari tabel di atas, penggunaan belanja tidak terduga dijabarkan sebagai berikut:

- Penanganan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur sebesar Rp1.195.234.127,00 dengan rincian Tahap I Rp512.387.000,00 dan Tahap II sebesar Rp682.847.127,00 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp31.704.500,00 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pemberian bantuan sosial tidak terencana (bantuan berobat) sebesar Rp224.455.714,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- Pemberian bantuan sosial tidak terencana kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur tahun 2023 sebesar Rp111.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
- Pemberian bantuan perbaikan rumah dan atap rumah korban bencana banjir dan angin kencang sebesar Rp9.000.000,00 dan pemberian bantuan sosial tidak terencana bantuan terdampak cuaca ekstrem Rp76.735.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

7.5.1.3 Transfer

Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	119.624.168.400,00	106.005.762.940,00

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar Rp119.624.168.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tranfer Bagi Hasil Pendapatan	4.265.558.000,00	4.265.558.000,00	100,00	1.250.699.940,00	3.014.858.060,00	241,05
2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	115.358.610.400,00	115.358.610.400,00	100,00	104.755.063.000,00	10.603.547.400,00	10,12
Jumlah		119.624.168.400,00	119.624.168.400,00	100,00	106.005.762.940,00	13.618.405.460,00	12,85

7.5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp4.265.558.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.265.558.000,00. Transfer bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah untuk dibagikan kepada Pemerintah Desa. Rincian Belanja bagi hasil pendapatan sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.540.423.000,00	3.540.423.000,00	100,00	1.199.999.990,00	2.340.423.010,00	195,04
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.135.000,00	725.135.000,00	100,00	50.699.950,00	674.435.050,00	1.330,25
JUMLAH		4.265.558.000,00	4.265.558.000,00	100,00	1.250.699.940,00	3.014.858.060,00	241,05

Realisasi Belanja bagi hasil terjadi kenaikan yang signifikan. Ini disebabkan naiknya realisasi Pajak Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam sebagai dampak adanya objek pajak mineral bukan logam akibat aktivitas tambang pasir kuarsa. Semakin besarnya realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah akan berdampak pada belanja bagi hasil yang akan diterima oleh desa. Ini disebabkan terdapat kewajiban sebesar 10% atas pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7.5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp115.358.610.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	61.508.176.400,00	61.508.176.400,00	100,00	53.796.781.000,00	7.711.395.400,00	14,33
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.850.434.000,00	53.850.434.000,00	100,00	50.958.282.000,00	2.892.152.000,00	5,68
Jumlah		115.358.610.400,00	115.358.610.400,00	100,00	104.755.063.000,00	10.603.547.400,00	10,12

Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp115.358.610.400,00 terdiri dari:

- Transfer Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari Bantuan Dana Perimbangan selain DAK sebesar Rp61.508.176.400,00.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kepri Perhitungan alokasi formula alokasi dana desa yang telah disalurkan pada tahun anggaran 2023 terdapat kekeliruan penggunaan data, sehingga menyebabkan kekeliruan penetapan alokasi per desa. Adapun kekeliruan data yang digunakan adalah Jumlah Penduduk-JP Per Desa yang mempunyai besaran bobot perhitungan 25%, Jumlah Penduduk Miskin-JPM per desa yang mempunyai bobot perhitungan sebesar 35%, Luas Wilayah-LW per desa yang mempunyai bobot perhitungan 10%, dan Indeks Kesulitan Geografis-IKG per desa yang mempunyai bobot perhitungan 30%. Dengan terjadi kesalahan penggunaan data per desa menyebabkan kesalahan penetapan alokasi dana desa setiap desanya. Perhitungan kelebihan dan kekurangan alokasi dana desa setiap desa sebagai berikut:

Tabel 7.5.40 Selisih Kurang dan Selisih Lebih Perhitungan Alokasi Dana Desa

No	Nama Desa	Alokasi Formula	Alokasi Formula Simulasi	Selisih Kurang/Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	5(3-4)
1	Sebelat	104.708.000	110.217.000	(5.509.000)
2	Air Putih	98.165.000	85.949.000	12.216.000
3	Mekar Jaya	145.785.000	146.974.000	(1.189.000)
4	Binjai	149.381.000	146.030.000	3.351.000
5	Pian Tengah	140.939.000	132.344.000	8.595.000
6	Selaut	107.092.000	99.032.000	8.060.000
7	Kampung Hilir	100.413.000	104.166.000	(3.753.000)
8	Batu Berian	133.428.000	130.662.000	2.766.000
9	Tanjung Setelung	103.658.000	114.582.000	(10.924.000)
10	Tanjung Balau	97.187.000	100.943.000	(3.756.000)
11	Pangkalan	83.951.000	88.642.000	(4.691.000)
12	Jermalik	91.211.000	107.479.000	(16.268.000)
13	Sungai Ulu	270.088.000	271.835.000	(1.747.000)
14	Sepempang	250.870.000	245.229.000	5.641.000
15	Batu Gajah	181.055.000	167.234.000	13.821.000
16	Kelarik Utara	147.496.000	278.524.000	(131.028.000)
17	Kelarik	144.107.000	145.662.000	(1.555.000)
18	Kelarik Barat	94.476.000	99.978.000	(5.502.000)
19	Kelarik Air Mali	118.761.000	128.444.000	(9.683.000)
20	Teluk Buton	115.077.000	127.083.000	(12.006.000)
21	Belakang Gunung	85.083.000	87.918.000	(2.835.000)
22	Seluan Barat	87.632.000	88.829.000	(1.197.000)
23	Gunung Durian	104.935.000	97.677.000	7.258.000
24	Subi	129.545.000	134.831.000	(5.286.000)
25	Subi Besar	136.951.000	125.464.000	11.487.000
26	Meliah	92.700.000	94.791.000	(2.091.000)
27	Pulau Panjang	93.210.000	89.547.000	3.663.000
28	Terayak	109.806.000	110.062.000	(256.000)
29	Pulau Kerdau	88.814.000	69.487.000	19.327.000
30	Subi Besar Timur	135.280.000	128.520.000	6.760.000
31	Meliah Selatan	86.814.000	91.689.000	(4.875.000)
32	Tanjung Pala	147.234.000	162.440.000	(15.206.000)
33	Air Payang	187.994.000	185.982.000	2.012.000
34	Kadur	103.701.000	107.054.000	(3.353.000)
35	Sabang Mawang	124.226.000	125.012.000	(786.000)
36	Sededap	102.827.000	89.345.000	13.482.000
37	Tanjung Batang	196.165.000	185.417.000	10.748.000
38	Serantas	150.450.000	133.686.000	16.764.000
39	Sabang Mawang Barat	126.274.000	108.186.000	18.088.000
40	Teluk Labuh	99.297.000	82.571.000	16.726.000
41	Tanjung	159.139.000	152.570.000	6.569.000
42	Ceruk	155.098.000	152.968.000	2.130.000
43	Kelanga	172.515.000	170.280.000	2.235.000
44	Pengadah	140.027.000	139.293.000	734.000

No	Nama Desa	Alokasi Formula	Alokasi Formula Simulasi	Selisih Kurang/Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	5(3-4)
45	Sebadai Hulu	103.193.000	102.423.000	770.000
46	Limau Manis	117.848.000	108.578.000	9.270.000
47	Selemam	126.294.000	145.815.000	(19.521.000)
48	Tapau	160.253.000	131.181.000	29.072.000
49	Harapan Jaya	183.100.000	172.575.000	10.525.000
50	Air Lengit	192.719.000	168.011.000	24.708.000
51	Cemaga	215.961.000	197.939.000	18.022.000
52	Cemaga Selatan (Setengar)	126.152.000	174.581.000	(48.429.000)
53	Cemaga Utara (Singgang Bulan)	155.199.000	157.281.000	(2.082.000)
54	Cemaga Tengah	103.130.000	109.221.000	(6.091.000)
55	Arung Ayam	128.805.000	127.292.000	1.513.000
56	Air Nusa	133.320.000	140.975.000	(7.655.000)
57	Air Ringau	101.626.000	105.137.000	(3.511.000)
58	Payak	117.868.000	129.195.000	(11.327.000)
59	Batubi Jaya	248.083.000	238.093.000	9.990.000
60	Gunung Putri	196.917.000	191.631.000	5.286.000
61	Sedarat Baru	141.611.000	115.366.000	26.245.000
62	Sedanau Timur	102.796.000	123.421.000	(20.625.000)
63	Semedang	113.809.000	99.914.000	13.895.000
64	Pulau Tiga	139.878.000	132.419.000	7.459.000
65	Tanjung Kumbik Utara	123.008.000	117.474.000	5.534.000
66	Setumuk	96.554.000	102.476.000	(5.922.000)
67	Selading	109.492.000	97.480.000	12.012.000
68	Air Kumpai	102.381.000	102.430.000	(49.000)
69	Batu Belanak	105.998.000	89.197.000	16.801.000
70	Gunung Jambat	86.667.000	101.489.000	(14.822.000)
Jumlah		9.226.227.000	9.226.222.000	5.000

Atas kesalahan penetapan alokasi per desa sebagaimana di atas, akan dilakukan kebijakan penyelesaiannya di tahun 2024 dengan menetapkan Peraturan/keputusan Bupati Natuna tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar alokasi dana desa tahun 2023 di tahun 2024. Atas kekurangan penyaluran yang ditetapkan akan disalurkan ditahun 2024 untuk setiap desanya, dan atas penetapan kelebihan bayar akan dilakukan pemotongan alokasi dana desa tahun 2024 secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan setiap desa.

- Transfer Dana Desa sebesar Rp53.850.434.000,00.

Transfer Dana Desa sebesar Rp53.850.434.000,00 merupakan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening kas desa. Penetapan alokasi per desa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah Daerah mencatat belanja bantuan keuangan sebesar pendapatan dana desa yang bersumber dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan.

7.5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit LRA	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	159.010.716.668,50	(27.359.565.935,26)

Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2023 sebesar Rp159.010.716.668,50 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.41 Surplus/Defisit LRA

(dalam rupiah)							
No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Pendapatan	1.275.091.033.815,11	1.333.507.226.175,09	104,58	989.275.275.868,02	344.231.950.307,07	34,79
2.	Belanja	1.160.434.491.212,00	1.054.872.341.106,59	90,90	910.629.078.863,28	144.243.262.243,31	15,84
3.	Belanja	119.624.168.400,00	119.624.168.400,00	100,00	106.005.762.940,00	13.618.405.460,00	12,85

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan	%
	Transfer						
	Surplus (Defisit)	(4.967.625.796,89)	159.010.716.668,50	(3.200,94)	(27.359.565.935,26)	186.370.282.603,76	(681,19)

7.5.1.5 Pembiayaan

7.5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp4.961.941.796,89 atau sebesar 99,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.967.625.796,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.42 Penggunaan SiLPA

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Penggunaan SiLPA	4.967.625.796,89	4.961.941.796,89	99,89	32.327.191.732,15	(27.365.249.935,26)	(84,65)

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.961.941.796,89 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp4.967.625.796,89. Perbedaan anggaran dan realisasi Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.684.000,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara koreksi pencatatan saldo awal dana BOS SDN 004 Pulau Panjang Rp7.320.000,00 dengan koreksi saldo akhir BOP PAUD tahun 2022 TK Harapan Bunda yang pada tahun 2022 berstatus sekolah swasta menjadi TK dengan status sekolah negeri pada tahun 2023 dengan nama TK Negeri 002 Subi Rp1.636.000,00.

7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

SiLPA	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	163.972.658.465,39	4.967.625.796,89

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.972.658.465,39 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.43 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.275.091.033.815,11	1.333.507.226.175,09	104,58	989.275.275.868,02	344.231.950.307,07	34,79
2	Belanja	1.160.434.491.212,00	1.054.872.341.106,59	90,9	910.629.078.863,28	144.243.262.243,31	15,84
3	Transfer	119.624.168.400,00	119.624.168.400,00	100	106.005.762.940,00	13.618.405.460,00	12,85
4	Surplus (Defisit)	(4.967.625.796,89)	159.010.716.668,50	(3.200,94)	(27.359.565.935,26)	186.370.282.603,76	(680,96)
5	Pembiayaan Netto	4.967.625.796,89	4.961.941.796,89	99,89	32.327.191.732,15	-27.365.249.935,26	(84,63)
	SiLPA	0	163.972.658.465,39	100	4.967.625.796,89	159.005.032.668,50	3.200,83

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.972.658.465,39, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.44 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas
1	Kas di Kas Daerah	160.269.238.865,20
2	Kas di BLUD	2.163.231.053,38
3	Kas di Bendahara Penerimaan	54.224.500,00
4	Kas Dana BOS	134.737.273,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	253.805.728,81
6	Kas Lainnya – Dana BOP PAUD	3.555.714,00
7	Kas Lainnya – Dana BOK Puskesmas	1.093.865.331,00
	Jumlah	163.972.658.465,39

Perbedaan antara Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.972.658.465,39 dengan saldo kas dan setara kas di Neraca sebesar Rp164.087.995.928,39. Terdapat selisih Rp115.337.463,00 yang merupakan kas lainnya atas pengembalian dana bergulir yang belum diterima di kas daerah Per Tanggal

31 Desember 2023 yang terdiri dari Saldo Kas Dana Bergulir UMKM Rp104.956.213,00 dan Saldo Kas Dana Bergulir Perikanan Rp9.200.000,00. Kemudian Saldo Kas lainnya Bendahara Pengeluaran Kecamatan Serasan yang belum dicatat sebesar Rp1.181.250,00

Selain pengungkapan terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, diungkapkan juga terkait kejadian-kejadian yang mempengaruhi pengungkapan dan penyajian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu kejadian yang mempengaruhi adalah pembakaran dokumen pertanggungjawaban belanja daerah pada Puskesmas Serasan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Atas pembakaran tersebut mengakibatkan dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan JKN, Operasional dan BOK senilai Rp1.098.709.871,42 hangus terbakar. Sedangkan dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan JKN, Operasional dan BOK yang dapat diselamatkan senilai Rp1.288.754.257,00. Sampai saat proses penyusunan Laporan keuangan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersangkutan masih ditahan di Polsek Serasan dan sedang menjalankan proses hukum. Terkait tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut, Pemerintah Daerah akan meminta Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan apakah terdapat kerugian daerah yang ditimbulkan serta terdapat belanja yang fiktif.

7.5.2. LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		4.967.625.796,89	32.379.329.056,74

Nilai SAL awal sebesar Rp4.967.625.796,89 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.

7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		4.961.941.796,89	32.327.191.732,15

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah seluruh SAL akhir tahun 2022 ditambah koreksi atas saldo awal pada tahun 2023. Jumlah Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp4.961.941.796,89 yang merupakan realisasi dari SiLPA tahun 2022. Kemudian koreksi pencatatan SAL sebesar Rp5.684.000,00. Jumlah tersebut merupakan selisih penambahan koreksi saldo akhir BOP PAUD Tahun 2022 TK Harapan Bunda yang pada tahun 2022 berstatus sekolah swasta menjadi TK dengan status sekolah negeri pada tahun 2023 dengan nama TK Negeri 002 Subi sebesar Rp1.636.000,00, dan pengurangan koreksi lebih catat saldo awal dana BOS Sekolah Dasar SDN 004 Pulau Panjang sebesar Rp7.320.000,00.

7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		163.972.658.465,39	4.967.625.796,89

(SILPA/SIKPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 yang telah dilakukan koreksi pencatatan adalah sebesar Rp163.972.658.465,39.

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(5.684.000,00)	(52.137.324,59)

Untuk tahun 2023 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp(5.684.000,00). Jumlah tersebut merupakan selisih penambahan koreksi Saldo akhir BOP PAUD Tahun 2022 TK Harapan Bunda yang pada tahun 2022 berstatus sekolah swasta menjadi TK dengan status sekolah negeri pada tahun 2023 dengan nama TK Negeri 002 Subi sebesar Rp1.636.000,00, dan pengurangan koreksi lebih catat saldo awal dana BOS Sekolah Dasar SDN 004 Pulau Panjang sebesar Rp7.320.000,00.

7.5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		163.972.658.465,39	4.967.625.796,89

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp163.972.658.465,39.

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	214.859.324.034,80	79.337.316.724,46

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp214.859.324.034,80 terdiri dari kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan dan beban dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	164.087.995.928,39	5.125.743.882,89
Piutang	79.891.887.873,71	99.296.686.051,96
Penyisihan Piutang	(49.532.956.905,69)	(47.758.915.754,79)
Beban Dibayar Dimuka	756.512.500,01	284.791.666,66
Persediaan	19.655.884.638,38	22.389.010.877,74
Jumlah	214.859.324.034,80	79.337.316.724,46

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	164.087.995.928,39	5.125.743.882,89

Nilai saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.087.995.928,39 merupakan saldo di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Kas Daerah	160.269.238.865,20	2.558.239.608,75
Kas di BLUD	2.163.231.053,38	1.859.924.388,90
Kas di Bendahara Penerimaan	54.224.500,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Dana BOS	134.737.273,00	194.546.712,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	253.805.728,81	386.955.981,24
Kas Lainnya	1.212.758.508,00	126.077.192,00

Kas dan Bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.087.995.928,39 terdiri dari:

7.5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	160.269.238.865,20	2.558.239.608,75

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.269.238.865,20 terdiri dari:

Tabel 7.5.45 Rincian Kas di Kas Daerah

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023
	Bank Riau Kepri Syariah KCP Ranai Natuna	
1	Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010)	160.192.806.478,20
2	Rekening Penerimaan Daerah (No. Rek. 117-02-22222)	76.432.387,00
3	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 11-70-23333-3)	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah	160.269.238.865,20

Saldo Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010) secara pembukuan Rp160.192.806.478,20 dan saldo rekening koran (No. Rek. 117-02-00010) sebesar Rp160.159.675.299,20. Perbedaan saldo kas buku dan saldo bank sebesar Rp33.131.179,00 yang merupakan pengembalian Belanja yang secara buku telah dicatat sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh Bank. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari pengembalian belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp29.750.000,00, pengembalian Belanja pada Dinas Perikanan Rp1.760.679,00, dan pengembalian belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp1.620.500,00.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan kebijakan pemanfaatan kas dengan melakukan penempatan deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bulan berikutnya. Penempatan dalam bentuk deposito tersebut dilakukan pada bulan September sejumlah Rp20.000.000.000,00 pada Bank Riau Kepri Syariah dan sejumlah Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mandiri KCP Natuna. Deposito tersebut telah dicairkan pada bulan Oktober 2023 dan seluruh dananya sudah dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Sehingga Deposito Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 Rp0,00.

7.5.3.1.2 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di BLUD	2.163.231.053,38	1.859.924.388,90

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.163.231.053,38 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.46 Rincian Kas di BLUD

<i>(dalam rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	2.163.231.053,38
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 109-00-1378157-0)	0,00
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	2.163.231.053,38

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 merupakan saldo yang berada di rekening bank. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah Rp0,00. Rekening Bank Mandiri 109-00-1378157-0 telah dilakukan penutupan dan tidak digunakan lagi dalam proses operasional BLUD, dan semua saldo yang terdapat pada rekening tersebut telah dipindahkan ke Rekening Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor 11-70-20213-9 pada tahun sebelumnya.

7.5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.224.500,00. Kas Bendahara Penerimaan merupakan saldo atas retribusi daerah yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp598.000,00 yang berada pada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp53.626.500,00 yang berada pada bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup.

7.5.3.1.4 Kas Dana BOS

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas Dana BOS	134.737.273,00	194.546.712,00

Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 sebesar Rp134.737.273,00. Perhitungan Saldo Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Perhitungan Posisi Kas Dana BOS Pada Dinas Pendidikan

<i>(dalam rupiah)</i>								
No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan 2023	Pengurangan			Saldo 31 Desember 2023
					Belanja 2023	Penyetoran Utang PFK TA 2022	Penyetoran Pajak Restoran TA 2022	
1	Dana BOS SD	54.220.461,00	(7.320.000,00)	10.825.190.138,00	10.822.254.549,00	22.006.615,00	6.117.200,00	29.032.235,00
2	Dana BOS SMP	140.326.251,00	0,00	4.611.438.688,00	4.641.025.790,00	4.632.331,00	401.780,00	105.705.038,00
JUMLAH		194.546.712,00	(7.320.000,00)	15.436.628.826,00	15.463.280.339,00	26.638.946,00	6.518.980,00	134.737.273,00

Koreksi Saldo Awal Dana BOS Rp(7.320.000,00) merupakan koreksi saldo awal dana BOS SDN 004 Pulau Panjang. Penyetoran utang PFK Rp26.638.946,00 dan Penyetoran pajak Restoran Rp6.518.980,00 merupakan utang PFK dan potongan pajak daerah yang dipungut pada tahun 2022 yang dilakukan penyetoran pada tahun 2023 hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana BOS yang disajikan dalam Kas Dana BOS adalah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berstatus sekolah negeri. Sedangkan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berstatus swasta dicatat sebagai Belanja hibah dan saldo atas penggunaan belanja tidak dicatat sebagai saldo dana BOS.

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SD sebagai berikut:

Tabel 7.5.48 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SD

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
1	11.002.363	SD Negeri 001 Sabang Barat	Midai	105.000,00
2	11.001.175	SD Negeri 002 Air Putih	Midai	45.243,00
3	11.001.185	SD Negeri 003 Sabang Barat	Midai	0,00
4	11.001.196	SD Negeri 004 Gunung Sebelat	Midai	0,00
5	11.001.161	SD Negeri 001 Sedanau	Bunguran Barat	0,00
6	11.001.173	SD Negeri 002 Sedanau	Bunguran Barat	0,00
7	11.001.314	SD Negeri 003 Sedanau	Bunguran Barat	0,00
8	11.001.332	SD Negeri 004 Pian Tengah	Bunguran Barat	1.050.000,00
9	11.001.341	SD Negeri 005 Sedanau	Bunguran Barat	0,00
10	11.001.347	SD Negeri 006 Sedanau	Bunguran Barat	0,00
11	11.001.353	SD Negeri 007 Selaut	Bunguran Barat	0,00
12	11.001.359	SD Negeri 008 Binjai	Bunguran Barat	4.388.000,00
13	11.001.375	SD Negeri 009 Mekar Jaya	Bunguran Barat	0,00
14	11.001.380	SD Negeri 010 Sedanau	Bunguran Barat	0,00
15	11.001.160	SD Negeri 001 Ranai	Bunguran Timur	0,00
16	11.001.172	SD Negeri 002 Ranai	Bunguran Timur	298,00
17	11.001.190	SD Negeri 003 Sungai Ulu	Bunguran Timur	0,00
18	11.001.308	SD Negeri 004 Ranai	Bunguran Timur	209.188,00
19	11.001.326	SD Negeri 005 Sepempang	Bunguran Timur	155.250,00
20	11.001.350	SD Negeri 006 Bandarsyah	Bunguran Timur	4.310.580,00
21	11.001.357	SD Negeri 007 Ranai Darat	Bunguran Timur	13.858.002,00
22	11.001.368	SD Negeri 008 Batu Gajah	Bunguran Timur	0,00
23	11.001.378	SD Negeri 009 Bandarsyah	Bunguran Timur	0,00
24	11.001.383	SD Negeri 010 Batu Gajah	Bunguran Timur	0,00
25	11.002.764	SD Negeri 011 Ranai	Bunguran Timur	0,00
26	69.964.075	SD Negeri 012 Ranai	Bunguran Timur	10.000,00
27	11.002.364	SD Negeri 001 Serasan	Serasan	0,00
28	11.001.165	SD Negeri 002 Serasan	Serasan	0,00
29	11.001.191	SD Negeri 003 Tanjung Balau	Serasan	0,00
30	11.001.197	SD Negeri 004 Jermalik	Serasan	0,00
31	11.001.311	SD Negeri 005 Pangkalan	Serasan	50.000,00
32	11.001.316	SD Negeri 006 Batu Berian	Serasan	0,00
33	11.001.328	SD Negeri 007 Hilir	Serasan	0,00
34	11.001.162	SD Negeri 001 Subi	Subi	0,00
35	11.002.509	SD Negeri 002 Meliah	Subi	240.000,00
36	11.001.181	SD Negeri 003 Subi Besar	Subi	0,00
37	11.001.186	SD Negeri 004 Pulau Panjang	Subi	102.000,00
38	11.001.198	SD Negeri 005 Kerdau	Subi	0,00
39	11.002.358	SD Negeri 001 Kelarik Air Mali	Bunguran Utara	0,00
40	11.001.168	SD Negeri 002 Kelarik	Bunguran Utara	100.000,00
41	11.001.178	SD Negeri 003 Kelarik Utara	Bunguran Utara	0,00
42	11.001.189	SD Negeri 004 Kelarik Barat	Bunguran Utara	0,00
43	11.001.302	SD Negeri 005 Teluk Buton	Bunguran Utara	0,00
44	11.002.448	SD Negeri 001 Air Payang	Pulau Laut	0,00
45	11.001.174	SD Negeri 002 Tanjung Pala	Pulau Laut	25.000,00
46	11.001.177	SD Negeri 003 Kadur	Pulau Laut	40.000,00
47	11.001.192	SD Negeri 001 Tanjung Batang	Pulau Tiga	0,00
48	11.001.300	SD Negeri 002 Sededap	Pulau Tiga	0,00
49	11.001.304	SD Negeri 003 Sabang Mawang	Pulau Tiga	15.000,00
50	11.001.327	SD Negeri 004 Serantas	Pulau Tiga	0,00
51	11.001.182	SD Negeri 001 Tanjung	Bunguran Timur Laut	1.486.130,00
52	11.001.312	SD Negeri 002 Kelanga	Bunguran Timur Laut	0,00
53	11.001.319	SD Negeri 003 Pengadah	Bunguran Timur Laut	0,00
54	11.001.335	SD Negeri 004 Ceruk	Bunguran Timur Laut	0,00
55	11.001.372	SD Negeri 005 Limau Manis	Bunguran Timur Laut	0,00
56	11.001.381	SD Negeri 006 Selemam	Bunguran Timur Laut	1.000,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
57	11.001.382	SD Negeri 007 Sebadai Hulu	Bunguran Timur Laut	0,00
58	11.001.360	SD Negeri 001 Harapan Jaya	Bunguran Tengah	256.000,00
59	11.001.365	SD Negeri 002 Tapau	Bunguran Tengah	471.784,00
60	11.001.370	SD Negeri 003 Air Lengit	Bunguran Tengah	1.064.968,00
61	11.001.195	SD Negeri 001 Cemaga	Bunguran Selatan	0,00
62	11.001.330	SD Negeri 002 Cemaga Tengah	Bunguran Selatan	0,00
63	11.001.345	SD Negeri 003 Cemaga Utara	Bunguran Selatan	0,00
64	11.001.346	SD Negeri 004 Cemaga Selatan	Bunguran Selatan	0,00
65	11.001.376	SD Negeri 005 Cemaga Selatan	Bunguran Selatan	0,00
66	11.001.384	SD Negeri 006 Cemaga Selatan	Bunguran Selatan	0,00
67	11.001.176	SD Negeri 001 Arung Ayam	Serasan Timur	0,00
68	11.001.303	SD Negeri 002 Air Nusa	Serasan Timur	0,00
69	11.001.325	SD Negeri 003 Payak	Serasan Timur	0,00
70	69.893.603	SD Negeri 004 Air Ringau	Serasan Timur	100.000,00
71	11.001.338	SD Negeri 001 Sedanau Timur	Bunguran Batubi	0,00
72	11.001.366	SD Negeri 002 Batubi Jaya	Bunguran Batubi	947.812,00
73	11.001.369	SD Negeri 003 Gunung Putri	Bunguran Batubi	0,00
74	11.001.371	SD Negeri 004 Sedarat Baru	Bunguran Batubi	0,00
75	11.001.374	SD Negeri 005 Batubi Jaya	Bunguran Batubi	0,00
76	11.001.183	SD Negeri 001 Pulau Tiga	Pulau Tiga Barat	0,00
77	11.001.321	SD Negeri 002 Selading	Pulau Tiga Barat	0,00
78	11.001.358	SD Negeri 003 Setumuk	Pulau Tiga Barat	0,00
79	11.001.167	SD Negeri 001 Batu Belanak	Suak Midai	0,00
80	11.001.305	SD Negeri 002 Gunung Jambat	Suak Midai	980,00
Jumlah				29.032.235,00

Rincian Dana BOS tingkat SMP sebagai berikut:

Tabel 7.5.49 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SMP

(dalam rupiah)				
No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
1	11.002.363	SMP Negeri 1 Midai	Midai	0,00
2	11.001.161	SMP Negeri 1 Bunguran Barat	Bunguran Barat	2.473.788,00
3	11.001.173	SMP Negeri SATAP Pian Tengah	Bunguran Barat	0,00
4	11.001.314	SMP Negeri 3 SATAP Bunguran Barat	Bunguran Barat	0,00
5	11.001.160	SMP Negeri 1 Bunguran Timur	Bunguran Timur	90.885.150,00
6	11.001.172	SMP Negeri 2 Bunguran Timur	Bunguran Timur	0,00
7	11.001.190	SMP Negeri 3 Bunguran Timur	Bunguran Timur	0,00
8	11.002.364	SMP Negeri 1 Serasan	Serasan	0,00
9	11.001.165	SMP Negeri 2 SATAP Serasan	Serasan	0,00
10	11.001.191	SMP Negeri 3 SATAP Serasan	Serasan	0,00
11	11.001.162	SMP Negeri 1 Subi	Subi	9.260.098,00
12	11.002.057	SMP Negeri 2 SATAP Pulau Panjang	Subi	0,00
13	11.002.358	SMP Negeri 1 Bunguran Utara	Bunguran Utara	0,00
14	11.001.168	SMP Negeri 2 Bunguran Utara	Bunguran Utara	0,00
15	11.001.178	SMP Negeri 3 SATAP Bunguran Utara	Bunguran Utara	0,00
16	11.002.448	SMP Negeri 1 Pulau Laut	Pulau Laut	0,00
17	11.001.192	SMP Negeri 1 Pulau Tiga	Pulau Tiga	0,00
18	11.001.182	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	Bunguran Timur Laut	0,00
19	11.001.312	SMP Negeri SATAP Pengadah	Bunguran Timur Laut	0,00
20	11.001.360	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	Bunguran Tengah	2.308.530,00
21	11.001.195	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	524.500,00
22	11.001.330	SMP Negeri 2 SATAP Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	0,00
23	11.001.176	SMP Negeri 1 Serasan Timur	Serasan Timur	0,00
24	11.001.338	SMP Negeri 1 Bunguran Batubi	Bunguran Batubi	2.972,00
25	11.001.183	SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga Barat	250.000,00
Jumlah				105.705.038,00

7.5.3.1.5 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	253.805.728,81	386.955.981,24

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.805.728,81. Saldo pada Bendahara Dana Kapitasi FKTP Puskesmas dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.50 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

Kode Unit Kerja	Nama FKTP	Jumlah
1.02.01.03.	Puskesmas Ranai	32.100.992,00
1.02.01.04.	Puskesmas Tanjung	11.761.945,00
1.02.01.05.	Puskesmas Bunguran Tengah	5.811.325,00
1.02.01.06.	Puskesmas Bunguran Selatan	4.144.364,00
1.02.01.07.	Puskesmas Kelarik	17.413.193,00
1.02.01.08.	Puskesmas Sedanau	72.202.815,57
1.02.01.09.	Puskesmas Pulau Tiga	57.276.752,00
1.02.01.10.	Puskesmas Pulau Laut	1.015.089,00
1.02.01.11.	Puskesmas Midai	14.306.058,00
1.02.01.12.	Puskesmas Serasan	4.223.440,03
1.02.01.13.	Puskesmas Serasan Timur	948.985,00
1.02.01.14.	Puskesmas Subi	3.098.037,00
1.02.01.15.	Puskesmas Batubi Jaya	23.743.093,21
1.02.01.16.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	5.759.640,00
Jumlah		253.805.728,81

7.5.3.1.6 Kas Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Kas Lainnya	1.212.758.508,00	126.077.192,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.212.758.508,00 Saldo Kas Lainnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.51 Daftar Saldo Kas Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah	3.555.714,00
2	Saldo Kas Piutang Dana Bergilir	114.156.213,00
3	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	1.093.865.331,00
4	Saldo Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran Serasan	1.181.250,00
Jumlah		1.212.758.508,00

Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah merupakan saldo kas dari pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun 2023 yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah. Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah Rp3.555.714,00. Saldo awal Kas dana BOP PAUD Pada tahun 2022 Rp1.194.164,00. Pada Tahun 2023 terdapat perubahan status sekolah TK Harapan Bunda yang pada tahun 2022 berstatus sekolah swasta menjadi TK dengan status sekolah negeri pada tahun 2023 dengan nama TK Negeri 002 Subi, sehingga dilakukan koreksi atas saldo awal sekolah tersebut sebesar Rp1.636.000,00. Sehingga saldo awal Dana BOP PAUD pada Sekolah setelah dilakukan koreksi pencatatan sebesar Rp2.830.164. Saldo Dana BOP PAUD tahun 2023 pada Sekolah Rp3.555.714,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.52 Daftar Saldo Kas Lainnya- Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Saldo
1	69870157	TK NEGERI 001 BUNGURAN BARAT	0,00
2	11002724	TK NEGERI 002 BUNGURAN BARAT	100.000,00
3	11002726	TK NEGERI BUNGURAN BATUBI	0,00
4	69870178	TK NEGERI BUNGURAN SELATAN	192.000,00
5	11002758	TK NEGERI BUNGURAN TENGAH	0,00
6	P9970341	SKB NATUNA	0,00
7	11002738	TK NEGERI 001 PEMBINA BUNGURAN TIMUR	225.000,00
8	69934196	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR	1.920.164,00
9	11003237	TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	0,00
10	11003229	TK PERTIWI RANAI (TK NEGERI 004 BUNGURAN TIMUR)	192.000,00
11	69870174	TK BHAKTI LESTARI (TK NEGERI 004 BUNGURAN TIMUR LAUT)	0,00
12	11002757	TK NEGERI 001 BUNGURAN TIMUR LAUT	600,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Saldo
13	69870173	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT	625.950,00
14	69870172	TK AL-BANNA (TKN 003 BUNGURAN TIMUR LAUT)	0,00
15	11002746	TK HARAPAN BANGSA (TK NEGERI 002 BUNGURAN UTARA)	0,00
16	11003233	TK NEGERI BUNGURAN UTARA	300.000,00
17	11002451	TK NEGERI MIDAI	0,00
18	11002750	TK NEGERI PULAU LAUT	0,00
19	11002752	TK NEGERI PULAU TIGA BARAT	0,00
20	11002731	TK NEGERI SERASAN	0,00
21	11002760	TK NEGERI SERASAN TIMUR	0,00
22	11002749	TK HARAPAN BUNDA (TK NEGERI 002 SUBI)	0,00
23	11002747	TK NEGERI SUBI	0,00
24	69870192	KB ABDI PERTIWI	0,00
25	69870183	KB AISYIYAH	0,00
26	69870219	KB AL ARIF	0,00
27	69870198	KB AL ATHFAL	0,00
28	69870218	KB AL HIDAYAH	0,00
29	69870187	KB AL HIDAYAH	0,00
30	69870197	KB AN NUSHUR	0,00
31	69890750	KB AS-SHOFAH	0,00
32	69870185	KB BAKTI BUNDA	0,00
33	69870214	KB BATU MAS	0,00
34	69870188	KB BINA KASIH	0,00
35	69870220	KB BOCAH PINTAR	0,00
36	69870222	KB BUAH HATI	0,00
37	69870207	KB BUAH HATI AN NUR	0,00
38	69870213	KB CAHAYA IBU	0,00
39	69935480	KB CAHAYA UTARA	0,00
40	69870193	KB H MUHAMMAD NUR	0,00
41	69870216	KB HARAPAN BUNDA	0,00
42	69890748	KB JAMBU AIR	0,00
43	69870217	KB KASIH IBU	0,00
44	69870186	KB KASIH IBU	0,00
45	69870211	KB KELANGA INDAH	0,00
46	69934064	KB MUSLIMAT NU MIFTAHUL JANNAH	0,00
47	69870189	KB MITRA BUNDA	0,00
48	69870184	KB NURUDDINIYAH	0,00
49	69933935	KB PELITA UTARA	0,00
50	69870206	KB PERMATA BUNDA	0,00
51	69870223	KB PERMATA BUNDA	0,00
52	69870227	KB PUTRI BALQITS	0,00
53	69934077	KB RA KARTINI	0,00
54	69870196	KB RESTU BUNDA	0,00
55	69934195	KB ROUDLOTUL ATFAL	0,00
56	69870205	KB SAYANG IBU	0,00
57	69870212	KB SAYANG IBU	0,00
58	69870209	KB SEDULANG INDAH	0,00
59	69890751	KB TERANG PERMATA	0,00
60	69870215	KB TERATAI	0,00
61	69870204	KB TERATAI	0,00
62	69933941	KB WONDERFUL KIDS	0,00
63	11002730	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	0,00
64	69870177	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3	0,00
65	69870176	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4	0,00
66	69934060	TK AR RAHMAN	0,00
67	11002727	TK. AL AROFAH	0,00
68	11002728	TK AL BA'DIYAH	0,00
69	69870163	TK AL FITRAH	0,00
70	69870161	TK AN NUR	0,00
71	69870168	TK ANGKASA LANUD RADEN SADJAD	0,00
72	69870179	TK ASH SHOFFA	0,00
73	11002745	TK BINA WIDYA	0,00
74	69870181	TK HARAPAN BUNDA	0,00
75	69942421	TK ISLAM NURUL HIKMAH	0,00
76	69956578	TK ISLAM TERPADU IBNU ABBAS	0,00
77	69890746	TK ISLAM TERPADU PADANG KEMANGI	0,00
78	69870166	TK MERCY	0,00
79	69870167	TK MUSLIMAT NU AN NAFIYAH	0,00
80	69870164	TK MUTIARA	0,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Saldo
81	11002743	TK NURUL HIDAYAH	0,00
82	69890743	TK PADAMU NEGERI	0,00
83	69890747	TK PERMATA MAHARANI	0,00
84	69934065	TK PERMATA PANGKALAN	0,00
85	69870182	TK SETIA	0,00
86	69890744	TK WONDERFUL KIDS	0,00
87	11002725	TK YASPEN KUSUMA BANGSA	0,00
88	69870225	KB SEHATI	0,00
89	69870226	KB PERMATA IBU	0,00
90	69870232	KB PERMATA HATI	0,00
91	69870159	TK AL JANNAH	0,00
92	69890742	TK AL UMMI	0,00
93	11002729	TK BAKTI MALIA	0,00
94	69870221	KB MELATI PUTIH	0,00
95	69870180	TK AL-KHOIR	0,00
96	70009714	KB MUTIARA	0,00
97	69870170	TK ISLAM TERPADU (IT) BUMI BAHARI	0,00
98	69870194	KB AL-HIDAYAH KS	0,00
99	11002756	TK AN-NUSHUR	0,00
100	11002733	TK AL ABSHAR	0,00
101	69970249	TK. ISLAM TERPADU AL IKHLAS SELAUT	0,00
102	69870208	KB PERDANA BUNDA	0,00
103	69870210	KB MUTIARA HATI	0,00
Jumlah			3.555.714,00

Saldo Kas Piutang Dana Bergulir Rp114.156.213,00 merupakan Saldo Pengembalian dari piutang dana bergulir yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian Saldo Pengelolaan Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Sebagai berikut:

Tabel 7.5.53 Daftar Saldo Kas Lainnya Dana Bergulir

<i>(dalam rupiah)</i>				
No.	Jenis Dana Bergulir	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jumlah
1	UKM	Peng. Pokok Dana Bergulir Kab. Natuna 2007	11-70-20087-1	104.956.213,00
2	Perikanan	Dana Kredit Pengelolaan yg belum disalurkan	2-135-301-000 00117	9.200.000,00
Jumlah				114.156.213,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo kas dari pengelolaan DAK Non Fisik BOK Puskesmas Tahun 2023 yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Puskesmas (FKTP). Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Rp1.093.865.331,00 sebagai berikut:

Tabel 7.5.54 Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

<i>(dalam rupiah)</i>		
Kode Unit Kerja	Nama FKTP	Jumlah
1.02.01.03.	Puskesmas Ranai	74.257.114,00
1.02.01.04.	Puskesmas Tanjung	8.261,00
1.02.01.05.	Puskesmas Bunguran Tengah	156.513.066,00
1.02.01.06.	Puskesmas Bunguran Selatan	114.769.199,00
1.02.01.07.	Puskesmas Kelarik	222.919.883,00
1.02.01.08.	Puskesmas Sedanau	136.004.230,00
1.02.01.09.	Puskesmas Pulau Tiga	43.223.062,00
1.02.01.10.	Puskesmas Pulau Laut	276.844,00
1.02.01.11.	Puskesmas Midai	72.893.736,00
1.02.01.12.	Puskesmas Serasan	69.802.174,00
1.02.01.13.	Puskesmas Serasan Timur	110.613,00
1.02.01.14.	Puskesmas Subi	62.084.328,00
1.02.01.15.	Puskesmas Batubi Jaya	53.697.796,00
1.02.01.16.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	87.305.025,00
Jumlah		1.093.865.331,00

Saldo Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran Serasan sebesar Rp1.181.250,00, merupakan saldo atas pembayaran honorarium pengurus barang pada Kecamatan Serasan yang

sampai dengan 31 Desember 2023 masih berada pada rekening bendahara pengeluaran serasan dan belum diteruskan ke penerima. Atas pembayaran tersebut telah diteruskan ke penerima pada minggu pertama bulan Januari 2024.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil kebijakan terkait pelaksanaan transaksi Non Tunai dimana untuk mekanisme pembayaran atas 1 (satu) dokumen pembayaran yang melebihi dari 1 (satu) penerima (pembayaran dengan *system payroll*) dilakukan dengan menggunakan rekening penampung Bank. Dikarenakan keterlambatan dari penerimaan daerah, dimana baru terdapat kesediaan dana untuk pembayaran tagihan per tanggal 29 Desember 2023, maka transaksi atas pembayaran sebagaimana dimaksud tidak bisa diteruskan ke rekening penerima Bank lainnya (selain Bank Riau Kepri Syariah) oleh Bank Riau Kepri Syariah selaku Bank Pemegang Kas Umum Daerah. Masalah tersebut terkait dengan Sistem Kliring Nasional yang merupakan kebijakan Bank Indonesia dan Kebijakan Bank Riau Kepri Syariah tidak bisa meneruskan transaksi di tanggal 30 dan 31 Desember 2023 melalui teller Bank. Atas transaksi Belanja yang belum diteruskan tersebut masih terdapat di Rekening Penampung Bank Riau Kepri Syariah Per 31 Desember 2023. Selain hal tersebut, masih terdapat sisa pembulatan atas pembayaran gaji pada tahun 2023. Rincian saldo rekening tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.5.55 Daftar Saldo Rekening Penampung yang belum diteruskan ke Penerima Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)				
No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo 31 Des 2023
1	Riau Kepri Syariah	1172500011	Titipan Gaji Ptt Satpol	6.655.345,00
2	Riau Kepri Syariah	1172500013	Titipan Gaji Setda	29.005.000,00
3	Riau Kepri Syariah	1172500017	Titipan Gaji Dmpd	136.700,00
4	Riau Kepri Syariah	1172500020	Titipan Gaji Kontrak Dinkes/Puskesmas Natuna	637.703,00
5	Riau Kepri Syariah	1172500040	Titipan Gaji Dprkpp	19.800.000,00
6	Riau Kepri Syariah	1172500044	Titipan Gaji Dinas Pendidikan	310.712.685,00
7	Riau Kepri Syariah	1172500045	Titipan Gaji Ptt Rsud	214.874.200,00
8	Riau Kepri Syariah	1172500053	Titipan Gaji Dinas Perikanan	15.010.000,00
9	Riau Kepri Syariah	1172500054	Titipan Gaji Damkar & Penyelamatan	83.408.930,00
10	Riau Kepri Syariah	1172500057	Titipan Gaji BP3D Kab Natuna	122.850.000,00
11	Riau Kepri Syariah	1172500059	Titipan Gaji BKPSDM	191.808,00
12	Riau Kepri Syariah	1172500069	Titipan Gaji Disdik Kec Suak Midai	3,00
13	Riau Kepri Syariah	1172500075	Titipan Gaji Disdik Kec Bung Tengah	765.156,00
14	Riau Kepri Syariah	1172500076	Titipan Gaji Disdik Kec Bung Timur Laut	1,00
15	Riau Kepri Syariah	1172500084	Titipan Gaji Kec.Subi	80.893,00
16	Riau Kepri Syariah	1172500085	Titipan Gaji Kec.Bung Tengah	20,00
17	Riau Kepri Syariah	1172500087	Titipan Gaji Kec.Pulau Laut	360,00
18	Riau Kepri Syariah	1172500089	Titipan Gaji Kec.Pulau Tiga Barat	20.050,00
19	Riau Kepri Syariah	1172500093	Titipan Gaji BPKPD	59.710.500,00
Total				863.859.354,00

Atas rekening tersebut sudah diteruskan ke penerima pada saat laporan keuangan ini disampaikan.

Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang daerah merupakan salah satu komponen penting dalam neraca yang akan menambah aset lancar yang merupakan hak pemerintah daerah untuk menagih dan mencatatnya.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang	79.891.887.873,71	99.296.686.051,96

Piutang tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 7.5.56 Saldo Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1	Piutang Pajak	22.755.123.774,81	20.616.125.160,06
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.915.470.599,90	41.608.034.416,90
3	Piutang Transfer Antar Daerah	18.221.293.499,00	37.072.526.475,00
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		79.891.887.873,71	99.296.686.051,96

7.5.3.1.7 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.755.121.774,80 merupakan nilai piutang pajak yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Saldo Piutang Pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.57 Daftar Mutasi Saldo Piutang Pajak Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Penambahan 2023		Pengurangan 2023		Saldo per 31 Desember 2023
			Ketetapan baru (Piutang 2023)	Koreksi Pencatatan	Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Pajak Restoran	0,00	44.142.363,64	0,00	0,00	0,00	44.142.363,64
2	Piutang Pajak Reklame	47.480.000,00	142.088.250,00	0,00	143.346.250,00	0,00	46.222.000,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20.441.465.531,00	4.002.426.894,00	456.952,00	1.374.421.082,00	529.957.026,00	22.539.971.269,00
4	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	127.179.629,06	4.381.502.773,00	1,24	4.383.894.259,00	2,13	124.788.142,17
Jumlah		20.616.125.160,06	8.570.160.280,64	456.953,24	5.901.661.591,00	529.957.028,13	22.755.123.774,81

- 1) Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.142.363,64, merupakan koreksi kurang catat Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang belum disetor (atas transaksi makan minum pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan Bunguran Timur dan Sekretariat DPRD).
- 2) Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.222.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo per 31 Des 2022	Ketetapan baru (Piutang 2023)	Pembayaran 2023	Saldo per 31 Des 2023
2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
2019	7.364.000,00	0,00	0,00	7.364.000,00
2020	3.832.000,00	0,00	767.000,00	3.065.000,00
2021	2.736.000,00	0,00	0,00	2.736.000,00
2022	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00	0,00
2023	0,00	142.088.250,00	140.681.250,00	1.407.000,00
Jumlah	47.480.000,00	142.088.250,00	143.346.250,00	46.222.000,00

- 3) Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.539.971.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(dalam rupiah)

Tahun pajak	Saldo per 31 Des 2022	Penambahan Ketetapan TA 2023		Pengurangan				Saldo per 31 Des 2023
		Ketetapan Tahun 2023	Pembetulan	Pembayaran 2023	Relaksasi	Pembetulan	Koreksi Pencatatan	
2010	769.821.030,00	0,00	0,00	4.324.161,00	4.600.204,00	6.681.661,00	0,00	754.215.004,00
2011	785.952.460,00	0,00	0,00	4.654.836,00	5.185.020,00	12.815.941,00	0,00	763.296.663,00
2012	807.298.681,00	0,00	0,00	5.479.011,00	5.881.468,00	12.815.941,00	0,00	783.122.261,00
2013	863.496.512,00	0,00	0,00	5.450.220,00	5.546.941,00	12.324.162,00	242.200,00	839.932.989,00
2014	842.009.615,00	0,00	0,00	7.524.096,00	3.801.133,00	12.794.182,00	1,00	817.890.203,00
2015	883.073.181,00	0,00	0,00	8.499.865,00	4.260.340,00	12.353.859,00	1,00	857.959.116,00
2016	875.840.646,00	0,00	0,00	9.260.552,00	4.823.076,00	12.129.443,00	0,00	849.627.575,00
2017	1.750.406.264,00	0,00	0,00	17.189.165,00	9.593.187,00	60.470.826,00	0,00	1.663.153.086,00
2018	2.029.888.741,00	0,00	0,00	31.764.699,00	10.259.246,00	61.195.063,00	0,00	1.926.669.733,00
2019	2.255.245.790,00	0,00	456.952,00	44.291.020,00	13.083.664,00	57.253.480,00	0,00	2.141.074.578,00
2020	2.602.782.909,00	0,00	0,00	55.228.258,00	15.639.590,00	53.958.759,00	0,00	2.477.956.302,00
2021	2.872.092.994,00	0,00	0,00	83.305.682,00	24.178.807,00	51.741.478,00	0,00	2.712.867.027,00
2022	3.103.556.708,00	0,00	0,00	149.249.671,00	4.194.784,00	52.132.569,00	0,00	2.897.979.684,00
2023	0,00	4.002.426.894,00	0,00	948.199.846,00	0,00	0,00	0,00	3.054.227.048,00
Jumlah	20.441.465.531,00	4.002.426.894,00	456.952,00	1.374.421.082,00	111.047.460,00	418.667.364,00	242.202,00	22.539.971.269,00

Terdapat selisih antara Pembayaran 2023 dengan Realisasi PBB-P2 dalam laporan realisasi anggaran sejumlah Rp11.618,00 yang merupakan kelebihan pembayaran PBB-P2 selama tahun 2023 yang dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan. Kemudian terdapat kebijakan relaksasi pembayaran PBB-P2 selama tahun 2023 yang mempengaruhi dari pengurangan piutang PBB-P2 tahun sebelumnya sebesar Rp111.047.460,00 dan terdapat pembetulan dari ketetapan yang telah terbit tahun sebelumnya yang mempengaruhi penambahan sebesar Rp456.952,00 dan pengurangan sebesar Rp418.667.364,00. Terdapat koreksi pencatatan sejumlah Rp242.202,00 pada posisi pengurangan merupakan koreksi atas pembetulan transaksi tahun-tahun sebelumnya yang telah dicatat oleh aplikasi Income Poin PBB-P2 tetapi belum dilakukan koreksi dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.

- 4) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp124.788.142,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.60 Rincian Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir per 31 Desember 2023
		Ketetapan baru (Piutang 2023)	Koreksi Pencatatan	Pembayaran 2023	Koreksi Pencatatan	
2017	308.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	308.939,38
2018	44.264.150,51	0,00	0,00	889.338,00	0,75	43.374.811,76
2019	40.907.505,36	0,00	1,24	536.410,00	0,63	40.371.095,97
2020	32.528.102,93	0,00	0,00	860.738,00	0,75	31.667.364,18
2021	9.069.710,88	0,00	0,00	105.000,00	0,00	8.964.710,88
2022	101.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.220,00
2023	0,00	4.381.502.773,00	0,00	4.381.502.773,00	0,00	0,00
Jumlah	127.179.629,06	4.381.502.773,00	1,24	4.383.894.259,00	2,13	124.788.142,17

7.5.3.1.8 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Pajak Reklame	1.407.000,00	2.736.000,00	10.429.000,00	31.650.000,00	46.222.000,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7.035,00	684.000,00	5.214.500,00	31.650.000,00	37.555.535,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	1399965,00	2052000,00	5214500,00	0,00	8666465,00

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
2	Piutang PBB-P2	3.054.227.048,00	5.610.846.711,00	4.619.030.880,00	9.255.866.630,00	22.539.971.269,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.271.135,24	1.402.711.677,75	2.309.515.440,00	9.255.866.630,00	12.983.364.882,99
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	3.038.955.912,76	4.208.135.033,25	2.309.515.440,00	0,00	9.556.606.386,01
3	Piutang BPHTB	0,00	9.065.930,88	72.038.460,15	43.683.751,14	124.788.142,17
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	2.266.482,72	36.019.230,08	43.683.751,14	81.969.463,94
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	6.799.448,16	36.019.230,08	0,00	42.818.678,24
	JUMLAH NRV	3.040.355.877,76	4.216.986.481,41	2.350.749.170,08	0,00	9.608.091.529,25
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	15.278.170,24	1.405.662.160,47	2.350.749.170,08	9.331.200.381,14	13.102.889.881,93

7.5.3.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.915.470.599,90, terdiri dari:

Tabel 7.5.62 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

Piutang Lain-lain	Saldo per 31 Des 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan		Saldo per 31 Des 2023
			Pembayaran tahun 2023	Koreksi Pencatatan	
Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	408.800.000,00	0,00	0,00	408.800.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	24.500.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	11.500.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	258.664.750,00	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	5.071.673.796,00	2.075.538.770,00	4.496.977.172,00	538.553.273,00	2.111.682.121,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.253.195.870,90	0,00	128.372.142,00	0,00	36.124.823.728,90
Jumlah	41.608.034.416,90	2.484.338.770,00	4.638.349.314,00	538.553.273,00	38.915.470.599,90

- 1) Piutang Hasil Sewa BMD merupakan piutang pendapatan sewa atas 58 Unit Rumah Dinas Pemda yang belum dipungut tahun 2022 sebesar Rp102,200,000.00 dan tahun 2023 sebesar Rp306,600,000.00.
- 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS) merupakan piutang yang terjadi akibat terlambatnya penyampaian SK pensiun oleh pensiunan PNS, sehingga menyebabkan gaji pensiunan PNS tersebut masih terbayarkan di atas tanggal SK pensiun. Pengembalian atas piutang tersebut dilakukan Oleh PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiunan PNS dengan memotong uang pensiunan bulanan PNS. Jumlah piutang dana pensiun per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Rincian Piutang Dana Pensiun PNS

(dalam rupiah)

No	Nama	Nomor Ketetapan	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Drs. CHAIDIR CHAR, M.Si	047/KEU/SKPP/X/2017	11.500.000,00
Jumlah			11.500.000,00

- 3) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang Sky Aviation) merupakan piutang yang timbul dikarenakan masih terdapat belanja subsidi penerbangan yang diberikan kepada PT. Sky Aviation yang belum dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tahun 2023 masih belum terdapat pelunasan dan jumlahnya masih sebesar Rp258.664.750,00. Atas Piutang tersebut telah dilakukan pengalihan penagihan ke KPKNL Wilayah Kepri berdasarkan Surat Bupati Natuna Nomor 900/EKON/70 tanggal 2 Maret 2015 perihal penyerahan pengurusan piutang sisa dana subsidi penerbangan. Sampai saat ini proses penagihan masih dilakukan oleh KPKNL Wilayah Kepri.
- 4) Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.111.682.121,00 merupakan piutang yang berasal dari RSUD selaku BLUD di Kabupaten Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.64 Rincian Piutang Pendapatan RSUD – BLUD

(dalam rupiah)

Piutang Lain-lain	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan		Saldo per 31 Des 2023
			Koreksi Pencatatan	Pembayaran tahun 2023	
Piutang BPJS Kesehatan	5.031.023.283,00	2.032.831.338,00	538.553.273,00	4.492.470.010,00	2.032.831.338,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	2.006.347,00	6.493.647,00	0,00	2.006.347,00	6.493.647,00
PT. Jasa Raharja	35.000,00	36.213.785,00	0,00	35.000,00	36.213.785,00
PT. Pegadaian	2.068.000,00	0,00	0,00	2.068.000,00	0,00
PT. Bank Riau Kepri Syariah	397.815,00	0,00	0,00	397.815,00	0,00
Piutang Perusda	31.649.078,00	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00
Piutang TNI AL	4.494.273,00	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00
Jumlah	5.071.673.796,00	2.075.538.770,00	538.553.273,00	4.496.977.172,00	2.111.682.121,00

Koreksi Pencatatan Piutang BLUD sebesar Rp538.553.273,00 merupakan koreksi piutang BPJS kesehatan yang tidak diakui berdasarkan hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

- 5) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang yang timbul dari pengelolaan dana bergulir yang dihentikan pelaksanaan programnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perikanan. Program dana bergulir yang dihentikan dan dialihkan pencatatannya ke piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.65 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Pengurangan		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	29.038.966.010,90	119.172.142,00	0,00	28.919.793.868,90
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	3.984.829.775,00	1.000.000,00	0,00	3.983.829.775,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	3.229.400.085,00	8.200.000,00	0,00	3.221.200.085,00
Jumlah		36.253.195.870,90	128.372.142,00	0,00	36.124.823.728,90

Sebagian Piutang dana bergulir Koperasi dan UMKM telah diserahkan penagihannya ke KPKNL Wilayah Kepri. Atas pengalihan penagihan tersebut, pada tahun 2023 KPKNL Wilayah Kepri berhasil menagih sebesar Rp14.215.929,00 yang telah diterima oleh Kas Daerah. Sedangkan pengembalian dana bergulir melalui Bank Riau Kepri Syariah Rp114.156.213,00 yang dananya masih terdapat pada rekening dana bergulir yang telah dicatat bagian dari Kas Lainnya.

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM per wilayah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.66 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir
Dinas Koperasi dan UKM**

(dalam rupiah)

No	Rekapan Piutang	Jumlah
1	Bunguran Timur	10.626.298.447,00
2	Bunguran Timur Laut	1.495.518.181,00
3	Bunguran Tengah	305.039.259,00
4	Bunguran Utara	1.254.867.403,00
5	Bunguran Barat	5.613.727.854,00
6	Pulau Tiga	3.407.776.970,00
7	Serasan	1.914.233.600,00
8	Subi	519.260.512,00
9	Midai	870.236.463,00
10	Pulau Laut	676.466.558,90
11	Koperasi	2.181.418.621,00
12	Bunguran Selatan	54.950.000,00
Jumlah		28.919.793.868,90

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003 per wilayah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.67 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun
2002 dan 2003**

(dalam rupiah)

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Baki Debet
A	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	
1	Bunguran Timur	863.403.755,00
2	Bunguran Barat	1.654.740.775,00
3	Serasan	678.000.020,00
4	Midai	444.074.110,00
5	Subi	197.500.000,00
6	Bunguran Utara	46.111.115,00
7	Pulau Laut	100.000.000,00
Jumlah		3.983.829.775,00
B	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	
1	Bunguran Timur	997.772.275
2	Bunguran Barat	718.703.715
3	Serasan	668.851.860
4	Midai	361.798.155
5	Subi	57.592.595
6	Bunguran Utara	219.629.630
7	Pulau Laut	196.851.855
Jumlah		3.221.200.085
Jumlah A + B		7.205.029.860,00

7.5.3.1.10 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang.

Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.68 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Lain-Lain PAD yang sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar <1 THN	Kurang Lancar <1 S.D 3 THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	11.442.500,00	0,00	0,00	0,00	11.442.500,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BPJS Kesehatan	2.032.831.338,00	0,00	0,00	0,00	2.032.831.338,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	10.164.156,69	0,00	0,00	0,00	10.164.156,69
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.022.667.181,31	0,00	0,00	0,00	2.022.667.181,31
4	BPJS Ketenagakerjaan	6.493.647,00	0,00	0,00	0,00	6.493.647,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	32.468,24	0,00	0,00	0,00	32.468,24
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	6.461.178,77	0,00	0,00	0,00	6.461.178,77
5	PT. Jasa Raharja	36.213.785,00	0,00	0,00	0,00	36.213.785,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	181.068,93	0,00	0,00	0,00	181.068,93
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	36.032.716,08	0,00	0,00	0,00	36.032.716,08
6	Piutang Perusda	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang TNI AL	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	2.076.603.576,15	0,00	0,00	0,00	2.076.603.576,15
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	10.435.193,85	0,00	0,00	294.808.101,00	305.243.294,86

Penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang hasil pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3 THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	28.919.793.868,90	28.919.793.868,90
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	28.919.793.868,90	28.919.793.868,90
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.983.829.775,00	3.983.829.775,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.983.829.775,00	3.983.829.775,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	0,00	0,00	0,00	3.221.200.085,00	3.221.200.085,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.221.200.085,00	3.221.200.085,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	0,00	0,00	0,00	36.124.823.728,90	36.124.823.728,90

7.5.3.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.221.293.499,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Piutang bagi hasil pajak	Saldo per 31 Des 2022	Penambahan	Pembayaran tahun 2023	Saldo per 31 Des 2023
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.180.416.314,00	3.747.009.196,00	3.180.416.314,00	3.747.009.196,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.477.914.314,00	2.505.629.784,00	2.477.914.314,00	2.505.629.784,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.710.338,00	11.953.945.732,00	10.710.338,00	11.953.945.732,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.403.485.509,00	14.708.787,00	31.403.485.509,00	14.708.787,00
JUMLAH	37.072.526.475,00	18.221.293.499,00	37.072.526.475,00	18.221.293.499,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 merupakan kurang bayar bagi hasil dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 berdasarkan dari SK Gubernur Kepri Nomor 250 Tahun 2024 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

7.5.3.1.12 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	756.512.500,01	284.791.666,66

Pada akhir tahun 2023 terdapat saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp756.512.500,01 yang dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	284.791.666,66
Penambahan tahun 2023	Rp	756.512.500,01
Jumlah	Rp	1.020.470.833,34
Pengurangan tahun 2023	Rp	284.791.666,66
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	756.512.500,01

Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 7.5.71 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	94.833.333,33	142.791.666,67	94.833.333,33	142.791.666,67
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	40.416.666,67	37.916.666,67	40.416.666,67	37.916.666,67
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.083.333,33	0,00	4.083.333,33	0,00
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara	58.375.000,00	89.916.666,67	58.375.000,00	89.916.666,67

Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Golongan I				
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Tempat Tinggal-Asrama	0,00	300.037.500,00	0,00	300.037.500,00
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Tempat Tinggal-Bangunan Gedung-Tempat Tinggal Lainnya	87.083.333,33	185.850.000,00	87.083.333,33	185.850.000,00
Jumlah	284.791.666,66	756.512.500,01	284.791.666,66	756.512.500,01

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp142.791.666,67 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.72 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.750.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.250.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.875.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.500.000,00
5	Dinas Perhubungan	16.666.666,67
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	7.500.000,00
7	Sekretariat Daerah	43.750.000,00
8	Kecamatan Bunguran Timur	17.500.000,00
Jumlah		142.791.666,67

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gudang sebesar Rp37.916.666,67 terdiri dari beban sewa Gudang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp35.000.000,00 dan beban sewa Gudang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.916.666,67.

Saldo akhir Beban Sewa Rumah Negara Golongan I sebesar Rp89.916.666,67 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa rumah dokter pada Dinas Kesehatan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Saldo akhir Beban Sewa Asrama sebesar Rp300.037.500,00 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa Asrama Mahasiswa Natuna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo akhir Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebesar Rp185.850.000,00 terdiri dari beban sewa rumah perlindungan UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.516.666,67 dan beban sewa sebesar Rp183.333.333,33 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa rumah singgah bertempat di Batam yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat Kabupaten Natuna yang mendapat rujukan berobat ke Batam dan keperluan sosial lainnya yang tercatat pada Sekretariat Daerah.

7.5.3.1.13 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	19.655.884.638,38	22.389.010.877,74

Pada tahun 2023, Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Kimia, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Baku, Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Bahan-Isi Tabung Gas, Bahan-Bahan Lainnya, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Obat-Obatan-Obat, Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga, Natura dan Pakan-Natura, Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Pelatihan Kerja, Pakaian Kerja Bengkel, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, Pakaian Paskibraka, Pakaian Jas/Safari, Komponen-Komponen Peralatan, Komponen-Komponen Lainnya, Hadiah yang Bersifat erlomba, Beasiswa, Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD), Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan beban.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.655.884.638,38 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.73 Nilai Keseluruhan Mutasi Persediaan

<i>(dalam rupiah)</i>				
Sumber persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Persediaan APBD	22.389.010.877,74	76.569.717.684,01	79.302.843.923,77	19.655.884.638,38
Jumlah	22.389.010.877,74	76.569.717.684,01	79.302.843.923,77	19.655.884.638,38

Penambahan persediaan sebesar Rp76.569.717.684,01 terdiri dari:

Belanja Persediaan Tahun 2023	Rp	66.463.251.243,53
Koreksi Saldo Awal	Rp	708.554.097,00
Pendapatan Hibah Persediaan	Rp	7.477.540.158,50
Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga	Rp	1.147.288.627,00
Reklasifikasi dari beban Hibah	Rp	568.321.758,81
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	53.668.909,00
Reklasifikasi dari KDP	Rp	64.790.000,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	716.840,17
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD BOS	Rp	85.586.050,00
Jumlah	Rp	76.569.717.684,01

Rp 79.302.843.923,77

Tabel 7.5.74 Daftar Mutasi Persediaan Masuk dan Mutasi Persediaan Keluar

162

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan											Pengurangan							Saldo Akhir
			Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah L/D	Retras dari BTT	Retras dari Belanja Hibah	Retras dari Perawatan dan Mesin	Retras dari KOP	Retras dari Belanja Barang dan Jasa BOS	Retras dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	Retras antar Persediaan	Murjail Beban	Pekurangan Uang Tahun 2022	Retras Ke Perawatan dan Mesin	Retras Ke Aset Tetap Lainnya	Retras ke Aset Lain-lain	Kabupaten ke Tagihan Jangka Panjang (Pemasangan Pemeliharaan)	Retras ke Belanja Hibah	Retras antar Persediaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	Komponen-Komponen Lainnya	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Hedak yang Berikat Perumahan	0,00	711.486.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.486.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beasiswa	0,00	440.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transfer Keuangan Daerah dan Dana (TKDD)	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga (Pihak Lain)	0,00	1.396.367.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.367.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		22.389.910.877,74	66.463.251.243,53	708.554.097,00	7.477.546.158,50	1.147.388.627,00	568.321.758,81	53.668.909,00	64.790.000,00	85.586.050,00	716.840,17	2.640.454.561,30	77.765.528.464,37	42.620.000,00	161.732.000,00	5.100.000,00	366.696.550,00	32.176.300,00	928.990.809,00	2.640.454.561,30	19.655.884.638,38

Koreksi pencatatan yang menambah nilai persediaan sebesar Rp708.554.097,00 merupakan koreksi atas kurang catat Persediaan alat KB dan Kontrasepsi tahun 2022 yang belum dilaporkan oleh bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan koreksi kurang catat persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2022 (BAST Nomor 300/108/PMK.SET/III/2022) sebesar Rp569.849.000,00. Jumlah persediaan sebesar Rp19.655.884.638,38 per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 7.5.75 Daftar Saldo Persediaan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Debet
1.1.12.01.01.0001.	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	532.000,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan-Bahan Kimia	198.174.200,00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.396.000,00
1.1.12.01.01.0005.	Bahan-Bahan Baku	870.750,00
1.1.12.01.01.0012.	Bahan-Bahan Lainnya	96.519.698,17
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	60.000,00
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.175.500,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	253.326.930,00
1.1.12.01.03.0002.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.357.900,00
1.1.12.01.03.0003.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	138.415.038,75
1.1.12.01.03.0004.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.122.200,00
1.1.12.01.03.0006.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	140.000,00
1.1.12.01.03.0007.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.515.000,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.175.000,00
1.1.12.01.03.0009.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	67.801.835,00
1.1.12.01.03.0011.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.022.000,00
1.1.12.01.03.0012.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.250.000,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.901.000,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat-Obatan-Obat	13.654.294.958,65
1.1.12.01.04.0002.	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	300.260.558,00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.066.340.319,81
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	126.275.000,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	2.586.311.300,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura dan Pakan-Natura	50.247.450,00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.400.000,00
JUMLAH		19.655.884.638,38

1. Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Saldo Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2023 sebesar Rp532.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bahan-Bahan Kimia
Saldo Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2023 sebesar Rp198.174.200,00 berada pada:

Tabel 7.5.76 Daftar Saldo Bahan-Bahan Kimia

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	320.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	176.000.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.854.200,00
Jumlah		198.174.200,00

3. Bahan Bakar dan Pelumas
Saldo Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.396.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.77 Daftar Saldo Bahan Bakar dan Pelumas

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	23.090.000,00
2.	Kecamatan Midai	748.000,00
3.	Kecamatan Serasan Timur	558.000,00
Jumlah		24.396.000,00

4. Bahan-Bahan Baku
Saldo Bahan-Bahan Baku per 31 Desember 2023 sebesar Rp870.750,00 berada pada Dinas Kesehatan.
5. Bahan-Bahan Lainnya
Saldo Bahan-Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.519.698,17 berada pada:

Tabel 7.5.78 Daftar Saldo Bahan-Bahan Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.515.000,00
2.	Dinas Kesehatan	365.000,00
3.	Rumah sakit Umum Daerah	61.193.458,17
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.540.000,00
5.	Dinas Sosial	13.254.540,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.183.600,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.237.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	351.100,00
9.	Dinas Perikanan	763.000,00
10.	Kecamatan Serasan Timur	87.000,00
11.	Kecamatan Pulau Panjang	30.000,00
JUMLAH		96.519.698,17

6. Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
Saldo Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.000,00 berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
Saldo Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.175.500,00 berada di Sekretariat Daerah.
8. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.326.930,00 berada pada:

Tabel 7.5.79 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.319.300,00
2.	Dinas Kesehatan	5.188.310,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.928.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	185.000,00
5.	Dinas Sosial	270.000,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.091.430,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	156.837.370,00
8.	Dinas Perhubungan	114.500,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.477.400,00
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	178.000,00
11.	Dinas Perikanan	3.315.700,00
12.	Sekretariat Daerah	10.900.000,00
13.	Sekretariat DPRD	3.003.200,00
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.205.000,00
15.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.860.000,00
16.	Inspektorat Daerah	606.000,00
17.	Kecamatan Bunguran Timur	420.000,00
18.	Kecamatan Bunguran Utara	280.000,00
19.	Kecamatan Pulau Laut	560.000,00
20.	Kecamatan Midai	380.000,00
21.	Kecamatan Pulau Tiga	1.673.040,00
22.	Kecamatan Serasan Timur	211.200,00
23.	Kecamatan Suak Midai	699.000,00
24.	Kecamatan Pulau Panjang	578.930,00
25.	Kecamatan Pulau Seluan	1.045.550,00
Jumlah		253.326.930,00

9. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover per 31 Desember 2023 Sebesar Rp25.357.900,00 berada pada:

Tabel 7.5.80 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.234.200,00
2.	Dinas Sosial	715.000,00
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	650.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.449.500,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	489.200,00
6.	Dinas Pemuda dan Olahraga	180.000,00
7.	Dinas Perikanan	2.118.000,00
8.	Kecamatan Pulau Panjang	522.000,00

No.	SKPD	Jumlah
JUMLAH		25.357.900,00

10. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.415.038,75 berada pada:

Tabel 7.5.81 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.504.000,00
2.	Dinas Kesehatan	3.293.288,75
3.	Rumah sakit Umum Daerah	12.322.100,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.275.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.160.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.045.650,00
7.	Dinas Perhubungan	1.450.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.725.000,00
9.	Dinas Perikanan	4.145.000,00
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.615.000,00
11.	Kecamatan Pulau Tiga	325.000,00
12.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	7.140.000,00
13.	Kecamatan Serasan Timur	275.000,00
14.	Kecamatan Bunguran Batubi	7.140.000,00
JUMLAH		138.415.038,75

11. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.122.200,00 berada pada:

Tabel 7.5.82 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	209.000,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	580.000,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	240.000,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	365.200,00
6.	Dinas Perikanan	200.000,00
7.	Kecamatan Pulau Seluan	328.000,00
JUMLAH		3.122.200,00

12. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp140.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.515.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.83 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.515.000,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
Jumlah		11.515.000,00

14. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.801.835,00 berada pada:

Tabel 7.5.84 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.435.000,00
2.	Dinas Kesehatan	1.188.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	14.999.985,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.080.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.098.850,00
JUMLAH		67.801.835,00

15. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.022.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.250.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.901.000,00 berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 7.5.85 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	510.900,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.390.100,00
Jumlah		3.901.000,00

18. Obat-Obatan-Obat
Saldo Obat-Obatan-Obat per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.654.294.958,65 berada pada:

Tabel 7.5.86 Daftar Obat-Obatan-Obat

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.615.900,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3.103.274.660,17
3	Puskesmas Ranai	484.161.251,48
4	Puskesmas Tanjung	135.094.018,59
5	Puskesmas Bunguran Tengah	67.188.760,05
6	Puskesmas Bunguran Selatan	153.048.192,34
7	Puskesmas Kelarik	148.626.689,84
8	Puskesmas Sedanau	138.530.342,69
9	Puskesmas Pulau Tiga	89.480.341,23
10	Puskesmas Pulau Laut	47.751.549,77
11	Puskesmas Midai	220.949.513,51
12	Puskesmas Serasan	88.168.417,07
13	Puskesmas Serasan Timur	157.309.904,11
14	Puskesmas Subi	116.197.812,01
15	Puskesmas Batubi Jaya	94.962.107,60

No	Nama SKPD	Jumlah
16	Puskesmas Pulau Tiga Barat	91.887.885,89
17	UPT Instalasi Farmasi	8.516.047.612,30
Jumlah		13.654.294.958,65

19. Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

Saldo Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya per 31 Desember 2023 Sebesar Rp300.260.558,00 berada pada:

Tabel 7.5.87 Daftar Saldo Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.925.750,00
2	Dinas Kesehatan	234.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.299.775,00
4	Puskesmas Ranai	7.074.385,00
5	Puskesmas Tanjung	14.741.315,00
6	Puskesmas Bunguran Tengah	1.672.850,00
7	Puskesmas Bunguran Selatan	5.381.109,00
8	Puskesmas Kelarik	1.127.964,00
9	Puskesmas Sedanau	17.391.686,00
10	Puskesmas Pulau Tiga	2.247.510,00
11	Puskesmas Pulau Laut	4.314.275,00
12	Puskesmas Midai	2.968.773,00
13	Puskesmas Serasan	2.657.622,00
14	Puskesmas Serasan Timur	2.723.498,00
15	Puskesmas Subi	263.160,00
16	Puskesmas Batubi Jaya	18.574.422,00
17	Puskesmas Pulau Tiga Barat	11.947.130,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	128.034.834,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.680.000,00
Jumlah		300.260.558,00

20. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.066.340.319,81 berada pada:

Tabel 7.5.88 Daftar Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.379.350,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.572.700,00
3.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	96.450.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	381.233.000,00
5.	Dinas Sosial	989.847.500,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49.643.711,00
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	288.564.058,81
8.	Dinas Pariwisata	28.650.000,00
JUMLAH		2.066.340.319,81

21. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp126.275.000,00 berada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

22. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Saldo Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.586.311.300,00 berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Persediaan ini digunakan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana alam. Saldo akhir persediaan ini belum termasuk dengan persediaan pakaian bekas yang bersumber dari sumbangan masyarakat secara perseorangan sebanyak 57 karung.

23. Natura dan Pakan-Natura

Saldo Natura dan Pakan-Natura per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.247.450,00 berada pada:

Tabel 7.5.89 Daftar Natura dan Pakan-Natura

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	29.840.850,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	20.406.600,00
JUMLAH		50.247.450,00

Persediaan ini merupakan persediaan bahan pokok makanan untuk pasien yang ada di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan.

24. Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya

Saldo Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.400.000,00 berada pada Dinas Perikanan. Saldo Persediaan ini merupakan persediaan pakan ikan yang belum dibagikan ke kelompok pembudidaya.

Persediaan obat diatas tidak termasuk persediaan dalam kondisi rusak dan kadaluarsa/usang. Untuk persediaan dalam keadaan rusak dan kadaluarsa/usang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.90 Daftar Persediaan Rusak, Kadaluarsa/Usang

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Obat-Obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat	Jumlah
1	Instalasi Farmasi	15.851.629.600,54	0,00	15.851.629.600,54
2	Rumah Sakit Umum Daerah	202.096.327,00	0,00	202.096.327,00
3	Puskesmas Ranai	153.919.242,53	0,00	153.919.242,53
4	Puskesmas Tanjung	61.018.860,70	0,00	61.018.860,70
5	Puskesmas Bunguran Tengah	1.180.487,57	0,00	1.180.487,57
6	Puskesmas Bunguran Selatan	25.405.238,23	0,00	25.405.238,23
7	Puskesmas Kelarik	16.071.178,60	0,00	16.071.178,60
8	Puskesmas Sedanau	51.619.500,33	0,00	51.619.500,33
9	Puskesmas Pulau Tiga	17.901.421,49	0,00	17.901.421,49
10	Puskesmas Pulau Laut	65.581.462,15	0,00	65.581.462,15
11	Puskesmas Midai	42.730.916,92	0,00	42.730.916,92
12	Puskesmas Serasan	10.047.887,00	0,00	10.047.887,00
13	Puskesmas Serasan Timur	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
14	Puskesmas Subi	113.052.362,73	0,00	113.052.362,73
15	Puskesmas Batubi Jaya	8.693.190,00	0,00	8.693.190,00
16	Puskesmas Pulau Tiga Barat	23.088.706,53	0,00	23.088.706,53
17	Dinas Pemadam Kebakaran (Persediaan Covid untuk Masyarakat)	0,00	63.925.000,00	63.925.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga)	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Jumlah		16.645.146.382,33	72.325.000,00	16.717.471.382,33

Barang kadaluarsa obat sejumlah Rp16.645.146.382,33 merupakan obat yang kadaluarsa yang masih menunggu proses pemusnahan. Sedangkan barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat sejumlah Rp72.325.000,00 berupa *handsanitizer* yang kadaluarsa yang merupakan sediaan penanganan *covid-19* sebesar Rp63.925.000,00 dan paket sembako kadaluarsa untuk penanganan bencana sebesar Rp8.400.000,00.

7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.

7.5.3.2.1 Investasi Permanen

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	57.477.323.037,00	60.078.154.512,00

Investasi permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.477.323.037,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

Tabel 7.5.91 Rincian Investasi Permanen

No	Investasi Permanen	Saldo per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan 2023		Saldo per 31 Desember 2023
				Kerugian Entitas	Koreksi Pencatatan	
1	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Sri Serindit Daerah Kab. Natuna	4.517.886.393,00	0,00	380.526.805,00	0,00	4.137.359.588,00
2	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau	36.018.100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.018.100.000,00
3	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Laines	9.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	10.042.168.119,00	0,00	1.052.821.986,00	1.167.482.684,00	7.821.863.449,00
Jumlah		60.078.154.512,00	0,00	1.433.348.791,00	1.167.482.684,00	57.477.323.037,00

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Natuna pada setiap investasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.92 Metode Penilaian Investasi Permanen

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Metode Penilaian
1	PERUMDA SRI SERINDIT	4.137.359.588,00	Metode Ekuitas
2	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	36.018.100.000,00	Metode Biaya
3	PT. RIAU AIR LINES	9.500.000.000,00	Metode Biaya
4	PERUMDA TIRTA NUSA	7.821.863.449,00	Metode Ekuitas
Jumlah		57.477.323.037,00	

(1) Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Pada tahun 2022 Perusahaan Daerah berubah bentuk dan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna. Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Perusahaan umum Daerah Sri Serindit

adalah 100% dengan penyetoran modal sebesar dari awal berdiri Rp39.687.472.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.93 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sri Serindit

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2002	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2003	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	4.187.472.016,00
APBD 2006	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	5.000.000.000,00
APBD 2007	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	25.500.000.000,00
APBD 2013	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00
Total			39.687.472.016,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna tahun 2023 (*unaudited*) disajikan rugi tahun 2023 adalah sebesar Rp380.526.805,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.137.359.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.94 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna (Metode Ekuitas) Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023	
Modal Disetor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Modal Donasi	4.117.862.437,00	4.117.862.437,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(901.998.708,00)	(1.599.976.044,00)	697.977.336,00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(697.977.336,00)	(380.526.805,00)	(317.450.531,00)
Jumlah Ekuitas	4.517.886.393,00	4.137.359.588,00	380.526.805,00

(2) PT Bank Riau Kepri Syariah

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah sebesar Rp36.018.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.95 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah (Rp)
APBD 2003	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	6.000.000.000,00
APBD 2006	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	9.000.000.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	3.154.600.000,00
APBD 2017	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2017	Deviden Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	783.500.000,00
APBD 2018	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
APBD 2019	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2022	Penyertaan Modal BMD	PT Bank Riau Kepri Syariah	2.080.000.000,00
Total			36.018.100.000,00

Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%. Berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp36.018.100.000,00.

(3) PT Riau Airlines

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Riau Airlines adalah sebesar 5,19% dengan nilai penyertaan sebesar Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.96 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Saham	PT Riau Air Lines	1.500.000.000,00
APBD 2007	Saham	PT Riau Air Lines	8.000.000.000,00
Total			9.500.000.000,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Riau Airlines. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan hanya sebesar 5,19% berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp9.500.000.000,00.

(4) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (PDAM Tirta Nusa) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2004 tentang Pendirian PDAM. Pada tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa. Perusahaan Umum Daerah Minum Tirta Nusa sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna (100%) dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp24.444.169.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.97 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2004	Modal Awal	Perumda Tirta Nusa	3.326.337.005,00
APBD 2009	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	617.842.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	15.000.000.000,00
APBD 2013	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	1.500.000.000,00
APBD 2014	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	499.990.000,00
APBD 2015	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	3.500.000.000,00
Total			24.444.169.005,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah adalah 100%. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa tahun 2023 penurunan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp2.220.304.670,00, yang terdiri dari kerugian tahun berjalan sebesar Rp1.052.821.986,00, dan kesalahan pencatatan nilai investasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.167.482.684,00. Kesalahan pencatatan terjadi karena pada saat perhitungan nilai investasi pada tahun 2022

masih menggunakan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang belum diaudit oleh KAP. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp7.821.863.449,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.98 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa (Metode Ekuitas)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023	
Modal Disetor	18.326.337.005,00	18.326.337.005,00	0,00
Modal Donasi	6.117.832.000,00	6.117.832.000,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(15.062.191.481,00)	(15.569.483.570,00)	507.292.089,00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(798.337.377,00)	(1.052.821.986,00)	757.879.122,00
Jumlah Ekuitas	8.583.640.147,00	7.821.863.449,00	1.265.171.211,00

7.5.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>2.649.076.492.279,17</u>	<u>2.570.260.990.874,87</u>

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.384.062.482.709,05
Penambahan tahun 2023	333.422.947.806,12
Jumlah	4.717.485.430.515,17
Pengurangan tahun 2023	82.274.039.927,45
Aset Tetap per 31 Desember 2023	4.635.211.390.587,72
Penyusutan s/d tahun 2023	(1.986.134.898.308,55)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.649.076.492.279,17

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2023 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis Aset	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Tanah	362.824.531.096,88	12.201.524.915,00	2.212.846.925,00	372.813.209.086,88
Peralatan dan Mesin	472.607.638.997,21	73.611.086.449,00	6.934.961.328,95	539.283.764.117,26
Gedung dan Bangunan	1.391.845.817.237,75	72.947.853.426,66	8.778.567.276,66	1.456.015.103.387,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.030.388.415.732,09	149.294.499.201,46	56.445.202.860,84	2.123.237.712.072,71
Aset Tetap Lainnya	69.345.782.211,12	2.034.542.250,00	831.203.000,00	70.549.121.461,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.050.297.434,00	23.333.441.564,00	7.071.258.536,00	73.312.480.462,00
Nilai Aset	4.384.062.482.709,05	333.422.947.806,12	82.274.039.927,45	4.635.211.390.587,72
Akumulasi Penyusutan	(1.813.801.491.834,18)	(176.880.868.082,03)	(4.547.461.607,66)	(1.986.134.898.308,55)
Nilai Buku	2.570.260.990.874,87	156.542.079.724,09	77.726.578.319,79	2.649.076.492.279,17

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi data aset pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah. Penyajian atas penyesuaian data pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah dilakukan koreksi pencatatan antar rincian objek aset tetap. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar Rp372.813.209.086,88 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	362.824.531.096,88
Penambahan TA. 2023	Rp	12.201.524.915,00
Jumlah	Rp	389.292.067.011,88
Pengurangan TA. 2023	Rp	2.212.846.925,00
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023	Rp	372.813.209.086,88

Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp372.813.209.086,88 tersebut terdiri dari 631 bidang tanah diantaranya 597 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 34 bidang tanah yang belum bersertifikat dan masih dalam proses sertifikasi.

Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 senilai Rp372.813.209.086,88 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.100 Rincian Aset Tetap Tanah

Rincian	Saldo Akhir 2023
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	152.305.248.463,30
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58
Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	119.069.093.283,60
Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00
Tanah Basah	964.652.600,00
Tanah Kering	6.685.926.000,00
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00
Tanah Hutan	9.167.161.000,00
Tanah Lapangan Olahraga	7.614.164.660,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.383.246.000,00
Tanah untuk Jalan	12.099.301.400,00
Tanah untuk Bangunan Air	5.870.884.746,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	884.801.800,00
Tanah untuk Makam	2.685.914.200,01
Lapangan Lainnya	12.555.155.926,39
Jumlah	372.813.209.086,88

Aset Tetap berupa Tanah mengalami penambahan sebesar Rp12.201.524.915,00 dan pengurangan sebesar Rp2.212.846.925,00 dari tahun 2022 sebesar Rp362.824.531.096,88 menjadi Rp372.813.209.086,88. Peningkatan nilai Aset Tanah tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 7.5.101 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tanah

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)												
NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2022	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				SALDO AKHIR 2023
			REALISASI BELANJA	PENDAPATAN HIBAH	SK PENGGUNA NOMOR 408 TAHUN 2023	REKLASIFIKASI DARI KDP	REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP TANAH	HIBAH	REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP TANAH	REKLASIFIKASI KE GEDUNG DAN BANGUNAN	KDP	
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat tinggal	152.809.607.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000.000,00	863.888.000,00	86.471.000,00	0,00	0,00	152.305.248.463,30
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199.733.507,58
3	Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.723.000,00

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2022	PENAMBAHAN					PENGURANGAN					SALDO AKHIR 2023
			REALISASI BELANJA	PENDAPATAN HIBAH	SK PENGUNAAN NOMOR 408 TAHUN 2023	REKLASIFIKASI DARI KDP	REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP TANAH	HIBAH	REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP TANAH	REKLASIFIKASI KE			
										GEDUNG DAN BANGUNAN	KDP		
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	109.475.959.153,60	1.653.000.000,00	8.960.894.000,00	29.240.130,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	119.069.093.283,60	
5	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.060.000,00	
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690.000,00	
7	Tanah Persil Lainnya	0,00	446.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Tanah Basah	964.652.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.652.600,00	
9	Tanah Kering	6.685.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.926.000,00	
10	Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299.146.500,00	
11	Tanah Hutan	9.167.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167.161.000,00	
12	Tanah Lapangan Olahraga	7.455.337.600,00	99.944.400,00	0,00	0,00	0,00	158.827.060,00	0,00	0,00	0,00	99.944.400,00	7.614.164.660,00	
13	Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.306.000,00	
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.235.098.000,00	0,00	148.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383.246.000,00	
15	Tanah untuk Jalan	12.069.359.400,00	0,00	0,00	0,00	29.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099.301.400,00	
16	Tanah untuk Bangunan Air	5.668.276.546,00	116.137.200,00	0,00	0,00	0,00	86.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.884.746,00	
17	Tanah untuk Bangunan Jaringan	882.801.800,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.801.800,00	
18	Tanah untuk Makam	2.331.083.000,01	354.831.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.914.200,01	
19	Lapangan Lainnya	12.551.609.526,39	357.841.585,00	0,00	3.546.400,00	0,00	0,00	0,00	158.827.060,00	199.014.525,00	0,00	12.555.155.926,39	
JUMLAH		362.824.531.096,88	3.027.754.385,00	9.111.042.000,00	32.786.530,00	29.942.000,00	691.298.060,00	1.913.888.000,00	691.298.060,00	199.014.525,00	99.944.400,00	372.813.209.086,88	

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.201.524.915,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023	Rp	3.027.754.385,00
Pendapatan Hibah	Rp	9.111.042.000,00
Tanah Tahun Sebelumnya yang belum tercatat	Rp	32.786.530,00
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	29.942.000,00
Jumlah	Rp	12.201.524.915,00

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2023 di Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp3.027.754.385,00 berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.811.827.060,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp116.137.200,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp354.831.200,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp298.958.925,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp446.000.000,00. Pendapatan Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.111.042.000,00 berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.345.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp700.850.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp148.148.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.000.000,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp8.000.235.000,00 dan Kecamatan Bunguran Timur sebesar Rp232.464.000,00. Tanah tahun sebelumnya yang belum tercatat sebesar Rp32.786.530,00 merupakan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang berasal dari tanah eks transmigrasi yang telah ditetapkan status Pengguna dengan SK Nomor 408 Tahun 2023 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.251.430,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp3.546.400,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp2.988.700,00. Nilai Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp29.942.000,00 berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar Rp2.212.846.925,00 terdiri dari:

Hibah Aset Tetap Tanah	Rp	1.913.888.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	199.014.525,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	99.944.400,00
Jumlah	Rp	2.212.846.925,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.913.888.000,00. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna memberi hibah Aset Tetap Tanah ke KPU Kabupaten Natuna sebesar Rp1.050.000.000,00. Hibah Aset Tetap Tanah ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Natuna sebesar Rp450.000.000,00, serta Hibah Aset Tetap Tanah ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 387 Tahun 2023 sebesar Rp413.888.000,00. Reklasifikasi ke Aset Tetap

Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.014.525,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp99.944.400,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tanah merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Tanah sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Berikut adalah Aset Tetap Tanah yang berada pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 31 Desember 2023 :

Tabel 7.5.102 Rincian Aset Tanah per SKPD

		(dalam rupiah)
No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.285.506.226,00
2	Dinas Kesehatan	6.207.504.838,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.686.178.746,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.043.350.954,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.466.795.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.246.683.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	8.514.159.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.357.491.850,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	69.993.800,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.971.710.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.902.988.700,00
12	Dinas Perikanan	480.971.000,00
13	Dinas Pariwisata	10.241.035.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.005.908.564,00
15	Sekretariat Daerah	187.307.989.763,26
16	Sekretariat DPRD	6.576.147.000,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.151.991.534,00
18	Kecamatan Bunguran Timur	3.695.245.000,00
19	Kecamatan Bunguran Barat	372.463.000,00
20	Kecamatan Bunguran Utara	341.400.000,00
21	Kecamatan Pulau Laut	168.000.000,00
22	Kecamatan Midai	131.400.000,00
23	Kecamatan Serasan	110.220.000,00
24	Kecamatan Subi	280.200.000,00
25	Kecamatan Pulau Tiga	558.207.000,00
26	Kecamatan Bunguran Tengah	131.670.807,62
27	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.281.348.304,00
28	Kecamatan Serasan Timur	226.650.000,00
JUMLAH		372.813.209.086,88

Nilai Aset tanah tersebut diatas sebesar Rp372.813.209.086,88 tidak termasuk aset eks transmigrasi yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sejumlah Rp639.199.500,00 dengan rincian SMK Pertanian Rp230.945.000,00, SMA Rp85.750.000,00, MTS Rp60.274.500,00, TNI Rp12.250.000,00, Polsek Bunguran Batubi Rp67.210.000,00 dan Tes FARM PDAM Rp82.770.000,00.

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp539.283.764.117,26 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	472.607.638.997,21
Penambahan Tahun 2023	Rp	73.611.086.449,00
Jumlah	Rp	546.218.725.446,21
Pengurangan Tahun 2023	Rp	6.934.961.328,95
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023	Rp	539.283.764.117,26

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.103 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

[illegible]

No.	Uraian	Saldo Awal	PENAMBAHAN										PENGURANGAN										SALDO AKHIR			
			Realisasi Belanja	Koreksi pencatatan aset tetap yg dim tercatat tahun sebelumnya	BTT	Pendapatan Hibah 2023	Koreksi pencatatan pendapatan hibah tahun sebelumnya					Reklasifikasi dari					Pelunasan Utang Tahun 2022	Penghapusan	Reklasifikasi dari							
							Koreksi pencatatan pendapatan hibah tahun sebelumnya	Jalan, Jaringan dan Irigasi	KDP	Aset Tetap Lainnya	Persediaan	Aset Lain-Lain	Beban Barang dan Jasa	Antar Sub RO	Ekstrakomtab	Jalan, Jaringan dan Irigasi			Aset Tetap Lainnya	Aset Lain-Lain	Beban Barang dan Jasa	Antar Sub RO				
140	Nal Laboratorium Proses Teknologi Kult, Kant, dan Piasal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00	
141	Nal Laboratorium Penelitian	217.034.120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.534.120,71	
142	Nal Laboratorium Elektronik dan Daya	15.086.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086.150,00	
143	Nal Laboratorium Osanografi	25.450.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450.980,00	
144	Nal Laboratorium Lingkungan Pesisir	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
145	Nal Laboratorium Biologi Perairan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
146	Nal Laboratorium Botani	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
147	Nal Laboratorium Geoteknik	28.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930.000,00	
148	Nal Laboratorium Proses/Teknik Kimia	49.500.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743.500,00	0,00	0,00	843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700.430,00	
149	Nal Laboratorium Kesehatan Keta	1.380.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.687,00	
150	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	2.920.450.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.450.690,00	
151	Nal Laboratorium Lain	603.789.112,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.789.112,00	
152	General Laboratory Tool	127.535.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.535.300,00	
153	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut Bahasa Indonesia	102.270.000,00	3.167.544.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.660.499,00
154	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut Matematika	4.444.548.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.838.037,00
155	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut IPA Dasar	705.871.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.871.280,00	
156	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut IPA Lanjutan	111.869.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.080.274,00
157	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut IPA Menengah	334.275.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.775.864,00
158	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut IPA Asas	30.897.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.897.490,00
159	Nal PrangaPraktek Sekolah Bidang Saut IPA Asas	154.447.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.047.820,00
160	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut Ketenagap	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
161	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut Ketenag	660.227.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.011.000,00	0,00	0,00	0,00	27.110.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.538.949,00
162	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut Olahraga	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
163	Nal Pranga Praktek Sekolah Bidang Saut PKN	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
164	Nal Pranga PAU/DTP	24.923.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923.800,00
165	Nal Pranga Praktek Sekolah Lainnya	2.375.956.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.956.150,00
166	Recorder Digital	41.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.399.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.061.150,00
167	Measuring/Testing Device	14.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.000,00
168	Measuring/Testing Device	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
169	Selection Application Equipment	54.260.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.260.160,00
170	Peralatan Hidrologi	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
171	Nal Laboratorium Kuisasi Udara	360.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.300.000,00
172	Nal Laboratorium Kuisasi Udara	87.357.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.357.650,00
173	Nal Laboratorium Perikanan	281.255.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.255.867,50
174	Peralatan Umum	148.743.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.743.440,00
175	Pengolahan/Modul Ship Workshop	8.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215.625,00
176	Nal Laboratorium Kalibasa Elektromedik (an Bonewell)	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
177	Nal Laboratorium Listrik dan Mekani	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
178	Nal Laboratorium rekaman dan Suho	1.963.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.636,00
179	Nal Laboratorium Standarisasi Kalibasi dan Instrumen/asi Lain	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rp2.353.803.393,00. Selain itu terdapat pendapatan hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.598.718.358,00 yang terdiri dari hibah yang berasal dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.785.364.090,00, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sebesar Rp1.496.930.000,00, hibah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp45.234.525,00 dan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp49.042.000,00. Hibah dari penambahan belanja tidak terduga yang menghasilkan aset peralatan dan mesin sebesar Rp61.750.000,00, reklasifikasi dari beban barang dan jasa Rp135.242.000,00, reklasifikasi dari aset lain-lain yang rusak berat setelah dilakukan perbaikan dan dapat digunakan dalam proses operasional Pemerintah Daerah Rp659.831.745,00, reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp47.927.000,00, reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp233.137.430,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp192.385.000,00 dan reklasifikasi dari Persediaan Rp36.020.000,00. Reklasifikasi antar sub rincian objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdiri dari:

Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2022	Rp	2.150.185.171,00
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	761.541.100,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	4.760.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	1.564.237.350,00
Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	Rp	2.370.764.998,95
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	26.300.000,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	57.172.709,00
Jumlah	Rp	6.934.961.328,95

Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp6.922.393.099,95 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan cara dilelang dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset lain-lain dengan status kondisi aset rusak berat serta penghapusan Barang Milik Daerah aset tetap peralatan dan mesin hasil inventarisasi. Pelunasan utang tahun 2022 senilai Rp2.150.185.171,00 merupakan perolehan dari utang tahun 2022 yang dilakukan pembayaran pada tahun 2023. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp539.283.764.117,26 yang berada pada:

Tabel 7.5.104 Rincian Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam rupiah)		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.813.171.307,00
2	Dinas Kesehatan	236.419.530.918,47
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.331.610.038,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.446.410.630,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2.034.505.930,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.976.902.124,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.200.366.080,00
8	Dinas Sosial	1.490.429.165,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.778.180.810,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.879.131.360,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.702.115.982,00

No	SKPD	Jumlah
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.781.765.263,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.254.457.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.462.802.910,00
15	Dinas Perhubungan	21.330.087.817,36
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.566.510.580,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.631.372,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.275.583.505,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.965.218.222,39
20	Dinas Perikanan	9.474.589.088,07
21	Dinas Pariwisata	4.693.328.267,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	8.473.577.495,75
23	Sekretariat Daerah	68.618.994.941,50
24	Sekretariat DPRD	15.188.592.948,72
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.559.283.890,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.028.701.601,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.057.861.448,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.120.445.600,00
29	Inspektorat Daerah	1.328.121.600,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	1.840.069.565,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	1.228.431.112,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	883.882.650,00
33	Kecamatan Pulau Laut	2.744.846.031,00
34	Kecamatan Midai	3.415.696.736,00
35	Kecamatan Serasan	1.450.075.065,00
36	Kecamatan Subi	4.677.917.170,00
37	Kecamatan Pulau Tiga	1.048.670.468,00
38	Kecamatan Bunguran Tengah	591.801.548,00
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	796.978.571,00
40	Kecamatan Bunguran Selatan	697.066.184,00
41	Kecamatan Serasan Timur	932.766.024,00
42	Kecamatan Suak Midai	495.659.500,00
43	Kecamatan Bunguran Batubi	679.890.000,00
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.158.694.500,00
45	Kecamatan Pulau Panjang	356.839.000,00
46	Kecamatan Pulau Seluan	191.631.500,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.439.940.099,00
JUMLAH		539.283.764.117,26

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp539.283.764.117,26 termasuk aset yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Nol (0) sebanyak 21.052 unit aset yang masih digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Nol (0) berada pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 7.5.105 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Nilai Buku Nol (0)
Masih digunakan Dalam Operasional Pemerintah Daerah**

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2023	Nilai Buku	Jumlah Aset
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.328.722.783,00	40.328.722.783,00	0,00	5.976
2	Dinas Kesehatan	114.829.750.458,92	114.829.750.458,92	0,00	5.858
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.281.176.924,00	3.281.176.924,00	0,00	225
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.221.722.746,00	4.221.722.746,00	0,00	132
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1.587.528.805,00	1.587.528.805,00	0,00	91
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.436.927.990,00	2.436.927.990,00	0,00	24
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	558.140.980,00	558.140.980,00	0,00	56
8	Dinas Sosial	353.697.165,00	353.697.165,00	0,00	25
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.053.420.500,00	3.053.420.500,00	0,00	484
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.283.410.360,00	3.283.410.360,00	0,00	299
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.359.178.930,10	6.359.178.930,10	0,00	574
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.952.329.233,00	3.952.329.233,00	0,00	238
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	919.847.500,00	919.847.500,00	0,00	81
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.331.579.310,00	1.331.579.310,00	0,00	173
15	Dinas Perhubungan	14.451.582.033,00	14.451.582.033,00	0,00	400
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.127.095.080,00	3.127.095.080,00	0,00	37
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.338.910.332,00	1.338.910.332,00	0,00	258
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	436.278.720,00	436.278.720,00	0,00	29
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.300.808.930,65	2.300.808.930,65	0,00	238
20	Dinas Perikanan	8.127.776.549,07	8.127.776.549,07	0,00	595
21	Dinas Pariwisata	2.866.012.140,00	2.866.012.140,00	0,00	262
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2.621.125.249,75	2.621.125.249,75	0,00	284
23	Sekretariat Daerah	27.071.231.619,00	27.071.231.619,00	0,00	2.023
24	Sekretariat DPRD	8.777.183.483,00	8.777.183.483,00	0,00	561
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.777.337.990,00	2.777.337.990,00	0,00	403
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.975.945.801,00	3.975.945.801,00	0,00	431
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.416.774.898,00	1.416.774.898,00	0,00	171
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	735.960.600,00	735.960.600,00	0,00	102
29	Inspektorat Daerah	808.582.200,00	808.582.200,00	0,00	46
30	Kecamatan Bunguran Timur	1.131.261.165,00	1.131.261.165,00	0,00	144
31	Kecamatan Bunguran Barat	663.184.752,00	663.184.752,00	0,00	68
32	Kecamatan Bunguran Utara	481.670.050,00	481.670.050,00	0,00	42
33	Kecamatan Pulau Laut	399.855.531,00	399.855.531,00	0,00	68
34	Kecamatan Midai	372.422.600,00	372.422.600,00	0,00	36
35	Kecamatan Serasan	1.079.670.065,00	1.079.670.065,00	0,00	57
36	Kecamatan Subi	1.341.466.918,00	1.341.466.918,00	0,00	43
37	Kecamatan Pulau Tiga	612.663.168,00	612.663.168,00	0,00	35
38	Kecamatan Bunguran Tengah	388.799.318,00	388.799.318,00	0,00	37
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	431.816.571,00	431.816.571,00	0,00	47
40	Kecamatan Bunguran Selatan	482.913.184,00	482.913.184,00	0,00	72
41	Kecamatan Serasan Timur	546.135.024,00	546.135.024,00	0,00	37
42	Kecamatan Suak Midai	247.690.500,00	247.690.500,00	0,00	55
43	Kecamatan Bunguran Batubi	522.897.000,00	522.897.000,00	0,00	55
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	217.276.500,00	217.276.500,00	0,00	41
45	Kecamatan Pulau Panjang	13.531.000,00	13.531.000,00	0,00	1
46	Kecamatan Pulau Seluan	27.166.500,00	27.166.500,00	0,00	6
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.071.340.099,00	1.071.340.099,00	0,00	132
TOTAL		277.361.799.255,49	277.361.799.255,49	0,00	21.052

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.456.015.103.387,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.391.845.817.237,75
Penambahan tahun 2023	Rp	72.947.853.426,66
Jumlah	Rp	1.464.793.670.664,41
Pengurangan tahun 2023	Rp	8.778.567.276,66
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.456.015.103.387,75

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.106 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)																						
No.	URAIAN	SALDO AKHIR 2022	REALISASI BELANJA	KOREKSI TAHUN SEBELUM NYA	HIBAH	PENAMBAHAN						PENGURANGAN										SALDO AKHIR 2023
						REKLASIFIKASI DARI TANAH	REKLASIFIKASI DARI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	REKLASIFIKASI DARI KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	REKLASIFIKASI DARI ASET TIDAK BERWUJUD	REKLASIFIKASI DARI BEBAN BARANG DAN JASA	REKLASIFIKASI SESAMA GEDUNG DAN BANGUNAN	PELUNASAN UTANG 2022	HIBAH	REKLASIFIKASI KE KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	REKLASIFIKASI KE EKSTRAKOMBATABLE	REKLASIFIKASI KE ASET TIDAK BERWUJUD	REKLASIFIKASI KE ASET LAIN	REKLASIFIKASI KE BEBAN BARANG DAN JASA	REKLASIFIKASI KE TAGIHAN JANGKA PANJANG	REKLASIFIKASI SESAMA GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung Kantor	163.214.285.862,34	1.570.473.244,18	0,00	0,00	0,00	428.743.350,00	0,00	299.202.308,00	297.847.610,00	358.313.525,00	0,00	982.711.327,00	99.850.000,00	0,00	348.464.520,00	149.626.900,00	99.637.100,00	294.974.356,00	229.560.000,00	184.263.841.695,50	
2	Bangunan Gedung	16.856.480.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.626.953,00	0,00	145.676.900,00	0,00	0,00	0,00	16.885.186.864,00	
3	Bangunan Gedung Instalasi	95.386.742,00	11.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.586.740,00	
4	Bangunan Gedung Laboratorium	3.363.209.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.176.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.382.273,31	
5	Bangunan Kesehatan	123.065.891.589,27	0,00	68.488.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.234.780.269,27	
6	Bangunan Gedung Tempat Sidang	160.881.146.737,00	214.565.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.719.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.391.371.723,18	
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.814.367.604,00	99.815.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.560.000,00	59.815.680,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.072.731.722,00	
8	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	287.730.348.255,78	3.808.303.466,00	0,00	0,00	865.553.891,00	154.512.000,00	0,00	0,00	0,00	336.304.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.454.833.485,78	
9	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	35.507.095.963,75	314.266.696,91	0,00	0,00	199.014.525,00	0,00	47.754.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.058.731.840,66	
10	Bangunan Gedung Pendidikan/Keperawatan	14.172.024.273,00	0,00	1.118.788.595,00	0,00	0,00	292.078.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.566.000,00	0,00	0,00	3.410.867.335,00	0,00	13.775.458.273,00	
11	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.936.054.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	0,00	221.100.000,00	0,00	0,00	2.682.454.355,20	0,00	2.682.454.355,20	
12	Bangunan Gedung Perumahan	8.952.894.957,00	294.174.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.269.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796.339.465,00	
13	Bangunan Gedung Museum	31.378.632.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378.632.437,60	
14	Bangunan Gedung	6.465.267.721,00	6.243.624.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.808.626,00	0,00	0,00	358.125.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423.575.975,00	
15	Bangunan Bioskop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.867.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.867.335,00	
16	Bangunan Penerimaan/Perbaikan	4.205.430.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.675.000,00	0,00	0,00	3.982.755.804,00	0,00	3.982.755.804,00	
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.023.113.875,71	2.648.992.782,00	0,00	0,00	0,00	9.889.806.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.588.064,00	53.790.325.275,71	53.790.325.275,71	
18	Bangunan Fasilitas Umum	130.735.601.626,47	1.308.739.921,39	21.647.735,00	0,00	0,00	5.991.530.960,00	0,00	0,00	0,00	129.607.893,00	230.744.372,00	0,00	33.800.000,00	0,00	998.784.654,00	0,00	13.837.684,40	205.719.166,00	135.614.742.259,40	135.614.742.259,40	
19	Bangunan Parkir	216.178.518,23	458.786.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.964.781,23	
20	Jalan	23.954.669.604,00	199.596.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.596.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954.669.604,00	
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.545.920.355,77	298.731.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.077.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.574.255,77	
22	Kumuh Negara Golongan I	76.602.342.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.602.342.792,00	
23	Kumuh Negara Golongan II	38.479.212.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.678.896.504,10	
24	Kumuh Negara Golongan III	4.364.562.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.562.799,00	
25	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Perumahan	15.714.236.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.236.971,60	
26	Kumuh	54.409.518.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.295.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.971.814.060,00	
27	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.153.953.620,29	199.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.407.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.684.400,00	0,00	11.151.361.108,29	
28	Jalan	376.232.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.232.863,00	
29	Bangunan Peningkatan	2.842.998.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.998.207,00	
30	Sandi/Tumpukan/Prasasti	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	
31	Bangunan Menara Perambuan	6.806.673.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.673.121,58	
32	Bangunan Perambuan	16.839.696.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839.696.801,00	
33	Bangunan Tenda Bales Administrasi	2.512.773.632,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.773.632,00	
34	Pagar	35.040.470.891,39	1.876.403.596,00	0,00	0,00	0,00	4.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.902.273.486,39	
35	Lotus/Tenda Bales Lainnya	935.518.270,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.518.270,00	
	Jumlah	291.245.817.237,75	94.095.024.269,66	90.536.415,00	118.788.595,00	199.014.525,00	17.175.634.683,00	572.005.921,00	299.202.308,00	297.847.610,00	1.136.901.369,00	284.598.570,00	1.988.563.127,00	817.945.862,00	95.116.953,00	348.464.520,00	134.429.04,00	99.637.100,00	308.812.04,40	1.136.901.369,00	456.015.103.387,75	

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.947.853.426,66 terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	49.095.024.269,66
Koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	190.536.415,00
Pendapatan Hibah	Rp	3.118.788.595,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	199.014.525,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	17.175.634.683,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	2.572.005.021,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	Rp	299.202.308,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	297.647.610,00
Jumlah	Rp	72.947.853.426,66

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar Rp49.095.024.269,66 terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	16.953.884.427,00
Dinas Kesehatan	Rp	268.352.490,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	7.478.812.638,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	1.221.945.761,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	59.943.196,00
Dinas Perhubungan	Rp	6.243.624.922,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	219.235.194,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	314.266.696,91
Dinas Pariwisata	Rp	1.077.995.549,39

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	15.030.366.588,18
Sekretariat Daerah	Rp	28.000.000,00
Sekretariat DPRD	Rp	198.596.807,18

Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp190.536.415,00 serta pendapatan hibah dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.118.788.595,00. Kemudian, reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp199.014.525,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.175.634.683,00 dan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.572.005.021,00. Rekalsifikasi dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp299.202.308,00 dan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp297.647.610,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.778.567.276,66 terdiri dari:

Pelunasan Utang Belanja Modal	Rp	2.284.598.570,18
Hibah	Rp	888.563.127,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	1.617.945.882,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	Rp	96.116.953,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	348.464.520,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	Rp	3.134.429.084,00
Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang	Rp	308.812.040,48
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	Rp	99.637.100,00
Jumlah	Rp	8.778.567.276,66

Pengurangan dari pelunasan Utang Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp2.284.598.570,18 merupakan pengurangan dari Belanja Modal tahun 2023 yang asetnya telah diakui di tahun 2022. Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp888.563.127,00 terdiri dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp682.711.327,00, Pagar sebesar Rp119.451.800,00 serta Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp86.400.000,00. Kemudian reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Rekalsifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.617.945.882,00, reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp96.116.953,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp348.464.520,00, reklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp3.134.429.084,00, Rekalsifikasi ke Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp308.812.040,48 dan reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp99.637.100,00. Selanjutnya reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.456.015.103.387,75 yang berada pada:

Tabel 7.5.107 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	426.457.707.364,66
2	Dinas Kesehatan	9.861.878.136,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50.007.680.417,69
4	Puskesmas Ranai	5.104.868.954,23
5	Puskesmas Tanjung	4.232.993.212,95
6	Puskesmas Bunguran Tengah	7.421.847.611,32
7	Puskesmas Bunguran Selatan	8.447.041.136,38
8	Puskesmas Kelarik	4.141.715.035,17
9	Puskesmas Sedanau	7.373.679.566,78
10	Puskesmas Pulau Tiga	10.402.797.763,77
11	Puskesmas Pulau Laut	7.925.096.050,00
12	Puskesmas Midai	8.485.540.575,71
13	Puskesmas Serasan	9.313.710.950,04
14	Puskesmas Serasan Timur	6.145.829.010,00
15	Puskesmas Subi	5.790.749.194,24
16	Puskesmas Batubi Jaya	4.832.748.604,71
17	Puskesmas Pulau Tiga Barat	1.355.340.072,00
18	Puskesmas Suak Midai	9.941.421.547,01

No	SKPD	Jumlah
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.420.623.306,69
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	272.230.095.982,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.943.196,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.271.940.805,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.502.606.060,09
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.987.182.811,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	19.862.687.097,00
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.944.000,00
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.018.800.000,00
28	Dinas Perhubungan	51.312.076.740,03
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.612.346.400,00
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	622.435.194,00
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	30.788.040.717,98
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.107.759.300,00
33	Dinas Perikanan	10.595.847.203,00
34	Dinas Pariwisata	8.886.818.706,93
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	27.610.182.686,07
36	Bagian Tata Pemerintahan	28.000.000,00
37	Bagian Umum	93.208.745.263,00
38	Sekretariat DPRD	36.969.056.305,12
39	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.907.072.179,00
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.645.400.000,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.000,00
42	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.328.075.000,00
43	Kecamatan Bunguran Timur	2.815.681.650,00
44	Kecamatan Bunguran Barat	9.411.232.054,00
45	Kecamatan Bunguran Utara	3.736.164.000,00
46	Kecamatan Pulau Laut	1.526.625.000,00
47	Kecamatan Midai	5.759.111.150,00
48	Kecamatan Serasan	4.550.921.000,00
49	Kecamatan Subi	3.541.525.000,00
50	Kecamatan Pulau Tiga	5.129.866.511,60
51	Kecamatan Bunguran Tengah	2.013.281.454,58
52	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.314.650.000,00
53	Kecamatan Bunguran Selatan	1.275.870.000,00
54	Kecamatan Serasan Timur	5.070.304.981,00
55	Kecamatan Suak Midai	3.432.671.130,00
56	Kecamatan Bunguran Batubi	4.437.210.000,00
57	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.638.215.301,00
Jumlah		1.456.015.103.387,75

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah sebesar Rp2.123.237.712.072,71 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 2.030.388.415.732,09
Penambahan Tahun 2023	Rp 149.294.499.201,46
Jumlah	Rp 2.179.682.914.933,55
Pengurangan Tahun 2023	Rp 56.445.202.860,84
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp 2.123.237.712.072,71

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.108 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AKHIR 2022	PENAMBAHAN				PELUNASAN UTANG 2022	PENGHAPUSAN SK 251 TAHUN 2023	HIBAH	REKLASIFIKASI KE PERALATAN DAN MESIN	REKLASIFIKASI KE GEDUNG DAN BANGUNAN	REKLASIFIKASI KE KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	REKLASIFIKASI KE ASSET LAIN-LAIN	BEBAN BARANG DAN JASA	REKLASIFIKASI KE TAGIHAN JANGKA PANJANG	REKLASIFIKASI SESAMA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO AKHIR 2023
			REALISASI BELANJA	REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN	REKLASIFIKASI DARI KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	REKLASIFIKASI SESAMA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN											
1	Jalan Provinsi	3.779.708.668,00	0,00	0,00	0,00	99.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.368.668,00
2	Jalan Kabupaten	995.753.317.920,87	49.459.871.101,08	0,00	1.155.858.795,00	3.193.552.157,00	154.742.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299.390,81	0,00	198.680.304,00	577.968.737,76	99.660.000,00	1.027.232.157.366,19
3	Jalan Desa	351.539.100.412,95	35.024.833.780,38	0,00	780.919.000,00	2.506.442.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.473.000,00	244.841.860,00	0,00	409.690.804,08	0,00	4.121.116.922,48
4	Jalan Khusus	1.611.245.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.245.884,00
5	Jalan Lainnya	22.413.957.597,00	11.681.601.169,00	0,00	0,00	0,00	8.186.841.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.442.410,00	23.972.752.500,00
6	Jembatan pada Jalan Nasional	3.679.273.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.273.815,00
7	Jembatan pada Jalan Kabupaten	24.172.838.153,46	2.469.799.522,00	0,00	49.940.000,00	217.835.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.785.345,00	0,00	0,00	26.712.627.699,46
8	Jembatan pada Jalan Desa	2.602.768.503,00	746.524.780,50	0,00	0,00	972.777.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.822.081,00	4.123.248.831,50
9	Jembatan Penyelenggaraan	194.214.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.214.755,00
10	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	136.506.442.607,93	0,00	0,00	0,00	149.602.193,00	0,00	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.265.145.800,93
11	Jembatan Lainnya	96.430.214.194,96	1.464.778.447,00	0,00	0,00	198.822.081,00	224.481.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00	0,00	0,00	0,00	1.240.796.698,00	96.557.717.665,96
12	Bangunan Pengambilan Irigasi	131.401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.401.800,00
13	Bangunan Pembawa Irigasi	26.614.601.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.614.601.371,00
14	Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	199.661.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.661.600,00
15	Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	1.220.958.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.958.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bangunan Sawah Irigasi	2.680.886.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.886.187,00
18	Bangunan Air Irigasi Lainnya	697.867.745,20	25.933.990,00	0,00	0,00	25.933.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.867.745,20
19	Saluran Pembuang Pasang Surut	509.702.616,29	12.273.348.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584.475.483,29
20	Bangunan Pengaman Pasang Surut	221.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.340.000,00
21	Bangunan Pengaliran Pasang Surut Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	191.506.408,00	0,00	0,00	0,00	191.506.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	44.476.095.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.778.228.012,72
24	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	16.700.620.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960.917.517,81
25	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	47.703.622.635,00	0,00	0,00	25.938.000,00	27.842.856.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.580.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.482.837.816,00
26	Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai	11.138.413.373,50	0,00	0,00	0,00	17.448.232.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586.645.695,00
27	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	247.003.347,00	0,00	0,00	0,00	29.752.458.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.461.484,00
28	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	358.658.338,00	0,00	0,00	0,00	358.658.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	3.569.664.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.664.560,00
30	Bangunan Pengembangan Pengembangan Sumber Air	11.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484.000,00
31	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	0,00	4.236.802.290,00	0,00	0,00	0,00	4.236.802.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
33	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	6.456.458.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456.458.990,00
34	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00
35	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.215.124.861,00	49.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.064.861,00
36	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Bangunan Pembawa Air Kotor	859.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.999.000,00
38	Bangunan Pembuang Air Kotor	10.445.085.800,00	94.624.830,00	0,00	0,00	992.963.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.624.830,00
39	Bangunan Pengaman Air Kotor	149.570.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.570.865,21
40	Bangunan Pelengkap Air Kotor	3.438.342.576,00	0,00	0,00	0,00	49.683.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.026.276,00
41	Bangunan Air Kotor Lainnya	45.290.117.030,24	865.553.691,00	0,00	0,00	199.728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.553.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489.845.330,24
42	Instalasi Air Permukaan	2.131.784.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.784.724,00
43	Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	102.665.349.232,00	817.450.000,00	0,00	0,00	0,00	793.650.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.665.349.232,00
45	Instalasi Air Ruangan Domestik	2.517.583.500,00	1.912.659.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.859.324,00	2.517.583.500,00	0,00
46	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	114.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.606.000,00
47	Bangunan Penampung Sampah	409.260.000,00	209.337.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.337.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.260.000,00
48	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	4.987.565.870,34	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.565.870,34
49	Instalasi Pengolahan Bahan Bangkuan Lainnya	380.054.999,50	0,00	0,00	0,00	91.840.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.628.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.298.994,00
50	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	4.465.479.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.479.920,00
51	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	10.280.442.554,00	3.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180.442.554,00
52	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	59.369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.369.200,00
54	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	380.054.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.0,

Sekretariat DPRD

Jumlah

Rp 306.748.371,00

Rp 147.255.543.406,46

Jumlah reklasifikasi tambah ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp2.038.955.795,00 diantaranya reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.300.000,00 dan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.012.655.795,00.

Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp56.445.202.860,84 yang terdiri dari:

Pelunasan Utang Tahun 2022	Rp	15.214.445.852,00
Penghapusan Aset Tahun 2023	Rp	41.600.000,00
Hibah	Rp	98.450.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	233.137.430,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	17.175.634.683,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	21.615.551.282,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	349.299.000,00
Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang	Rp	577.968.737,76
Beban Barang dan Jasa	Rp	1.139.115.876,08
Jumlah	Rp	56.445.202.860,84

Pelunasan Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp15.214.445.852,00 yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perhubungan. Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah sebesar Rp41.600.000,00 yang berdasarkan SK Nomor 251 Tahun 2023.

Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp98.450.000,00 yaitu ke Pemerintah Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat berdasarkan SK Nomor 139 Tahun 2023. Jumlah reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp18.551.760.243,00, diantaranya reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp233.137.430,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.175.634.683,00, reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp21.615.551.282,00, reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp349.299.000,00, Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp577.968.737,76 dan reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.139.115.876,08.

Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.123.237.712.072,71 yang berada pada:

Tabel 7.5.109 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

		(dalam rupiah)
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.581.267.289,24
2	Dinas Kesehatan	16.678.669.748,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.818.099.537.043,35
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	186.745.787.318,30
5	Dinas Sosial	1.253.831,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	321.047.000,00

No	SKPD	Jumlah
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.560.200,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.402.101.321,36
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.129.348.384,00
10	Dinas Perhubungan	54.301.879.918,82
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	614.312.120,00
12	Dinas Perikanan	11.928.486.345,00
13	Dinas Pariwisata	11.010.283.933,09
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	274.739.439,00
15	Sekretariat Daerah	1.185.361.100,00
16	Sekretariat DPRD	238.557.865,21
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	35.174.000,00
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10.584.269.000,00
19	Kecamatan Bunguran Timur	2.161.272.200,00
20	Kecamatan Midai	185.000.000,00
21	Kecamatan Serasan	389.159.000,00
22	Kecamatan Pulau Tiga	330.645.016,00
JUMLAH		2.123.237.712.072,71

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar Rp70.549.121.461,12 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 69.345.782.211,12
Penambahan Tahun 2023	Rp 2.034.542.250,00
Jumlah	Rp 71.380.324.461,12
Pengurangan Tahun 2023	Rp 831.203.000,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	Rp 70.549.121.461,12

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.110 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)													
No	Uraian	Saldo Akhir 2022	Penambahan				Pengurangan						Saldo Akhir 2023
			Realisasi Belanja	Reklasifikasi Dari Beban Barang Dan Jasa	Reklasifikasi Dari Peralatan Dan Mesin	Reklasifikasi Sesama Aset Tetap Lainnya	Pelunasan Utang 2022	Reklasifikasi Ke Peralatan Dan Mesin	Reklasifikasi Ke Aset Tak Berwujud	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain	Reklasifikasi Ke Tagihan Jangka Panjang	Reklasifikasi Sesama Aset Tetap Lainnya	
1	Buku Umum	35.915.121.740,32	9.500.000,00	0,00	0,00	402.008.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.326.630.490,32
2	Buku Filsafat	16.562.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.258,00
3	Buku Agama	137.422.588,00	0,00	0,00	0,00	8.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.125.588,00
4	Buku Ilmu Sosial	260.555.632,00	0,00	0,00	0,00	7.536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.091.932,00
5	Buku Ilmu Bahasa	280.792.780,00	597.979.250,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	153.015.000,00	0,00	0,00	0,00	435.251.450,00	292.005.580,00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	31.473.602,00	0,00	0,00	0,00	12.689.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.162.802,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	484.837.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.837.997,00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.080.295.359,00	0,00	0,00	0,00	1.539.200,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.074.964.559,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	36.470.534,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.670.534,00
10	Buku Laporan	5.340.275,00	0,00	345.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.952.218,00	0,00	15.034.782,00	0,00	5.340.275,00
11	Bahan Perpustakaan Terceat Lainnya	48.683.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683.755,00
12	Audio Visual	0,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bentuk Mikro (Microform)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
14	Bahan Kartografi	30.031.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031.360,00
15	Karya Grafika (Graphic Material)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16	Alat Musik	2.519.382.500,00	349.581.000,00	5.100.000,00	0,00	2.775.000,00	199.831.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.707.500,00
17	Lukisan	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
18	Alat Peraga Kesenian	0,00	597.735.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.495.000,00
19	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	160.764.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.764.778,00
20	Barang Kerajinan	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
21	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	11.222.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.469,80
22	Ternak Potong	89.727.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.273,00
23	Ikan Budidaya	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
24	Tanaman	5.409.993.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.993.625,00
25	Tanaman Koleksi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
26	Aset Tetap Dalam Renovasi	22.790.513.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790.513.685,00
27	Aset Tetap Lainnya	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
JUMLAH		69.345.782.211,12	1.676.995.250,00	352.787.000,00	4.760.000,00	435.251.450,00	199.831.000,00	189.085.000,00	424.252.218,00	3.000.000,00	15.034.782,00	435.251.450,00	70.549.121.461,12

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar Rp2.034.542.250,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.676.995.250,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	352.787.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	4.760.000,00
Jumlah	Rp	2.034.542.250,00

Realisasi belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar Rp1.676.995.250,00 termasuk didalamnya bersumber dari Belanja BOS dan BOP Aset Tetap Lainnya berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp597.979.250,00.

Penambahan dari reklasifikasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp352.787.000,00 dan penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.760.000,00.

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp481.916.000,00 terdiri dari:

Pelunasan Utang Tahun 2022	Rp	199.831.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	192.385.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	420.952.218,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	3.000.000,00
Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang	Rp	15.034.782,00
Jumlah	Rp	831.203.000,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp831.203.000,00 berasal dari pelunasan Utang Tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp199.831.000,00.

Kemudian reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp192.385.000,00. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp420.952.218,00. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain sebesar Rp3.000.000,00 dan Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp15.034.782,00. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Lainnya sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp70.549.121.461,12 berada pada :

Tabel 7.5.111 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)		
No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.145.308.070,12
2	Dinas Kesehatan	83.176.700,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.560.539.885,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	35.750.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	644.499.898,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	4.862.836.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.720.277.630,00
8	Dinas Perikanan	206.120.000,00
9	Dinas Pariwisata	176.179.778,00

No.	SKPD	Jumlah
10	Sekretariat Daerah	59.565.000,00
11	Sekretariat DPRD	49.999.000,00
12	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.869.500,00
Jumlah		70.549.121.461,12

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.312.480.462,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 57.050.297.434,00
Penambahan tahun 2023	Rp 23.333.441.564,00
Jumlah	Rp 80.383.738.998,00
Pengurangan tahun 2023	Rp 7.071.258.536,00
Nilai Aset Tetap Tahun 2023	Rp 73.312.480.462,00

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.112 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)													
No	Uraian	Saldo akhir 2022	penambahan			pengurangan							Saldo Akhir 2023
			Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi ke Aset Tanah	Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	Reklasifikasi ke Gedung Bangunan	Reklasifikasi Ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	Reklasifikasi Ke Persediaan Untuk Diserahkan Lainnya	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.618.236.403,00	0,00	33.300.000,00	0,00	29.942.000,00	0,00	2.004.629.626,00	919.736.295,00	2.215.372.500,00	0,00	64.790.000,00	42.417.065.982,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	23.942.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	99.944.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.944.400,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Komputer Jaringan	47.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.878.068,00	0,00	99.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.728.068,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	1.484.795.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.220,00	0,00	1.477.823.662,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	130.706.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.894.900,00
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	292.078.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.078.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	68.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	563.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.459.000,00
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	49.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896.000,00	0,00	0,00
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	21.589.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589.825,00
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional	4.806.490.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.212.000,00	0,00	0,00	0,00	4.082.278.108,00
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	833.666.040,00	0,00	0,00	21.299.390.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133.056.852,00
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa	908.880.350,00	0,00	0,00	244.841.860,00	0,00	0,00	0,00	10.307.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143.415.210,00
16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Lainnya	1.368.499.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.036.862,00
17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00
18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	253.629.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.938.000,00	0,00	71.698.000,00	0,00	155.993.056,00
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	17.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017.000,00
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	13.858.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.927,00
JUMLAH		57.050.297.434,00	99.944.400,00	1.617.945.882,00	21.615.551.282,00	29.942.000,00	47.927.000,00	2.572.005.021,00	2.012.655.795,00	2.215.372.500,00	128.566.220,00	64.790.000,00	73.312.480.462,00

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp23.333.441.564,00 terdiri dari:

Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp 99.944.400,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 1.617.945.882,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 21.615.551.282,00
Jumlah	Rp 23.333.441.564,00

Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp99.944.400,00 berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga, reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp1.617.945.882,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.584.645.882,00 dan nilai sebesar Rp33.300.000,00 berasal dari Dinas Pariwisata. Kemudian, reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp20.821.862.152,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp7.071.258.536,00 dengan rincian sebagai berikut :

Relasifikasi ke Aset Tanah	Rp	29.942.000,00
Relasifikasi ke Peralatan Mesin	Rp	47.927.000,00
Reklasifikasi ke Gedung Bangunan	Rp	2.572.005.021,00
Reklasifikasi Ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	2.012.655.795,00
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	Rp	2.215.372.500,00
Reklasifikasi Ke Aset lain-lain	Rp	128.566.220,00
Reklasifikasi Ke Persediaan Untuk Diserahkan Lainnya	Rp	64.790.000,00
Jumlah	Rp	7.071.258.536,00

Saldo Akhir Konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp73.312.480.462,00 terdiri dari :

Tabel 7.5.113 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
NO.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	421.476.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.451.775.337,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.589.825,00
4	Dinas Perhubungan	177.500.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	206.839.300,00
6	Dinas Pariwisata	33.300.000,00
JUMLAH		73.312.480.462,00

Nilai Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp73.312.480.462,00, terdapat penambahan dari Pekerjaan tahun 2023 sebesar Rp21.848.645.682,00 yang akan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2024. Sedang untuk Konstruksi dalam pengerjaan Gedung Bangunan berupa pasar modern senilai Rp20.504.180.031,00, Pembangunan Gedung DPRD Rp24.414.425.328,00 dan Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Pulau Tiga Barat Rp1.544.611.562,00 dilanjutkan menunggu kemampuan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah meningkat, ini disebabkan untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dalam pekerjaan yang berupa jasa konsultasi perencanaan dibawah tahun 2023 Sebesar Rp5.000.617.859,00 akan dilanjutkan penyelesaiannya ditahun 2025.

Aset-aset tetap sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah aset-aset mempunyai nilai batasan kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yaitu untuk peralatan dan mesin mempunyai nilai minimal Rp1.000.000,00 dan pada gedung dan bangunan Rp10.000.000,00.

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.986.134.898.308,55 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.813.801.491.834,18
Penambahan Tahun 2023	Rp	176.880.868.082,03
Jumlah	Rp	1.990.682.359.916,21
Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.547.461.607,66
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.986.134.898.308,55

Jumlah tersebut merupakan rincian Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.114 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)															
No.	Uraian	Saldo Akhir 2022	Penambahan							Pengurangan					
			Koreksi Kurang Catat Saldo Awal	Koreksi Kurang Catat Aset	Perubahan Masa Manfaat	Reklasifikasi Dari Kdp	Pendapatan Hibah	Reklasifikasi Dari Persediaan	Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain	Beban Penyusutan	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal	Reklasifikasi Ke Kdp	Penghapusan	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain	Hibah
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	1.714.780.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.849.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	87.708.689.191,71	508.035.000,01	523.553.745,00	0,00	0,00	1.367.850.671,19	0,00	659.831.745,00	7.888.572.112,79	0,00	0,00	32.329.000,00	1.334.267.254,76	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.413.961.844,62	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.283.883,25	0,00	0,00	24.060.000,00	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	4.993.453.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.208.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	74.266.222.588,48	114.878.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	0,00	8.404.818.119,44	1.811.093,33	0,00	140.258.000,00	13.362.366,67	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.820.809.420,41	13.785.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.789.261,40	0,00	0,00	0,00	180.048.000,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	98.442.498.920,76	105.918.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292.104.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	15.913.776.078,82	4.006.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.754.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	37.214.058.919,75	51.739.832,65	0,00	0,00	6.907.294,17	0,00	0,00	0,00	7.876.122.506,68	550,00	0,00	547.824.670,83	0,00	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	93.151.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	44.262.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.454.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	261.047.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.702.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.533.645.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	979.698.979,64	0,00	0,00	4.929.693.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	582.803.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	411.421.237,85	4.001.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.741.670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	230.221.681.374,65	2.844.419.151,61	0,00	0,00	78.286.142,90	5.197.980,99	0,00	0,00	26.677.436.301,17	108.568.895,68	61.875.698,66	21.260.198,67	669.121.777,22	24.336.000,00
19	Akumulasi Penyusutan Monumen	482.376.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.172.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	9.484.107.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.159.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	5.279.078.390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.473.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.094.669.021.543,96	3.518.611.390,93	0,00	0,00	2.363.939.434,19	0,00	0,00	0,00	76.720.477.463,54	678.828.971,62	173.515.517,93	17.541.333,33	60.465.005,00	9.024.583,33
23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	95.796.402.822,94	142.022.612,35	0,00	0,00	199.491.785,48	0,00	0,00	0,00	8.927.378.329,05	622.478.208,35	0,00	0,00	0,00	104.442.817.341,47
24	Akumulasi Penyusutan Instalasi	32.362.776.491,23	11.173.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.595.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.942.547.143,46
25	Akumulasi Penyusutan Jaringan	5.672.584.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.681.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.265.928,72
JUMLAH		1.813.801.491.834,18	7.319.661.921,14	523.553.745,00	4.929.693.183,21	2.648.624.656,74	1.373.048.652,18	11.750.000,00	659.831.745,00	59.414.704.178,76	1.411.687.719,18	235.391.216,59	783.273.202,83	32.257.264.403,65	33.360.583.331

Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp176.880.868.082,03 terdiri dari:

1.	Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2023	Rp	159.414.704.178,76
2.	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	659.831.745,00
3.	Penambahan dari Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	6.907.294,17
4.	Penambahan dari Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	78.286.142,90
5.	Penambahan dari Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	2.563.431.219,67
6.	Penambahan dari Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	11.750.000,00
7.	Kekurangan pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	803.435.505,16
8.	Kekurangan pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	2.844.419.151,61
9.	Kekurangan pencatatan Akumulasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	3.671.807.264,37
10.	Koreksi kurang catat aset tetap (SK 204 Tahun 2023)	Rp	523.553.745,00
11.	Perubahan Masa Manfaat Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	4.929.693.183,21
12.	Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.367.850.671,19
13.	Pendapatan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	5.197.980,99
Jumlah Penambahan		Rp	176.880.868.082,03

Pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp4.547.461.607,66 terdiri dari:

1.	Kelebihan pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	1.811.643,33
----	--	----	--------------

2. Kelebihan pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	108.568.895,68
3. Kelebihan pencatatan Akumulasi Jalan Irigasi dan jaringan	Rp	1.301.307.180,17
4. Penghapusan Aset Tetap	Rp	783.273.202,83
5. Pencatatan Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Rp	2.257.264.403,65
6. Pengurangan atas Aset tetap yang telah dihibahkan	Rp	33.360.583,33
7. Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	Rp	61.875.698,66
Jumlah Pengurangan	Rp	4.547.461.607,66

Aset Ekstrakomptabel

Aset-aset yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi aset tetap dan aset yang tidak diyakini keberadaanya sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan sebagai Aset Ekstrakomptabel. Aset Ekstrakomptabel tetap disajikan dalam dokumen penatusahaan Barang Milik Daerah tetapi tidak disajikan di Neraca Pemerintah. Aset Ekstrakomptabel untuk peralatan dan mesin adalah dengan nilai dibawah Rp1.000.000,00, sedangkan untuk gedung dan bangunan dengan nilai dibawah Rp10.000.000,00

Nilai Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp122.058.379.147,15 sebagai berikut:

Tabel 7.5.115 Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin

<i>(dalam rupiah)</i>								
No	Nama SKPD	Saldo Akhir 2022	Penambahan			Pengurangan		Saldo Akhir 2023
			Mutasi Pengguna	Koreksi Saldo Awal	Penambahan 2023	Mutasi Pengguna	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.690.415.681,00	0,00	0,00	1.145.405.800,00	0,00	0,00	72.835.821.481,00
2	Dinas Kesehatan	6.521.383.600,00	0,00	0,00	412.177.118,95	0,00	0,00	6.933.560.718,95
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.593.100,00	0,00	13.430.000,00	7.195.480,00	0,00	0,00	161.218.580,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	58.548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.548.700,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	99.613.366,69	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	100.573.366,69
6	Dinas Pemadam Kebakaran	102.610.800,00	0,00	24.600.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00	135.030.800,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.150.000,00	8.299.200,00	0,00	12.175.000,00	0,00	0,00	38.624.200,00
8	Dinas Sosial	20.400.000,00	0,00	0,00	10.520.000,00	0,00	0,00	30.920.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	356.810.900,00	0,00	0,00	20.265.100,00	0,00	0,00	377.076.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.241.000,00	0,00	72.704.500,00	0,00	0,00	0,00	131.945.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	311.529.866,01	0,00	0,00	0,00	8.299.200,00	0,00	303.230.666,01
12	Dinas Lingkungan Hidup	31.646.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646.900,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.654.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654.800,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.735.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.735.726,00
15	Dinas Perhubungan	114.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.444.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.200.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200.701,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	37.594.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.594.535,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.100.217,00	0,00	0,00	70.670.000,00	0,00	0,00	234.770.217,00
19	Dinas Perikanan	739.157.900,00	0,00	0,00	28.690.000,00	0,00	210.496.900,00	557.351.000,00
20	Dinas Pariwisata	129.083.200,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	130.073.200,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	342.597.664,00	0,00	0,00	129.288.000,00	0,00	0,00	471.885.664,00
22	Sekretariat Daerah	35.426.660.807,50	0,00	0,00	369.760.000,00	0,00	0,00	35.796.420.807,50
23	Sekretariat DPRD	1.053.768.158,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.054.368.158,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.925.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.925.100,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	122.933.970,03	0,00	0,00	0,00	3.016.000,00	15.577.104,03	104.340.866,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297.000,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726.000,00
28	Inspektorat	32.928.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.928.050,00
29	Kecamatan Bunguran Timur	201.990.000,00	3.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.006.000,00
30	Kecamatan Bunguran Barat	57.178.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.500,00	53.444.750,00
31	Kecamatan Bunguran Utara	207.336.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.336.960,00
32	Kecamatan Pulau Laut	245.588.500,00	0,00	30.000.000,00	19.908.000,00	0,00	0,00	295.496.500,00
33	Kecamatan Midai	127.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.134.500,00
34	Kecamatan Serasan	61.604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.604.500,00
35	Kecamatan Subi	189.688.100,00	0,00	0,00	24.937.500,00	0,00	185.736.500,00	28.889.100,00
36	Kecamatan Pulau Tiga	220.053.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.053.250,00
37	Kecamatan Bunguran Tengah	40.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.934.500,00
38	Kecamatan Bunguran Timur Laut	307.662.500,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	347.562.500,00
39	Kecamatan Bunguran Selatan	60.124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.124.450,00
40	Kecamatan Serasan Timur	37.124.500,00	0,00	0,00	29.440.000,00	0,00	0,00	66.564.500,00
41	Kecamatan Suak Midai	31.475.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	47.975.000,00
42	Kecamatan Bunguran Batubi	56.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.720.000,00
43	Kecamatan Pulau Tiga Barat	101.750.000,00	0,00	0,00	8.663.000,00	0,00	0,00	110.413.000,00
44	Kecamatan Pulau Seluan	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	53.306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.306.900,00
Total		119.962.423.652,23	11.315.200,00	140.734.500,00	2.370.764.998,95	11.315.200,00	415.544.004,03	122.058.379.147,15

Nilai Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.112.927.630,07 sebagai berikut:

Tabel 7.5.116 Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Akhir 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	321.549.043,00	9.990.000,00	0,00	331.539.043,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.647.735,00	0,00	0,00	21.647.735,00
3	Dinas Kesehatan	191.806.400,00	0,00	0,00	191.806.400,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.990.750,00	0,00	0,00	9.990.750,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.975.000,00	0,00	0,00	18.975.000,00
7	Dinas Perhubungan	5.612.714.222,07	0,00	0,00	5.612.714.222,07
8	Dinas Perikanan	87.649.880,00	0,00	0,00	87.649.880,00
9	Dinas Pariwisata	13.475.000,00	0,00	0,00	13.475.000,00
10	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	251.795.500,00	0,00	0,00	251.795.500,00
12	Sekretariat Daerah	288.300.200,00	28.000.000,00	0,00	316.300.200,00
13	Sekretariat DPRD	220.315.900,00	0,00	0,00	220.315.900,00
14	Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
15	Kecamatan Bunguran Selatan	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
Total		7.074.937.630,07	37.990.000,00	0,00	7.112.927.630,07

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna belum menerapkan PSAP 17 terkait properti investasi. Penerapan properti invetasi belum dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyusun Kebijakan Akuntansi terkait properti investasi. Alasan Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyusun kebijakan akuntansi properti investasi dikarenakan belum tersedia Bagan Akun Standar atas aset properti investasi dari Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna masih menggunakan Bagan Akun Standar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang belum mengatur tentang bagan akun standar aset properti investasi.

Bagan Akun Standar untuk aset properti investasi baru diatur dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Penyisihan dan Beban Penyisihan Dana Bergulir, Surplus/Defisit Non Operasional, Beban Dibayar Dimuka atas Asuransi Barang Milik Daerah dan Jasa Internet, Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang Terutang atas Belanja Pemerintah Daerah, Belanja Uang Meugang untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh serta Pungutan Bagi Wisatawan Asing dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat untuk Provinsi Bali Tanggal 5 April 2024 yang baru mengatur terkait adanya Bagan Akun Standar Aset Properti Investasi. Pemerintah Daerah akan menyajikan aset Properti Investasi pada tahun 2024 setelah kebijakan Akuntansi Pemerintah Natuna selesai disusun.

7.5.3.4 Aset Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lainnya	43.834.912.844,05	52.121.929.639,10

Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar Rp43.834.912.844,05 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp 56.961.209.775,65
Penambahan Tahun 2023	Rp 23.872.696.797,21
Jumlah	Rp 80.833.906.572,86
Pengurangan Tahun 2023	Rp 29.357.400.924,55
Saldo Aset Lainnya	Rp 51.476.505.648,31
Akumulasi Per 31 Desember 2023	Rp (7.641.592.804,26)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 43.834.912.844,05

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.834.912.844,05. Aset Lainnya pada tahun 2023 bertambah sebesar Rp23.872.696.797,21 dan berkurang sebesar Rp29.357.400.924,55 atau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.117 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023
Tagihan Jangka Panjang	12.689.954.458,87	2.255.140.874,56	5.732.190.411,41	9.212.904.922,02
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	8.669.526.094,00	3.181.289.238,00	403.852.308,00	11.446.963.024,00
Aset Lain-Lain	20.380.834.826,78	3.303.159.633,68	7.999.892.758,17	15.684.101.702,29
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	15.220.894.396,00	15.133.106.000,00	15.221.464.396,00	15.132.536.000,00
Saldo Aset Lainnya	56.961.209.775,65	23.872.695.746,24	29.357.399.873,58	51.476.505.648,31
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.839.280.136,55)	(2.897.753.539,51)	(95.440.871,80)	(7.641.592.804,26)
Jumlah	52.121.929.639,10	20.974.942.206,73	29.261.959.001,78	43.834.912.844,05

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Lainnya disajikan sesuai dengan klasifikasi pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

7.5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

	Tahun 2023	Tahun 2022
Tagihan Jangka Panjang	9.212.904.922,02	12.689.954.458,87

Tagihan Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.5.118 Rincian Tagihan Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir
		Penambahan 2023	Koreksi Pencatatan	Koreksi Pencatatan	Pelunasan	
Tuntutan Perbendaharaan	3.867.362.944,00	0,00	0,00	1.668.380.008,00	3.287.000,00	2.195.695.936,00
Tuntutan Ganti Rugi	8.822.591.514,87	1.864.439.266,56	390.701.608,00	2.197.738.448,00	1.862.784.955,41	7.017.208.986,02
Jumlah	12.689.954.458,87	1.864.439.266,56	390.701.608,00	3.866.118.456,00	1.866.071.955,41	9.212.904.922,02

Selama tahun 2023 terdapat penambahan tagihan jangka panjang sebesar Rp1.864.439.266,56 terdiri dari Temuan BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2022 berupa denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp8.605.466,00 dan sebesar Rp1.855.833.800,56 merupakan Temuan BPK audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2023. Koreksi Pencatatan sebesar Rp390.701.608,00 merupakan reklasifikasi kelebihan pencatatan dari Tuntutan Perbendaharaan ke Tuntutan Ganti Rugi.

Pengurangan Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp1.668.380.008,00 terdiri dari kelebihan pencatatan Tuntutan Perbendaharaan yang direklasifikasi ke Tuntutan Ganti Kerugian Rp390.701.608,00 dan koreksi atas pengurangan tuntutan perbendaharaan yang sudah mempunyai ketetapan hukum secara tetap (*inkracht*) Rp1.277.678.400,00. Kemudian Koreksi Pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian Rp2.197.738.448,02 terdiri dari Koreksi pencatatan Kerugian Daerah pada Perusahaan Daerah Sri Serindit

Rp2.027.969.309,00 dan penyetoran Tuntutan Ganti Kerugian tahun sebelumnya yang baru dilaporkan dan divalidasi pada tahun 2023 sebesar Rp169.769.139,00. Pelunasan Kerugian Daerah pada tahun 2023 berjumlah Rp1.866.071.955,41. Rincian pembayaran selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.119 Daftar Pembayaran Tagihan Jangka Panjang

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Nama Penanggung TGR	Pembayaran 2023
1	CV. UP	66.550.420,00
2	CV. AJP	6.206.322,56
3	CV MAB	2.399.143,74
4	PT. IK	20.300,00
5	CV. SW	92.905,00
6	Hj. SA	1.370.000,00
7	M. GH	1.724.500,00
8	SAK	2.749.000,00
9	AGT	2.050.000,00
10	CV. AVC	3.828.000,00
11	SY. CA	3.300.000,00
12	CV. NTP	4.300.384,15
13	MAR	7.800.000,00
14	CV. CEC	13.000.000,00
15	CV. KTP	13.010.120,53
16	CV. TEC	15.984.166,67
17	EYN	1.500.000,00
18	CV. LJ	2.000.000,00
19	CV. LS	1.867.861,00
20	RHA	14.040.000,00
21	CV. SMJ	21.730.256,14
22	CV. A	23.594.044,00
23	CV. PIJAR MANDIRI	25.740.201,81
24	MAZ	5.000.000,00
25	Ir. BAS	31.233.742,00
26	CV. CNS	44.668.384,92
27	AS	42.185.000,00
28	CV. PS	25.000.000,00
29	CV. JCB	56.035.222,00
30	CV. BJB	59.223.273,00
31	CV. TCP	105.724.733,20
32	CV. KAB	7.000.000,00
33	CV. BB	10.000.000,00
34	MTQ	92.600.000,00
35	CV. PM	224.278.344,44
36	AZW	13.000.000,00
37	SHR	63.581.000,00
38	HEN	3.287.000,00
39	CV. CNL	38.365.905,22
40	CV. ATM	35.913.207,95
41	CV. PM	18.533.761,91
42	CV. LI	5.522.137,21
43	CV. KAB	32.350.367,92
44	CV. SMJ	7.149.668,74
45	CV. KAB	43.233.858,19
46	CV. MAB	183.192.464,67
47	CV. AJP	116.909.060,44
48	DPUPR	4.560.000,00
49	BKPD	23.809.000,00
50	DPP	9.562.500,00
51	DPP	6.375.000,00
52	BPD	4.250.000,00
53	BPK	60.090.000,00
54	DKM	41.625.000,00
55	BPPPD	13.272.500,00
56	DKNS	1.007.500,00
57	DPUPR	23.250.000,00
58	DPR	6.300.000,00
59	DPPKKB	8.175.000,00
60	DPK	9.625.000,00
61	DKUKM	2.012.500,00
62	DS	6.070.000,00
63	SDPRD	147.243.198,00
Jumlah		1.866.071.955,41

7.5.3.4.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2023	Tahun 2022
	11.446.963.024,00	8.669.526.094,00

Perhitungan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	8.669.526.094,00
Jumlah Penambahan	Rp	3.181.289.238,00
Jumlah Pengurangan	Rp	403.852.308,00
Saldo Akhir	Rp	11.446.963.024,00

Peningkatan nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 7.5.120 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tidak Terwujud

(dalam rupiah)									
NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN		SALDO AKHIR 2023
			REKLASIFIKASI DARI				REKLASIFIKASI KE		
			GEDUNG DAN BANGUNAN	KDP	ASET TETAP LAINNYA	BEBAN	ASET LAIN-LAIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1.	Software	1.082.684.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.650.000,00	0,00	978.034.151,00
2.	Kajian	7.586.841.943,00	348.464.520,00	2.215.372.500,00	420.952.218,00	196.500.000,00	0,00	299.202.308,00	10.468.928.873,00
	Jumlah	8.669.526.094,00	348.464.520,00	2.215.372.500,00	420.952.218,00	196.500.000,00	104.650.000,00	299.202.308,00	11.446.963.024,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp3.181.289.238,00 adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	Rp	348.464.520,00
Reklasifikasi dari Aset KDP	Rp	2.215.372.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	420.952.218,00
Reklasifikasi dari Beban	Rp	196.500.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	3.181.289.238,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp3.181.289.238,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp348.464.520,00 dan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp2.215.372.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan Untuk Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp420.952.218,00 berasal dari Sekretariat Daerah sebesar Rp90.000.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp330.952.218,00. Reklasifikasi dari Beban sebesar Rp196.500.000,00 berasal dari Dinas Pariwisata.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp403.852.308,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp104.650.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp299.202.308,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.446.963.024,00 berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.121 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)									
Kode	SKPD	Saldo Awal	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir
			Reklasifikasi Dari				Reklasifikasi Ke		
			Gedung dan Bangunan	KDP	Aset Tetap Lainnya	Beban	Aset Lain-Lain	Gedung dan Bangunan	
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	288.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.475.000,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	833.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.423.000,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	842.012.900,00	348.464.520,00	2.215.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.849.920,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.605.442.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00	0,00	1.550.692.860,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.347.500,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330.952.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.952.218,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00	0,00	0,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	1.185.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.855.000,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	817.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.410.000,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.575.875,00
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00

Kode	SKPD	Saldo Awal	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir
			Reklasifikasi Dari				Reklasifikasi Ke		
			Gedung dan Bangunan	KDP	Aset Tetap Lainnya	Beban	Aset Lain-Lain	Gedung dan Bangunan	
3.26.01.	Dinas Pariwisata	635.315.000,00	0,00	0,00	0,00	196.500.000,00	0,00	0,00	831.815.000,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	778.282.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.202.308,00	479.080.000,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	40.466.651,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.466.651,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	388.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.120.000,00
JUMLAH		9.000.478.312,00	348.464.520,00	2.215.372.500,00	90.000.000,00	196.500.000,00	104.650.000,00	299.202.308,00	11.446.963.024,00

7.5.3.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	15.684.101.702,29	20.380.834.826,78

Aset Lain-lain merupakan aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah karena kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dan merupakan aset yang dicadangkan untuk dilakukan penghapusan menunggu dokumen keputusan penghapusan terbit. Perhitungan Aset Lain-lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	63.830.906.411,92
Penambahan		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.564.237.350,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	3.134.429.084,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	349.299.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	3.000.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	128.566.220,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	Rp	104.650.000,00
Reklasifikasi dari Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat	Rp	366.696.550,00
Jumlah	Rp	69.481.784.615,92
Pengurangan		
Koreksi Saldo Awal Aset Lain-Lain	Rp	7.444.832.634,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	659.831.745,00
Penghapusan berdasarkan SK No. 396 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Barang Rusak Berat Milik Pemerintah Daerah Berupa Aset Lain-lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp	3.486.773.295,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang masih memiliki masa manfaat (nilai buku)	Rp	4.222.391.380,71
Reklasifikasi Pencatatan Aset Lain-Lain ke Ekstrakomtable	Rp	37.983.853.858,92
Jumlah Pengurangan	Rp	53.797.682.913,63
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	15.684.101.702,29

Penambahan Aset Lain-lain pada tahun 2023 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp5.284.181.654,00 antara lain penambahan dari reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin yang rusak berat sebesar Rp1.564.237.350,00, penambahan dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.134.429.084,00 merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang akan dihibahkan namun belum ada Berita Acara Serah Terima sehingga dicatat di aset lain-lain, antara lain dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dihibahkan ke Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Serasan berdasarkan SK Nomor 447 Tahun 2023 sebesar Rp1.998.784.654,00, dari Dinas Perikanan yang dihibahkan ke Pemerintah

Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK Nomor 331 Tahun 2023 sebesar Rp986.017.500,00 dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp149.626.930,00 merupakan aset tetap perolehan tahun 2023 yang akan dihibahkan ke Pemerintah Desa Kelanga. Penambahan dari reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp349.299.000,00 merupakan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang akan dihibahkan namun belum ada Berita Acara Serah Terima sehingga dicatat di aset lain-lain berasal dari Dinas Perikanan yang dihibahkan ke Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK Nomor 331 Tahun 2023 sebesar Rp349.299.000,00, penambahan dari reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp3.000.000,00, penambahan dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp128.566.220,00 dan penambahan dari aset tak berwujud sebesar Rp104.650.000,00. Penambahan dari persediaan untuk diserahkan ke masyarakat berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp366.696.550,00 merupakan dokumen perencanaan untuk hibah ke masyarakat yang tidak dilanjutkan lagi dan menunggu proses penghapusan.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp53.797.682.913,63 antara lain terdiri dari koreksi saldo awal sebesar Rp7.444.832.634,00 berasal dari Sekretariat Daerah sebesar Rp337.550.000,00 merupakan aset lain-lain yang telah di reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin tahun sebelumnya, dari Dinas Sosial sebesar Rp130.000.000,00 merupakan aset lain-lain yang telah dihapuskan tahun sebelumnya berdasarkan SK Nomor 328 Tahun 2020 dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp6.977.282.634,00 merupakan aset lain-lain yang telah diserahkan ke Propinsi Kepulauan Riau (P3D) berdasarkan BAST Tahap III P3D No: 180/HK/BA/30/2019. Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp659.831.745,00 dan penghapusan sebesar Rp3.486.773.295,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang nilai bukunya tercatat pada neraca sebesar Rp4.222.391.380,71 dan reklasifikasi pencatatan aset lain-lain ke ekstrakomptabel sebesar Rp37.983.853.858,92.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.890.346.941,92, namun yang disajikan di neraca adalah nilai buku aset lain-lain yaitu sebesar Rp15.684.101.702,29 sedangkan aset lain-lain yang telah habis manfaatnya namun belum dilakukan penghapusan dicatat secara ekstrakomptabel.

Tabel 7.5.122 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo Awal	PENAMBAHAN								PENGURANGAN				Saldo Akhir 2023
			Mutasi Pengguna	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	Reklasifikasi dari Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat	Mutasi Pengguna	Koreksi Saldo Awal	Penghapusan	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.360.751.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.553.745,00	837.197.900,00
2	Dinas Kesehatan	17.930.605.175,00	0,00	869.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799.881.175,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	213.206.550,00	0,00	0,00	149.626.930,00	0,00	78.670.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.503.700,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.708.173.869,00	0,00	0,00	1.998.784.654,00	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00	366.696.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.405.073,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	455.000.000,00	0,00	28.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	353.820.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	43.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.234.000,00
7	Dinas Sosial	26.445.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445.050,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan	16.508.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508.825,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242.650.000,00	0,00	190.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.598.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.158.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793.136,00	0,00	13.365.000,00
14	Dinas Perhubungan	10.002.930.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125.000,00	0,00	9.966.805.967,00
15	Dinas Perikanan	3.113.177.510,67	0,00	47.800.000,00	986.017.500,00	349.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.753.944,00	0,00	1.967.540.066,67
16	Dinas Pariwisata	1.064.392.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.159.000,00	0,00	782.233.425,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pertanian	46.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.398.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763.000,00	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	317.042.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.042.500,25
23	Sekretariat Daerah	3.118.349.200,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.550.000,00	0,00	110.000.000,00	2.780.799.200,00
24	Sekretariat DPRD	232.407.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.407.750,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14.959.371.444,00	0,00	16.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977.282.634,00	113.740.000,00	0,00	7.884.513.310,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

No.	SKPD	Saldo Awal	PENAMBAHAN								PENGURANGAN				Saldo Akhir 2023
			Mutasi Pengguna	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	Reklasifikasi dari Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat	Mutasi Pengguna	Koreksi Saldo Awal	Penghapusan	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.689.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.502.500,00	0,00	1.533.002.000,00
29	Inspektorat	140.299.850,00	0,00	19.135.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	16.164.500,00	33.279.700,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	135.711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113.500,00	125.598.000,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	67.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.799.000,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	163.807.800,00	0,00	343.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.744.800,00
33	Kecamatan Pulau Laut	901.805.165,00	0,00	15.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.790.465,00	0,00	821.838.200,00
34	Kecamatan Midai	89.221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221.500,00
35	Kecamatan Serasan	1.020.557.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.780.200,00	0,00	967.777.250,00
36	Kecamatan Subi	31.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.399.500,00
37	Kecamatan Pulau Tiga	121.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.159.500,00
38	Kecamatan Bunguran Tengah	47.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.564.000,00
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	31.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.399.500,00
40	Kecamatan Bunguran Selatan	44.141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.141.500,00
41	Kecamatan Serasan Timur	269.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.091.200,00
42	Kecamatan Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	157.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.921.000,00	0,00	10.190.400,00
Total		63.830.906.411,92	110.000.000,00	1.564.237.350,00	3.134.429.084,00	349.299.000,00	128.566.220,00	3.000.000,00	104.650.000,00	366.696.550,00	110.000.000,00	7.444.832.634,00	3.486.773.295,00	659.831.745,00	57.890.346.941,92

Aset lain-lain yang masih memiliki nilai buku dan disajikan di neraca berada pada:

Tabel 7.5.123 Rincian Aset Lain-lain per SKPD yang masih memiliki nilai buku

(dalam rupiah)				
No	SKPD	Nilai Aset Lain-lain	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.496.100,00	0,00	11.496.100,00
2	Dinas Kesehatan	49.350.400,00	0,00	49.350.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.503.700,00	0,00	441.503.700,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7.505.926.073,00	1.788.812.261,77	5.717.113.811,23
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	43.234.000,00	13.362.366,67	29.871.633,33
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.550.000,00	45.741.666,67	21.808.333,33
7	Dinas Lingkungan Hidup	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00
8	Dinas Perhubungan	408.170.800,00	0,00	408.170.800,00
9	Dinas Perikanan	1.383.116.500,00	287.659.062,26	1.095.457.437,74
10	Dinas Pariwisata	233.205.000,00	27.834.655,56	205.370.344,44
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	181.045.000,00	175.013.916,67	6.031.083,33
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.777.097.510,00	1.625.243.349,44	6.151.854.160,56
13	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.533.002.000,00	154.358.485,00	1.378.643.515,00
14	Kecamatan Serasan	129.140.000,00	81.738.616,67	47.401.383,33
15	Kecamatan Pulau Tiga	89.760.000,00	22.627.000,00	67.133.000,00
16	Kecamatan Bunguran Selatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
JUMLAH		19.906.493.083,00	4.222.391.380,71	15.684.101.702,29

Sedangkan aset lain-lain yang tercatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp37.983.853.858,92 berada pada:

Tabel 7.5.124 Rincian Aset Lain-lain Ekstrakomptabel per SKPD

(dalam rupiah)		
No	SKPD	Nilai Aset Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	825.701.800,00
2	Dinas Kesehatan	18.750.530.775,00
3	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	622.479.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	353.820.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan	16.508.825,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	405.048.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	27.000.000,00

No	SKPD	Nilai Aset Lain-Lain
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.365.000,00
9	Dinas Perhubungan	9.558.635.167,00
10	Dinas Perikanan	584.423.566,67
11	Dinas Pariwisata	549.028.425,00
12	Dinas Pertanian	46.398.000,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	135.997.500,25
14	Sekretariat Daerah	2.780.799.200,00
15	Sekretariat DPRD	232.407.750,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	107.415.800,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00
18	Inspektorat	33.270.700,00
19	Kecamatan Bunguran Timur	125.598.000,00
20	Kecamatan Bunguran Barat	67.799.000,00
21	Kecamatan Bunguran Utara	527.744.800,00
22	Kecamatan Pulau Laut	821.838.200,00
23	Kecamatan Midai	89.221.500,00
24	Kecamatan Serasan	838.637.250,00
25	Kecamatan Subi	31.399.500,00
26	Kecamatan Pulau Tiga	31.399.500,00
27	Kecamatan Bunguran Tengah	47.564.000,00
28	Kecamatan Bunguran Timur Laut	31.399.500,00
29	Kecamatan Bunguran Selatan	44.141.500,00
30	Kecamatan Serasan Timur	269.091.200,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	10.190.400,00
JUMLAH		37.983.853.858,92

7.5.3.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.641.592.804,26. Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	4.839.280.136,55
Penambahan		
Penambahan Beban Amortisasi Tahun 2023	Rp	1.460.472.877,53
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	104.042.016,67
Penambahan karena reklasifikasi aset dari Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	1.332.738.645,30
Penambahan karena kapitalisasi aset tahun berjalan	Rp	500.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	2.897.753.539,50
Pengurangan		
Reklasifikasi aset tak berwujud ke aset lain-lain	Rp	90.454.166,67
Reklasifikasi aset tak berwujud ke aset gedung dan bangunan	Rp	4.986.705,13
Jumlah Pengurangan	Rp	95.440.871,80
Saldo Akhir	Rp	7.641.592.804,26

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.641.592.804,26 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.125 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

(dalam rupiah)		
No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	164.142.916,67
2	Dinas Kesehatan	747.499.583,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.361.775.550,33
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	335.983.453,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.347.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.515.870,30
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.185.855.000,00
8	Dinas Perhubungan	800.917.700,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	452.988.456,25
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.936.666,67
11	Dinas Pariwisata	638.590.000,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	225.169.333,33
13	Sekretariat Daerah	16.267.774,38
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	291.603.000,00
Jumlah		7.641.592.804,26

7.5.3.4.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	15.132.536.000,00	15.220.894.396,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Tata cara pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Rincian TDF sebagai berikut:

Tabel 7.5.126 Rincian *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)					
Kode	Uraian	Saldo Awal	Penambahan TDF Tahun 2023	Pencairan TDF 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.134.701.192,00	8.057.788.000,00	4.134.701.192,00	8.057.788.000,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPH Pasal 21	1.320.806.745,00	2.091.084.000,00	1.320.806.745,00	2.091.084.000,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	82.230.510,00	17.361.000,00	82.230.510,00	17.361.000,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.280.541,00	0,00	1.280.541,00	0,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.440.056.370,00	4.671.201.000,00	1.440.056.370,00	4.671.201.000,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.737.725.310,00	0,00	7.737.725.310,00	0,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	286.427.832,00	295.102.000,00	286.427.832,00	295.102.000,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.912.685,00	0,00	5.912.685,00	0,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	211.753.211,00	0,00	211.753.211,00	0,00
Jumlah		15.220.894.396,00	15.132.536.000,00	15.220.894.396,00	15.132.536.000,00

Penyaluran Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Milik Kabupaten Natuna yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.220.894.396,00 telah dicairkan semua pada tahun 2023. Penambahan *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, dimana Kabupaten Natuna mendapat sebesar Rp15.132.536.000,00.

7.5.3.5 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
	2.053.727.104,58	26.443.341.006,87

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.053.727.104,58 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Utang Per 31 Desember 2022	Rp	26.443.341.006,87
Penambahan Utang		
Penambahan Utang Tahun 2023	Rp	2.053.727.104,58
Jumlah	Rp	28.497.068.111,45
Pengurangan Utang		
Pelunasan Tahun 2023	Rp	26.236.129.704,82
Koreksi Pencatatan	Rp	207.211.302,05
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Rp	2.053.727.104,58

Saldo Kewajiban sebesar Rp2.053.727.104,58 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang pembayarannya diharapkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.053.727.104,58 dengan perhitungan:

Tabel 7.5.127 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)							
No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan Utang		Pengurangan Utang Tahun 2023		Saldo Akhir per 31 Desember 2023
			Utang Tahun 2023	Koreksi Pencatatan	Pelunasan	Koreksi Pencatatan	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.716.078,00	0,00	0,00	26.716.078,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	97.633.333,33	37.033.333,34	0,00	97.633.333,33	0,00	37.033.333,34
3	Utang Belanja	26.318.991.595,54	2.016.693.771,24	0,00	26.111.780.293,49	207.211.302,05	2.016.693.771,24
	Jumlah	26.443.341.006,87	2.053.727.104,58	0,00	26.236.129.704,82	207.211.302,05	2.053.727.104,58

Koreksi Pencatatan merupakan kelebihan utang belanja barang dan jasa BLUD dan kelebihan pencatatan utang belanja modal.

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Adapun Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.128 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Asuransi Kesehatan	0,00	16.410.608.756,00	16.410.608.756,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai	77.132,00	12.049.647.190,00	12.049.724.322,00	0,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	308.701.064,00	308.701.064,00	0,00
4	Jaminan Kematian	0,00	926.102.458,00	926.102.458,00	0,00
5	PPN	23.652.532,00	33.216.806.649,00	33.240.459.181,00	0,00
6	PPh 21	969.340,00	14.385.004.087,00	14.385.973.427,00	0,00
7	PPh 22	0,00	1.304.372.525,00	1.304.372.525,00	0,00
8	PPh 23	2.017.074,00	1.127.229.310,00	1.129.246.384,00	0,00
9	PPh 4 (2)/PPh 25	0,00	3.929.399.173,00	3.929.399.173,00	0,00
	Jumlah	26.716.078,00	83.657.871.212,00	83.684.587.290,00	0,00

7.5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.033.333,34 merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten

Natuna namun secara akuntansi akrual belum merupakan hak Pemerintah Kabupaten Natuna yang merupakan Sewa ruangan ATM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.129 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	No. Surat Perjanjian	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Selesai Sewa	Biaya Sewa	Pendapatan LO s.d Tahun Sebelumnya	Pendapatan Terima dimuka per 31 Desember 2022 (Neraca)	Pencatatan Pendapatan LO Tahun Berjalan	Pendapatan Diterima dimuka Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-7-8)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	169/UMUM-SET/751/VI/2022 R01.Br/NTN/246/2022	01/07/2022	30/06/2024	40.400.000,00	10.100.000,00	30.300.000,00	20.200.000,00	10.100.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	032/UM-SET/751/IX/2021 025/RNI/2021	10/09/2021	10/09/2024	60.600.000,00	6.733.333,33	33.666.666,67	40.400.000,00	13.466.666,67
4	Sekretariat Daerah	032/UM-SET/750/IX/2021 026/RNI/2021	10/09/2021	10/09/2024	60.600.000,00	6.733.333,33	33.666.666,67	40.400.000,00	13.466.666,67
Jumlah					161.600.000,00	23.566.666,67	97.633.333,33	101.000.000,00	37.033.333,34

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar Rp2.016.693.771,24 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai	Rp 1.119.800.975,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 896.892.796,24
Utang Belanja Hibah	Rp 0,00
Utang Belanja Modal	Rp 0,00
Jumlah	Rp 2.016.693.771,24

Adapun saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.016.693.771,24 dengan perhitungan:

Tabel 7.5.130 Rincian Perhitungan Utang Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Per 31 Des 2022)	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
		Reklasifikasi Antar utang	Penambahan 2023	Reklasifikasi Antar utang	Pembayaran	Koreksi Kelebihan Pencatatan	
Utang Belanja Pegawai	43.996.367,00	0,00	1.119.800.975,00	0,00	43.996.367,00	0,00	1.119.800.975,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.331.334.488,00	550.289.661,00	896.892.796,24	305.075.730,00	4.369.337.117,31	207.211.301,69	896.892.796,24
Utang Belanja Hibah	1.759.476.216,00	89.910.000,00	0,00	0,00	1.849.386.216,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.150.185.171,00	0,00	0,00	0,00	2.150.185.171,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.110.488.063,18	174.110.507,00	0,00	0,00	2.284.598.570,18	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaring, dan Irigasi	15.723.680.290,36	191.506.408,00	0,00	700.740.846,00	15.214.445.852,00	0,36	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	199.831.000,00	0,00	0,00	0,00	199.831.000,00	0,00	0,00
Jumlah	26.318.991.595,54	1.005.816.576,00	2.016.693.771,24	1.005.816.576,00	26.111.780.293,49	207.211.302,05	2.016.693.771,24

Rincian utang belanja Per SKPD sebesar Rp2.016.693.771,24 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.131 Daftar Utang Belanja Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	356.782.274,00	366.450.000,00	0,00	0,00	723.232.274,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	734.723.638,00	404.995.107,00	0,00	0,00	1.139.718.745,00
3	Dinas Kesehatan	27.113.813,00	114.381.493,00	0,00	0,00	141.495.306,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	11.066.196,24	0,00	0,00	11.066.196,24
	Kantor Camat Serasan	1.181.250,00	0,00	0,00	0,00	1.181.250,00
JUMLAH		1.119.800.975,00	896.892.796,24	0,00	0,00	2.016.693.771,24

7.5.3.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas	Rp	Rp
	2.963.194.325.090,44	2.735.355.050.743,56

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.963.194.325.090,44 dengan perhitungan:

Ekuitas Awal (Saldo Akhir Tahun 2022)	Rp	2.735.355.050.743,56
Penambahan Selama Tahun 2023	Rp	1.284.550.003.188,82
Jumlah	Rp	4.019.905.053.932,38
Pengurangan Selama Tahun 2023	Rp	1.056.710.728.841,94
Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	2.963.194.325.090,44

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan – LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan-LO	(Rp)	(Rp)
	1.284.550.003.188,82	1.022.492.315.534,31

Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp1.284.550.003.188,82 atau meningkat sebesar 25,63% dibanding tahun 2022. Rincian Pendapatan-LO tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.132 Rincian Pendapatan-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	96.521.016.902,31	62.585.443.896,23	54,22
2	Pendapatan Transfer – LO	1.161.415.344.811,00	917.299.013.732,00	26,61
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	26.613.641.475,51	42.607.857.906,08	(37,54)
	Jumlah	1.284.550.003.188,82	1.022.492.315.534,31	25,63

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp96.521.016.902,31 mengalami kenaikan sebesar 54,22% dibanding tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.133 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	57.512.536.963,64	15.211.620.015,39	278,08
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	986.362.910,00	963.777.940,00	2,34
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.927.016.847,00	7.043.060.400,00	(1,65)
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	31.095.100.181,67	39.366.985.540,84	(21,01)
	Jumlah	96.521.016.902,31	62.585.443.896,23	54,22

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp57.512.536.963,64, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	722.504.512,00	174.549.315,00	313,93
2	Pajak Restoran-LO	2.803.839.088,64	2.246.562.727,00	24,81
3	Pajak Hiburan-LO	17.566.200,00	8.943.600,00	96,41
4	Pajak Reklame-LO	142.088.250,00	111.250.800,00	27,72
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	6.308.949.822,00	7.607.124.621,00	(17,07)
6	Pajak Parkir-LO	2.550.000,00	5.251.500,00	(51,44)
7	Pajak Air Tanah-LO	3.000.000,00	3.800.000,00	(21,05)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	39.128.097.806,00	279.702.646,00	13889,18
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	4.002.438.512,00	4.027.188.857,00	(0,61)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.381.502.773,00	747.245.949,39	486,35
Jumlah		57.512.536.963,64	15.211.620.015,39	278,08

Kenaikan pendapatan pajak ini dikarenakan meningkatnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna mengalami kenaikan sebesar 278,08% dari tahun sebelumnya. Penjelasan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel-LO
Pajak Hotel-LO tahun 2023 sebesar Rp722.504.512,00 mengalami kenaikan sebesar 313,93% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp174.549.315,00.
- b) Pajak Restoran-LO
Pajak Restoran-LO tahun 2023 sebesar Rp2.803.839.088,64 mengalami kenaikan sebesar 24,81% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.246.562.727,00.
- c) Pajak Hiburan-LO
Pajak Hiburan-LO tahun 2023 sebesar Rp17.566.200,00 mengalami kenaikan sebesar 96,41% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.943.600,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.135 Rincian Pajak Hiburan – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	15.870.200,00	7.713.600,00	105,74
2	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	645.000,00	0,00	0,00
3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.051.000,00	1.230.000,00	(14,55)
Jumlah		17.566.200,00	8.943.600,00	96,41

- d) Pajak Reklame-LO
Pajak Reklame-LO tahun 2023 sebesar Rp142.088.250,00 mengalami kenaikan sebesar 27,72% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp111.250.800,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.136 Rincian Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	112.246.000,00	93.174.000,00	20,47
2	Pajak Reklame Kain-LO	25.626.000,00	18.076.800,00	41,76
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	1.916.250,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	2.300.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
	Jumlah	142.088.250,00	111.250.800,00	27,72

e) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2023 sebesar Rp6.308.949.822,00 mengalami penurunan sebesar (17,07)% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp7.607.124.621,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.137 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	1.947.997.781,00	(100,00)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	6.308.949.822,00	5.659.126.840,00	11,48
	Jumlah	6.308.949.822,00	7.607.124.621,00	(17,07)

f) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO tahun 2023 sebesar Rp2.550.000,00 mengalami penurunan sebesar (51,44)% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.251.500,00.

g) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO tahun 2023 sebesar Rp3.000.000,00 mengalami penurunan sebesar (21,05)% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.800.000,00.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2023 sebesar Rp39.128.097.806,00 mengalami kenaikan sebesar 13.889,18% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp279.702.646,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.138 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Batu Apung-LO	0,00	1.380.000,00	(100,00)
2	Pajak Granit/Andesit-LO	0,00	16.546.463,00	(100,00)
3	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	31.199.440,00	30.237.072,00	3,18
4	Pajak Pasir Kuarsa-LO	38.729.347.500,00	9.089.084,00	426.008,37
6	Pajak Tanah Liat-LO	22.684.200,00	49.166.736,00	(53,86)
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	344.866.666,00	173.283.291,00	99,02
	Jumlah	39.128.097.806,00	279.702.646,00	13.889,18

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2023 sebesar Rp4.002.438.512,00 mengalami penurunan sebesar (0,61)% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.027.188.857,00.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2023 sebesar Rp4.381.502.773,00 mengalami kenaikan sebesar 486,35% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp747.245.949,39.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp986.362.910,00 meningkat sebesar 2,34% dari tahun sebelumnya Rp963.777.940,00. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.139 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	826.874.200,00	868.387.000,00	(4,78)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	39.265.000,00	49.800.000,00	(21,15)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	120.223.710,00	45.590.940,00	163,70
Jumlah		986.362.910,00	963.777.940,00	2,34

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a) **Retribusi Jasa Umum-LO**

Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp826.874.200,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.140 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	667.300.700,00	718.864.500,00	(7,17)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	129.583.500,00	104.794.500,00	23,65
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	17.600.000,00	15.150.000,00	16,17
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	12.390.000,00	29.578.000,00	(58,11)
Jumlah		826.874.200,00	868.387.000,00	(4,78)

b) **Retribusi Jasa Usaha-LO**

Retribusi Jasa Usaha-LO di tahun 2023 sebesar Rp39.265.000,00 mengalami penurunan (21,15)% dibandingkan tahun sebelumnya.

c) **Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

Retribusi Perizinan Tertentu-LO sebesar Rp120.223.710,00 mengalami kenaikan 163,70% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.141 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	120.223.710,00	45.590.940,00	163,70
Jumlah		120.223.710,00	45.590.940,00	163,70

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp6.927.016.847,00 merupakan deviden hasil dari investasi jangka panjang permanen pada Bank Riau Kepri Syariah (Dividen BUMD).

7.5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp31.095.100.181,67 terdiri dari:

Tabel 7.5.142 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	517.743.762,00	(100)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	371.750.000,00	20.200.000,00	1740,35
3	Jasa Giro-LO	877.434.099,73	563.696.705,63	55,66
4	Pendapatan Bunga-LO	60.092.972,00		100,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	287.764.500,18	0,00	100,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	68.899.701,31	52.173.685,60	32,06
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	74.142.763,00	62.597.813,25	18,44

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	57.061.217,46	608.007.804,31	(90,62)
9	Pendapatan dari BLUD-LO	22.626.890.252,99	31.601.071.662,14	(28,40)
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	6.671.064.675,00	5.941.494.107,00	12,28
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,91	(100,00)
Jumlah		31.095.100.181,67	39.366.985.540,84	(21,01)

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp0,00.
- b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp371.750.000,00. Hasil Pemanfaatan BMD ini terdiri dari Koreksi kurang catat atas temuan Pendapatan Sewa atas 58 Unit Rumah Dinas Pemda Belum Dipungut (TP 19) sebesar Rp306.600.000,00 dan hasil pemanfaatan yang penyetorannya langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk Pemanfaatan BMD yang dipisahkan yang dikelola oleh BLUD pencatatannya merupakan bagian dari pendapatan BLUD-LO sebesar Rp65.150.000,00.
- c) Jasa Giro-LO
Penerimaan Jasa Giro-LO tahun 2023 sebesar Rp877.434.099,73 mengalami kenaikan sebesar 55,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp563.696.705,63 terdiri dari:

Tabel 7.5.143 Rincian Penerimaan Jasa Giro-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	443.499.768,73	534.542.488,00	(17,03)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	58.378.313,00	27.755.995,00	110,33
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	0,00	177.358,63	(100,00)
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	1.220.864,00	(100,00)
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	375.556.018,00	0,00	0,00
Jumlah		877.434.099,73	563.696.705,63	55,66

- d) Pendapatan Bunga-LO
Penerimaan Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 sebesar Rp60.092.972,00 merupakan dari Koreksi lebih catat rekening pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang seharusnya dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah.
- e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp287.764.500,18 terdiri dari:

Tabel 7.5.144 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	287.764.500,18	0,00	0,00
Jumlah		287.764.500,18	0,00	0,00

- f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp68.899.701,31.
- g) Pendapatan Denda Pajak-LO
Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp74.142.763,00 mengalami kenaikan 18,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Denda Pajak-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.145 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	1.107.863,00	184.587,00	500,18
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	5.312.385,00	4.062.132,00	30,78
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	229.540,00	44.896,00	411,27
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	562.960,00	689.420,00	(18,34)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	81.000,00	69.000,00	17,39
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	110.000,00	52.000,00	111,54
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	103.786,00	18.686,00	455,42
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	65.494.641,00	56.805.744,00	15,30
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.140.588,00	671.348,25	69,90
Jumlah		74.142.763,00	62.597.813,25	18,44

h) Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pendapatan Dari Pengembalian-LO sebesar Rp57.061.217,46 terdiri dari:

Tabel 7.5.146 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	40.497.162,00	182.423.430,93	(77,80)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	6.839.200,00	50.759.911,00	(86,53)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	7.990.000,00	0,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	1.484.345,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	250.510,46	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	0,00	374.824.462,38	(100,00)
Jumlah		57.061.217,46	608.007.804,31	(90,62)

i) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD-LO tahun 2023 sebesar Rp22.626.890.252,99 mengalami penurunan sebesar (28,40)%, dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp31.601.071.662,14. Pendapatan BLUD terdiri dari Pendapatan dari BLUD-LO Rp22.626.890.252,99 dan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO sebesar Rp0,00

j) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO sebesar Rp6.671.064.675,00 mengalami kenaikan sebesar 12,28% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.941.494.107,00 .

k) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.161.415.344.811,00 mengalami kenaikan sebesar 26,61% dari tahun sebelumnya sebesar Rp917.299.013.732,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.147 Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-	1.076.300.810.771,00	832.115.429.682,00	29,35

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
	LO			
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	85.114.534.040,00	85.183.584.050,00	(0,08)
	Jumlah	1.161.415.344.811,00	917.299.013.732,00	26,61

Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp1.045.631.356.771,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.148 Rincian Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	136.695.312.925,00	79.837.575.375,00	71,22
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	328.084.003.000,00	250.028.267.672,00	31,22
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	407.458.406.092,00	390.559.258.000,00	4,33
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	173.388.774.754,00	107.797.063.635,00	60,85
	Jumlah	1.045.626.496.771,00	828.222.164.682,00	26,25

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp136.695.312.925,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.149 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH PBB-LO	121.602.216.000,00	67.081.406.149,00	81,28
2	DBH PPh Pasal 21-LO	14.034.318.000,00	1.320.806.745,00	962,56
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.051.489.000,00	11.424.495.510,00	(90,80)
4	DBH CHT-LO	7.289.925,00	10.866.971,00	(27,67)
	Jumlah	136.695.312.925,00	79.837.575.375,00	71,22

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp56.857.737.550,00 atau sebesar 71,22%.

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp328.084.003.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.150 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	170.994.975.000,00	66.343.882.762,00	157,74
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	147.655.556.000,00	177.687.676.897,00	(16,90)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	(143.213.916,00)	0,00	0,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.336.917.916,00	3.766.050.117,00	(64,50)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	19.774.000,00	60.593.685,00	(67,37)
6	DBH SDA Perikanan-LO	8.219.994.000,00	2.170.064.211,00	278,79
	Jumlah	328.084.003.000,00	250.028.267.672,00	31,22

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp78.055.735.328,00 atau sebesar 31,22%.

7.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Umum-LO tahun 2023 sebesar Rp407.458.406.092,00 mengalami kenaikan sebesar 4,33% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp390.559.258.000,00.

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2023 sebesar Rp173.388.774.754,00 dengan rincian :

Tabel 7.5.151 Rincian Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Alokasi Khusus - Fisik	115.479.222.997,00	57.090.150.721,00	102,28
2	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	57.909.551.757,00	50.706.912.914,00	14,20
	Jumlah	173.388.774.754,00	107.797.063.635,00	60,85

Dibanding dengan tahun 2022 terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari dana alokasi khusus sebesar 60,85%. Dana alokasi khusus terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dana alokasi khusus fisik terdiri dari:

Tabel 7.5.152 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	658.914.850,00	0,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.911.575.277,00	3.160.024.074,00	23,78
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.926.183.112,00	3.854.777.484,00	131,56
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	763.625.702,00	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	33.477.108.239,00	8.846.552.972,00	278,42
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	3.564.988.978,00	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	583.802.556,00	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	0,00	14.685.729.157,00	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	94.072.500,00	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	18.058.916.261,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	1.170.791.504,00	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	2.163.832.346,00	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	849.786.122,00	0,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	41.259.806.211,00	8.430.609.354,00	389,40
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	4.245.200.000,00	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	5.083.429.000,00	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	442.715.094,00	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	7.540.430.050,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan-LO	796.502.875,00	0,00	0,00
	Jumlah	115.479.222.997,00	57.090.150.721,00	102,28

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.153 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	15.390.204.810,00	14.156.066.940,00	8,72
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	955.000.000,00	560.000.000,00	70,54
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	20.579.997.200,00	18.708.385.360,00	10,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.171.750.000,00	1.016.000.000,00	15,33
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.387.495.000,00	1.282.824.400,00	8,16
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.276.470.400,00	2.300.299.000,00	(1,04)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	344.590.000,00	163.500.000,00	110,76
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	6.757.304.900,00	10.140.727.429,00	(33,36)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.489.993.800,00	1.180.876.075,00	110,86
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	4.270.152.492,00	317.418.680,00	1245,27
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	997.034.200,00	467.528.580,00	113,26
12	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	1.289.558.955,00	413.286.450,00	212,03
Jumlah		57.909.551.757,00	50.706.912.914,00	14,20

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Dana transfer dari Pemerintah Pusat selain dana perimbangan yang merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

7.5.4.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian tahun 2023 merupakan Dana Insentif Daerah. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2023 sebesar Rp30.674.314.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 687,88%, dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.893.265.000,00.

Untuk dana desa tidak disajikan sebagai pendapatan LO disebabkan saat diterima dicatat sebagai kewajiban yang wajib diteruskan kepada pemerintah desa.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer Pemerintah Provinsi - LO di tahun 2023 sebesar Rp85.114.534.040,00, terdiri dari:

7.5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebesar Rp84.114.534.040,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.154 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	12.119.445.031,00	11.120.394.469,00	8,98
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	9.722.911.586,00	7.742.855.605,00	25,57
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	52.067.056.464,00	54.654.683.397,00	(4,73)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	40.802.017,00	35.244.696,00	15,77
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.164.318.942,00	10.341.905.883,00	(1,72)
JUMLAH		84.114.534.040,00	83.895.084.050,00	0,26

7.5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.288.500.000,00 atau sebesar (22,39)%.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp26.613.641.475,51 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.155 Rincian lain - lain Pendapatan yang Sah-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	26.554.891.130,51	42.607.857.906,08	(37,68)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	58.750.345,00	0,00	100,00
Jumlah		26.613.641.475,51	42.607.857.906,08	(37,54)

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp26.554.891.130,51 terdiri dari:

Tabel 7.5.156 Rincian Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	14.178.631.340,51	39.232.879.262,99	(63,86)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	11.244.679.700,00	3.374.978.643,09	233,18
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	876.343.000,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	255.237.090,00	0,00	100,00
JUMLAH		26.554.891.130,51	42.607.857.906,08	(37,68)

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2023 sebesar Rp14.178.631.340,51 berasal dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.115.924.451,50, hibah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp45.234.525,00, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp6.474.962.000,00, hibah dari Kementerian Sosial sebesar Rp989.847.500,00, hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp185.072.250,00, hibah dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.113.590.614,01 dan hibah sanitasi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.254.000.000,00.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2023 sebesar Rp11.244.679.700,00 mengalami peningkatan sebesar 233,18% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.374.978.643,09.

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO pada tahun 2023 sebesar Rp876.343.000,00 mengalami kenaikan 100,00% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO pada tahun 2023 sebesar Rp255.237.090,00 mengalami kenaikan 100,00% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

7.5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2023 sebesar Rp58.750.345,00. Dibanding dengan tahun 2022, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO naik sebesar 100,00%. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO berisikan pengembalian atas pendapatan Dana BOP Paud yang diterima oleh sekolah swasta.

7.5.4.2 Beban-LO

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban-LO	1.027.480.322.038,23	956.027.511.310,41

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar Rp1.027.480.322.038,23 mengalami kenaikan sebesar 7,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp956.027.511.310,41. Rincian beban tahun 2023 merupakan pengakuan Beban Operasi tahun 2023 terinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.157 Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	419.978.177.052,00	365.534.221.004,00	14,89
2	Beban Persediaan	77.765.528.464,37	59.382.215.958,37	30,96
3	Beban Jasa	182.734.357.478,93	180.601.767.609,32	1,18
4	Beban Pemeliharaan	20.929.670.768,73	7.973.505.261,37	162,49
5	Beban Perjalanan Dinas	56.199.331.406,00	44.932.177.286,00	25,08
6	Beban Hibah	38.648.139.444,31	75.116.998.912,20	(48,55)
7	Beban Bantuan Sosial	2.363.988.714,00	5.215.351.979,34	(54,67)
8	Beban Penyusutan	160.883.967.926,59	160.066.440.372,85	0,51
9	Beban Transfer	65.773.734.400,00	55.047.480.940,00	19,49
10	Beban Penyisihan Piutang	2.203.426.383,30	2.157.351.986,96	2,14
JUMLAH		1.027.480.322.038,23	956.027.511.310,41	7,47

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp419.978.177.052,00 mengalami kenaikan sebesar 14,89% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.158 Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	202.615.634.536,00	186.317.141.444,00	8,75
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	168.392.953.248,00	136.215.553.506,00	23,62
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.971.662.750,00	35.315.547.585,00	16,02
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	6.248.915.722,00	6.204.427.787,00	0,72
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	890.238.796,00	747.932.682,00	19,03
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.480.000,00	510.880.000,00	(0,08)
7	Beban Pegawai BLUD	348.292.000,00	222.738.000,00	56,37
JUMLAH		419.978.177.052,00	365.534.221.004,00	14,89

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp419.978.177.052,00 terdiri dari:

a) **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 sebesar Rp202.615.634.536,00 naik 8,75% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	148.629.890.480,00	137.064.254.486,00	8,44
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	13.732.202.435,00	12.881.941.903,00	6,60

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.218.111.000,00	4.995.246.000,00	4,46
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	8.822.061.000,00	7.355.221.000,00	19,94
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.390.812.000,00	3.356.174.000,00	1,03
6	Beban Tunjangan Beras ASN	9.426.605.598,00	8.809.893.000,00	7,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.143.343,00	201.184.669,00	(76,07)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.273.562,00	2.072.358,00	9,71
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.114.894.348,00	10.522.064.350,00	15,14
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	307.195.610,00	282.412.693,00	8,78
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	922.050.844,00	846.676.985,00	8,90
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.394.316,00	0,00	100,00
JUMLAH		202.615.634.536,00	186.317.141.444,00	8,75

- b) **Beban Tambahan Penghasilan ASN**
 Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023 sebesar Rp168.392.953.248,00 mengalami kenaikan sebesar 23,62% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	52.586.770.128,00	42.261.450.174,00	24,43
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	4.574.099.165,00	3.843.011.397,00	19,02
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.191.024.732,00	3.987.557.654,00	30,18
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.671.170.575,00	2.111.533.744,00	26,50
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	103.369.888.648,00	84.012.000.537,00	23,04
JUMLAH		168.392.953.248,00	136.215.553.506,00	23,62

- c) **Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**
 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2023 sebesar Rp40.971.662.750,00 mengalami kenaikan 16,02% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	14.999.999,00	(100,00)
2	Beban TPG PNSD	19.740.229.600,00	19.394.722.000,00	1,78
3	Beban TKG PNSD	1.417.151.000,00	1.227.234.600,00	15,48
4	Beban Tamsil Guru PNSD	1.199.500.000,00	1.016.000.000,00	18,06
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.010.989.322,00	1.823.179.642,00	65,15
6	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.295.691.185,00	10.849.615.094,00	31,76
7	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	187.896.643,00	56.560.000,00	232,21
8	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	105.000.000,00	88.600.000,00	18,51
9	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	24.500.000,00	9.625.000,00	154,55
10	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	990.705.000,00	835.011.250,00	18,65
JUMLAH		40.971.662.750,00	35.315.547.585,00	16,02

d) **Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2023 sebesar Rp6.248.915.722,00 mengalami kenaikan sebesar 0,72% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	60.039.700,00	60.197.200,00	(0,26)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	64.221.840,00	65.090.880,00	(1,34)
4	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	62.026.650,00	63.396.900,00	(2,16)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.481.000,00	16.914.975,00	(67,60)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.524.600.000,00	1.512.000.000,00	0,83
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.599.596,00	66.599.596,00	0,00
11	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	39.965.964,00	39.972.264,00	(0,02)
12	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	928.368,00	928.368,00	0,00
13	Beban Jaminan Kematian DPRD	2.785.104,00	2.785.104,00	0,00
14	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00
15	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.781.000.000,00	2.754.000.000,00	0,98
16	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.725.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		6.248.915.722,00	6.204.427.787,00	0,72

e) **Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO tahun 2023 sebesar Rp890.238.796,00 terjadi kenaikan 19,03% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.163 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00	7.531.680,00	0,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	213.034,00	920.400,00	(76,85)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00	1.000,00	0,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.503.680,00	32.446.322,00	(83,04)
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	716.016.122,00	546.060.000,00	31,12
JUMLAH		890.238.796,00	747.932.682,00	19,03

f) **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp510.480.000,00 terjadi penurunan (0,08)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	DPRD			
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	399.600.000,00	400.000.000,00	(0,10)
JUMLAH		510.480.000,00	510.880.000,00	(0,08)

g) Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2023 sebesar Rp348.292.000,00 terjadi kenaikan sebesar 56,37% dari tahun sebelumnya sebesar Rp222.738.000,00.

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

Pengakuan Beban Persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp77.765.528.464,37 terjadi kenaikan 30,96% dari tahun sebelumnya Rp59.382.215.958,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

N o	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	192.502.000,00	280.899.460,00	(31,47)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	268.463.280,07	780.337.019,93	(65,60)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.322.518.151,00	4.805.435.132,50	31,57
4	Beban Bahan-Bahan Baku	10.488.225,00	9.679.000,00	8,36
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	170.305.685,00	707.177.000,00	(75,92)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	37.110.000,00	8.628.000,00	330,11
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	435.300,00	0,00	100,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.249.232.278,10	2.696.838.906,50	131,72
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.898.324.756,00	1.552.037.951,00	22,31
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	62.800.000,00	45.715.000,00	37,37
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	230.571.253,00	161.533.400,00	42,74
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.900.948.672,00	4.136.983.204,00	18,47
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.671.500,00	2.500.000,00	22.326,86
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.604.252.189,75	8.918.098.307,93	(25,95)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	892.059.900,00	647.358.000,00	37,80
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	13.990.045,00	6.967.600,00	100,79
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.000.000,00	2.775.000,00	296,40
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.900.000,00	0,00	100,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	703.893.644,00	549.221.094,00	28,16
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	940.897.330,00	406.176.150,00	131,65
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	116.707.000,00	246.817.844,00	(52,72)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	75.075.000,00	95.050.000,00	(21,02)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.195.282.470,00	88.969.500,00	1.243,47
24	Beban Obat-Obatan-Obat	7.708.797.690,68	8.273.995.075,77	(6,83)
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.239.699.633,70	1.985.866.732,74	12,78
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	484.177.750,00	1.223.874.280,00	(60,44)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.831.773.391,07	102.100.889,00	2.673,51
28	Beban Persediaan untuk Tujuan	3.574.739.127,00	0,00	100,00

N o	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0		
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	786.173.528,00	24.587.799,00	3.097,41
30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	39.901.000,00	41.849.324,00	(4,66)
31	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.400.434.308,00	3.955.802.100,00	36,52
32	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.368.649.710,00	9.059.367.920,00	36,53
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	43.469.000,00	0,00	100,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	506.029.000,00	878.835.525,00	(42,42)
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.100.000,00	246.545.000,00	(98,34)
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.652.342.800,00	3.773.404.670,00	23,29
37	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	65.850.000,00	80.530.000,00	(18,23)
38	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	205.150.000,00	187.050.000,00	9,68
40	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	819.458.500,00	118.513.000,00	591,45
41	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	49.400.000,00	47.625.000,00	3,73
42	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.600.000,00	16.950.000,00	(43,36)
43	Beban Pakaian Siaga	0,00	69.774.600,00	(100,00)
44	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	208.815.740,00	129.925.000,00	60,72
45	Beban Pakaian Kerja Bengkel	32.890.000,00	0,00	100,00
46	Beban Pakaian Adat Daerah	368.704.800,00	527.786.010,00	(30,14)
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	191.788.000,00	10.000.000,00	1.817,88
48	Beban Pakaian Olahraga	348.420.000,00	654.018.004,00	(46,73)
49	Beban Pakaian Paskibraka	421.352.000,00	419.202.825,00	0,51
50	Beban Pakaian Jas/Safari	9.000.000,00	0,00	100,00
51	Beban Komponen-Komponen Peralatan	15.000.000,00	32.789.409,00	(54,25)
52	Beban Komponen-Komponen Lainnya	1.880.000,00	0,00	100,00
53	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	711.486.187,00	569.525.225,00	24,93
54	Beban Beasiswa	440.400.000,00	387.700.000,00	13,59
55	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	63.700.000,00	(100,00)
56	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	75.000.000,00	300,00
57	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.396.367.620,00	262.450.000,00	432,05
58	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	56.000.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		77.765.528.464,37	59.382.215.958,37	30,96

7.5.4.2.3 Beban Jasa

Pengakuan Beban Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp182.734.357.478,93 terjadi kenaikan sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp180.601.767.609,32, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.166 Rincian Beban Jasa

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	675.000,00	1.144,44
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.550.690.000,00	3.857.634.880,00	17,97
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.421.451.000,00	3.721.922.000,00	(8,07)
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau	1.787.900.000,00	1.846.960.000,00	(3,20)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Pendampingan			
5	Beban Honorarium Rohaniwan	4.000.000,00	7.200.000,00	(44,44)
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.800.000,00	4.200.000,00	85,71
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.100.000,00	0,00	100,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	157.400.000,00	22.750.000,00	591,87
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	601.840.000,00	0,00	100,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.614.400.000,00	10.433.350.000,00	(27,02)
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.345.899.233,00	25.683.688.934,00	(24,68)
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	43.945.000,00	31.465.000,00	39,66
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.122.000.000,00	1.241.450.000,00	(9,62)
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	424.800.000,00	0,00	100,00
15	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.795.000,00	0,00	100,00
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	108.000.000,00	(100,00)
17	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	182.450.000,00	46.150.000,00	295,34
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	36.683.072.328,00	32.982.415.768,00	11,22
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	29.900.000,00	20.000.000,00	49,50
20	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.591.900.000,00	16.255.650.000,00	(16,39)
21	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.406.512.600,00	880.100.000,00	59,81
22	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.607.573.960,00	2.669.026.896,00	(2,30)
23	Beban Jasa Tenaga Keamanan	497.700.000,00	353.450.000,00	40,81
24	Beban Jasa Tenaga Supir	865.300.000,00	827.500.000,00	4,57
25	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	184.853.100,00	63.750.000,00	189,97
26	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	97.500.000,00	159.000.000,00	(38,68)
27	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.300.000,00	0,00	100,00
28	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.357.950.000,00	1.422.400.000,00	(4,53)
29	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	139.990.880,00	28.236.500,00	395,78
30	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	920.193.048,00	(100,00)
31	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	16.000.000,00	0,00	100,00
32	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	304.918.945,00	4.866.651,34	6.165,48
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.430.825.000,00	33.200.000,00	4.209,71
34	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	17.600.000,00	15.300.000,00	15,03
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	44.626.000,00	26.696.000,00	67,16
36	Beban Jasa Kalibrasi	172.683.000,00	0,00	100,00
37	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.089.900.000,00	1.301.800.000,00	(16,28)
38	Beban Jasa Pengukuran Tanah	22.000.000,00	7.384.676,00	197,91
39	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.847.582.090,00	4.907.920.000,00	100,65
40	Beban Jasa Operator Kapal	899.600.000,00	862.500.000,00	4,30
41	Beban Tagihan Telepon	129.237.645,00	113.825.949,00	13,54
42	Beban Tagihan Air	696.292.996,00	770.650.707,00	(9,65)
43	Beban Tagihan Listrik	5.763.181.694,00	5.278.011.416,00	9,19
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	301.665.000,00	463.229.000,00	(34,88)
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.278.950.079,00	3.272.258.245,00	0,20
46	Beban Paket/Pengiriman	439.282.800,00	177.361.264,00	147,68
47	Beban Penambahan Daya	6.455.400,00	0,00	100,00
48	Beban Registrasi/Keanggotaan	60.000.000,00	108.000.000,00	(44,44)
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	434.738.991,00	355.141.953,00	22,41
50	Beban Medical Check Up	0,00	65.530.000,00	(100,00)
51	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	404.995.107,00	0,00	100,00
52	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	11.754.966.000,00	14.127.567.400,00	(16,79)
53	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	967.050.000,00	0,00	100,00
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.490.604.304,00	3.264.911.047,00	6,91
55	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	218.888.288,24	109.107.154,60	100,62
56	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	217.944.513,00	128.118.058,00	70,11
57	Beban Sewa Mesin Proses	1.000.000,00	0,00	100,00
58	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	48.220.000,00	0,00	100,00
59	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
60	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	212.750.000,00	369.343.000,00	(42,40)
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.550.000,00	5.700.000,00	(20,18)
62	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.320.000,00	15.220.000,00	(25,62)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
63	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	140.440.000,00	179.389.000,00	(21,71)
64	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	0,00	100,00
65	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	4.000.000,00	(100,00)
66	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	76.500.000,00	0,00	100,00
67	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.342.144.264,00	1.195.832.400,00	12,24
68	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	16.400.000,00	0,00	100,00
69	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain	18.150.000,00	0,00	100,00
70	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	950.623.070,00	0,00	100,00
71	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	214.280.000,00	208.250.000,00	2,90
72	Beban Sewa Mebel	0,00	2.500.000,00	(100,00)
73	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.100.000,00	2.000.000,00	3.505,00
74	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	15.500.000,00	124.700.000,00	(87,57)
75	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	9.207.075,00	0,00	100,00
76	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	173.050.000,00	15.250.000,00	1.034,75
77	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus	9.293.771,00	11.196.407,00	(16,99)
78	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.975.000,00	0,00	100,00
79	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	16.879.000,00	0,00	100,00
80	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	4.000.000,00	(100,00)
81	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	41.870.500,00	37.972.622,00	10,26
82	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.292.376,00	0,00	100,00
83	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	407.561.666,66	486.503.333,34	(16,23)
84	Beban Sewa Bangunan Gudang	276.000.000,00	201.416.666,67	37,03
85	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	251.118.833,33	124.296.666,67	102,03
86	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.000.000,00	0,00	100,00
87	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.500.000,00	7.200.000,00	4,17
88	Beban Sewa Bangunan Terbuka	7.000.000,00	0,00	100,00
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.300.000,00	108.000.000,00	(13,61)
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.168.000,00	0,00	100,00
91	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	171.758.333,33	129.309.000,00	32,83
92	Beban Sewa Asrama	216.912.500,00	516.950.000,00	(58,04)
93	Beban Sewa Hotel	402.832.409,00	590.958.410,00	(31,83)
94	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	13.000.000,00	11.000.000,00	18,18
95	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	172.033.333,33	17.416.666,67	887,75
96	Beban Sewa Alat Musik	25.000.000,00	0,00	100,00
97	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	65.000.000,00	30.800.000,00	111,04
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	364.761.096,00	79.180.740,00	360,67
99	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	140.000.000,00	(100,00)
100	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	2.985.900,00	(100,00)
101	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	100,00
102	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	99.900.000,00	0,00	100,00
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00	100.000.000,00	(80,00)
104	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	100,00
105	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	100,00
106	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.828.256.487,00	0,00	100,00
107	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	54.913.920,00	89.707.940,00	(38,79)
108	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	89.665.800,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri			
109	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.077.870.650,00	1.100.793.760,00	(2,08)
110	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	228.081.000,00	301.376.100,00	(24,32)
111	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	239.398.650,00	194.472.000,00	23,10
112	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	282.294.000,00	(100,00)
113	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	305.051.329,98	(100,00)
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	99.470.932,00	(100,00)
115	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	100,00
116	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	169.957.650,00	100.000.000,00	69,96
117	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	198.830.232,96	(100,00)
118	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0,00	0,00	100,00
119	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
120	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	728.507.820,00	379.782.000,00	91,82
121	Beban Sosialisasi	140.245.000,00	78.136.500,00	79,49
122	Beban Bimbingan Teknis	149.450.000,00	71.450.000,00	109,17
123	Beban Diklat Kepemimpinan	357.747.500,00	2.650.000,00	13.399,91
124	Beban Barang dan Jasa BOS	11.551.090.990,00	11.751.546.711,80	(1,71)
125	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.233.869.831,04	21.804.787.743,29	(2,62)
Jumlah		182.734.357.478,93	180.601.767.609,32	1,18

Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp816.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00, dikarenakan pada tahun 2022 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan pada rekening Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, demikian pula dengan Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp424.800.000,00 mengalami kenaikan 100% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00, dikarenakan pada tahun 2022 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum. Beban Jasa Penyelenggara Acara pada tahun 2023 sebesar Rp1.430.825.000,00 terjadi kenaikan 4.209,71% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp33.200.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 Belanja Jasa Penyelenggara Acara dianggarkan sebagian pada rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan banyaknya penyelenggaraan kegiatan bimtek/kunjungan lapangan/on job training/EO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata yang pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan.

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Pengakuan Beban Pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp20.929.670.768,73 terjadi kenaikan 162,49% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7.973.505.261,37, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.167 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	38.300.000,00	0,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	57.048.185,00	0,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	1.214.151.862,00	828.027.023,00	46,63

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	316.494.000,00	142.068.000,00	122,78
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.075.000,00	22.801.000,00	(51,43)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	5.885.000,00	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	24.900.000,00	0,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.545.000,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	636.485.300,00	180.885.000,00	251,87
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.130.000,00	0,00	100,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	7.865.000,00	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	3.670.000,00	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.090.000,00	3.800.000,00	165,53
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	23.965.000,00	39.975.000,00	(40,05)
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	353.062.000,00	566.578.421,77	(37,69)
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.231.876.406,00	645.203.501,00	90,93
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	6.350.000,00	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	29.774.050,00	12527500	137,67
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	356.784.500,00	210.734.600,00	69,31
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	11.648.000,00	0,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.186.100,00	36.755.000,00	28,38
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	35.800.614,00	0,00	100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	100,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	100,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.952.310.510,00	0,00	100,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	100,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.945.000,00	65.655.000,00	(63,53)
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	100,00
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	94.603.000,00	25.340.000,00	273,33
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	32.705.124,00	216.213.000,00	(84,87)
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	62.110.000,00	20.990.000,00	195,90
32	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	46.000.000,00	0,00	100,00
33	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	656.662.843,00	136028085	382,74

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
34	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	111.866.355,00	98.207.000,00	13,91
35	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.725.000,00	0,00	100,00
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.475.943.261,06	1.128.652.886,00	207,97
37	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.524.674.713,66	321.482.000,00	685,32
38	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	0,00	9.570.000,00	(100,00)
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.146.544.182,50	1.582.072.392,00	35,68
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	754.362.723,00	298.300.903,00	152,89
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	316.672.583,00	573.162.800,00	(44,75)
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	49.906.647,00	99.260.907,60	(49,72)
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	248.455.600,43	0,00	100,00
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	0,00	15.000.000,00	(100,00)
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	15.850.000,00	0,00	100,00
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	188.577.900,00	(100,00)
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	48.020.000,00	0,00	100,00
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	7.100.000,00	0,00	100,00
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	855.668.032,00	115.114.000,00	643,32
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	962.745.000,00	0,00	100,00
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	239.367.726,00	64.335.860,00	272,06
52	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	9.918.520,00	0,00	100,00
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	39.840.000,00	19.950.000	99,70
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	100,00
55	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	16.050.000,00	0,00	100,00
56	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	198.680.304,00	100.332.705,00	98,02
57	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	409.690.804,08	0,00	100,00
58	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	26.133.347,00	(100,00)
59	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	197.785.345,00	0,00	100,00
60	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	287.107.105,00	0,00	100,00
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	100,00
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	100,00
63	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	197.932.400,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			
64	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	26.587.830	(100,00)
65	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.625.000,00	2.700.000	(2,78)
66	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	52.572.000	(100,00)
67	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	511.199.973,00	74.141.600	589,49
68	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.367.000,00	0,00	100,00
69	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	5.920.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		20.929.670.768,73	7.973.505.261,37	162,49

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2023 sebesar Rp56.199.331.406,00 terjadi kenaikan sebesar 25,08% dari tahun sebelumnya sebesar Rp44.932.177.286,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Rincian Beban Perjalanan Dinas

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.658.273.989,00	43.034.685.670,00	(0,87)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.775.877.417,00	1.674.885.116,00	662,79
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	706.560.000,00	222.606.500,00	217,40
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	58.620.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		56.199.331.406,00	44.932.177.286,00	25,08

7.5.4.2.6 Beban Hibah

Pengakuan Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp38.648.139.444,31 terjadi penurunan sebesar (48,55)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp75.116.998.912,20, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Rincian Beban Hibah

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.400.000.000,00	463.140.000,00	1.929,62
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.850.329.256,00	21.436.295.514,13	(86,70)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.257.396.199,79	518.789.834,15	335,13
4	Beban Hibah Barang kepada BUMN	0,00	321.755.000,00	(100,00)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.000.000,00	1.020.000.000,00	34,80
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.354.101.619,00	94.072.500,00	6.654,47
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.384.316.400,00	1.491.522.000,00	(7,19)
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.079.109.142,52	39.364.152.291,92	(66,77)
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	515.878.000,00	9.883.838.929,00	(94,78)
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	412.360.000,00	0,00	100,00
11	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	496.215.984,00	0,00	100,00
12	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	523.432.843,00	523.432.843,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
JUMLAH		38.648.139.444,31	75.116.998.912,20	(48,55)

7.5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp2.363.988.714,00 penurunan (54,67)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.215.351.979,34, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rincian Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.054.840.714,00	635.895.683,00	65,88
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	80.388.000,00	119.255.200,00	(32,59)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.838.000,00	2.074.800.000,00	(98,03)
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.187.922.000,00	2.385.401.096,34	(50,20)
JUMLAH		2.363.988.714,00	5.215.351.979,34	(54,67)

7.5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp160.883.967.926,59 mengalami kenaikan sebesar 0,51% dari tahun sebelumnya sebesar Rp160.066.440.372,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.912.329.859,18	32.829.673.382,25	21,57
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.109.241.768,72	26.608.773.356,59	5,64
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.393.132.550,86	99.515.752.930,37	(8,16)
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.469.263.747,83	1.112.240.703,64	32,10
JUMLAH		160.883.967.926,59	160.066.440.372,85	0,51

7.5.4.2.9 Beban Transfer

Pengakuan Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp65.773.734.400,00 mengalami kenaikan 19,49% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.540.423.000,00	1.199.999.990,00	195,04
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.135.000,00	50.699.950,00	1.330,25
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	61.508.176.400,00	53.796.781.000,00	14,33
JUMLAH		65.773.734.400,00	55.047.480.940,00	19,49

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp2.203.426.383,30 terjadi kenaikan sebesar 2,14% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.157.351.986,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.173 Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	2.441.045,00	3.966.995,00	(38,47)
2	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	2.172.310.600,97	2.141.002.027,09	1,46
3	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak	28.674.737,33	12.382.964,87	131,57

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Baru			
	JUMLAH	2.203.426.383,30	2.157.351.986,96	2,14

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp257.069.681.150,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.174 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan	1.284.550.003.188,82	1.022.492.315.534,31	25,63
2	Beban	1.027.480.322.038,23	956.027.511.310,41	7,47
	Jumlah	257.069.681.150,59	66.464.804.223,90	286,78

7.5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2023 Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(6.000.303.848,95) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.175 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	1.380.000.000,00	(100,00)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	255.300,00	(100,00)
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	(4.566.955.057,95)	(5.771.759.427,20)	(20,87)
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.433.348.791,00)	(1.490.492.576,00)	(3,83)
	JUMLAH	(6.000.303.848,95)	(5.881.996.703,20)	2,01

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp(6.000.303.848,95) mengalami kenaikan sebesar 2,01% dibanding tahun 2022 sebesar Rp(5.881.996.703,20).

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp(4.566.955.057,95) terjadi atas penghapusan aset tetap dan aset lain-lain dengan kondisi rusak berat dan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang memiliki nilai perolehan dibawah batasan minimal kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang pencatatannya dilakukan secara *ekstrakomtable*.

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(1.433.348.791,00) adalah pencatatan kerugian yang terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar biasa per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Ini disebabkan karena semua beban pos laur biasa berupa beban luar biasa telah dilakukan reklasifikasi pencatatan ke akun beban sesuai peruntukannya

7.5.4.6 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	251.069.377.301,64	60.582.807.520,70

Surplus-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp251.069.377.301,64 terjadi kenaikan sebesar 314,42% dibanding tahun 2022 sebesar Rp60.582.807.520,70, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.176 Rincian Surplus/Defisit-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	257.069.681.150,59	66.464.804.223,90	286,78
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(6.000.303.848,95)	(5.881.996.703,20)	2,01
JUMLAH		251.069.377.301,64	60.582.807.520,70	314,42

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

7.5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas Masuk	1.333.507.226.175,09	988.757.532.106,02
Arus Kas Keluar	910.215.474.417,47	835.783.697.994,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	423.291.751.757,62	152.973.834.111,33

Pada tahun 2023, terdapat Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp423.291.751.757,62 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp1.333.507.226.175,09 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp910.215.474.417,47. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.177 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	54.850.557.254,00	12.561.988.365,52
Penerimaan Retribusi Daerah	1.049.361.910,00	963.777.940,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.927.016.847,00	7.043.060.400,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	35.154.229.487,09	45.592.302.989,50
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	132.068.098.913,00	74.298.556.387,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	332.799.575.408,00	240.346.392.264,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	407.458.406.092,00	390.559.258.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	173.388.774.754,00	107.797.063.635,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	30.674.314.000,00	3.893.265.000,00
Penerimaan Dana Desa	53.850.434.000,00	50.958.282.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102.965.767.156,00	53.455.085.125,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	1.254.000.000,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.288.500.000,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	66.690.354,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.333.507.226.175,09	988.757.532.106,02
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	418.913.978.804,00	380.605.113.177,00
Pembayaran Barang	330.784.746.050,54	314.912.697.738,35
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	37.301.653.821,93	27.753.967.108,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.942.798.000,00	5.174.294.368,34
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	1.648.129.341,00	1.331.862.663,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	3.540.423.000,00	1.199.999.990,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	725.135.000,00	50.699.950,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	115.358.610.400,00	104.755.063.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	910.215.474.417,47	835.783.697.994,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	423.291.751.757,62	152.973.834.111,33

Tidak terdapat perbedaan antara Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA.

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan Aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas Masuk	0,00	517.743.762,00
Arus Kas Keluar	264.281.035.089,12	180.851.143.808,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(264.281.035.089,12)	(180.333.400.046,59)

Penurunan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(264.281.035.089,12) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp264.281.035.089,12. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.178 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	517.743.762,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	517.743.762,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	3.027.754.385,00	14.947.363.488,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	63.225.717.778,00	36.673.771.470,56
Perolehan Gedung dan Bangunan	49.095.024.269,66	35.255.591.251,14
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	147.255.543.406,46	93.570.889.388,89
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.676.995.250,00	403.528.210,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	264.281.035.089,12	180.851.143.808,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(264.281.035.089,12)	(180.333.400.046,59)

Tidak ada perbandingan antara Belanja Modal LRA dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.

7.5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya Uang yang dipungut atau

dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas Masuk	78.777.385.383,00	64.048.236.443,00
Arus Kas Keluar	78.777.462.515,00	64.244.389.661,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(77.132,00)	(196.153.218,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(77.132,00). Rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.179 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

<i>(dalam rupiah)</i>		
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	78.777.385.383,00	64.048.236.443,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	78.777.385.383,00	64.048.236.443,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	78.777.462.515,00	64.244.389.661,00
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	78.777.462.515,00	64.244.389.661,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(77.132,00)	(196.153.218,00)

Perhitungan pihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.180 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

<i>(dalam rupiah)</i>					
No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Asuransi Kesehatan	0,00	16.410.608.756,00	16.410.608.756,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai	77.132,0	12.049.570.058,00	12.049.647.190,00	0,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	308.701.064,00	308.701.064,00	0,00
4	Jaminan Kematian	0,00	926.102.458,00	926.102.458,00	0,00
5	PPN	0,00	29.625.389.188,00	29.625.389.188,00	0,00
6	PPh 21	0,00	14.219.206.178,00	14.219.206.178,00	0,00
7	PPh 22	0,00	1.120.004.891,00	1.120.004.891,00	0,00
8	PPh 23	0,00	334.516.311,00	334.516.311,00	0,00
9	PPh 4 (2)/PPh 25	0,00	3.783.286.479,00	3.783.286.479,00	0,00
Jumlah		77.132,00	78.777.385.383,00	78.777.462.515,00	0,00

7.5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kenaikan/(Penurunan) Kas	159.010.639.536,50	(27.555.719.153,26)

Kenaikan kas bersih selama periode tahun 2023 sebesar Rp159.010.639.536,50 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan Kenaikan Kas Bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.181 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

<i>(dalam rupiah)</i>		
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	423.291.751.757,62	152.973.834.111,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(264.281.035.089,12)	(180.333.400.046,59)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(77.132,00)	(196.153.218,00)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	159.010.639.536,50	(27.555.719.153,26)

7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	4.962.018.928,89	32.523.422.082,15

Saldo Awal Kas di BUD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.182 Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)		
No	Uraian Saldo	Jumlah
1	Saldo Awal Kas di BUD	2.558.239.608,75
2	Saldo Awal Kas di BLUD	1.859.924.388,90
3	JKN FKTP	386.955.981,24
4	Saldo Kas Dana BOS	154.068.786,00
5	Saldo Awal Kas Lainnya	2.830.164,00
Jumlah Saldo Kas Awal		4.962.018.928,89

Terdapat perbedaan saldo awal Kas sebesar Rp(5.684.000,00) dengan Saldo akhir tahun 2022 Rp4.967.702.928,89. Jumlah tersebut merupakan selisih penambahan koreksi saldo akhir BOP PAUD Tahun 2022 TK Harapan Bunda yang pada tahun 2022 berstatus sekolah swasta menjadi TK dengan status sekolah negeri pada tahun 2023 dengan nama TK Negeri 002 Subi sebesar Rp1.636.000,00, dan pengurangan koreksi lebih catat saldo awal dana BOS Sekolah Dasar SDN 004 Pulau Panjang sebesar Rp7.320.000,00.

7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	163.972.658.465,39	4.967.702.928,89

Saldo Kas Akhir sebesar Rp163.972.658.465,39 merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Daerah dengan rincian:

Tabel 7.5.183 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	160.269.238.865,20
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	2.163.231.053,38
3	Saldo Kas Bendahara Penerimaan	54.224.500,00
4	Saldo Kas Dana BOS	134.737.273,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	253.805.728,81
6	Kas Lainnya	1.097.421.045,00
Jumlah Kas Akhir		163.972.658.465,39

Terdapat selisih antara saldo kas Laporan Arus Kas dengan Kas dan Setara Kas pada neraca sebesar Rp115.337.463,00 yang merupakan Kas Lainnya Dana Bergulir UMKM Rp104.956.213,00, Kas Lainnya Dana bergulir perikanan Rp9.200.000,00 dan Saldo Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran Serasan Rp1.181.250,00.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp2.735.355.050.743,56 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

7.5.6.2 Surplus/defisit - LO

Surplus - LO sebesar Rp251.069.377.301,64 merupakan Surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selisih sebesar Rp(23.230.102.954,76) merupakan koreksi-koreksi sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian disajikan dalam koreksi ekuitas lainnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.184 Daftar Koreksi Pencatatan Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Sebelumnya	207.211.301,69
3	Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Modal tahun Sebelumnya	0,36
4	Koreksi Kelebihan Pencatatan Penyisihan Piutang BLUD	14.799.958,37
5	Koreksi Kelebihan Pencatatan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	120.872.142,00
6	Koreksi Kelebihan Pencatatan Penyisihan Piutang Gaji-Taspen	65.000,00
7	Koreksi Kesalahan Pencatatan Amortisasi ATB Tahun Sebelumnya	4.986.705,13
8	Koreksi Penambahan Piutang PBB-P2 Karena Pembetulan	228.476,00
9	Koreksi Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin yang telah dihibahkan tahun sebelumnya	1.392.667.007,52
10	Koreksi Pencatatan Gedung Bangunan Tahun Sebelumnya	189.785.899,60
11	Koreksi Pencatatan penambahan TGR Tahun berjalan	8.605.466,00
12	Koreksi Pencatatan Piutang BPHTB tahun sebelumnya	0,62
13	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Peralatan dan Mesin tahun Sebelumnya	400.785.714,29
14	Koreksi Pencatatan Saldo awal Persediaan Tahun Sebelumnya	708.554.097,00
15	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Tanah tahun Sebelumnya	32.786.530,00
16	Koreksi Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya	166.183.655,58
17	Koreksi Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan JIJ Tahun Sebelumnya	1.305.568.118,93
18	Koreksi Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	1.811.643,33
19	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya BOP PAUD Perubahan Status Sekolah Dari Swasta Ke Negeri	1.636.000,00
20	Koreksi kas Lainnya atas Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO atas pendapatan retribusi tahun 2022 yang baru dicatat pada tahun 2023	62.999.000,00
21	Koreksi kurang catat atas Piutang Pendapatan Sewa atas 58 Unit Rumah Dinas Pemda Belum Dipungut	102.200.000,00
22	Koreksi kurang catat Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2022	140,00
23	Jumlah penambahan	4.721.746.856,42
24	Pengurangan	
25	Koreksi Atas penurunan TGR yang disetor tahun sebelumnya divalidasi tahun 2023	169.769.139,00
26	Kelebihan Pencatatan Saldo Kas Lainnya Sisa Dana BROS	5.340.000,00
27	Koreksi Kekurangan Pencatatan Investasi Jangka Panjang PDAM tirta Nusa	1.167.482.684,00

No	Uraian	Jumlah
28	Koreksi Kelebihan Pencatatan Piutang BLUD	538.553.273,00
29	Koreksi Kelebihan Pencatatan Piutang BPHTP	1,25
30	Koreksi Kesalahan Pencatatan Amortisasi ATB Tahun Sebelumnya	1.428.489.791,67
31	Koreksi Kesalahan pencatatan Aset lain-lain	5.919.687.549,34
32	Koreksi Kesalahan Pencatatan Tuntutan ganti Rugi Tahun Sebelumnya	2.027.969.309,00
33	Koreksi Pencatatan Atas Tuntutan Perbendaharaan yang telah ada Keputusan tetap (inkrach)	1.277.678.400,00
34	Koreksi Pencatatan Pengurangan Piutang PBB-P2 Tahun sebelumnya karena adanya pembetulan	190.371.355,40
35	Koreksi Pencatatan Pengurangan Piutang PBB-P2 Tahun sebelumnya karena adanya relaksasi	45.709.062,83
36	Koreksi kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.921.954.779,11
37	Koreksi kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan JIJ	6.235.238.484,04
38	Koreksi kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.016.285.982,54
39	Koreksi Saldo Awal Dana BOS	7.320.000,00
40	Jumlah pengurangan	27.951.849.811,18
41	Jumlah Selisih (23-40)	(23.230.102.954,76)

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.963.194.325.090,44

7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

7.5.7.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan –LRA

a. Pendapatan Asli Daerah

1	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
	Pajak Daerah	57.512.534.963,63	54.850.557.254,00	2.661.977.709,63

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.661.977.709,63 merupakan selisih antara pendapatan Pajak Daerah LO yang berasal dari penambahan piutang dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.185 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2023	1.407.000,00
2	Penambahan Piutang PBB-P2 Tahun 2023	3.054.227.048,00
3	Koreksi kurang catat Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang belum disetor (atas transaksi makan minum pada Disperindagkokum, Disperkim, Kec. Bunguran Timur, Sekretariat DPRD)	44.140.363,63
4	Jumlah penambahan (1 s.d 2)	3.099.774.411,63
5	Pelunasan Piutang Pajak Reklame Tahun Berjalan	2.665.000,00
6	Pelunasan Piutang BPHTB Tahun berjalan	2.391.486,00
7	Pelunasan Piutang PBB-P2 Tahun Berjalan	426.221.236,00
8	Pelunasan Utang pajak Restoran Dana BOS tahun 2022	6.518.980,00

9	Jumlah Pengurangan (4 s.d 8)	437.796.702,00
10	Jumlah (4-9)	2.661.977.709,63

2.	Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Selisih
		986.362.910,00	1.049.361.910,00	(62.999.000,00)

Selisih Pendapatan retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp62.999.000,00, Selisih tersebut merupakan koreksi lebih catat Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO atas pendapatan retribusi tahun 2022 yang baru disetor pada tahun 2023.

3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
		6.927.016.847,00	6.927.016.847,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

4	Lain-lain PAD yang Sah	LO	LRA	Selisih
		31.095.100.181,67	35.154.229.487,09	(4.059.129.305,42)

Selisih sebesar Rp(4.059.129.305,42) antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.186 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan dari Pendapatan diterima dimuka	97.633.333,33
3	Penambahan Piutang BLUD	2.075.538.770,00
4	Koreksi kurang catat atas temuan Pendapatan Sewa atas 58 Unit Rumah Dinas Pemda Belum Dipungut	306.600.000
5	Jumlah Penambahan	2.479.772.103,33
6	Pengurangan	
7	Pelunasan Piutang BLUD	4.496.977.172,00
8	Pelunasan Piutang Dana Bergulir	14.215.929,00
9	Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	13.000.000,00
10	Pelunasan TGR	1.862.784.955,41
11	Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan	3.287.000,00
12	Reklisifikasi ke Pendapatan Diterima Dimuka	37.033.333,34
13	Mutasi kas Dana Bergulir tahun Sebelumnya dari Kas lainnya ke Kasda	111.603.019,00
14	Jumlah Pengurangan	6.538.901.408,75
15	Jumlah Selisih (5-14)	(4.059.129.305,42)

Pendapatan Transfer

1.	Pendapatan Transfer Pemerintah	LO	LRA	Selisih
		1.045.626.496.771,00	1.045.714.855.167,00	(88.358.396,00)

**Pusat-Dana
Perimbangan**

Terdapat selisih sebesar Rp(88.358.396,00) antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA merupakan penetapan *Transfer Terasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023 sebesar Rp15.132.536.000,00 dan pencairan Dana *Transfer Terasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2022 sejumlah Rp15.220.894.396,00 yang dilakukan pada tahun 2023.

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
2.	Pemerintah Pusat - Lainnya	30.674.314.000,00	84.524.748.000,00	(53.850.434.000,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp(53.850.434.000,00) merupakan Pendapatan atas Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang langsung disalurkan ke desa di Tahun 2023 yang dicatat sebagai utang pada saat dibukukan.

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
3.	Pemerintah Propinsi	85.114.534.040,00	103.965.767.156,00	(18.851.233.116,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA sebesar Rp(18.851.233.116,00). Selisih tersebut merupakan pengurangan antara piutang transfer 2022 yang telah dibayarkan pada tahun 2023 Rp37.072.526.475,00, dan koreksi kekurangan pencatatan piutang tahun 2022 sebesar Rp140,00 dengan penambahan piutang transfer tahun 2023 Rp18.221.293.499,00.

b. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
1.	Hibah	26.554.891.130,51	1.254.000.000,00	25.300.891.130,51

Selisih sebesar Rp25.300.891.130,51 antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA merupakan pendapatan hibah barang yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan tersebut adalah:

Tabel 7.5.187 Rincian Pendapatan Hibah

<i>(dalam rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah Persediaan	7.477.540.158,50
Pendapatan Hibah Tanah	9.111.042.000,00
Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	5.598.718.358,00
Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan	3.113.590.614,01
Jumlah	25.300.891.130,51

	Lain-lain Pendapatan	LO	LRA	Selisih
2.	Sesuai dengan Ketentuan	58.750.345,00	66.690.354,00	(7.940.009,00)

**Peraturan
Perundang-
Undangan**

Selisih sebesar Rp(7.940.009,00) antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –LO dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LRA pengembalian atas dana BROS yang tahun sebelumnya telah dicatat sebagai kas lainnya.

7.5.7.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

a. Belanja Operasi

	Beban	LO	LRA	Selisih
1	Pegawai - Belanja Pegawai	419.978.177.052,00	418.913.978.804,00	1.064.198.248,00

Selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA tahun 2023 sebesar Rp1.064.198.248,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.188 Perbedaan Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA

(dalam rupiah)		
No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Utang Belanja Pegawai	1.119.800.975,00
3	Jumlah Penambahan	1.119.800.975,00
4	Pengurangan	
5	Pelunasan Utang Tahun 2022	43.996.367,00
6	Saldo Kas Lainnya Bendahara Kecamatan Serasan	1.181.250,00
7	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	10.425.110,00
8	Jumlah Pengurangan	55.602.727,00
9	Jumlah Perbedaan (3-8)	1.064.198.248,00

	Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas- Belanja Barang dan Jasa	LO	LRA	Selisih
2.		337.628.887.077,17	330.784.746.050,54	6.844.141.026,63

Terdapat perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa pada LO dengan nilai Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp6.844.141.026,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.189 Perbedaan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA

(dalam rupiah)				
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Barang	77.765.528.464,37	66.463.251.243,53	11.302.277.220,84
2	Beban Jasa	182.734.357.478,93	187.368.067.862,52	(4.633.710.383,59)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
3	Beban Pemeliharaan	20.929.669.727,87	20.392.510.488,49	537.159.239,38
4	Beban Perjalanan Dinas	56.199.331.406,00	56.560.916.456,00	(361.585.050,00)
Jumlah		337.628.887.077,17	330.784.746.050,54	6.844.141.026,63

- 1) Selisih antara Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan Tahun 2023 adalah senilai Rp11.302.277.220,84 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.190 Perbedaan Beban Persediaan LO dan Belanja yang menjadi Persediaan LRA

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	708.554.097,00
3	Pendapatan Hibah LO	7.477.540.158,50
4	Reklasifikasi dari Beban Hibah	568.321.758,81
5	Reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga	1.147.288.627,00
6	Penambahan Dari Peralatan dan Mesin	53.668.909,00
7	Reklasifikasi dari KDP	64.790.000,00
8	Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD	716.840,17
9	Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	85.586.050,00
10	Selisih antara Persediaan Awal tahun yang menjadi Beban dengan Saldo Akhir Persediaan Tahun 2023	2.733.126.239,36
11	Jumlah Penambahan	12.839.592.679,84
12	Pengurangan	
13	Reklasifikasi Ke Peralatan dan Mesin	161.732.000,00
14	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	5.100.000,00
15	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	366.696.550,00
16	Pelunasan Utang	42.620.000,00
17	Reklasifikasi ke Beban Hibah	928.990.609,00
18	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	32.176.300,00
19	Jumlah Pengurangan	1.537.315.459,00
20	Jumlah Perbedaan (11-19)	11.302.277.220,84

- 2) Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa Tahun 2023 adalah senilai Rp(4.633.710.383,59) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.191 Perbedaan Beban Jasa LO dan Belanja yang menjadi Jasa LRA

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari BTT	17.900.000,00
3	Reklasifikasi dari Beban di Bayar dimuka	284.791.666,66
4	Penambahan Beban dari Timbulnya Utang Belanja	896.892.796,24
5	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	3.503.800,00
6	Jumlah Penambahan	1.203.088.262,90
7	Pengurangan	
8	Reklasifikasi ke Beban di bayar di Muka	756.512.500,01
9	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	297.647.610,00
10	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	347.687.000,00
11	Pelunasan Utang Belanja	3.701.048.688,31
12	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	9.530.000,00
13	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	196.500.000,00
14	Reklasifikasi ke Persediaan	86.302.890,17
15	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	441.569.958,00
16	Jumlah Pengurangan	5.836.798.646,49
17	Jumlah Perbedaan (6-16)	(4.633.710.383,59)

- 3) Selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 adalah senilai Rp537.159.239,38 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.192 Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi Dari Jalan Irigasi dan Jaringan	1.139.115.876,08
3	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	99.637.100,00
4	Jumlah Penambahan	1.238.752.976,08
5	Pengurangan	
6	Pelunasan Utang Tahun 2022	625.668.429,00
7	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	75.925.307,70
8	Jumlah Pengurangan	701.593.736,70
9	Jumlah Perbedaan (4-8)	537.159.239,38

- 4) Selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah senilai Rp361.585.050,00 merupakan reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan).

3.	Beban Hibah	LO	LRA	Selisih
		38.648.139.444,31	37.301.653.821,93	1.346.485.622,38

Selisih antara Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah LRA senilai Rp1.346.485.622,38 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.193 Perbedaan Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Tanah	1.913.888.000,00
3	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	864.227.127,00
4	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.425.416,67
5	Reklasifikasi dari Persediaan	928.990.609,00
6	Jumlah Penambahan	3.796.531.152,67
7	Pengurangan	
8	Reklasifikasi ke Persediaan	568.321.758,81
9	Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	1.849.386.216,00
10	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	32.337.555,48
11	Jumlah Pengurangan	2.450.045.530,29
12	Jumlah Perbedaan (5-9)	1.346.485.622,38

4.	Beban Bantuan Sosial	LO	LRA	Selisih
		2.363.988.714,00	1.942.798.000,00	421.190.714,00

Selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp421.190.714,00 merupakan pelaksanaan Bantuan Sosial tidak terencana yang berasal dari Belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.194 Perbedaan Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD Pelaksana	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	224.455.714,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	111.000.000,00
3	Dinas Sosial	85.735.000,00
Jumlah		421.190.714,00

5.	Beban Penyusutan	LO	LRA	Selisih
----	------------------	----	-----	---------

160.994.584.784,64	0,00	160.994.584.784,64
---------------------------	-------------	---------------------------

Selisih antara Beban Penyusutan LO dengan LRA adalah sebesar Rp160.994.584.784,64. Ini disebabkan karena Beban Penyusutan adalah akun LO yang merupakan Belanja Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	Beban	LO	LRA	Selisih
6.	Transfer dan Belanja Transfer	65.773.734.400,00	119.624.168.400,00	(53.850.434.000,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp(53.850.434.000,00) merupakan pengurangan beban Transfer Dana Desa yang dicatat sebagai utang dan pelunasan utang pada saat disalurkan ke rekening desa sebesar Rp(53.850.434.000,00).

7.	Beban Penyisihan Piutang	LO	LRA	Selisih
		2.203.426.383,30	0,00	2.203.426.383,30

Selisih antara Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp2.203.426.383,30. Ini disebabkan karena Beban Penyisihan Piutang adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

b. Belanja Modal

Belanja Modal	LO	LRA	Selisih
	0,00	264.281.035.089,12	(264.281.035.089,12)

Selisih antara Belanja Modal adalah sebesar Rp264.281.035.089,12. Ini disebabkan karena Belanja Modal bukanlah akun LO karena bukan merupakan Belanja Operasional.

c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	LO	LRA	Selisih
		0,00	0,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara LO dan LRA terkait Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO. Ini disebabkan tidak ada transaksi yang mempengaruhi akun Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional.

2.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	LO	LRA	Selisih
		0,00	0,00	0,00

Tidak ada perbedaan antara LO dan LRA terkait Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Ini disebabkan tidak ada transaksi yang mempengaruhi akun Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional.

3.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	LO	LRA	Selisih
		(4.566.955.057,95)	0,00	(4.566.955.057,95)

Selisih antara Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO adalah sebesar Rp(4.566.955.057,95). Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.195 Perbedaan Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai Buku dari Penghapusan Peralatan dan Mesin	2.387.834.428,12
2	Nilai Buku dari Penghapusan Gedung dan Bangunan	74.856.754,33
3	Nilai Buku dari Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.058.666,67
4	Nilai Buku dari Penghapusan Aset Lain-lain	2.080.205.208,83
Jumlah		4.566.955.057,95

Selisih ini disebabkan karena Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	LO	LRA	Selisih
4.		<u>(1.433.348.791,00)</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.433.348.791,00)</u>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan kerugian investasi jangka panjang permanen yang dicatat dengan metode ekuitas yang terdiri dari kerugian PDAM Tirta Nusa Rp1.052.821.986,00 dan Kerugian Perusahaan Daerah Sri Serindit Rp380.526.805,00. Perbedaan Selisih ini disebabkan karena Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

d. Pos Luar Biasa

	LO	LRA	Selisih
Beban Luar Biasa	<u>0,00</u>	<u>1.648.129.341,00</u>	<u>(1.648.129.341,00)</u>

Selisih antara Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga LRA senilai Rp(1.648.129.341,00) terdiri dari :

Tabel 7.5.196 Perbedaan Beban Luar Biasa-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi Ke Perlengkapan Kebakaran Hutan	23.200.000,00
2	Reklasifikasi Ke Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.550.000,00
3	Reklasifikasi Ke Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00
4	Reklasifikasi Ke Alat Dapur	8.000.000,00
5	Reklasifikasi Ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	420.352.714,00
6	Reklasifikasi Ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	838.000,00
7	Reklasifikasi Ke Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	9.900.000,00
8	Reklasifikasi Ke Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.000.000,00
9	Reklasifikasi ke Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.147.288.627,00
Jumlah		1.648.129.341,00

7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016'- 7019' Lintang Utara dan 1050 00'-110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah timur : berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan

Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Daratannya pun bukan hanya satu pulau, tetapi berpulau-pulau yang struktur tanahnya berupa padosolik merah kuning, alluvial, organosol, dangley humus.

Kabupaten yang berada di ketinggian 3 - 959 Meter dari permukaan air laut ini ber ibu kota di Ranai. Jarak kota ini dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Tanjung Pinang (562 Km), Tanjung Balai Karimun (642 Km), Batam (589 Km), Sedanau (58 Km), Midai (139 Km), Serasan (177 Km), Tarempa (258 Km), Letung (322 Km), Tambelan (344 Km), Kijang (545 Km), Tanjung Uban (561 Km), Moro (618 Km), Tanjung Batu (654 Km), Senayang (593 Km), Dabo (954 Km), dan Daik (626 Km).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Natuna mencakup urusan:

1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Ketahanan Pangan dan Pertanian
10. Lingkungan Hidup
11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perhubungan

14. Komunikasi dan Informatika
15. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepemudaan dan Olahraga
17. Perpustakaan dan Kearsipan
18. Pemadam Kebakaran dan Keselamatan

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan pilihan dan urusan lainnya yang mencakup:

- a. Urusan Pilihan
 1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Perindustrian
- b. Urusan Pemerintahan
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Perencanaan
 4. Keuangan
 5. Kepegawaian
 6. Pengelolaan Perbatasan
 7. Inspektorat daerah
 8. Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Penanggulangan Bencana
- c. Urusan Kewilayahan
 1. Kecamatan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdapat tambahan pengakuan realisasi pada penyajian beberapa pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu:

- a. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);

- c. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas)
- d. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini)
- e. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan)

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2023 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah Pendapatan/Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 dari 14 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Natuna sebesar Rp6.671.064.675,00 dan sudah dikeluarkan/digunakan sebesar Rp6.804.214.927,43 sehingga sisa dana JKN sebesar Rp253.805.728,81 dicatat Kas Dana kapitasi JKN dan diungkapkan secara memadai pada penjelasan pada catatan atas laporan keuangan ini.

Tabel 7.6.1 Daftar Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	Saldo awal	Pendapatan	Total Belanja	Saldo Akhir 2023
1	Puskesmas Ranai	32.947,00	1.878.881.766,00	1.846.813.721,00	32.100.992,00
2	Puskesmas Bunguran Timur Laut	24.155.277,00	347.250.823,00	359.644.155,00	11.761.945,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	7,00	341.375.077,00	335.563.759,00	5.811.325,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	4.914.472,00	259.254.508,00	260.024.616,00	4.144.364,00
5	Puskesmas Kelarik	7.806.260,00	458.360.940,00	448.754.007,00	17.413.193,00
6	Puskesmas Sedanau	81.156.395,57	612.307.613,00	621.261.193,00	72.202.815,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	96.566.372,00	393.601.988,00	432.891.608,00	57.276.752,00
8	Puskesmas Pulau Laut	0,00	255.244.200,00	254.229.111,00	1.015.089,00
9	Puskesmas Midai	119.738.721,00	512.733.028,00	618.165.691,00	14.306.058,00
10	Puskesmas Serasan	9.127.712,46	580.978.488,00	585.882.760,43	4.223.440,03
11	Puskesmas Serasan Timur	1.877.342,00	366.325.358,00	367.253.715,00	948.985,00
12	Puskesmas Subi	10.563.225,00	285.337.975,00	292.803.163,00	3.098.037,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	30.058.750,21	260.478.107,00	266.793.764,00	23.743.093,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	958.500,00	118.934.804,00	114.133.664,00	5.759.640,00
Total		386.955.981,24	6.671.064.675,00	6.804.214.927,43	253.805.728,81

- b. Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pendidikan menengah beralih dari Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, maka untuk Pendapatan dan Belanja BOS Tingkat SLTA sederajat tidak disajikan dan diungkapkan. Yang disajikan dan diungkapkan hanya untuk urusan pendidikan Dasar. Untuk Dana BOS mengikuti Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023. Untuk pendapatan dicatat pada kode rekening Pendapatan Dana BOS, sedangkan untuk belanja dicatat pada belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS dan belanja modal BOS.

Total Dana BOS yang diterima oleh sekolah SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Natuna sebesar Rp15.436.628.826,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp15.455.960.339,00. sehingga Saldo kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 Rp134.737.273,00 disajikan dalam kas

dana BOS. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.2 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Negeri

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Bos Tingkat SD	26.096.646,00	(7.320.000,00)	10.825.190.138,00	10.814.934.549,00	29.032.235,00
2	Bos Tingkat SMP	135.292.140,00	0,00	4.611.438.688,00	4.641.025.790,00	105.705.038,00
	Jumlah	161.388.786,00	(7.320.000,00)	15.436.628.826,00	15.455.960.339,00	134.737.273,00

- c. BOK Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas)
BOK Puskesmas merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan. Total Realisasi Pendapatan dan Belanja BOK Kesehatan per Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 7.6.3 Daftar Pendapatan dan Belanja BOK Puskesmas

(dalam Rupiah)

NO.	PUSKESMAS	Total Penerimaan	Total Realisasi s/d Desember	Saldo Akhir
1	2	3	4	5=3-4
1	Puskesmas Batubi Jaya	424.302.900,00	370.605.104,00	53.697.796,00
2	Puskesmas Bunguran Selatan	565.673.000,00	450.903.801,00	114.769.199,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	520.642.000,00	364.128.934,00	156.513.066,00
4	Puskesmas Kelarik	535.136.000,00	312.216.117,00	222.919.883,00
5	Puskesmas Midai	405.456.100,00	332.562.364,00	72.893.736,00
6	Puskesmas Pulau Laut	334.236.000,00	333.959.156,00	276.844,00
7	Puskesmas Pulau Tiga Barat	296.286.900,00	208.981.875,00	87.305.025,00
8	Puskesmas Pulau Tiga	431.479.300,00	388.256.238,00	43.223.062,00
9	Puskesmas Ranai	836.852.800,00	762.595.686,00	74.257.114,00
10	Puskesmas Sedanau	570.393.600,00	434.389.370,00	136.004.230,00
11	Puskesmas Serasan	595.376.000,00	525.573.826,00	69.802.174,00
12	Puskesmas Serasan Timur	352.515.800,00	352.405.187,00	110.613,00
13	Puskesmas Subi	460.665.100,00	398.580.772,00	62.084.328,00
14	Puskesmas Tanjung	428.289.400,00	428.281.139,00	8.261,00
	TOTAL	6.757.304.900,00	5.663.439.569,00	1.093.865.331,00

- d. BOP PAUD (Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini)

BOP PAUD merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Pendidikan. Total Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	1.194.164,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	1.636.000,00
Pendapatan	Rp	2.265.940.400,00
Belanja	Rp	2.265.214.850,00
Saldo Akhir	Rp	3.555.714,00

- e. BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan)

BOP Kesetaraan merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Pendidikan. Total Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP Kesetaraan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	0,00
Pendapatan	Rp	344.590.000,00
Belanja	Rp	344.590.000,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

7.7 Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini atau pun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangan, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran.

Kami berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Natuna yang lebih baik.

BUPATI NATUNA



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si.